

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FAKFAK
2021 - 2026



Pemerintah Kabupaten Fakfak 2021

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK





**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, berisikan perencanaan makro 5 (lima) tahunan daerah sebagai acuan dan rujukan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016, Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020, Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Fakfak yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

14. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan kebijakan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk produk hukum daerah untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
23. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
31. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
32. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
33. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
37. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
39. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
41. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
43. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
44. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak selaku OPD yang bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berasaskan demokrasi, teknokratis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

- (2) RPJMD dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahunan menggambarkan:

- a. Visi dan Misi Bupati terpilih; dan
- b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan OPD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
dan
 - i. BAB IX : PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 7

Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJMD dapat diubah, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, maka perubahan RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 11 November 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 11 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 015

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT (15/63/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 035



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kabupaten Fakfak) 2021-2026 yang telah di perdakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 .

Sesuai dengan Amanat Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, berkeadilan dan demokratis, di perlukan adanya sistem peencanaan pembangunan nasional dan daerah yang dapat di laksanakan secara bertahap, sinergi dan berkesinambungan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang Penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), memperhatikan RPJM Nasional maupun Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan di serta dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif.

Buku RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026 yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak dalam rangka mewujudkan masyarakat fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul, dan mandiri telah menjadi komitmen antara pemerintah daerah kabupaten fakfak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak serta masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (Lima) tahun kedepan seperti yang tertuang dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah ini.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman rencana lima tahun ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menyertai kita, Amin.

Fakfak,

2022



BUPATI FAKFAK

UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si



Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-6
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-11
1.3.1	Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026	I-11
1.3.2	Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Fakfak .. Tahun 2021-2026	I-13
1.3.3	Keselarasan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2033.....	I-14
1.3.4	Keselarasan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021- 2026 dengan Renstra OPD dan RKPD Kabupaten Fakfak.....	I-15
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-16
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN	I-17
BAB II	GAMBARAN UMUM	II-1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2.1.1.2	Topografi.....	II-5
2.1.1.3	Geologi.....	II-6
2.1.1.4	Hidrologi	II-9

	2.1.1.5	Klimatologi	II-9
	2.1.1.6	Jenis Tanah dan Bentuk Lahan	I-12
	2.1.1.7	Pengunaan Lahan	II-13
	2.1.1.8	Wilayah Rawan Bencana	II-14
	2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-15
	2.1.3	Demografi	II-17
2.2		ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-20
	2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
	2.2.1.1	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB	II-20
	2.2.1.2	PDRB per Kapita	II-23
	2.2.1.3	Indeks Gini/Koefisien Gini.....	II-24
	2.2.1.4	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	II-24
	2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-25
	2.2.2.1	Pendidikan	II-25
	2.2.2.2	Kesehatan	II-28
	2.2.3	Fokus Ketenagakerjaan	II-30
	2.2.3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk/ <i>Employment to Population Ratio (EPR)</i>	II-30
	2.2.3.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-31
	2.2.3.3	Tingkat pengangguran terbuka	II-31
2.3		ASPEK PELAYANAN UMUM	II-32
	2.3.1	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-32
	2.3.1.1	Pendidikan	II-32
	2.3.1.2	Kesehatan	II-39
	2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-62
	2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-68
	2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-71
	2.3.1.6	Sosial	II-73
	2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-74
	2.3.2.1	Ketenagakerjaan	II-74
	2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-75
	2.3.2.3	Pertanahan.....	II-79

2.3.2.4	Lingkungan Hidup	I-79
2.3.2.5	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-82
2.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.....	II-83
2.3.2.7	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .	II-89
2.3.2.8	Perhubungan	II-89
2.3.2.9	Komunikasi dan Informatika	II-93
2.3.2.10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-96
2.3.2.11	Penanaman Modal	II-96
2.3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga	II-97
2.3.2.13	Statistik	II-99
2.3.2.14	Kebudayaan	II-100
2.3.2.15	Perpustakaan.....	II-102
2.3.2.16	Kearsipan	II-103
2.3.3	Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-104
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan.....	II-104
2.3.3.2	Pariwisata	II-107
2.3.3.3	Pertanian	II-108
2.3.3.4	Kehutanan	II-111
2.3.3.5	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-112
2.3.3.6	Perdagangan	II-113
2.3.3.7	Perindustrian	II-114
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Layanan Pemerintahan Umum.....	II-116
2.3.4.1	Perencanaan Pembangunan	II-116
2.3.4.2	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...	II-118
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-118
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-118
2.4.1.1	Pengeluaran per Kapita.....	II-118
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani.....	II-119
2.4.1.3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita.....	II-119
2.4.1.4	Jenis dan jumlah bank dan cabang	II-120
2.4.1.5	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang.....	II-120
2.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi	II-120
2.4.2.1	Angka Kriminalitas	II-120



2.4.2.2	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	I-121
2.4.2.3	Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	II-122
2.4.2.4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	II-122
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD TA 2016-2020.....	III-2
3.1.1.1	Pendapatan Daerah.....	III-4
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-8
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah.....	III-12
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-14
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-21
3.2.2.1	Ruang Fiskal Daerah.....	III-24
3.2.2.2	Kapasitas Fiskal Daerah.....	III-26
3.2.2.3	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah.....	III-27
3.2	KERANGKA PENDANAAN	III-28
3.2.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-28
3.2.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-31
BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		IV-1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.1.1	Bidang Pendidikan	IV-3
4.1.1.2	Bidang Kesehatan	IV-4
4.1.1.3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-8
4.1.1.4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	IV-10
4.1.1.5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	IV-11
4.1.1.6	Bidang Sosial.....	IV-12
4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-13



4.1.2.1	Bidang Tenaga Kerja.....	IV-13
4.1.2.2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV-14
4.1.2.3	Bidang Pangan	IV-15
4.1.2.4	Bidang Pertanahan.....	IV-16
4.1.2.5	Bidang Lingkungan Hidup	IV-16
4.1.2.6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-17
4.1.2.7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-18
4.1.2.8	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	IV-19
4.1.2.9	Bidang Perhubungan	IV-20
4.1.2.10	Bidang Komunikasi dan Informatika.....	IV-21
4.1.2.11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-22
4.1.2.12	Bidang Penanaman Modal.....	IV-23
4.1.2.13	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	IV-23
4.1.2.14	Bidang Statistik.....	IV-24
4.1.2.15	Bidang Persandian.....	IV-25
4.1.2.16	Bidang Kebudayaan.....	IV-25
4.1.2.17	Bidang Perpustakaan.....	IV-26
4.1.2.18	Bidang Kearsipan	IV-26
4.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-27
4.1.3.1	Bidang Kelautan dan Perikanan	IV-27
4.1.3.2	Bidang Pariwisata.....	IV-28
4.1.3.3	Bidang Pertanian.....	IV-29
4.1.3.4	Bidang Kehutanan.....	IV-30
4.1.3.5	Bidang Perdagangan	IV-31
4.1.3.6	Bidang Perindustrian.....	IV-32
4.1.3.7	Bidang Transmigrasi.....	IV-32
4.1.4	Urusan Pemerintahan Penunjang	V-33
4.1.4.1	Bidang Pemerintahan Umum	IV-33
4.1.4.2	Bidang Aparatur dan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	IV-34
4.1.4.3	Bidang Keuangan Daerah.....	IV-35
4.1.4.4	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ..	IV-36



4.1.4.5	Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah.....	V-37
4.1.4.6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	IV-38
4.2	ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-38
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV-39
4.2.1.1	Agenda Tujuan Pembangunan Berlanjutan (TPB) / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	IV-39
4.2.1.2	Peluang Investasi Asing dan Kerjasama Internasional	IV-41
4.2.1.3	Transformasi Digital	IV-42
4.2.1.4	Pandemi Covid-19.....	IV-43
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-44
4.2.2.1	Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Tentang Pembangunan Wilayah Papua Barat.....	IV-44
4.2.2.2	Kebijakan Otonomi Khusus	IV-45
4.2.2.3	Arahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	IV-48
4.2.3	Isu Strategis Provinsi Papua Barat.....	IV-50
4.2.3.1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan Otonomi Khusus.....	IV-51
4.2.3.2	Rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan & kesehatan)... ..	IV-53
4.2.3.3	Belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal secara produktif & inovatif	IV-54
4.2.3.4	Ketahanan wilayah & kota yang rentan atas perubahan iklim, demografi, bencana dan polusi	IV-55
4.2.3.5	Penurunan kualitas lingkungan hidup serta terdapat potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	IV-56
4.2.3.6	Rendahnya ketersediaan dan kualitas	



	infrastruktur serta konektivitas daerah	V-57
4.2.3.7	Belum optimalnya pembangunan berbasis gender & perlindungan terhadap anakserta lanjut usia	IV-57
4.2.3.8	Masih terjadi konflik horizontal & kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah.....	IV-58
4.2.4	Isu Strategis Kabupaten Fakfak	IV-59
4.2.4.1	Isu Strategis 1: Pembangunan Manusia yang Berkeadilan.....	IV-59
4.2.4.2	Isu Strategis 2: Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal	IV-60
4.2.4.3	Isu Strategis 3: Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	IV-61
4.2.4.4	Isu Strategis 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Responsif	IV-62
4.2.4.5	Isu Strategis 5: Lingkungan Hidup	IV-63
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	V-1
5.1	VISI	V-1
5.2	MISI PEMBANGUNAN	V-4
5.2.1	Misi 1: Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat religius dan produktif.....	V-4
5.2.2	Misi 2: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelautan	V-5
5.2.3	Misi 3: Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik	V-6
5.2.4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi	V-8
5.2.5	Misi 5: Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.....	V-8
5.2.6	Misi 6: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan,	





	berbasis sumber daya alam dan lingkungan.....	V-10
5.3	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN	
	FAKFAK TAHUN 2021-2026	V-12
5.3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 1.....	V-12
5.3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 2.....	V-13
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 3.....	V-15
5.3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 4.....	V-17
5.3.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 5.....	V-17
5.3.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 6.....	V-19
 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM		
	PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI-5
6.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH	VI-16
6.4	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-23
 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN		
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN.....	VII-1
7.2	KEBUTUHAN PENDANAAN	VII-2
 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
	DAERAH	VIII-1
 BAB IX PENUTUP.....		
9.1	KAIDAH TRANSISI.....	IX-1
9.2	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-2





BAB I

Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri semakin terbuka lebar. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,



jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada pasal 263 UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana



kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan uraian pasal dari kedua Undang-Undang tersebut, dapat dikatakan bahwa RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi pembangunan suatu daerah. Hal ini di karenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua Barat yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan amanat UU nomor 23 Tahun 2014 mempunyai tugas, salah satunya adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Rancangan Perda Kabupaten Fakfak yang mengatur tentang RPJMD Tahun 2021-2026 harus mendapat evaluasi Gubernur Papua Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Fakfak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak ini dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pendekatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak menggunakan pendekatan teknokratik dimana metode



dan kerangka berpikir ilmiah digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Fakfak, pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendekatan politis dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati periode 2021-2026 ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 yang dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Fakfak, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dengan menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kampung, Distrik, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Perumusan dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada program Nasional dalam penanganan distrik/kampung tertinggal. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur, yaitu:

1. Persiapan penyusunan RPJMD, yang meliputi:

- a. Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. Orientasi mengenai RPJMD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD, yang meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran umum Propinsi Papua;
- c. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
- d. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis;
- e. Perumusan dan penjelasan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun;
- g. Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan;
- h. Penetapan indikator kinerja daerah;
- i. Pembahasan dengan OPD Propinsi Papua sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra OPD;
- j. Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

3. Penyusunan rumusan RPJMD, yang meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. Verifikasi rancangan Renstra SKPD;

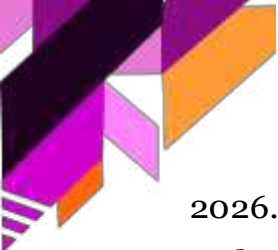
- c. Rancangan Renstra SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD;
 - d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
4. **Perumusan rancangan akhir RPJMD**, meliputi:
- a. Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil musrenbang RPJMD;
 - b. Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.
5. **Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD**, meliputi:
- a. Penyusunan RAPERDA;
 - b. Pembahasan pansus DPRD Propinsi Papua;
 - c. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Gambar I.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJMD



Sumber: Lampiran III Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penjabaran RPJMD Kabupaten Fakfak kemudian disusun dalam dokumen RKPD yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen RKPD disusun setiap tahun selanjutnya menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bahan penyusunan rancangan RKPD adalah dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-



2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah



Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4868);
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4868);
- 13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama



Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan



- Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6618);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6619);
 - 29) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6619);
 - 30) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6620);
 - 31) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 - 32) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 - 33) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 34) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

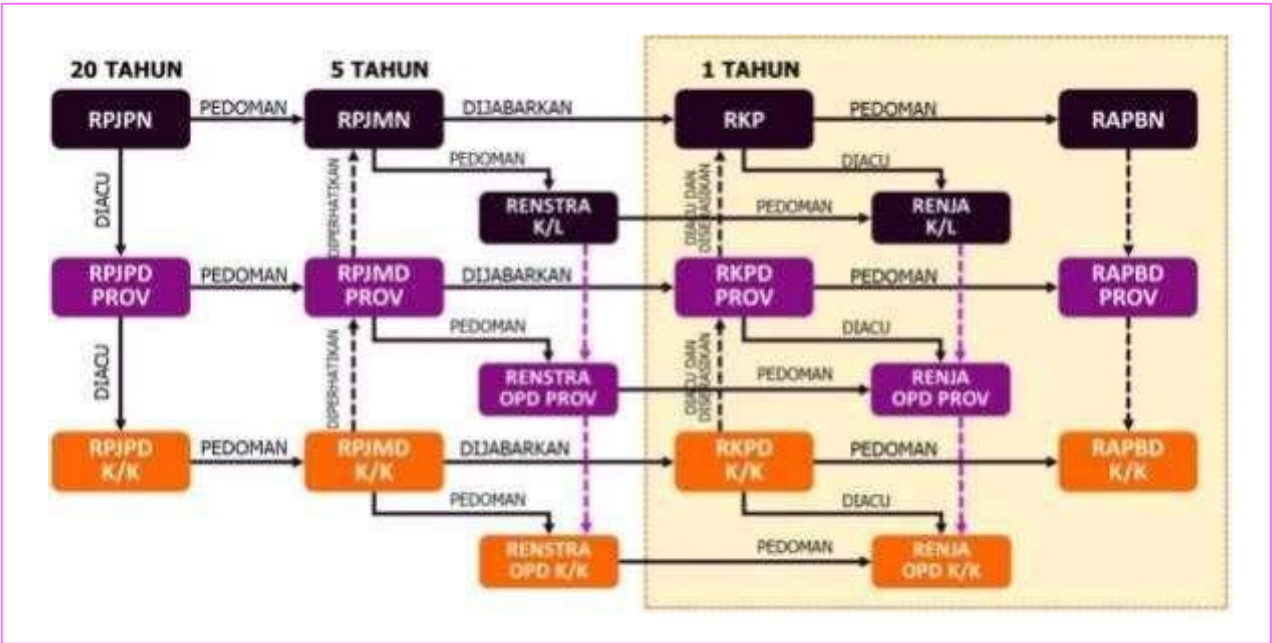
- 
- Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1114);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 - 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 42) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 43) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
 - 44) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Prov. Papua Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
 - 45) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);
 - 46) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Prov. Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4);
 - 47) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08);
 - 48) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Gambar I.2 memperlihatkan keterkaitan hubungan antar-dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ketiga dokumen ini disusun sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya ditampilkan dalam Gambar I.2.

Gambar I.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Wilayah



1.3.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 dan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017- 2022 menjadi dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026. Keselarasan ini terkait antara visi dan misi pembangunan.





Tabel I.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Tingkat Nasional dan Provinsi Papua Barat

		RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022	RPD* Prov. Papua Barat Tahun 2023-2026	RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026
VISI		Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan	Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat	-	Fakfak yang Terdepan, Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Mandiri
MISI	EKONOMI	MISI 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	MISI 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata MISI 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat	TUJUAN 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	MISI 2: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian, dalam arti luas dan kelauatan;
	SOSIAL BUDAYA	MISI 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa	MISI 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial MISI 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah	TUJUAN 6: Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	MISI 5: Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Fakfak;
	SARPRAS & WILAYAH	MISI 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan MISI 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	MISI 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar	TUJUAN 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah	MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektifitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi;
	LINGKUNGAN	MISI 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	MISI 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;	TUJUAN 4: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan	MISI 6: Mewujudkan pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana;

		RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022	RPD* Prov. Papua Barat Tahun 2023-2026	RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026
	SUMBER DAYA MANUSIA	MISI 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	MISI 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;	TUJUAN 1: Meningkatkan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial	MISI 1: Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan;
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	MISI 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (<i>good and clean governance</i>) serta otonomi khusus yang efektif	TUJUAN 5: Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik	MISI 3: Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesie dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik;

*Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat 2023-2026 disusun sesuai mandat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, menggunakan pendekatan teknokratik dan tidak disusun berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 memperhatikan rumusan Visi dan Misi dalam RPJM Nasional 2020-2024 serta rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. Keterkaitan serta keselarasan tersebut merupakan syarat bagi pencapaian sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan serta isu-isu strategis yang dihadapi.

1.3.2 Keselarasan Hubungan RPJPD Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan RPJPD ke-4 (2005-2025) yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Fakfak dengan skala prioritas lebih meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan surplus pangan; peningkatan kualitas SDM; pemantapan pemerintahan yang baik dan bersih; peningkatan pelayanan publik; peningkatan aksesibilitas daerah; dan nilai tambah produk pertanian. Sasaran pokok sebagaimana di amanatkan dalam RPJPD Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 dijabarkan kedalam program pembangunan daerah



sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun.

1.3.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2033

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031 untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Fakfak. Dokumen RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031 juga diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026 pada muatan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah setiap distrik.

Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi Papua Barat, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya. Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi.

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

Penetapan hirarki wilayah selain didasarkan pada hasil analisis kuantitatif dengan variabel kelengkapan fasilitas yang terdapat pada kota tersebut pada kondisi saat ini, juga perlu mempertimbangkan rencana program-program dari pemerintah baik pusat maupun daerah (Provinsi



Papua Barat dan Kabupaten Fakfak) pada kawasan-kawasan tertentu terkait dengan fungsi kawasan serta skenario konsep pengembangan yang telah dirumuskan. Disamping pertimbangan diatas dalam penetapan hirarki wilayah juga mempertimbangkan aspek pemerataan wilayah, yakni penetapan wilayah berorde II dan III (skala sub kabupaten) pada wilayah timur, utara dan selatan sebagai pendukung kota Fakfak yang merupakan orde I. Penetapan hirarki ini menjadi dasar pula dalam penetapan sub kawasan pengembangan wilayah.

Peta rencana orde perkotaan Kabupaten Fakfak menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak dibagi menjadi 5 SWP dengan mempertimbangkan 3 orde (orde I skala kabupaten, orde II skala sub kabupaten dan orde III skala lokal yang disiapkan untuk menjadi pengganti fungsi orde I) sebagai upaya pemerataan wilayah. Rencana hierarki pusat-pusat diwilayah Kabupaten Fakfak, yaitu:

- a. SWP Fakfak dan Fakfak Tengah, pusat: Kota Fakfak (Orde I)
- b. SWP Kokas dan Kramongmongga, pusat: Kokas (Orde II)
- c. SWP Teluk Patipi dan Fakfak Barat, pusat: Teluk Patipi (Orde II) SWP Bomberay, pusat: Bomberay (Orde III)
- d. SWP Fakfak Timur dan Karas, pusat: Fakfak Timur (Orde III) Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Fakfak:
- e. Kawasan perkotaan Fakfak sebagai pusat kegiatan pelayanan perkotaan, pusat pemerintahan dan simpul jasa perhubungan laut.
- f. Kawasan Kokas sebagai pusat pelayanan perhubungan dan pusat perdagangan/jasa skala lokal, kehutanan, perkebunan, dan pengembangan pesisir/laut.
- g. Kawasan Bomberay sebagai pusat pengembangan industri pertanian.
- h. Kawasan Fakfak Timur sebagai sentra kegiatan pertanian, pesisir dan kelautan terutama sub sektor pertanian tangkap.

1.3.4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan Renstra OPD dan RKPD Kabupaten Fakfak

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijabarkan kedalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten



Fakfak yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Dokumen Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Fakfak.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Fakfak sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari pasangan kepala daerah terpilih masa bakti 2021- 2024, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih periode 2021-2026;
2. Mengoordinasikan teknis pembangunan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Fakfak dan Nasional;
3. Menjadi salah satu dokumen acuan bagi anggota DPRD Kabupaten Fakfak periode 2019-2024 dalam menjalankan fungsi penyusunan Perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Menjadi pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahunnya dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun renstra SKPD; serta
5. Menjadi dokumen acuan bersama antara pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Fakfak selama 2021-2026.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi,



Sinkronisasi dan Sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dan Lampiran III Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atas kinerja keuangan masa lalu dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

BAB 4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Fakfak dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.



BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 yang didasarkan pada isu stragegis pembangunan Papua Barat, agenda RPJPD Papua Barat, draft RTRW Papua Barat, RPJMN dan draft RIPPP.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Fakfak dalam jangka menengah, sesuai dengan permasalahan dan dinamika isu strategis pembangunan yang berkembang.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan gambaran distribusi penggunaan kapasitas fiskal daerah ke dalam berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan kerangka urusan bidang kewenangan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB 9 PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah implementasi dan pedoman transisi RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.



BAB II

Gambaran Umum

Bab ini memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Fakfak terletak pada 131°53'03" BT - 133°29'19"BT dan 2°30'58"LS-3°57'51"LS, Kabupaten Fakfak setelah mengalami pemekaran berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2002 memiliki luas 14.320 km². Kabupaten Fakfak terdiri atas 17 (tujuh belas) distrik dan 142 Kampung definitif pada tahun 2015 setelah dilakukan pelantikan seluruh perangkat kampung. Dengan proporsi ini maka Wilayah Kabupaten Fakfak yang mempunyai luas terbesar berada pada Distrik Karas dengan luas 4.663,50 km² atau 32,57% sedangkan distrik dengan luas terkecil adalah Distrik Fakfak dengan luas 41,06 km² atau 0,29% dari luas total wilayah Kabupaten Fakfak, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.1.

Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Menurut Distrik

NO	DISTRIK	NAMA IBUKOTA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	LUAS WILAYAH (KM ²)	PROPORSI (%)
1	Fakfak Barat	Werba	9	679	4,74
2	Wartutin	Wartutin	6	1.006	7,03
3	FakfakTimur	Weri	6	1.020	7,12
4	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	10	701	4,9
5	Fakfak	Fakfak	3	233	1,63
6	Pariwari	Dulanpokpok	6	587	4,1
7	Kokas	Kokas	14	788	5,5
8	Arguni	Fior	5	334	2,33
9	Mbahamdandara	Goras	7	664	4,64
10	Karas	Malakuli	7	2.491	17,4
11	FakfakTengah	Raduria	13	705	4,9
12	Kramongmongga	Kramongmongga	10	746	5,21

Tabel II.2 Jumlah Distrik, Kampung dan Kelurahan
Beserta Titik Koordinat Kabupaten Fakfak

NO	KAMPUNG DAN KELURAHAN		TITIK KOORDINAT	
			SUMBU X	SUMBU Y
I	Distrik Fakfak		132°19'14" E	2°54'12" S
	1	Gewerpe	132°19'31.760" E	2°56'10.555" S
	2	Lusi Peri	132°18'59.551" E	2°55'51.367" S
	3	Wrikapal	132°18'32.140" E	2°51'28.903" S
	4	Kel. Fakfak Utara	132°17'57.251" E	2°55'12.048"
	5	Kel. Fakfak Selatan	S 132°17'54.091" E	2°55'38.967"
II	S			
	Distrik Fakfak Barat		132°11'32" E	2°53'29" S
	1	Werba	132°12'3.537" E	2°55'24.586" S
	2	Kiat	132°13'11.630" E	2°55'10.888" S
	3	Perwasak	132°11'32.234" E	2°54'48.963" S
	4	Wurkendik	132°12'45.807" E	2°54'38.243" S
	5	Purwahab Tonggo	132°11'27.362" E	2°54'58.220" S
	6	Pahger Nkindik	132°12'13.162" E	2°54'30.448" S
	7	Kwuhkendak	132°12'19.983" E	2°53'51.956" S
III	8	Werba Utara	132°12'3.904" E	2°54'45.065" S
	9	Porum	132°12'59.449" E	2°54'57.246" S
	Distrik Fakfak Timur		132°41'36" E	3°11'16" S
	1	Tunasgain	132°36'21.975" E	3°10'13.805" S
	2	Urat	132°32'9.252" E	3°8'16.223" S
	3	Sanggram	132°34'13.827" E	3°6'53.702" S
	4	Weri	132°38'50.143" E	3°11'4.546" S
IV	5	Kriabisa	132°35'7.279" E	3°12'47.688" S
	6	Saharei	132°38'36.291" E	3°12'47.995" S
	Distrik Kokas		132°27'34" E	2°41'53" S
	1	Mandoni	132°27'50.456" E	2°43'44.927" S
	2	Sekar	132°26'56.062" E	2°42'8.944" S
	3	Ugar	132°28'24.977" E	2°38'24.685" S
	4	Sisir	132°25'55.928" E	2°42'11.514" S
	5	Kampung Baru	132°25'7.958" E	2°42'6.717" S
	6	Patimburak	132°24'24.400" E	2°43'40.773" S
	7	Batufiatas	132°26'10.148" E	2°43'12.162" S
	8	Kinam	132°29'52.827" E	2°42'43.263" S
	9	Manbunibuni	132°28'44.299" E	2°43'24.281" S
	10	Kriawaswas	132°35'32.150" E	2°45'30.302" S
	11	Sosar	132°27'14.267" E	2°42'17.434" S
	12	Pang wadar	132°24'59.030" E	2°41'59.070" S
	13	Masina	132°25'23.719" E	2°42'19.738" S
	14	Kimina Kra	132°12'59.449" E	2°44'19.136" S
	15	Kel. Kokas	132°26'18.488" E	2°42'6.282" S
V	Distrik Fakfak Tengah		132°27'2" E	2°53'29" S
	1	Kayu Merah	132°20'21.174" E	2°54'35.894" S
	2	Katemba	132°20'32.738" E	2°55'4.162" S
	3	Nemewikarya	132°20'17.319" E	2°56'11.834" S
	4	Raduria	132°20'56.723" E	2°56'9.264" S
	5	Brongkendik	132°21'24.135" E	2°56'20.828" S
	6	Air Besar	132°21'33.129" E	2°56'47.811" S
	7	Mandopma	132°21'10.429" E	2°57'1.517" S
	8	Kanantare	132°21'24.563" E	2°56'56.806" S
	9	Pasir Putih	132°21'13.427" E	2°57'26.359" S
	10	Pirma	132°21'41.267" E	2°57'36.638" S
	11	Sakartemin	132°20'58.865" E	2°57'7.085" S
	12	Hambriemkendik	132°21'29.703" E	2°56'36.676" S
	13	Unipokpok	132°20'41.304" E	2°56'15.260" S
VI	14	Kel. Danaweria	132°19'12.591" E	2°56'8.367" S
	Distrik Karas		133°25'34" E	3°13'20" S
	1	Malakuli	132°51'19.225" E	3°28'15.035" S
	2	Faur	132°44'46.541" E	3°26'24.959" S
	3	Kiaba	132°44'47.226" E	3°27'45.137" S
	4	Antalisa	132°39'45.016" E	3°25'18.486" S
	5	Tarak	132°44'37.632" E	3°23'39.085" S
VII	6	Tuberwasak	132°44'39.688" E	3°24'55.186" S
	7	Maas	132°41'58.646" E	3°29'5.315" S
	Distrik Bomberay		133°25'36" E	2°59'17" S
	1	Onim Sari	132°59'33.590" E	2°51'51.648" S
	2	Mekar Sari	132°56'40.981" E	2°54'0.195" S



NO	KAMPUNG DAN KELURAHAN		TITIK KOORDINAT	
			SUMBU X	SUMBU Y
	3	Pinang Agung	132°54'32.870" E	2°54'17.210" S
	4	Bumi Moro Indah	132°53'42.480" E	2°56'6.265" S
	5	Tesha	132°51'37.714" E	2°52'6.766" S
	6	Onim Jaya	132°58'32.113" E	2°53'42.390" S
	7	Wono Rejo	132°53'54.091" E	2°54'13.611" S
VIII	Distrik Kramongmongga		132°27'2" E	2°49'51" S
	1	Kramongmongga	132°23'4.708" E	2°45'4.048" S
	2	Wargep	132°21'53.478" E	2°45'38.222" S
	3	Mamur	132°23'58.599" E	2°47'13.989" S
	4	Nembuktep	132°24'56.609" E	2°47'46.088" S
	5	Pikpik	132°25'48.616" E	2°45'28.371" S
	6	Kwamkwamur	132°25'26.773" E	2°46'32.188" S
	7	Bahbadan	132°26'54.147" E	2°45'17.663" S
	8	Gewab	132°22'39.124" E	2°47'46.516" S
	9	Tentreda	132°22'23.412" E	2°46'1.887" S
IX	Distrik Teluk Patipi		132°07'23" E	2°44'3" S
	1	Puar	132°06'41.613" E	2°44'1.407" S
	2	Degen	132°10'45.746" E	2°43'1.445" S
	3	Tetar	132°12'35.391" E	2°42'18.614" S
	4	Sum	132°03'31.981" E	2°46'51.741" S
	5	Adora	132°07'52.712" E	2°42'50.309" S
	6	Us	132°07'37.293" E	2°43'25.430" S
	7	Patipi Pasir	132°04'34.035" E	2°43'41.109" S
	8	Patipi Nusa	131°59'0.759" E	2°46'1.332" S
	9	Mawar	132°09'1.240" E	2°41'6.660" S
	10	Tibatibananam	132°10'26.044" E	2°41'31.501" S
	11	Offie	132°12'12.263" E	2°41'43.494" S
	12	Muhri	132°11'35.429" E	2°42'40.030" S
X	Distrik Pariwari		132°15'10" E	2°53'37" S
	1	Tanama	132°17'27.723" E	2°55'27.382" S
	2	Kapartutin	132°16'41.809" E	2°55'10.935" S
	3	Sekban	132°16'2.063" E	2°55'18.473" S
	4	Torea	132°15'18.890" E	2°55'13.676" S
	5	Sekru	132°14'48.737" E	2°55'5.453" S
	6	Sukuru Tuare	132°13'34.041" E	2°54'33.244" S
	7	Kel. Wagom	132°17'29.379" E	2°55'43.112" S
	8	Kel. Wagom Utara	132°17'37.340" E	2°55'28.480" S
XI	Distrik Wartutin		132°05'19" E	2°54'38" S
	1	Werpigan	132°10'35.227" E	2°55'40.123" S
	2	Werabuan	132°10'3.069" E	2°55'33.788" S
	3	Wartutin	132°07'40.769" E	2°56'6.921" S
	4	Siboru	132°07'1.951" E	2°56'20.188" S
	5	Sipatnanam	132°03'9.397" E	2°53'38.097" S
	6	Kamandu Tetar	132°03'11.003" E	2°53'27.387" S
XII	Distrik Fakfak Timur Tengah		132°36'24" E	2°59'53" S
	1	Waserat	132°31'0.576" E	3°03'43.193" S
	2	Wambar	132°28'37.352" E	3°01'37.786" S
	3	Kotam	132°26'30.574" E	3°00'9.384" S
	4	Kwama	132°25'32.325" E	2°59'24.156" S
	5	Kalamanuk	132°24'43.289" E	2°59'4.868" S
	6	Wayati Timur	132°24'38.187" E	2°58'7.404" S
	7	Wayati	132°23'15.953" E	2°58'25.221" S
	8	Wayati Barat	132°23'56.385" E	2°57'41.396" S
	9	Krabelang	132°22'10.851" E	2°57'58.495" S
XIII	Distrik Arguni		132°34'7E	2°41'53" S
	1	Andamata	132°31'24.163" E	2°40'50.192" S
	2	Taver	132°33'4.123" E	2°38'31.252" S
	3	Arguni	132°33'56.912" E	2°38'32.537" S
	4	Fior	132°36'5.129" E	2°42'33.841" S
	5	Furir	132°37'41.926" E	2°43'25.237" S
XIV	Distrik Mbahamdandara		132°42'7E	2°59'53" S
	1	Darembang	132°38'57.307" E	2°44'30.339" S
	2	Goras	132°42'7.474" E	2°46'59.389" S
	3	Mitimber	132°49'47.471" E	2°54'10.261" S
	4	Waremou	132°46'27.025" E	2°55'16.220" S



NO	KAMPUNG DAN KELURAHAN		TITIK KOORDINAT	
			SUMBU X	SUMBU Y
	5	Wos	132°44'45.089" E	2°52'53.167" S
	6	Bahamdandara	132°42'12.613" E	2°49'54.136" S
	7	Goras Selatan	132°42'1.992" E	2°47'23.202" S
XV	Distrik Kayauni		132°18'12"E	2°46'14" S
	1	Karbubur	132°20'20.869" E	2°45'30.924" S
	2	Ubadari	132°21'11.179" E	2°44'54.432" S
	3	Homorkokma	132°21'2.339" E	2°44'34.747" S
	4	Pattukar	132°20'38.182" E	2°44'26.267" S
	5	Kayuni	132°19'58.889" E	2°43'42.278" S
	6	Kuagas	132°19'54.167" E	2°43'50.760" S
	7	Rangkendak	132°18'35.989" E	2°43'13.081" S
	8	Mananmur	132°18'56.804" E	2°46'8.856" S
	9	Warpa	132°20'15.369" E	2°44'36.978" S
XVI	Distrik Furwagi		132°06'21"E	2°49'51" S
	1	Salakiti	132°3'23.615" E	2°47'19.860" S
	2	Tawar	132°3'12.715" E	2°47'57.777" S
	3	Gar	132°0'20.315" E	2°49'25.395" S
	4	Rumbati	132°2'42.726" E	2°48'32.928" S
	5	Werfra	132°2'26.181" E	2°50'2.923" S
	6	Tanehamur	132°2'14.844" E	2°50'33.131" S
	7	Sengkiti	132°3'50.493" E	2°47'16.647" S
	8	Twootkindik	132°2'50.493" E	2°47'16.647" S
XVII	Distrik Tomage		132°2'36"E	2°46'57" S
	1	Mbima Jaya	132°59'32.390" E	2°48'13.728" S
	2	Warisa Mulya	132°2'47.589" E	2°51'24.644" S
	3	Wonodadi Mulya	132°1'44.311" E	2°50'5.981" S
	4	Tomage	132°58'17.115" E	2°40'18.334" S
	5	Otoweri	132°54'45.545" E	2°39'52.567" S
	6	Wamosan	132°56'14.947" E	2°37'57.296" S
	7	Salawier	132°59'19.110" E	2°34'26.774" S
	8	Wasa Mulya	133°3'13.737" E	2°51'13.958" S
	9	Wammar	133°0'2.523" E	2°47'59.134" S

2.1.1.2

Topografi

Kondisi topografis Kabupaten Fakfak bervariasi, mulai dari dataran rendah sampai dengan daerah perbukitan. Dilihat dari aspek topografinya, didominasi oleh wilayah dengan kondisi kemiringan >40’ yaitu seluas 2.297.964 ha,yang disusun dengan wilayah dengan kemiringan 0–15’seluas 1.434.636 ha. Sedangkan yang lainnya adalah wilayah dengan kemiringan berkisar antara15– 40’. Dari pengelompokkan berikut:

- Datar,terletak pada ketinggian 0-50 mdpl diwilayah barat pada sebagian besar Distrik Fakfak, Fakfak Barat,dan Fakfak Timur;
- Berbukit,ketinggian 100-1000m dpl diantara Fakfak dan Kokas;
- Pegunungan diatas 1000m dpl terletak di bagian Utara Fakfak

Tabel II.3

Tingkat Kelerengan Lahan di Kabupaten Fakfak

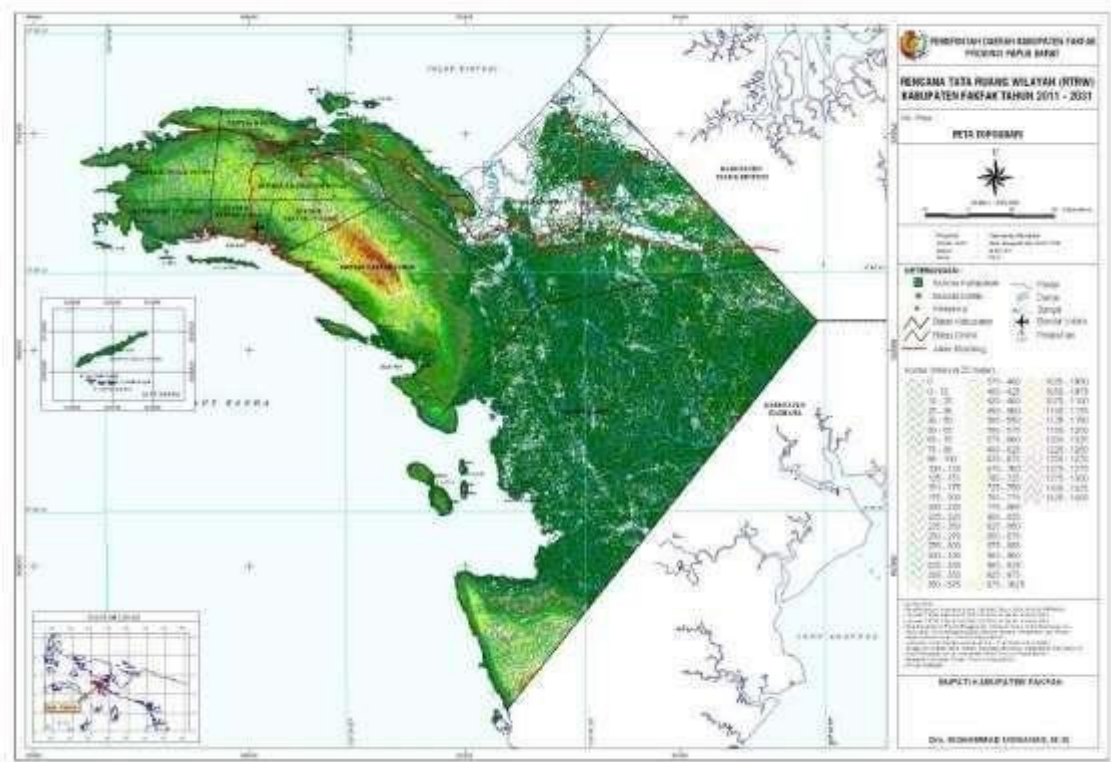
NO	KELAS KELERENGAN	LUAS (HA)	PERSEN(%)
1	0 – 15’	1.434.636	37,85
2	15 – 40’	57.500	1,52
3	>40’	2.297.964	60,63
Total Luas		3.790.100	100

Sumber: Bappeda litbang Litbang,2021





Gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

2.1.1.3 Geologi

2.1.1.3.1 Fisiografi dan Morfologi

Struktur geologi Kabupaten Fakfak termasuk daerah yang stabil jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Bila dilihat dari satuan morfologinya terdiri dari:

a) Satuan Morfologi Batuan Kasar

Morfologi ini menempati ketinggian 500–1428m dpl,satuan batuan pada umumnya batu gamping tersier yang berselingan dengan batu lempung, kondisi seperti ini terdapat dipegunungan Fakfak yang memanjang antara Barat Laut sampai Tenggara dengan hutan hujan yang cukup lebat.

b) Satuan Morfologi Perbukitan Kars

Satuan ini memiliki ketinggian antara 100–5000 mdpl, yang umumnya terdiri dari batu gamping terumbu yang menempati sepanjang pantai utara Distrik Kokas dan pulau-pulau di sebelah utara Kokas, yaitu: P. Ugar,P. Arguni, P.Koyier, P.Sopar, P.West, P.Basak, P.Ogasmumi dan Kep. Sariga.

Tabel II.4 Tingkat Morfologi dan Ketinggian di Kabupaten Fakfak

NO	MORFOLOGI	KETINGGIAN (MDPL)	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Dataran	0–150mdpl	1.007,41	70,35
2	Perbukitan	150–1.500mdpl	224.967	15,71
3	Pegunungan	>1.500mdpl	199.621	13,94
Total Luas			1.432.000	100

Sumber:Bappeda litbang Fakfak, 2021



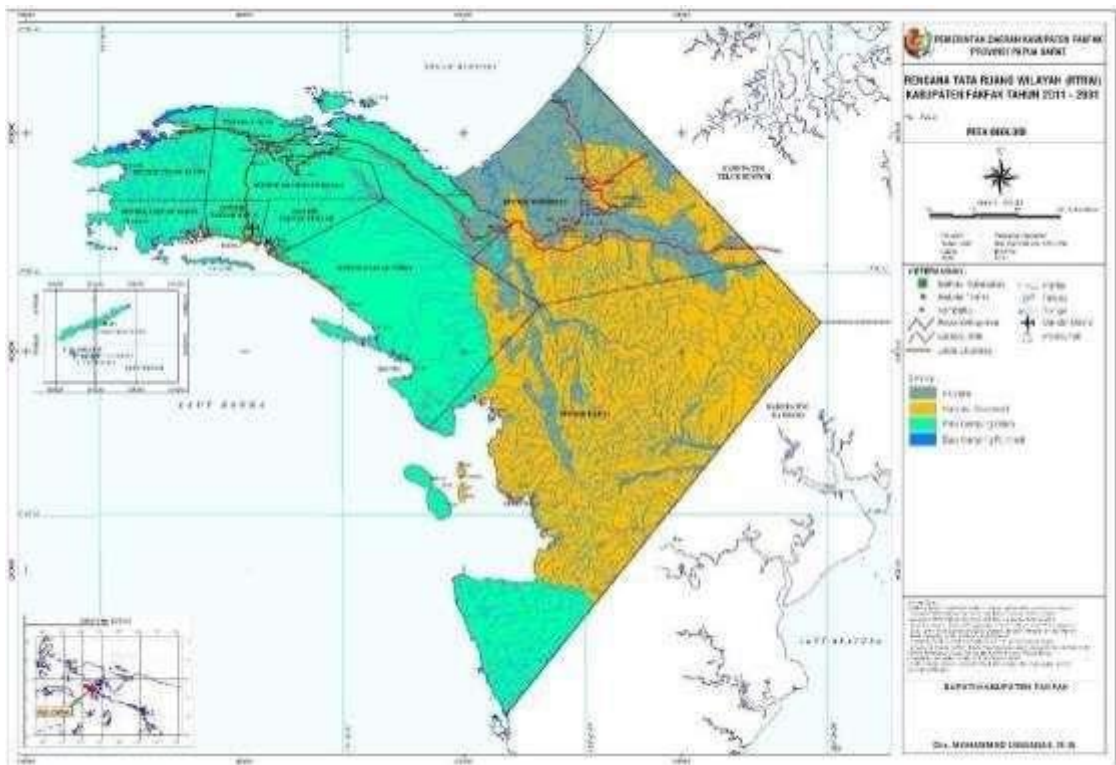
c) Satuan Morfologi Dataran Rendah

Morfologi ini menempati kawasan kaki gunung dengan ketinggian 5– 50 mdpl, satuan morfologi ini ditempati oleh endapan aluvial, pasir kuarsa dan lempung yang terdapat di sepanjang sungai dataran Bomberay.

2.1.1.3.2 Stratigrafi

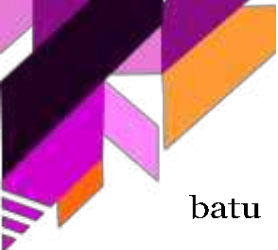
Kondisi geologi yang dijumpai di Kabupaten Fakfak sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang terjadi mulai pada jaman perem. Perem merupakan salah satu skala waktu geologi yang paling tua yang dijumpai di Indonesia. Batuan yang tersingkap dipermukaan hanya batuan karbonat dan batuan asal daratan berumur tua yaitu kenozoikum dan alluvium yang berumur kuartar yang tersingkap di Kabupaten Fakfak. Sedangkan secara stratigrafi bawah permukaan kelompok batuan penyusunnya dapat diketahui dari beberapa sumur pemboran dalam yang pernah dilakukan.

Gambar II.3 Peta Geologi Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

Susunan batuan yang dijumpai di Kabupaten Fakfak mulai dari yang berumur tua hingga dengan yang berumur muda mulai dari Kelompok Aifan yaitu batuan yang terjadi pada lingkungan pengendapan laguna yang diperkirakan berasal dari Benua Australia, Kelompok Batu Gamping Bogal (Trub) dengan penyebaran yang dijumpai pada bagian barat daya, Kelompok Fageo (Jf)diyakini berumur Jura Awal-Akhir pada skala waktu geologi. Tersusun oleh serpih tanah sedikit gampingan, setempat mengandung lignit



batu pasir gampingan (setempat dengan batu bara)dan sedikit batu gamping.Keberadaan kelompok ini terlihat dari sumur pemboranyang dilakukan dibagian barat Batu Gamping Facet (JKf), Formasi Jass (Kj) yang keberadaannya tersebar dibawah permukaan di utara lembar dengan ketebalan diduga hingga 407m dan kelompok batuan gamping lainnya yang merupakan anggota batu gamping Mbaham, Tawar, Rumbati,batu gamping onim, kuwama, kelompok besar batu gamping New Guinea, batu pasir Tusuwai dan endapan alluvium yang dijumpai di Kabupaten Fakfak.

2.1.1.3.3 Struktur dan Tektonika Geologi

Struktur dan tektonik yang terjadi di Kabupaten Fakfak ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi secara regional dan dikelompokkan menjadi:

a. Pegunungan Misool–Onin–Kumawa.

Punggungan Misool-Onin-Kumawa merupakan tinggian struktur yang berarah ketenggara,dengan panjang kurang lebih 400km,yang mempunyai kenampakan permukaan di P. Misool,di semenanjung Onin dan di semenanjung Kumawa. Kenampakan topografi yang tiba-tiba menunjukkan bahwa punggungan di Fakfak itu dibatasi oleh sistem sesar. Disepanjang sesaritu mempunyai gerakan geser jurus sepanjang ratusan meter.

b. Cekungan Bintuni

Cekungan Bintuni (Visser & Hermes, 1962)merupakan cekungan senjang yang berumur Miosen Akhir hingga Kuartar dan mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Fakfak. Endapan yang ada di Fakfak ini di kelompokkan menjadi Formasi Steenkool dan Batu Pasir Tusuwai. Dari hasil analisis dan penafsiran data dan informasi yang ada memberikan kesan bahwa paling tidak ada tiga lengkungan anti kiln yang berarah barat laut yang mempengaruhi Formasi Steenkool dan dataran Bomberay. Pembentukan cekungan Bintuni ini diperkirakan bersamaan dengan terjadinya pensesaran naik dan pelipatan jalur lipatan Lengguru dengan pembentukan Punggungan Misool– Onin –Kumawa.

c. Alas Cekungan Bintuni

Dari hasil analisis data informasi kegempaan memungkinkan terbentuknya punggungan yang merupakan pencerminan satu tapan atau lebih yang mengakibatkan adanya jebakan minyak bumi. Struktur yang ditafsirkan mencakup sejumlah punggungan yang berarah timur laut dan berangsur angsur hilang ke arah tenggara.



2.1.1.4 Hidrologi

Ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Fakfak sangat banyak yang berasal dari beberapa sumber, baik air tanah maupun air permukaan. Hal ini disebabkan karena letak wilayahnya yang berbukit-bukit dan didominasi oleh hutan, sehingga ketersediaan air di wilayah perencanaan sangat banyak. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari air bersih, penduduk pada umumnya menggunakan air permukaan.

Air permukaan di Kabupaten Fakfak terdiri dari beberapa sumber, diantaranya adalah Sungai Werba, Air Besar, Kayuni, Otoweri, Bomberay, Kalimati, dan Kampung Sungai. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sumber air baku berasal dari Sungai Air Besar, Kali mati, dan Kampung Sungai. Sumber-sumber tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan aspek ketersediaan sumber daya air di wilayah perencanaan, hal ini bukan merupakan suatu kendala untuk pengembangan wilayah di masa yang akan datang, karena masih bisa menampung kegiatan. Potensi sumber daya air di Kabupaten Fakfak secara umum adalah cukup melimpah terutama dari mata air, air tanah, dan air permukaan. Karena wilayahnya yang berbukit-bukit dan didominasi oleh hutan, maka ketersediaan air di wilayah perencanaan sangat banyak. Air permukaan di Kabupaten Fakfak terdiri dari beberapa sumber, di antaranya adalah Sungai Werba, Sungai Air Besar, Sungai Kayuni, Sungai Otoweri, Sungai Bomberay, Sungai Kalimati dan Kampung Sungai.

Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten bahwa sumber air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah bersumber dari air besar dengan debit 4000 l/dtk, kampung sungai dengan debit 6 l/dtk dan kali mati dengan debit 30 l/dtk. Semua sumber air baku ini belum dimanfaatkan secara optimal, karena sampai tahun 2006 yang baru dimanfaatkan adalah kampung sungai 50%, dan kali mati dimanfaatkan 67%, sedangkan dari sumber air besar dimanfaatkan 50%.

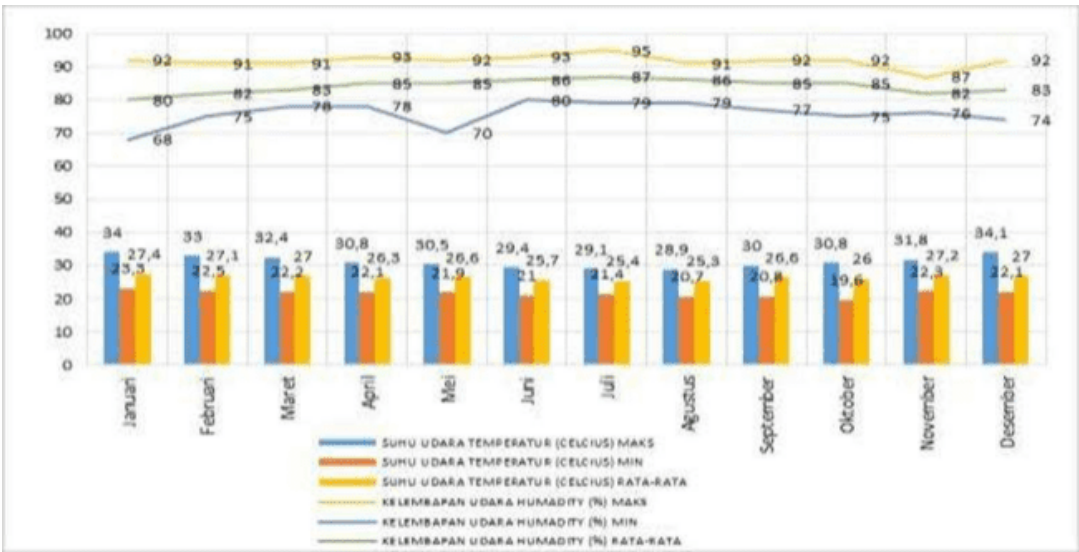
2.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Fakfak memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Rata-rata suhu udara yang tercatat di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Fakfak pada temperatur normal berada pada kisaran 25,30-27,40°C pada Tahun 2018, suhu udara terendah terjadi pada

bulan Oktober yaitu sebesar 19,60°C dan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 34,1°C.

Kelembaban udara rata-rata yang terjadi pada Tahun 2018 sebesar 84,083%, kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 83,8% dan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 95%, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.4.

Gambar II.4 Grafik Suhu dan Kelembaban Udara Minimum dan Maksimum



Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2020

Kecepatan angin yang tercatat di BMKG Fakfak selama Tahun 2020 berkisar antara 3-4 knot. Nilai tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu sebesar 4 knot. Banyaknya hari hujan yang terjadi di Kabupaten Fakfak sebanyak 269 hari dalam satu tahun. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah 248 hari hujan, jumlah tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi, Demikian pula yang terjadi sepanjang Tahun 2016–2020 di mana jumlah hari hujan semakin meningkat dan hampir terjadi di seluruh Indonesia, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.5.

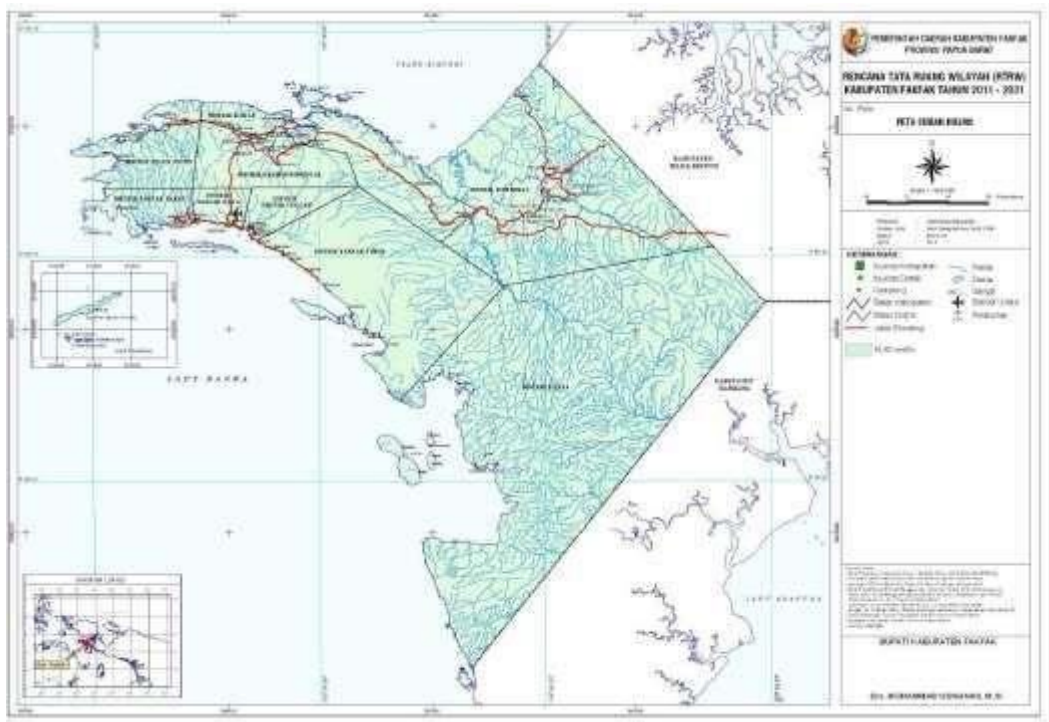
Tabel II.5 Rata-rata Kecepatan Angin Kabupaten Fakfak Tahun 2014-2020

NO	BULAN	KECEPATAN ANGIN (M/DET)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	4,1	4	4	4	4	4	4
2	Februari	4,3	4	4	4	4	4	3
3	Maret	4,3	4	5	5	4	4	3
4	April	4,1	4	4	4	4	4	3
5	Mei	3,8	4	4	4	3	4	3
6	Juni	4	4	4	4	2	4	3
7	Juli	4,6	4	6	6	3	4	3
8	Agustus	4,9	5	5	5	3	4	3
9	September	4,4	6	6	6	4	4	3
10	Oktober	5,2	5	7	7	3	4	3
11	November	4,4	4	5	5	4	4	3
12	Desember	3,7	5	6	6	4	4	3
Rata-rata		4,3	4,4	5	5	3,5	4	3,1

Sumber: Kabupaten Fakfak Dalam Angka, 2021

Apabila dilihat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 590,4 mm3 dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 77,2 mm3 saja. Tekanan udara rata-rata yang terjadi di Kabupaten Fakfak selamat Tahun 2020 sebesar 995,2 mb. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tekanan udara tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.011,7 mb. Tekanan udara terendah terjadi pada Bulan Desember sebesar 993,3 mb dan tekanan udara tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu sebesar 996,6 mb. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari yang terjadi di Tahun 2020 sebesar 48,83% dan penyinaran tertinggi terjadi pada Bulan Januari Dan Maret sebesar 62% dan penyinaran terendah pada Bulan Juli Dan Desember sebesar 33% (lihat Tabel II.6).

Gambar II.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

Tabel II.6 Banyaknya Hari Hujan Kabupaten Fakfak Tahun 2014–2020

NO	BULAN	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	20	31	19	19	20	24	14
2	Februari	14	28	14	21	22	19	22
3	Maret	21	31	27	25	26	16	20
4	April	20	26	26	25	25	19	25
5	Mei	19	24	25	21	29	22	26
6	Juni	21	23	19	22	22	19	25
7	Juli	25	19	28	27	25	28	24
8	Agustus	30	23	25	28	27	28	22
9	September	15	18	27	25	20	26	30
10	Oktober	13	16	28	25	30	23	24
11	November	16	23	11	19	22	11	19
12	Desember	19	14	20	19	27	11	18
Jumlah		233	276	269	276	295	248	269

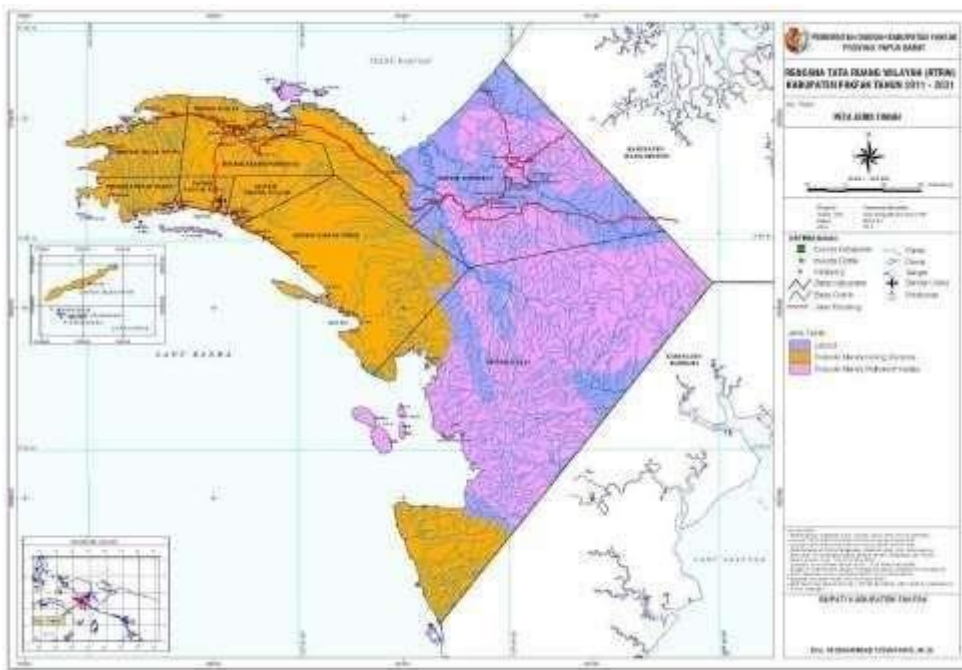
Sumber: Kabupaten Fakfak Dalam Angka,2021



2.1.1.6 Jenis Tanah dan Bentuk Lahan

Jenis tanah di Kabupaten Fakfak berdasarkan data Regional Physical Planning Floor Program Transmigration meliputi jenis tanah Latosol dan Aluvial, Pedsolik Merah Kuning, Pedsolik Coklat Kelabu, Organosol (Tanah Gambut) dan Mediteren Merah Kuning (lihat Gambar II.6). Bentuk dan jenis lahan dibedakan atas 6 (enam) kelompok yaitu kelompok Aluvial, Marin, Dataran, Perbukitan, Pegunungan dan kelompok Karst.

Gambar II.6 Jenis Tanah di Kabupaten Fakfak



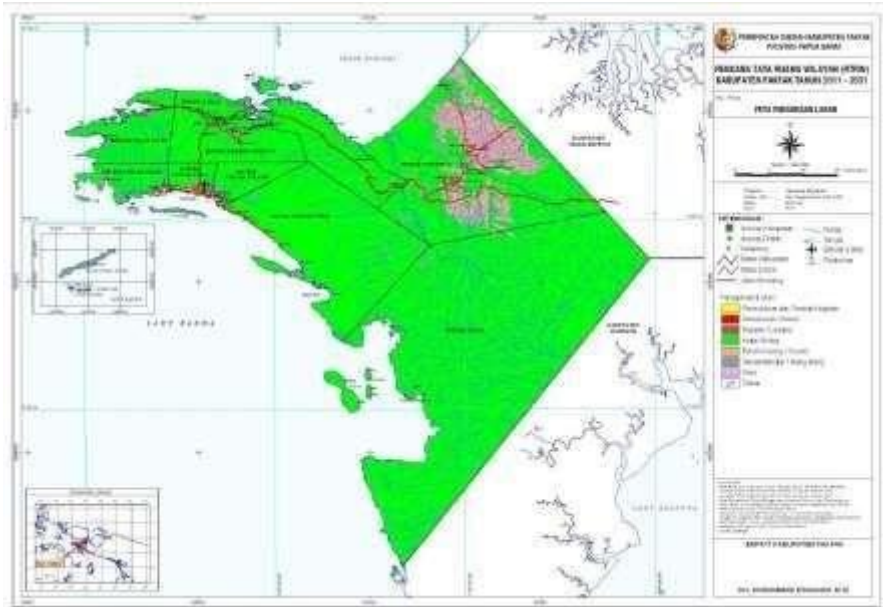
Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

- Kelompok Aluvial:** pada aliran sungai dan berada pada rawa yang tergenang, terdapat di wilayah datar, gelombang dan berbukit.
- Kelompok Dataran:** Bentuk lahan tersusun dari bahan induk deposit, Alufium, Napal dan Batu Pasir. Sistem ini mempunyai bentuk wilayah yang bergelombang, berbukit kecil sampai lereng yang agak curam.
- Kelompok Perbukitan:** Terletak pada perbukitan dan kaki-kaki gunung yang memanjang. Bentuk lahan pada kelompok ini tersusun dari bahan induk batu pasir dan serpihan.
- Kelompok Pegunungan:** Bentuk lahan pada kelompok ini tersebar pada daerah pegunungan dan perbukitan yang sistemnya paralel, berada pada perbukitan dan pengungan kapur yang terjal. Bentuk lahan dari sistem pegunungan ini tersusun dari bahan induk seperti nik, peridalit, batu di wilayah pesisir, batu gamping dan napal, sekis, filit dan Andesit.
- Karst:** Penyebaran sistem karst ini berada pada perbukitan berbentuk kerucut. Tersusun dari lahan Induk batu gamping, batu pasir dan napal.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Fakfak didominasi hutan rimba dan tanah kosong/gundul (lihat Gambar II.7). Rencana peruntukan kawasan budidaya di Kabupaten Fakfak dikembangkan dengan ketersediaan lahan yang luas dan bukan menjadi pembatas, akan tetapi mempertimbangkan kondisi saat ini dan peluang pengembangannya, maka intensitas dan skala kegiatan adalah skala menengah.

Gambar II.7 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

Rencana peruntukan kawasan budidaya yang termasuk kelompok lahan non hutan seluas sebesar 264.11 Ha (18,56%) terutama bagi kawasan lahan perkebunan, perkotaan dan kawasan agropolitan serta prasarana pendukung dan hutan produksi seluas 762,186 Ha (53,2%) dari luas wilayah Kabupaten Fakfak. Rincian Rencana Pola Ruang Kabupaten Fakfak dapat dilihat dalam Gambar II.8 dan Tabel II.7.

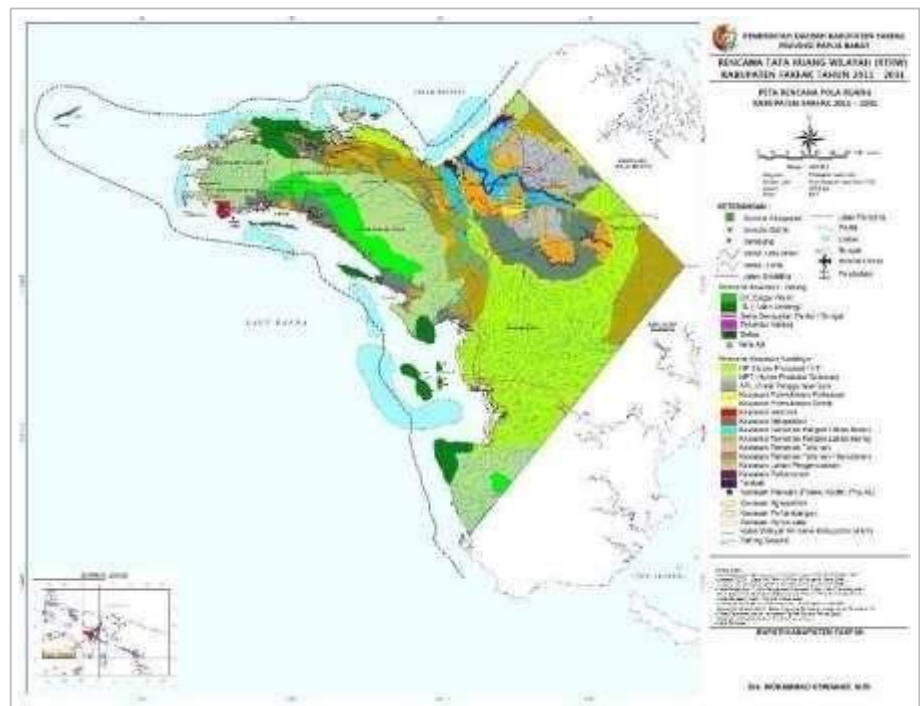
Tabel II.7 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak

NO	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	(%)
1	Kawasan Lindung:		
	Hutan Lindung	41.523,54	2,9
	Cagar Alam	43.930,05	3,07
2	Mangrove		
	Sempadan Sungai	50.000,00	3,49
	Sempadan Pantai	38.879,34	2,72
3	Kawasan Budidaya:		
	Hutan Produksi	310.008,82	21,65
	Hutan Produksi Terbatas	292.252,57	20,41
	Hutan Konversi	159.926,55	11,17
	Kawasan terbangun & Permukiman	7.000,00	0,49
	Perkotaan Bomberay	6.500,00	0,45
	Permukiman Transmigrasi	3.149,62	0,22
	Kawasan Agropolitan	76.511,73	5,34

NO	RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	(%)
	Perkebunan/Ladang	43.771,31	3,06
	Budidaya Perikanan	3.517,91	0,25
	Badan Air	75.000,00	5,24
	Jaringan Jalan	125.000,00	8,73
	Penggunaan Lain	155.028,50	10,83
	Luas Total	1.431.999,94	100
	Fishing Ground	100.024,86	

Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Fakfak

Gambar II.8 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan lindung yang termasuk dalam kelompok ini terutama adalah kawasan rawan longsor, gempa, gerakan tanah karena sesar dan patahan atau bencana geologi sejenis dan kawasan rawan banjir. Penentuan Kawasan rawan bencana di Kabupaten Fakfak berdasarkan kriteria berikut:

- Wilayah yang mempunyai sejarah ke gempaian yang merusak;
- Wilayah yang dilalui oleh patahan aktif;
- Wilayah dengan catatan kegempaan dengan kekuatan/magnitudo lebih besar dari 5 pada skala richter;
- Wilayah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai,endapan pantai dan batuan lapuk;
- Wilayah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah,terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng dikawasan ini;
- Wilayah dengan kerentanan tinggi terkena gelombang pasang dan banjir;
- Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana tsunami.

Kawasan yang termasuk rawan bencana di Kabupaten Fakfak diantaranya di lereng-lereng perbukitan dengan kemiringan curam, kawasan

dengan sejarah patahan dan gempa yaitu di sekitar semenanjung onim di wilayah Fakfak sisi barat. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah ini direncanakan sebagai kawasan lindung dan tetap dipertahankan dengan tutupan lahan berupa hutan,distrikuali dikawasan yang sesuai untuk dikembangkan budidaya yaitu sekitar kawasan pantai dan lereng landai. Dengan demikian, pengembangan kawasan perkotaan Fakfak harus dibatasi mendukung fungsi kawasan lindung.

Tabel II.8 Data Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Fakfak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI
1	Tanah Longsor	1 Kampung Lusiperi Distrik Fakfak
		2 Kampung Pasir Distrik Fakfak
		3 Kampung Wurunkendik Distrik Fakfak Barat
		4 Kampung Nemewikarya Distrik Fakfak Tengah
		5 Kampung Mendopma Distrik
		6 Kampung Gewerpe Distrik
2	Banjir	1 Kampung Kinam Distrik Fakfak
3	Kebakaran Hutan	1 Kampung Puar Distrik Teluk Patipi
		2 Kampung Wos, Kampung Waremu dan Kampung Goras Distrik Mbahamdandara
		3 Kampung Baru Distrik Kokas
4	Angin Putting Beliuang	1 Kampung Goras Distrik Mbahamdandara

Sumber:BPBD Kabupaten Fakfak,2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektoral yang dapat dikembangkan serta potensi alam yang luar biasa di Kabupaten Fakfak. Pembangunan Kabupaten Fakfak harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang tersedia di mana nantinya perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan. Berdasarkan karakteristik wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Budidaya sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.9.

Tabel II.9 Kawasan Budidaya Kabupaten Fakfak 2011-2031

NO	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
1	Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk mendukung perekonomian wilayah, pembangunan industri ekspor dan kelestarian alam dan lingkungan (ekosistem)	
	a. Kawasan hutan produksi terbatas	Distrik Bomberay dan Karas
	b. Kawasan hutan produksi tetap	Distrik Bomberay dan Distrik Karas
	c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Distrik Kokas, Bomberay dan perbatasan Distrik Fakfak Timur dan Distrik Karas
2	Kawasan Peruntukkan Pertanian Diperuntukkan untuk meningkatkan produksi lahan, mendorong pengembangan agribisnis berbasis komoditi unggulan daerah serta meningkatkan daya saing pertanian dalam mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah	



NO	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	a. Kawasan pertanian lahan basah	Kawasan Agropolitan Bomberay di Distrik Bomberay dan di Distrik Karas
	b. Kawasan pertanian lahan kering	semua distrik
3	Kawasan Peruntukkan Perkebunan Diperuntukkan untuk mendukung perekonomian lokal melalui perkebunan pala, kelapa, durian, cengkeh dan berbagai komoditi perkebunan lainnya, dengan memperhatikan kondisi eksisting, kenderungan perkembangan peternakan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal	
	a. Sentra produksi perkebunan pala	semua distrik kecuali Distrik Bomberay
	b. Sentra produksi perkebunan kakao	Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak Tengah, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas, Bomberay, Karas dan Fakfak Timur
	c. Sentra produksi perkebunan kelapa	Distrik Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas, Bomberay, Karas dan Fakfak Timur
	d. Sentra produksi perkebunan cengkeh	Distrik Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas, Bomberay, Karas dan Fakfak Timur
	e. Sentra produksi perkebunan kopi robusta	Distrik Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas, Karas dan Fakfak Timur
	f. Sentra produksi perkebunan kelapa sawit	Distrik Bomberay dan Distrik Karas
	g. Kawasan perkebunan lainnya	Distrik Fakfak Tengah, Distrik Kokas, Distrik Teluk Patipi, Distrik Karas dan Distrik Bomberay
4	Kawasan Peruntukkan Peternakan Merupakan kawasan yang sesuai untuk peternakan hewan, dengan memperhatikan kondisi eksisting, kenderungan perkembangan peternakan, kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal, serta merupakan kawasan dengan jenis tanah/iklim sesuai untuk padang rumput	
	a. Ternak besar (sapi, kambing)	Distrik Bomberay, Distrik Fakfak, Fakfak Timur, Kokas.
	b. Ternak babi	Distrik Fakfak Barat, Distrik Kramongmongga, dan Distrik Fakfak Timur yang berjauhan dengan kawasan permukiman
	c. Ternak unggas (ayam buras, ayam potong dan petelur)	Distrik Fakfak, Fakfak Barat, Bomberay dan Fakfak Tengah pada wilayah penyangga daerah perkotaan Fakfak
5	Kawasan Peruntukkan Perikanan Pengembangan kawasan dilakukan secara bertanggungjawab melalui pemberdayaan nelayan, pengembangan sarana prasarana dan fasilitas perikanan. Komoditas perikanan Kabupaten Fakfak adalah ikan karang, krustasea, moluska, dan ikan pelagis besar (seperti tuna dan cakalang), rumput laut, teripang, kerapu, kakap dan lobster.	
	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap	seluruh Distrik, kecuali Distrik Kramongmongga
	b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan	
	• Kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau	Distrik Bomberay
	• Kawasan budidaya perikanan laut (<i>marine-culture</i>)	beberapa wilayah pesisir Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Barat, Distrik, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur dan Distrik Karas dan Distrik Kokas
	c. Kawasan minapolitan	Weri, Distrik Fakfak Timur
6	Kawasan Peruntukkan Pertambangan Pemanfaatan ruang kawasan pertambangan dan galian dikembangkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, serta mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam (ekosistem).	
	a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara	Distrik Kokas, Distrik Barat, Distrik Kramongmongga dan Distrik Bomberay
	b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Blok Kasuri di Distrik Bomberay serta Blok Samai di Distrik Karas
7	Kawasan Peruntukkan Industri Pengembangan sektor industri yang dikembangkan terutama adalah industri yang dapat mendukung pengolahan hasil perkebunan, pertanian dan perikanan untuk memberikan nilai tambah dari produksi pertanian di Kabupaten Fakfak yang lebih besar.	
	a. Kawasan peruntukan industri besar	Distrik Kokas, Distrik Bomberay dan Distrik Karas
	b. Kawasan peruntukan industri sedang	kawasan agroindustri di Distrik Bomberay, Distrik Fakfak Timur, Distrik Karas, Distrik Kramongmongga, Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Barat, dan Distrik Fakfak Tengah
	c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga	seluruh distrik
8	Kawasan Peruntukkan Pariwisata Jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan meliputi wisata peninggalan sejarah, wisata	

NO	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	budaya hingga wisata alam. Rencana pengembangan wisata alam (ecotourism) merupakan bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Kabupaten Fakfak tanpa merusak lingkungan.	
	a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Tugu Perjuangan Merah Putih, terdapat di Pulau Tubir Seram, Kampung Nemiwikarya Distrik Fakfak
		Tugu perjuangan Trikora Kampung Rumbati di Distrik Teluk Patipi
		Tugu Perang Dunia II terdapat di Utara, Distrik Kokas
		Masjid Tua Wertuar di Kampung Patimburak Distrik Kokas
		Tugu Pepera terdapat di Distrik Fakfak
		Lukisan Telapak Tangan di Distrik Kokas
		Acara perkawinan, kelahiran, inisiasi dan kematian terdapat di seluruh wilayah
		Festival pariwisata dan budaya Fakfak di Distrik Fakfak
	b. Kawasan peruntukan pariwisata alam	Pantai Pasir Putih I, terdapat di Pasir Putih, Distrik Fakfak Tengah
		Pantai Pasir Putih II, terdapat di Wayati, Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur
		Pantai Wayob, terdapat di Pulau Panjang, Werpigan, Distrik Fakfak Barat
		Sungai Air Besar, terdapat di Air Besar, Distrik Fakfak Tengah
		Air Terjun Maredred, terdapat di Pasir Putih, Distrik Fakfak Tengah
		Air Terjun Kali, terdapat di Werba, Distrik Fakfak Barat dan Kampung Weri, Distrik Fakfak Timur
		Pasir Pantai , terdapat di Kampung Weri, Sanggaram
		Goa Alam, Distrik Fakfak
		Wisata Bahari di Distrik Fakfak, Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Timur dan Distrik Kokas
		Lubang Kayu Merah, terdapat di Kampung Kayu Merah, Distrik Tengah
		Cagar Alam Pegunungan Fakfak terbentang di sepanjang Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah dan di Distrik Fakfak Timur
		Cagar Alam Pegunungan Kumawa terdapat di Distrik Karas
	c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Kolam renang Air Besar terdapat di Air Besar Distrik Fakfak Tengah
		Kolam Air Kamandir terdapat di Sanggaram di Distrik Fakfak Timur
		Kolam Ikan Iskompors, Kampung Weri dan Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur
		Lukisan Telapak Tangan di Distrik Kokas
		Penangkaran Ikan Duyung, terdapat di Kiat, Distrik Barat
9	Kawasan Peruntukkan Permukiman Pemanfaatan ruang permukiman bertujuan untuk mendukung hunian dan fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat, yang didasarkan pada pertimbangan kondisi permukiman yang sudah ada saat sekarang, baik permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan.	
	a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Kawasan perkotaan dan kampung yang menjadi wilayah perkotaan, kota pertanian di Bomberay dan Kota Perikanan di Distrik Fakfak Timur
	b. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan	Kramongmongga (Distrik Kramongmongga), Tanjung Purkadi dan Kokas (Distrik Kokas), Weri (Distrik Timur), Raduria (Distrik Tengah), Patipi Pasir (Distrik Teluk Patipi), dan Karas (Distrik Karas)
10	Kawasan Peruntukkan Lainnya	
	a. Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan	Pos TNI Angkatan Laut di Distrik Fakfak
		Komando Distrik Militer (Kodim) di Distrik Fakfak
		Kepolisian Resort (Polres) di Distrik Fakfak
		Komando Rayon Militer dan Kepolisian Sektor di semua distrik

Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

2.1.3 Demografi

Penduduk Kabupaten Fakfak memiliki rasa nasionalis yang tinggi, terbukti dengan membuat suatu perkumpulan/organisasi dalam usaha memerdekakan daerah yang dicintainya, selain itu masyarakat Kabupaten



Fakfak terbuka terhadap orang-orang pendatang/turis, masyarakat masih kental dengangotong royong, tolong menolong dan kebersamaan, hal ini terbukti dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menolong mereka tidak melihat suku, ras dan agama karena mereka menganggap semuanya adalah saudara, terbukti dengan beraneka ragam suku, bangsa dan agama yang tinggal di Kabupaten Fakfak. Dari segi budaya masih memegang adat nenek moyangnya, tetapi mereka tidak menutup terhadap adat kebiasaan suku-suku yang lain.

Tabel II.10 Jumlah Penduduk Menurut Distrik, Jenis Kelamin dan Rumah Tangga di Kabupaten Fakfak Tahun 2020

NO	DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (L+P)	RUMAH TANGGA
1	Fakfak	9.384	8.910	18.294	5.271
2	Fakfak Barat	1.766	1.720	3.486	848
3	Fakfak Timur	673	619	1.292	312
4	Kokas	2.224	2.107	4.331	1.156
5	Fakfak Tengah	6.955	6.600	13.555	3.565
6	Karas	1.604	1.488	3.092	798
7	Bomberay	1.098	938	2.036	644
8	Kramongmongga	1.080	1.014	2.094	491
9	Teluk Patipi	2.158	2.063	4.221	1.049
10	Pariwari	12.338	11.584	23.922	6.550
11	Wartutin	1.087	1.036	2.123	472
12	Fakfak Timur Tengah	1.376	1.342	2.718	650
13	Arguni	628	556	1.184	339
14	Mbahamdandara	543	540	1.083	296
15	Kayauni	882	885	1.767	437
16	Furwagi	828	763	1.591	397
17	Tomage	1.149	1.077	2.226	666
JUMLAH		45.773	43.242	89.015	23.941

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab.Fakfak, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Fakfak Tahun 2021 sebesar 89.015 jiwa dengan rumah tangga sebanyak 23.941 rumah tangga. Dari jumlah penduduk tersebut dominan untuk proporsi perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, memiliki besaran yang hampir seimbang. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 45.773 jiwa (51,42%) sedangkan perempuan 43.242 jiwa (48,58%), sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.10.

Tabel II.11 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kab. Fakfak, 2020

NO	DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK	LUAS DAERAH (KM ²)	KEPADATAN PER KM ²
1	Fakfak	18.294	233	78,51
2	Fakfak Barat	3.486	679	5,14
3	Fakfak Timur	1.292	1.020	1,27
4	Kokas	4.331	788	5,49
5	Fakfak Tengah	13.555	2.491	5,44
6	Karas	3.092	705	4,38
7	Bomberay	2.036	746	2,55
8	Kramongmongga	2.094	786	2,72
9	Teluk Patipi	4.221	1.023	4,13
10	Pariwari	23.922	587	40,75
11	Wartutin	2.123	1.006	2,11
12	Fakfak Timur Tengah	2.718	701	3,87
13	Arguni	1.184	334	3,54
14	Mbahamdandara	1.083	664	1,63

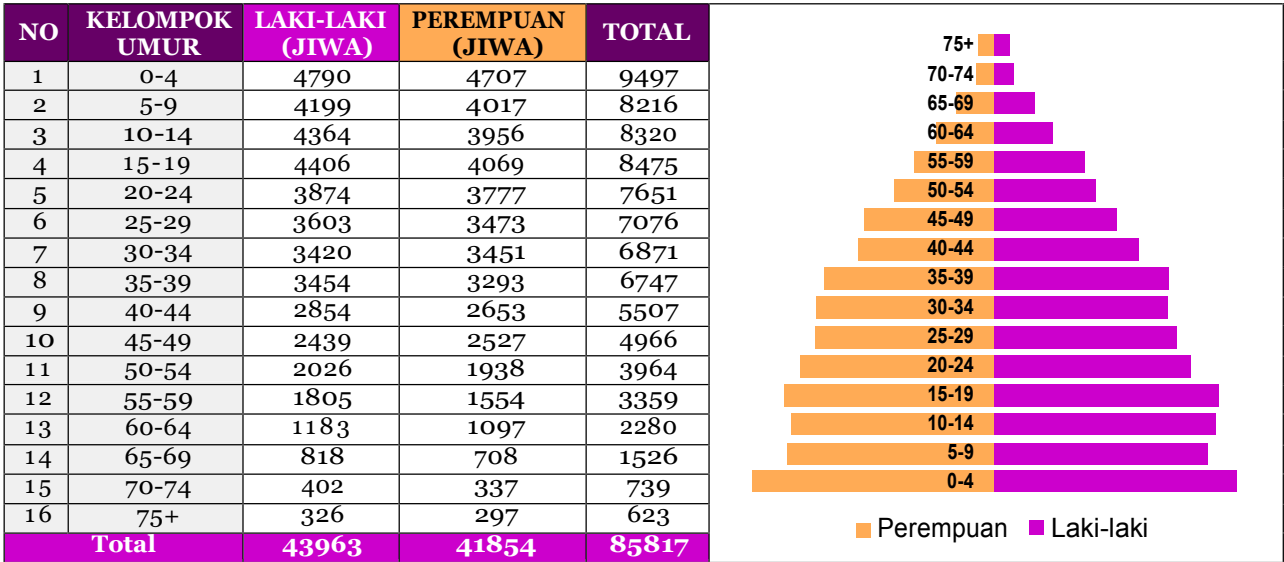
NO	DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK	LUAS DAERAH (KM ²)	KEPADATAN PER KM ²
15	Kayauni	1.767	938	1,88
16	Furwagi	1.591	732	1,17
17	Tomage	2.226	887	2,50
JUMLAH		89.015	14.320	168,08

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2021

Bila dilihat penduduk berdasarkan umur, terdapat golongan umur anak- anak dan remaja pada 0-19 tahun (35.995 jiwa) cukup tinggi, diikuti golongan usia angkatan kerja, golongan usia 20-29 tahun (15.874 jiwa). Angka ini menandakan angka pencari kerja cukup tinggi di Kabupaten Fakfak. Kepadatan penduduk terbesar di Distrik Fakfak yaitu 78,51 orang per km² yaitu sebanyak 18.294 jiwa penduduk sedangkan kepadatan terendah berada di Distrik Furwagi yaitu 1,17 penduduk per km².

Berdasarkan kelompok umur, dari Grafik penduduk (Gambar 2.8), penduduk Kabupaten Fakfak tergolong kelompok penduduk muda. Hal ini terlihat pada tingginya jumlah penduduk golongan 5-9 tahun dan 10-14 tahun dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini menunjukkan pula angka kelahiran di Kabupaten Fakfak cukup tinggi.

Tabel II.12 Penduduk Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kelompok Umur, 2021



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2021

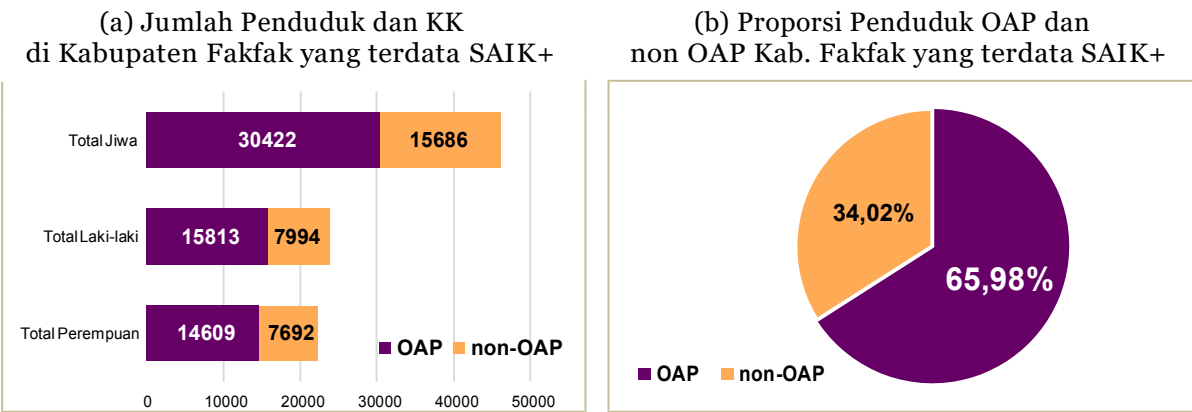
Rasio ketergantungan mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan tiap distrik relatif cukup bagus. Rasio ketergantungan yang ada masih dibawah angka 100, yang artinya jumlah penduduk tidak produktif masih dibawah jumlah penduduk produktif. Berdasarkan uraian sebelumnya

dapat disimpulkan, Kabupaten Fakfak memiliki daya tarik bagi penduduk luar Kabupaten Fakfak untuk mengadu nasib. Arus migrasi masuk tidak dapat dihindari, yang perlu diatur adalah bagaimana mengelola migran agar kesejahteraan penduduk terjaga karena migrasi tidak hanya dilakukan penduduk usia produktif, tetapi juga non-produktif.

Kondisi Demografi OAP dan non-OAP

Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi demografi OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) sejak Mei 2020 di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Gambar II.9 dapat diketahui proyeksi pendataan yang dilakukan sampai dengan Mei 2022 sebesar 46.108 jiwa atau 53,73% dari total jumlah penduduk tahun 2021. Meskipun demikian, berdasarkan proyeksi pendataan SAIK+ yang telah dilakukan, diketahui proporsi penduduk OAP sebanyak 65,98% sedangkan non-OAP sebanyak 34,02%%. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Gambar II.9 Proyeksi Penduduk OAP dan non-OAP yang Terdata SAIK+ (sampai dengan Mei 2022)



Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
<https://saikplus.papuaabaratprov.go.id/>

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara

nominal dalam memproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.13.

Tabel II.13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) di Kabupaten Fakfak Tahun 2018– 2020

SEKTOR PDRB	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutan dan Perikanan	813,56	860,10	868,51
Pertambangan dan Penggalian	61,05	65,20	62,44
Industri Pengolahan	159,76	167,26	171,46
Pengadaan Listrik dan Gas	2,60	2,82	3,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,04	9,52	9,73
Bangunan	1385,42	1493,13	1409,84
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	580,18	633,26	648,80
Transportasi dan Pergudangan	263,61	294,63	256,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,84	61,93	62,56
Informasi & Komunikasi	139,22	154,47	170,55
Jasa Keuangan dan Asuransi	66,42	75,08	87,55
Real Estate	111,48	121,77	123,23
Jasa Perusahaan	8,95	9,61	9,69

Sumber:PDRB Kabupaten Fakfak,2021

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan namun bila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB yaitu sektor bangunan dengan kontribusi sebesar Rp.1.409,84 sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor basis memberikan kontribusi sebesar Rp.868,51 lebih kecil dibandingkan sektor konstruksi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas karena sektor tersebut selain sebagai sektor unggulan daerah, juga banyak menyerap tenaga kerja terutama di Kampung- Kampung sehingga apabila dioptimalkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perkembangan PDRB Kabupaten Fakfak atas Dasar Harga Berlaku dalam Jutaan Rupiah tahun 2018-2020, maka dapat diuraikan distribusi persentase PDRB Kab. Fakfak 2018-2020 sebagaimana Tabel II.14.



Tabel II.14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) di Kab. Fakfak Tahun 2018–2020

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019*)	2020**)
1	Pertanian, Kehutan dan Perikanan	16,9	16,32	16,68
2	Pertambangan dan Penggalian	1,24	1,24	1,20
3	Industri Pengolahan	3,26	3,15	3,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,19
6	Bangunan	28,25	28,33	27,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,83	12,01	12,46
8	Transportasi dan Pergudangan	5,37	5,59	4,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,17	1,20
10	Informasi & Komunikasi	2,84	2,93	3,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,35	1,42	1,68
12	Real Estate	2,27	2,31	2,37
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	19,19	18,90	19,18
15	Jasa Pendidikan	4,59	4,56	4,54
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,34	1,33	1,39
17	Jasa Lainnya	0,30	0,30	0,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		100,0	100,0	100,0

Sumber : PDRB Kabupaten Fakfak 2021

Berdasarkan Tabel II.4 diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2018–2020 masih didominasi oleh kontribusi sektor bangunan (27,08%), sektor jasa-jasa dan pemerintahan umum (19,18%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (16,68%) sedangkan kontribusi yang terkecil yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (0,05%). Berdasarkan kondisi dapat dilihat bahwa peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor basis (*leading sektor*) masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan sektor pertanian dapat tumbuh positif, meskipun pada tahun 2020 terdapat pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi secara agregat.

Tabel II.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Kab. Fakfak Tahun 2018-2020

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019*)	2020**)
1	Pertanian, Kehutan dan Perikanan	594.926,67	617.042,03	606.125,37
2	Pertambangan dan Penggalian	45.931,44	49.285,12	47.124,14
3	Industri Pengolahan	125.862,79	123.629,95	131.207,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.634,54	1.668,39	1.780,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.422,29	7.725,67	7.790,33
6	Bangunan	875.750,79	931.734,61	870.551,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	413.381,24	436.839,11	440.039,03
8	Transportasi dan Pergudangan	179.861,75	192.085,89	167.545,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.528,96	37.667,49	36.942,81
10	Informasi & Komunikasi	108.056,44	117.169,53	127.479,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	44.188,86	48.374,02	56.844,92
12	Real Estate	75.487,13	80.480,31	79.939,78
13	Jasa Perusahaan	6.174,74	6.517,09	6.496,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	615.386,12	640.065,85	615.379,21
15	Jasa Pendidikan	179.048,63	188.704,65	183.786,90
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	46.654,21	48.898,88	50.357,68
17	Jasa Lainnya	10.933,48	11.416,06	11.186,59
PDRB ADHK		3.367.230,08	3.545.307,64	3.440.577,18

Sumber: PDRB Kabupaten Fakfak, 2020

Berdasarkan Tabel II.15 diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Fakfak mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah rendahnya tingkat produksi yang mempengaruhi tingkat output, sedangkan faktor eksternal yaitu disebabkan tingkat permintaan dari daerah lain terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari daerah tertentu serta rendahnya tingkat investasi. Penurunan PDRB ini juga dipengaruhi kondisi adanya penyebaran pandemi covid-19 yang telah mempengaruhi berbagai aspek terutama kesehatan dan ekonomi serta social. Adanya penyebaran virus covid-19 yang melanda dunia telah berdampak pada penurunan kinerja ekonomi di semua daerah termasuk di Kabupaten Fakfak. Penurunan ini terutama terjadi pada aspek produksi serta konsumsi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Adanya pembatasan sosial melalui sejumlah kebijakan telah mempengaruhi kelancaran produksi serta distribusi barangdan jasa yang mempegaruhi kelangsungan usaha.

Tabel II.16 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Fakfak Tahun 2018-2020

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019*)	2020**)
1	Pertanian, Kehutan dan Perikanan	3,54	3,72	-1,77
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,22	5,02	-4,38
3	Industri Pengolahan	3,18	3,00	1,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,70	2,07	6,71
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,58	4,09	0,84
6	Bangunan	9,48	6,39	-6,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,38	5,67	0,73
8	Transportasi dan Pergudangan	3,95	6,80	-12,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	6,02	-1,92
10	Informasi & Komunikasi	8,71	8,43	8,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	9,47	17,51
12	Real Estate	5,19	6,61	-0,67
13	Jasa Perusahaan	6,99	5,54	-0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,97	4,01	-3,86
15	Jasa Pendidikan	4,86	5,39	-2,61
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,88	4,81	2,98
17	Jasa Lainnya	5,65	4,41	-2,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		6,57	5,29	-2,95

Sumber: PDRB Kabupaten Fakfak, 2020

2.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Fakfak sebesar Rp 39,44 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 45,06 juta pada tahun 2019, dan mengalami penurunan menjadi Rp 43,08 juta pada tahun 2020, sebagaimana Tabel II.17. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Fakfak pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak meskipun nilainya masih lebih rendah dari PDRB per kapita Provinsi



Papua Barat. Adapun penurunan PDRB per kapita disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah sebagai dampak pandemi covid-19.

Tabel II.17 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (Rp 000) 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Fakfak	39.438	41.510	43.515	45.056	43.077
Provinsi Papua Barat	61.242	62.170	64.499	64.685	62.733

Sumber: PDRB Kabupaten Fakfak, 2020

2.2.1.3 Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel II.18, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi di Kabupaten Fakfak termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Pada tahun 2017-2021 tren rasio gini Kabupaten Fakfak menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Fakfak, meskipun ketimpangan di Fakfak masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Ketimpangan pendapatan ini mencerminkan distribusi pendapatan diantara golongan masih cukup tinggi. Oleh karena itu perlu diupayakan berbagai strategi,kebijakan serta program yang lebih berorientasi pada *pro poor* dan *pro job*.

Tabel II.18 Indeks Gini di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Fakfak	0,370	0,397	0,390	0,397	0,347
Provinsi Papua Barat	0,387	0,394	0,386	0,382	0,383

Sumber: BPS Papua Barat, 2022 dalam <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/23/171/1/rasio-gini-menurut-kabupaten-kota.html>

2.2.1.4 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Perhitungan angka kemiskinan di Kabupaten Fakfak dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan dengan perhitungan di tempat lain. BPS menggunakan perhitungan angka kemiskinan dengan pendekatan moneter, yakni dengan menghitung besarnya pendapatan kepala keluarga per bulan, yang besarnya Rp.578.510 per kapita per bulan. Bila menggunakan dasar perhitungan tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Fakfak sangat rendah. Hampir tidak ada penduduk Fakfak yang masuk dalam kategori miskin. Hal itu sangat berbeda dengan fakta di lapangan, dimana secara kasat mata masih terdapat penduduk yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hal itulah dilakukan pengukuran yang berbeda, yakni dengan mengembangkan skenario yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan rumah tangga di daerah ini, yakni dengan menggunakan pendekatan upah

minimum kabupaten. Skenario ini dipandang lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan dibandingkan dengan pendapatan perkapita penduduk. Adapun upah minimum di kabupaten ini adalah Rp 3.134.600,- per bulan. Penggunaan dasar upah minimum meskipun masih memiliki kelemahan karena dasar perhitungannya biasa pada pekerjaan formal, namun lebih mendekati kenyataan dibandingkan hanya menggunakan perhitungan pengeluaran masing-masing keluarga. Berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan sebesar Rp.578.510,- perkapita per bulan, jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 sebanyak 17.022 rumah tangga atau sebesar 22,27%. Dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 18.073 rumah tangga menunjukkan penurunan sebesar 24,31%.

Tabel II.19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2016-2020

KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Fakfak	19,67	18,73	18,22	17,72	18,51	25,96	24,31	23,25	22,27	22,86
Papua Barat	228,38	214,47	211,50	208,58	219,07	25,10	23,01	22,17	21,37	21,84

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2021”

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

2.2.2.1.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan HLS Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 mencapai angka 14,37 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa peluang penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Fakfak dapat bersekolah hingga jenjang Diploma 2 (D2). Angka ini meningkat sejak tahun 2016 (13,51 tahun) yang di tahun-tahun berikutnya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

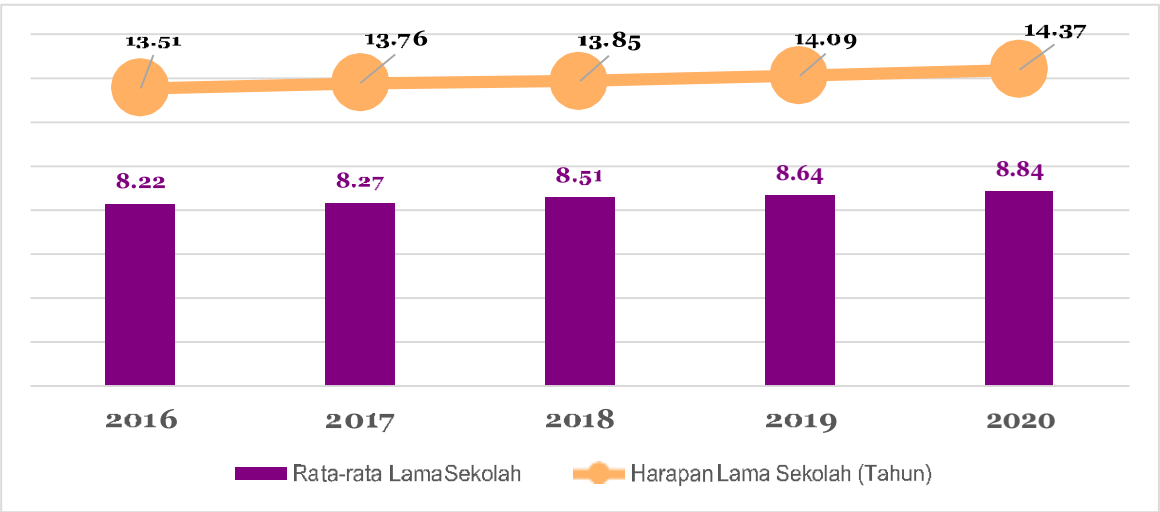
HLS Kabupaten Fakfak tahun 2020 lebih tinggi daripada angka Provinsi Papua Barat yakni 12,91 tahun. Dibandingkan kabupaten/ kota lain, Fakfak menempati urutan 2 tertinggi bersama Kota Sorong (14,38 tahun). Sedangkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah digunakan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani



pendidikan formal. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Data BPS menunjukkan Angka RLS Kabupaten Fakfak tahun 2020 sebesar 8,84 tahun. Angka ini setara dengan kelas tertinggi jenjang SLTP. Angka ini sedikit meningkat sejak tahun 2016 dengan angka 8,22 tahun yang kira-kira setara dengan kelas 2 SMP. Angka yang telah dicapai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak sudah hampir mencapai target program pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Angka RLS Kabupaten Fakfak ini pun lebih tinggi daripada angka provinsi (Papua Barat: 7,60 tahun), dan kedua tertinggi di tingkat provinsi bersama Kota Sorong. Gambar II.10 akan menunjukkan perbandingan HLS dan RLS di Kabupaten Fakfak dalam 5 tahun terakhir.

Gambar II.10 Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Fakfak, 2016-2020

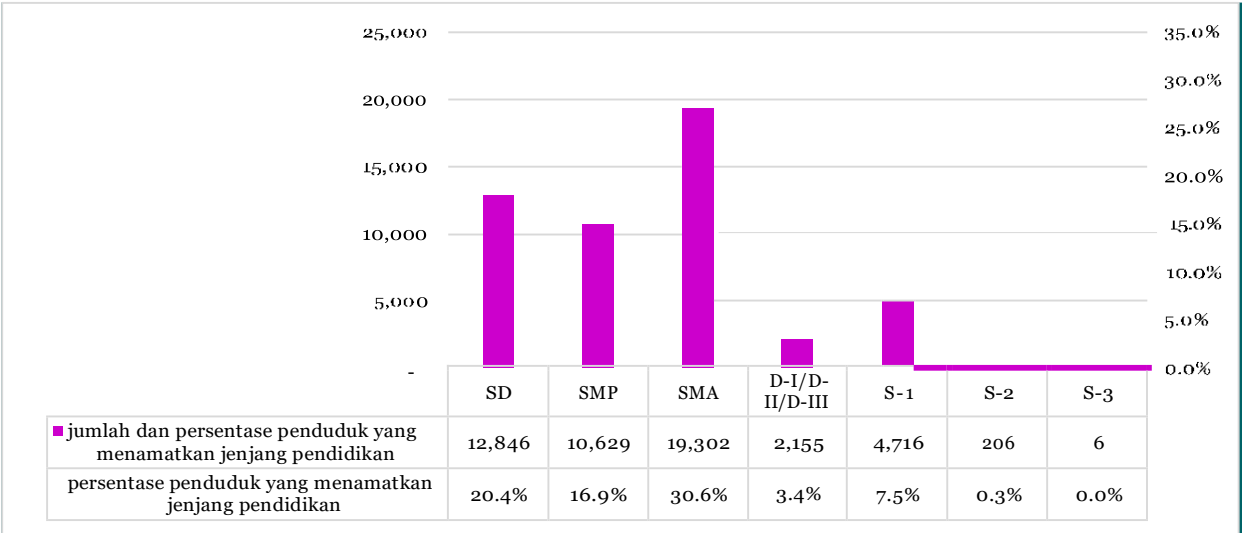


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.2.1.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka-angka di atas didukung juga dengan data mengenai proporsi penduduk berdasarkan jenjang sekolah yang ditamatkan. Data BPS tahun 2021 menyebutkan dari penduduk Kabupaten Fakfak yang berusia 15 tahun ke atas, terbanyak menamatkan jenjang SLTA (30,6%). Pada peringkat berikutnya adalah penduduk yang menamatkan jenjang SD (20,4%) dan SLTP (16,9%). Proporsi penduduk yang menamatkan jenjang perguruan tinggi relatif masih sedikit. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.11.

Gambar II.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

2.2.2.1.3 Angka Melek Huruf

Indikator lain yang juga menunjukkan kemajuan pembangunan pendidikan adalah kemampuan baca-tulis penduduk atau Angka Melek Huruf. Angka Melek Huruf (AMH) sebagai indikator tingkat literasi penduduk didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dan huruf lainnya) Jumlah penduduk usia >15 tahun yang bisa membaca dan menulis di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 sebanyak 42,0 %, meningkat menjadi 53,8% (2017), 54,5% (2018), 56,0% (2019) dan 58.1% (2020) (Tabel II.20).

Tabel II.20 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Memiliki Kemampuan Membaca dan Menulis

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf (%)	42,0	53,8	54,5	56,0	58,1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

Kabupaten Fakfak telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai universitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Untuk menuntaskan pendidikan ke taraf yang lebih baik, Kabupaten Fakfak menjalankan:

- a. Peningkatan infrastruktur pendidikan yang berorientasi pada pembangunan sarana prasarana dan fasilitasi terhadap perguruan tinggi baik dalam peningkatan sumber daya pendidikan dan kesehatan.
- b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berbasis potensi sumber

- daya daerah diantaranya pembangunan Politeknik Negeri Fakfak,
- c. Program Beasiswa dan Pendidikan Bermutu dengan kebijakan afirmasi mengirimkan putra/putri asli Papua untuk masuk universitas ternama di Indonesia.

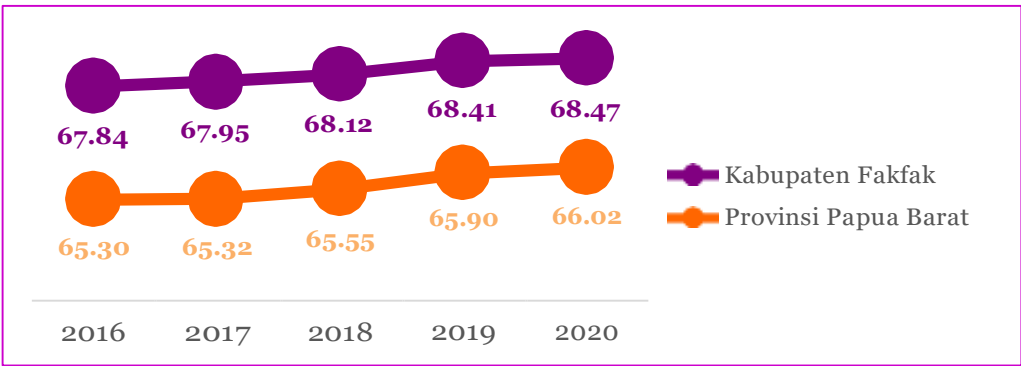
2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan gambaran kondisi kesehatan suatu wilayah secara garis besar, yang menggambarkan usia kematian pada suatu populasi sebagai ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. AHH juga merupakan komponen penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya AHH ditentukan oleh faktor-faktor: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, pelayanan kesehatan yang tersedia, kondisi sosio-ekonomi (tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan serta gaya hidup dan kondisi psikososial) yang mempengaruhi status kesehatan seseorang.

AHH di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari angka 67,84 di tahun 2016 hingga mencapai angka 68,47 pada tahun 2020. Angka ini di atas angka provinsi dengan selisih sebesar sekitar 2 tahun pada tiap tahunnya. Gambar II.12 menunjukkan peningkatan AHH Kabupaten Fakfak sejak tahun 2016 hingga 2020 dibandingkan dengan AHH Provinsi.

Gambar II.12 Perbandingan AHH Kabupaten Fakfak dengan Provinsi Papua Barat, 2016 - 2020

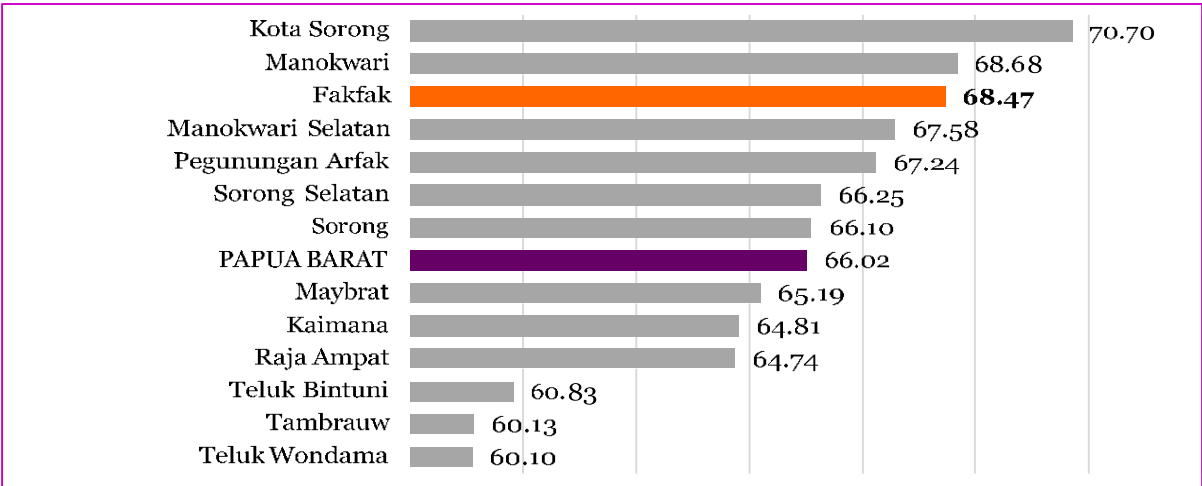


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dan BPS Kabupaten Fakfak, 2020

Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Papua Barat, Fakfak berada di urutan ketiga dengan AHH tertinggi, setelah Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, Keadaan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Fakfak berada pada keadaan yang relatif baik di antara kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Namun dibandingkan

dengan angka nasional (AHH nasional 2020 sebesar 71,46 tahun), AHH Kabupaten Fakfak masih berada di bawah rata-rata. Selengkapnya perbandingan AHH antar kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar II.13.

Gambar II.13 AHH Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat, BPS 2020

2.2.2.2.2 Gizi Buruk

Telah diketahui bahwa kondisi gizi mempengaruhi angka kesakitan, kematian dan kualitas hidup seseorang. Masa yang terpenting untuk pembentukan perkembangan otak, kecerdasan, dan pertumbuhan fisik adalah masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yakni sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi pada periode ini akan mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit-penyakit metabolisme pada usia dewasa. Kondisi kekurangan gizi pada 1000 HPK ini disebut *stunting* atau tubuh pendek. Mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya mempengaruhi pembangunan bangsa, maka masalah *stunting* menjadi salah satu prioritas program kesehatan secara nasional.

Pengukuran status gizi dapat diukur berdasarkan standar *World Health Organization* (WHO) dan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Pengukuran ini menggunakan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB).



Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), yang disebut *underweight* di Kabupaten Fakfak berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 diperoleh prevalensi sebesar 14,55%. Angka Ini terdiri dari 4,22% balita dengan BB sangat kurang, dan 10,33% balita dengan BB kurang. Angka ini cukup tinggi, namun masih lebih baik daripada angka provinsi Papua Barat yakni sebanyak 19,24% Balita *underweight*.

Berdasarkan pengukuran TB/U untuk menilai anak *stunted* (pendek), berdasarkan Riskesdas 2018 didapatkan angka 18,02% balita *stunting* di wilayah Kabupaten Fakfak. Prevalensi ini terdiri dari 8,81% balita sangat pendek (*stunting* berat) dan 9,21 balita pendek (*stunting* ringan) Angka ini lebih rendah daripada angka provinsi sebesar 27,75%. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, di Kabupaten Fakfak terdapat setidaknya 1 dari tiap 7 anak balita mengalami masalah gizi. Tabel II.21 berikut merangkum prevalensi Gizi Buruk pada usia 0-59 bulan.

Tabel II.21 Prevalensi Gizi Buruk berdasarkan indeks BB/U dan TB/U pada anak usia 0-59 bulan di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat, 2018

Wilayah	Berdasarkan Indeks BB/U (<i>underweight</i>)			Berdasarkan Indeks TB/U (<i>stunted</i>)		
	Persentase BB sangat kurang	Persentase BB kurang	Total	Persentase sangat pendek	Persentase pendek	Total
Fakfak	4.22	10.33	14.55	8.81	9.21	18.02
Papua Barat	5.15	14.09	19.24	11.66	16.09	27.75

Sumber: Riskesdas, Kemenkes RI, 2018

Selain status gizi pada masa balita, kondisi kesehatan anak juga dipengaruhi oleh keadaan gizi semasa janin. Sehingga status gizi pada Wanita Usia reproduktif, terutama ibu hamil juga mempengaruhi status kesehatan anak yang akan dilahirkannya. Kekurangan gizi pada kelompok ini disebut Kurang Energi Kronis (KEK). Di Kabupaten Fakfak, Riskesdas tahun 2018 menemukan prevalensi KEK sebesar 13,83% pada ibu hamil dan 25,34% pada perempuan tidak hamil. Angka-angka ini menunjukkan masih tingginya masalah gizi pada wanita usia reproduktif di Kabupaten Fakfak, meskipun dengan prevalensi yang lebih rendah dibandingkan angka provinsi. Pada tingkat Provinsi, Ibu Hamil mengalami KEK berdasarkan hasil riset yang sama ditemukan sebanyak 23,21%, dan pada perempuan tidak hamil (20,83%).

2.2.3 Fokus Ketenagakerjaan

2.2.3.1 Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk/
Employment to Population Ratio (EPR)

Angka rasio ini didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini



memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Dapat dilihat pada Tabel II.22 bahwa jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Fakfak meningkat tajam dari tahun 2016 menuju tahun 2017, namun menurun pada tahun-tahun berikutnya. Jumlah penduduk yang bekerja berfluktuatif, namun pernah mencapai puncak pada tahun 2019 dan menurun tajam pada tahun 2020 yang dipengaruhi pandemi Covid-19.

Tabel II.22 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kab. Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang Bekerja	28.246	29.458	22.768	39.570	22.868
2	Angkatan Kerja	31.044	80.530	60.833	77.851	63.057
Rasio		0,90	0,36	0,37	0,51	0,36

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.2.3.2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel II.23 menunjukkan perkembangan TPAK dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Fakfak yang cenderung stagnan.

Tabel II.23 Rasio Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Fakfak, 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkatan kerja 15thn ke atas	31.044	34.579	34.579	36.774	39.306
2	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	50.241	52.496	52.486	54.963	60.293
Rasio		64,65	65,86	65,88	64,82	65,19

Sumber: Fakfak Dalam Angka 2021

2.2.3.3 Tingkat pengangguran terbuka

TPT atau biasanya disebut juga sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Data mengenai perkembangan TPT setiap tahun di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.24. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel tersebut, TPT mengalami trend yang positif (menurun) dari tahun 2016 menuju tahun 2018, namun menunjukkan trend yang negatif (meningkat) sampai dengan tahun 2020. Dalam hal ini, maka Kabupaten Fakfak perlu membuka kesempatan kerja bagi Angkatan kerja dengan membuka sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.



Tabel II.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Fakfak, 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	4.073	3.444	3.444	4.073	4.502
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	31.044	34.579	34.579	36.774	39.306
Persentase		13,12	9,95	9,95	11,07	11,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Fakfak, 2021

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS penduduk Kabupaten Fakfak tergolong tinggi terutama pada kelompok usia 7-15 tahun. Sedangkan pada usia 19-24 tahun kurang dari separuh penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan formal. APS pada masing-masing kelompok umur ini berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir yang dapat dilihat selengkapnya pada Tabel II.25.

Tabel II.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Fakfak, Tahun 2016 – 2020

Kelompok Usia	APS Berdasarkan Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
7 - 12 Tahun	98.86	99.00	98.86	97.68	98.81
13 - 15 Tahun	98.38	98.57	100.00	96.58	98.11
16 - 18 Tahun	86.90	86.66	90.73	81.49	89.81
19 - 24 Tahun	45.09	48.98	47.62	n/a	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak, 2021

Untuk mengetahui keikutsertaan penduduk dalam pendidikan formal pada jenjang tertentu, Angka Partisipasi Sekolah ini dibedakan menjadi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sedangkan APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, termasuk juga Pendidikan Non Formal. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Kegunaannya adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APK di Kabupaten Fakfak dalam 5 tahun terakhir tergolong tinggi, terutama pada jenjang SD/MI, yang mencapai lebih dari 99% di Tahun 2016. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 mencapai angka 97,23%. Demikian pula untuk jenjang SMP/ MTs, capaiannya dalam 5 tahun terakhir antara 85% hingga 96%, sementara untuk jenjang SMA/MA paling tinggi mencapai angka 79,55% di tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.26.

Tabel II.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. Fakfak, 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah/ Angka	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD / MI	Murid	11.777	11.258	11.385	11.386	11.650
	Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	11.884	11.732	11.579	11.898	11.982
	APK SD/MI	99,10	95,96	98,32	95,70	97,23
SMP/ MTS	Murid Usia 13 – 15 Tahun	4.870	5.222	5.151	5.446	5.174
	Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	5.050	5.537	6.024	6.057	5.956
	APK SMP/ MTS	96,44	94,31	85,51	89,91	86,87
SMA/MA/SMK	Murid Usia 16 – 18 Tahun	3.625	4.139	3.465	3.779	4.147
	Penduduk Kelompok Usia 16 – 18 Tahun	5.185	5.203	5.221	5.535	5.883
	APS SMA/ MA /SMK	69,91	79,55	66,37	68,27	70,49

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

Sedangkan jika dipilah berdasarkan kesesuaian umur untuk memperoleh angka APM, terdapat perbedaan yang berkisar antara 10-30% lebih rendah untuk masing-masing jenjang pendidikan dengan fluktuasi masing-masing dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya sebagian siswa yang berada pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan umurnya, yang pada umumnya adalah siswa dengan umur yang lebih tua daripada umur ideal pada setiap jenjang pendidikan. Tabel II.27 menampilkan APM di Kabupaten Fakfak dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II.27 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Fakfak, 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah/ Angka	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD / MI	Murid Usia 7-12 Tahun	9.952	9.439	9.332	9.793	10.011
	Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	11.884	11.732	11.579	11.898	11.982
	APM SD/MI	83,74	80,45	80,59	82,31	83,55
SMP/MTS	Murid Usia 13 – 15 Tahun	3.407	3.535	3.714	3.758	3.612
	Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	5.050	5.537	6.024	6.057	5.956
	APM SMP/ MTS	67,46	63,84	61,65	62,04	60,64
SMA/MA/	Murid Usia 16 – 18 Tahun	2.523	2.635	3.174	3.329	3.309



Jenjang Pendidikan	Jumlah/ Angka	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SMK	Penduduk Kelompok Usia 16 – 18 Tahun	5.185	5.203	5.221	5.535	5.883
	APM SMA/MA/SMK	48.66	50.64	60.79	60.14	56.25

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

Pada jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Fakfak, data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menunjukkan jumlah siswa PAUD pada Tahun Ajaran 2018-2019 sebanyak 2.388 anak, dengan APK sebesar 35,64%. Terdiri dari 28,88% PAUD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan sisanya oleh Kementerian Agama. Satuan Pendidikan yang disebut PAUD mencakup:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. Raudhotul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)
- c. Kelompok Bermain (KB)
- d. Taman Penitipan Anak (TPA)
- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS) seperti Pos PAUD dan Bina Keluarga Balita

2.3.1.1.2 Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini menunjukkan kemampuan fasilitas sekolah untuk menampung penduduk pada jenjang pendidikan masing-masing. Dalam kurun waktu 2016-2020, penambahan sekolah di Kabupaten Fakfak hanya 1 yakni pada tingkat SLTA pada tahun 2017. Sehingga untuk jenjang pendidikan SLTA, terdapat sedikit kenaikan Rasio Ketersediaan Sekolah pada tahun 2017, yang kemudian menurun lagi pada tahun 2018 hingga 2020, karena bertambahnya jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel II.28 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk di Kabupaten Fakfak, 2016 – 2020

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	Gedung Sekolah	123	123	123	123	123
	Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	11.884	11.732	11.579	11.898	11.982
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	103,50	104,84	106,23	103,38	102,65
SMP/MTS	Gedung Sekolah	26	26	26	26	26
	Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	5.050	5.537	6.024	6.057	5.956
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/ MTS	51,48	46,96	43,16	42,92	43,65
SMA/MA/SMK	Gedung Sekolah	11	12	12	12	12
	Penduduk Kelompok Usia 16 – 18 Tahun	5.185	5.203	5.221	5.535	5.883
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/MA/SMK	21,21	23,06	22,98	21,68	20,40

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

Sedangkan pada 2 jenjang pendidikan di bawahnya (SD dan SLTP) tidak ada penambahan jumlah sekolah dalam 5 tahun terakhir, sehingga Rasio Ketersediaan Sekolah menurun dari tahun ke tahun, berhubung jumlah penduduk pada kelompok jenjang pendidikan masing-masing bertambah. Pengecualian pada jenjang SLTP, pada tahun 2020 terdapat pengurangan jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun, sehingga Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs meningkat pada tahun 2020. Tabel II.28 menunjukkan Rasio yang dimaksud dalam kurun waktu 2016-2020.

Ada sedikit perbedaan jumlah sekolah antara data Dinas Dikpora Kabupaten Fakfak dengan data yang ditampilkan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan Dapodik, jumlah sekolah di Kabupaten Fakfak pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 sebanyak 225 sekolah, dengan seluruh peserta didik berjumlah 20.219 siswa. Dari data tersebut, dapat diketahui rata-rata peserta didik per sekolah dan rata-rata peserta didik per rombongan belajar (rombel) (Tabel II.29).

Tabel II.29 Jumlah Sekolah, Peserta Didik dan Rombel pada Tiap Jenis Sekolah di Kabupaten Fakfak, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)	Rata-Rata Peserta Didik per Sekolah	Rata-Rata Peserta Didik per Rombel
1	PAUD	80	1.808	145	23	12
2	SD	114	10.280	747	90	14
3	SMP	22	4.188	162	190	26
4	SMA	6	2.909	95	485	31
5	SMK	3	1.034	41	345	25
6	SLB	0	0	0	0	0
Total		225	20.219	1190	90	17

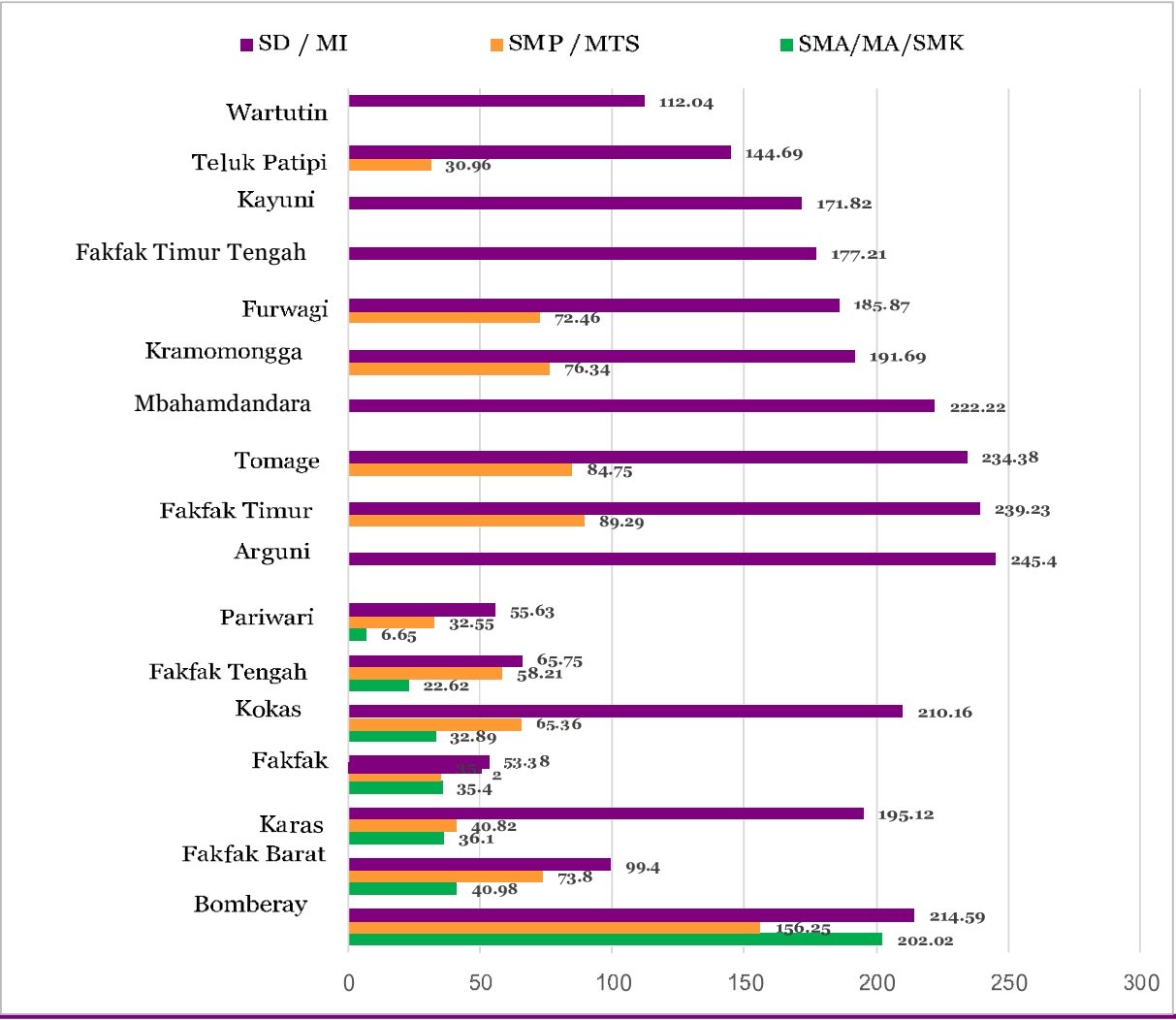
Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan Tabel II.29 diketahui jumlah peserta didik per rombongan belajar di Kabupaten Fakfak untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs, yaitu berturut-turut 14 dan 26 siswa per rombel, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013). Standar yang ditetapkan adalah jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs 36 orang.

Jika dipilah berdasarkan distrik, diketahui bahwa sekolah jenjang SD/MI telah tersedia di semua distrik, dengan rasio tertinggi berada di Distrik Arguni (245.40 sekolah SD per 10.000 penduduk). Sedangkan sekolah tingkat SLTP terdapat di 12 distrik, dengan rasio tertinggi di Distrik Bomberay



(156.25 per 10.000 penduduk). Distrik Bomberay juga memiliki rasio tertinggi untuk sekolah tingkat SMA, yakni 202,02 per 10.000 penduduk. Sementara distrik yang memiliki sekolah tingkat SLTA hanya 7 distrik. Gambar II.14 menunjukkan distribusi sekolah dan rasio ketersediaannya per penduduk.



Gambar II.14 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk Berdasarkan Distrik di Kabupaten Fakfak, 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

Jika dilihat kondisi bangunan sekolah masing-masing, pada tahun 2020 hampir semua sekolah berada dalam keadaan baik. Hanya 1 SD dan 1 SMP yang kondisinya tidak baik. Perkembangan jumlah sekolah beserta kondisinya dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan Tabel II.30.

Tabel II.30 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk di Kabupaten Fakfak, 2016-2020

PENDIDIKAN	JUMLAH/ PERSENTASE	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD / MI	Gedung Sekolah dengan Kondisi Baik	119	120	121	122	122
	Seluruh Sekolah	123	123	123	123	123
	Persentase Sekolah dengan Kodisi Baik	96,75	97,56	98,37	99,19	99,19
SMP/MTS	Gedung Sekolah dengan Kondisi Baik	25	25	25	25	25
	Seluruh Sekolah	26	26	26	26	26
	Persentase Sekolah dengan Kodisi Baik	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15

PENDIDIKAN	JUMLAH/ PERSENTASE	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
SMA/MA/SMK	Gedung Sekolah dengan Kondisi Baik	11	12	12	12	12
	Seluruh Sekolah	11	12	12	12	12
	Persentase Sekolah dengan Kodisi Baik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

2.3.1.1.3 Jumlah dan Kualifikasi Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pada tiap jenjang pendidikan per 1.000 murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan masing-masing. Rasio ini terkait dengan mutu pengajaran karena dengan mengetahui tingkat ketersediaan tenaga pengajar dapat diukur juga apakah telah tercapai jumlah ideal murid untuk satu guru. Jumlah guru di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 berjumlah 1426 orang, terdiri dari 894 guru SD/MI, 284 guru SMP/MTs dam 248 guru SMA/MA/SMK. Rasio guru terendah ada pada jenjang SLTP yakni sebesar 58.32 per 1000 murid. Tabel II.31 merincikan jumlah dan rasio guru terhadap murid pada tahun 2020.

Tabel II.31 Jumlah Guru dan Rasionya Terhadap Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Fakfak, 2020

No	Variabel	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA/SMK
1	Jumlah Guru	894	284	248
2	Jumlah Murid	11.777	4.870	3.625
3	Rasio Guru per 1000 murid	75,91	58,32	68,41
4	Rasio Murid per 1 Guru	13,2	17,1	15,6

Sumber: Kabupaten Fakfak Dalam Angka, BPS, 2021

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa berkenaan dengan rasio guru terhadap murid di tingkat SD, Kabupaten Fakfak telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan yang menyebutkan setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs dalam SPM disebutkan tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, yang capaiannya tidak dihitung di sini berhubung data mengenai jumlah gutu per mata pelajaran tidak tersedia.

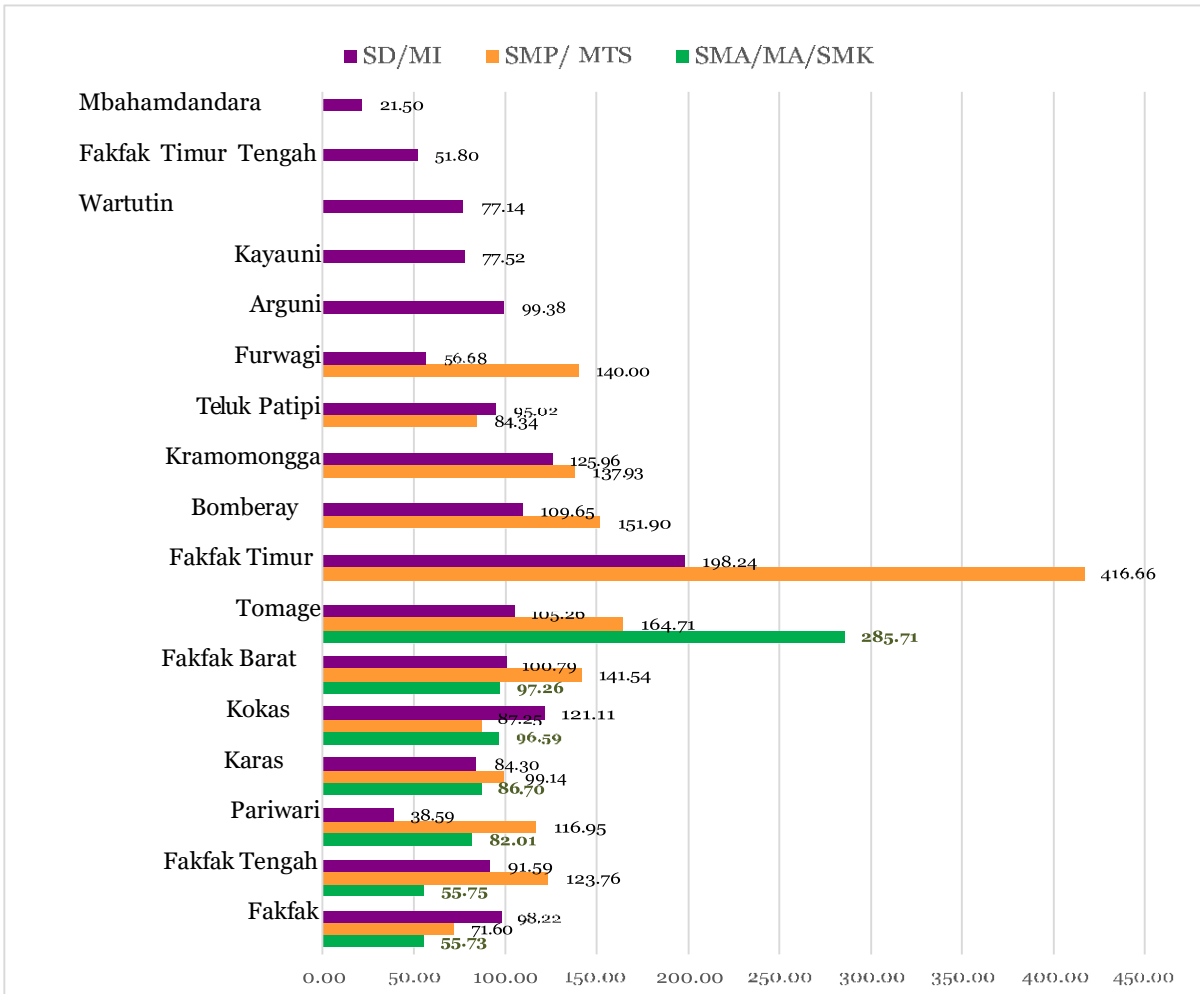
Jika dilihat distribusinya pada masing-masing distrik, terlihat bahwa rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang SD dan SLTP ada di Distrik Fakfak Timur, berturut-turut 198,24 dan 416,66 per 1,000 murid. Sedangkan untuk jenjang SLTA terdapat di Distrik Tomage dengan rasio 285.71 guru per 1000 murid. Gambar II.15 menunjukkan distribusi rasio guru terhadap murid menurut jenjang pendidikan di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.

Di antara seluruh guru di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Fakfak, persentase guru yang berijazah dengan kualifikasi S1 atau D-IV berkisar antara 85-87% dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020. Berturut-



turut persentasenya per tahun sejak 2016 hingga 2020 adalah 86,98%, 87,08%, 86,56%, 87,26% dan 86,93% (*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, 2021*). Meskipun data di atas tidak memilah kualifikasi guru menurut jenjang sekolah tempat mereka mengajar, namun terlihat bahwa Kabupaten Fakfak telah memenuhi SPM Pendidikan Dasar mengenai kualifikasi guru. Dalam SPM disebutkan bahwa di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, dan di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%. Angka Kabupaten Fakfak telah melebihi 70%.

Gambar II.15 Rasio Guru Terhadap 1,000 Murid Berdasarkan Distrik pada masing-masing Jenjang Pendidikan di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: Kabupaten Fakfak Dalam Angka, BPS 2021

2.3.1.1.4 Kelulusan Murid

Pada tahun 2020, Angka Kelulusan siswa pada jenjang SD dan SLTA di Kabupaten Fakfak mencapai 100%. Pada tingkat SLTP, juga menunjukkan capaian yang baik yakni 99,43%. Pada jenjang SD dan SLTP Angka Kelulusan ini berfluktuasi dari tahun ke tahun antara 96% hingga 100%, dan pada jenjang SLTA antara 61,11% hingga 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.32.

Tabel II.32 Perkembangan Angka Kelulusan pada Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Fakfak, 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah/ Persentase	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	Jumlah Lulusan	1.682	1.838	1.765	1.684	1.661
	Jumlah Siswa Kelas Tertinggi	1.682	1.852	1.771	1.697	1.661
	Angka Kelulusan (%)	100	99,13	99,66	99,23	100
SMP/MTS	Jumlah Lulusan	1.214	1.612	1.507	1.586	1.577
	Jumlah Siswa Kelas Tertinggi	1.252	1.612	1.526	1.610	1.586
	Angka Kelulusan (%)	96,96	100	98,75	98,50	99,43
SMA/MA/SMK	Jumlah Lulusan	861	1.304	1.113	1.041	1.446
	Jumlah Siswa Kelas Tertinggi	1.409	1.324	1.153	1.053	1.446
	Angka Kelulusan (%)	61,11	98,50	96,53	98,86	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

2.3.1.1.5 Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah murid-murid di Kabupaten Fakfak tergolong tinggi, baik dari dari SD/MI ke SMP/MTs, maupun dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK. Dari tingkat SD/MI ke SMP/MTs, dakam 5 tahun terakhir Angka Melanjutkan Sekolah berfluktuasi antara 89,46% hingga 112,66%, dan angka pada tahun 2020 mencapai 92,52%. Sedangkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK, Angka Melanjutkan berkisar antara 89,54% hingga 94,88%, dengan angka tahun 2020 sebesar 91,99%. Tabel II.33 menampilkan data mengenai Angka Kelulusan tersebut.

Tabel II.33 Perkembangan Angka Kelulusan pada Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Fakfak, 2016–2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah/ Persentase	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs	1.545	1.895	1.761	1.896	1.558
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	1.727	1.682	1.838	1.765	1.684
	Angka Melanjutkan (%)	89,46	112,66	95,81	107,42	92,52
Dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMA/ MA/ SMK	1.352	1.087	1.485	1.380	1.459
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/ MTs Tahun Ajaran Sebelumnya	1.425	1.214	1.612	1.507	1.586
	Angka Melanjutkan (%)	94,88	89,54	92,12	91,57	91,99

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2021

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Praktik Perseorangan, Unit



Transfusi Darah dan Laboratorium, Rumah Sakit, Upaya Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Fasilitas-fasilitas ini adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Dalam pembahasan ini, fasilitas yang dibahas adalah puskesmas, rumah sakit, UKBM dan Ketersediaan Obat dan Vaksin sebagai bagian dari Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

A. Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Fakfak dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami penambahan yakni sebanyak 10 unit sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 (Pusdatin Kemenkes RI, 2021) Sementara itu, data BPS Kabupaten Fakfak menyebutkan jumlah puskesmas bertambah dari 9 unit di tahun 2016 menjadi 13 unit di tahun 2020 (Kabupaten Fakfak Dalam Angka, BPS 2016- 2021).. Perbedaan ini disebabkan karena yang dimaksud dalam data Dinas Kesehatan adalah puskesmas yang telah teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI.

Mengacu kepada data Dinas Kesehatan dengan ketersediaan 10 Puskesmas di Kabupaten Fakfak yang tersebar di 10 distrik, maka terdapat 7 distrik yang belum memiliki puskesmas, yaitu Furwagi, Wartutin, Arguni, Mbahamdandara, Fakfak Timur Tengah, Tomage dan Kayauni. Di ke-7 distrik ini hanya terdapat Puskesmas Pembantu yang menginduk kepada puskesmas di distrik terdekat.

Dari 10 puskesmas tersebut, 7 puskesmas di antaranya adalah puskesmas rawat inap. Ke-7 puskesmas tersebut adalah Puskesmas Karas, Puskesmas Weri (Disrik Fakfak Timur), Puskesmas Werba (Distrik Fakfak Barat), Puskesmas Degen (Distrik Teluk Patipi), Puskesmas Kokas, Puskesmas Kramongmongga dan Puskesmas Bomberay. Sedangkan puskesmas yang telah terakreditasi sampai dengan 31 Desember 2019 baru 4 puskesmas, yakni:: Puskesmas Fakfak Kota, Kramongmongga, Karas (Akreditasi Madya) dan Puskesmas Weri (Akreditasi Dasar). Berikut nama-nama Puskesmas di Kabupaten Fakfak beserta wilayah kerja dan status masing-masing.

Tabel II.34 Wilayah Kerja, Fasilitas Perawatan dan Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Fakfak, 2020

No	Puskesmas	Distrik Wilayah Kerja	Fasilitas	Akreditasi
1	Bomberay	Bomberay Tomage	Rawat Inap	-
2	Degen	Teluk Patipi Furwagi	Rawat Inap	-

No	Puskesmas	Distrik Wilayah Kerja	Fasilitas	Akreditasi
3	Fakfak Kota	Fakfak	Non Rawat Inap	Madya
4	Fakfak Tengah	Fakfak Tengah	Non Rawat Inap	-Madya
5	Karas	Karas	Rawat Inap	-
6	Kokas	Kokas Arguni Mbahamdandara	Rawat Inap	Madya
7	Kramongmongga	Kramongmongga Kayauni	Rawat Inap	-
8	Sekban	Pariwari	Non Rawat Inap	-
9	Werba	Fakfak Barat Wartutin	Rawat Inap	Dasar
10	Weri	Fakfak Timur Fakfak Timur Tengah	Rawat Inap	

Sumber: (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2020 (2) <https://dinkespapuabarat.wordpress.com> artikel 3 Januari 2020)

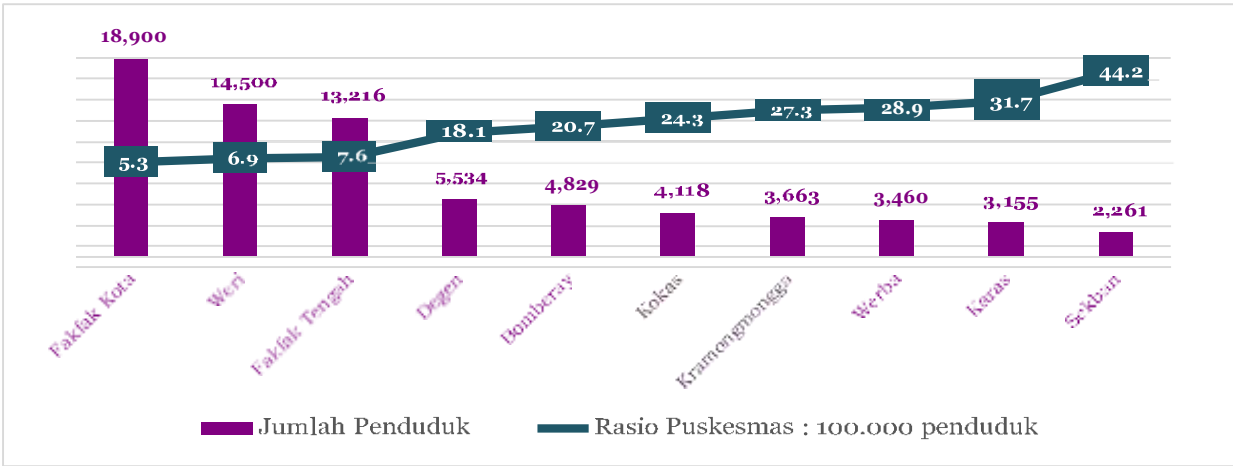
Dari 10 puskesmas yang ada di Kabupaten Fakfak, hanya Puskesmas Fakfak Kota yang rasionya terhadap penduduk yang dilayani belum memenuhi standar nasional (Rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 1:16.000 atau 6,3 puskesmas per 100.000 penduduk). Sembilan puskesmas lainnya memiliki rasio puskesmas antara 6,9 per 100.000 penduduk (Puskesmas Weri) hingga yang tertinggi Puskesmas Sekban (44,2 per 100.000 penduduk). Grafik di bawah ini menunjukkan distribusi penduduk yang dilayani puskesmas dan rasio puskesmas terhadap penduduk di masing-masing distrik.

Untuk menyesuaikan dengan ketersediaan data penduduk per wilayah puskesmas, pada Gambar II.16 angka jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data Pusdatin Kemenkes RI tahun 2020. Sehingga jika dibandingkan dengan data BPS terdapat perbedaan jumlah keseluruhan penduduk kabupaten. Namun tidak menyebabkan perbedaan dalam memberikan gambaran perbandingan rasio antar puskesmas.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap distrik. Rasio Puskesmas terhadap distrik di Kabupaten Fakfak sebelum tahun 2017 telah memenuhi standar rasio Puskesmas terhadap distrik yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 distrik. Namun dengan pemekaran distrik menjadi 17 distrik yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dan tidak diikuti dengan pembangunan puskesmas baru, maka hingga tahun 2020 baru 10 dari 17 distrik yang memiliki Puskesmas, sehingga rasio puskesmas terhadap distrik menjadi 0,59. Hal ini menunjukkan kebutuhan pembangunan puskesmas baru atau peningkatan kapasitas puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk.



Gambar II.16 Jumlah Penduduk yang Dilayani Puskesmas dan Rasio masing-masing Terhadap 100.000 Penduduk di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021

Kondisi prasarana yang tersedia di puskesmas dalam menyediakan pelayanan kepada penduduk belum semuanya dalam keadaan yang optimal. Tabel berikut menampilkan jumlah dan kondisi rumah dinas petugas puskesmas, pusling dan sepeda motor di ke-10 puskesmas di Kab. Fakfak.

Tabel II.35 Kondisi Sarana Pelayanan Puskesmas Kab. Fakfak, 2020

Puskesmas	Rumah Dinas			Pusling Roda 4			Pusling Perairan			Sepeda Motor		
	Baik	Rusak Ringan-Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan-Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan-Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan-Sedang	Rusak Berat
Bomberay	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Degen	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Fakfak Kota	-	1	-	-	-1	-	-	--	-	1	-	-
Fakfak Tengah	3	1	-	-	--	1	-	--	-	1	-	-
Karas	7	4	-	-	--	-	1	-	-	1	-	-
Kokas	6	1	-	-	-1	-	1	-	-	1	-	2
Kramongmongga	4	3	-	-	-1	1	-	-	-	-	-	-
Sekban	2	-10	-	-	-1	-	-	-	-	1	-	-
Werba	-	1	-	-	--	1	-	-	1	1	-	-
Weri	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

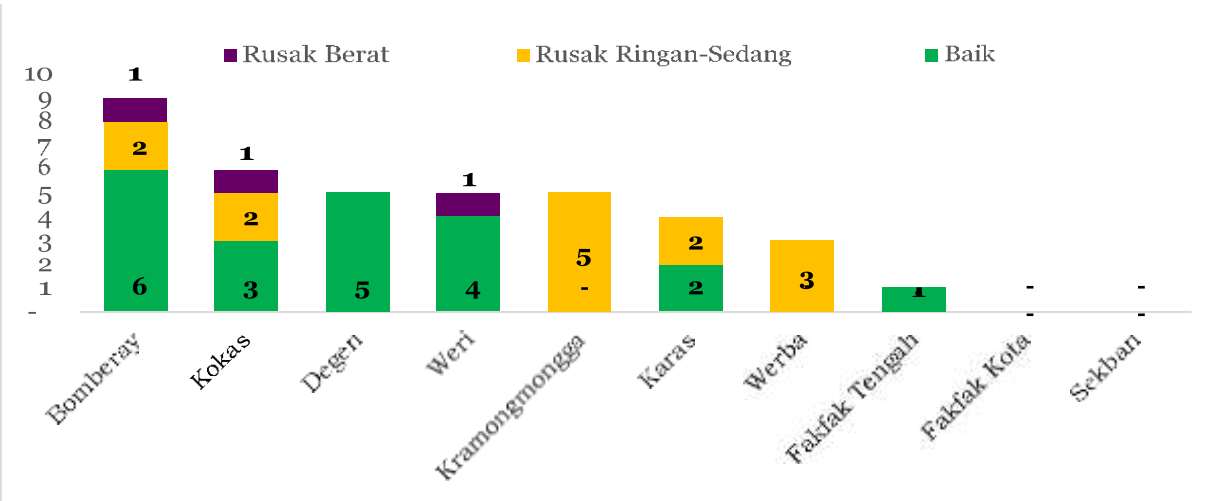
Sumber: Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021

B. Puskesmas Pembantu

Data BPS menyebutkan jumlah puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Fakfak meningkat dari 35 unit di tahun 2015, menjadi 43 unit di tahun 2020. Sedangkan Pustu yang terdaftar pada Data Dasar Puskesmas di Pusdatin Kemenkes RI, jumlah pustu di kabupaten Fakfak pada tahun 2020 adalah 38 unit. Jika dilihat distribusinya per wilayah kerja Puskesmas, maka puskesmas yang memiliki pustu terbanyak adalah puskesmas yang wilayah kerjanya terluas yakni Distrik Bomberay (9 unit) serta distrik Kokas (6 unit). Distrik yang tidak memiliki pustu adalah distrik yang penduduknya relatif memiliki akses yang mudah ke puskesmas, yaitu 2 distrik di perkotaan, yakni Distrik Fakfak (Puskesmas Fakfak Kota) dan Distrik Pariwari (Puskesmas Sekban). Di antara 38 pustu tersebut, 3 di antaranya dilaporkan dalam kondisi rusak berat, dan 14 unit dalam keadaan rusak ringan – sedang.

Gambar II.17 menunjukkan informasi mengenai jumlah dan kondisi fisik puskesmas-puskesmas pembantu di masing-masing wilayah puskesmas yang terdapat di wilayah Kabupaten Fakfak, berdasarkan data Pusdatin kemenkes RI tahun 2020.

Gambar II.17 Jumlah dan Kondisi Puskesmas Pembantu berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021

C. Rumah Sakit

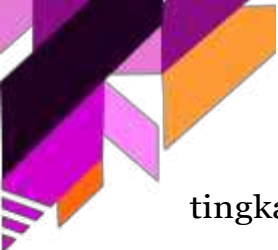
Kabupaten Fakfak memiliki 1 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, yang merupakan rumah sakit tipe C dan hingga tahun 2020 tercatat telah terakreditasi Perdana. Indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Menurut data Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019, RSUD Fakfak memiliki kapasitas 125 tempat tidur, atau 1,5 Tempat Tidur per 1000 penduduk. Rasio ini melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk.

D. Ketersediaan Obat dan Vaksin

Upaya peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan bertujuan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator sasaran strategis untuk mengukur capaian upaya ini yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Tidak tersedia data mengenai persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas-puskesmas Kabupaten Fakfak hingga tahun 2020. Namun dalam





tingkat provinsi, berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, Provinsi Papua Barat menunjukkan capaian puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 89,9%, yang telah melampaui target nasional sebesar 85%. Sedangkan persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat esensial seProvinsi Papua Barat menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni 12 dari 13 kabupaten/ kota (92%) memiliki ketersediaan obat esensial. Indikator ini menunjukkan persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan. Capaian ini melebihi target nasional 77%.

Data mengenai cakupan Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) di Kabupaten Fakfak hingga tahun 2020 juga belum tersedia. Indikator ini diukur dengan menggunakan persentase Puskesmas yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG (Bacillus Calmette-Guérin), Vaksin DPT-HB-HIB (Difteri, Pertusis, Tetanus - Hepatitis B -Haemophilus Influenza tipe B), Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Secara provinsi, Provinsi Papua Barat baru mencapai 81,9%.

E. Telemedicine

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, di antara strategi pembangunan kesehatan yakni penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satu fokusnya pada: Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine. Kabupaten Fakfak belum mencatat capaian terkait jenis layanan ini.

F. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

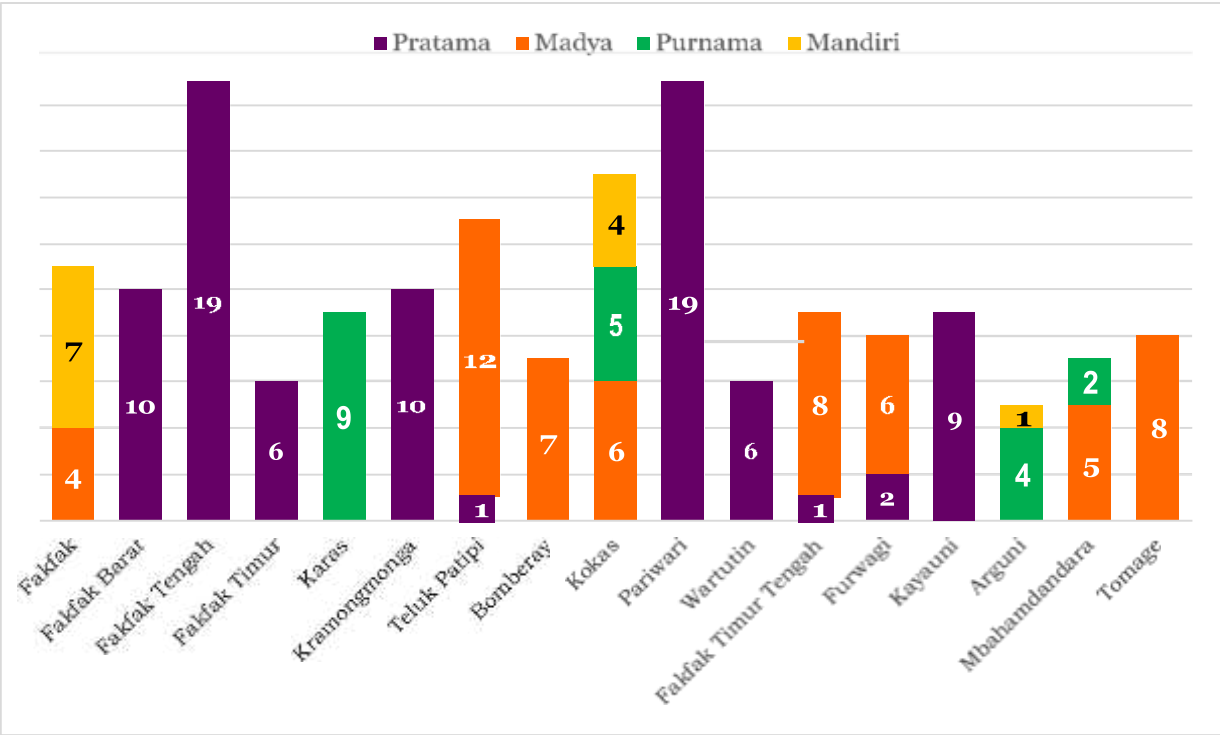
Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang diuraikan dalam dokumen ini yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) dan Kader Malaria.

G. Posyandu

Posyandu adalah UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sehingga posyandu bukan saja tersedia untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mendorong peran lintas sektor dalam bidang kesehatan. Pelayanan posyandu ditujukan untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan

dasar upaya kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana dan penanggulangan penyakit menular.

Gambar II.18 Jumlah dan Strata Posyandu Berdasarkan Distrik di Kabupaten Fakfak, 2018



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2018

Jumlah keseluruhan posyandu di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan, dari 148 unit di tahun 2016 menjadi 160 unit (2017), hingga 171 unit di tahun 2018 hingga 2020. Data stratifikasi posyandu yang tersedia pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018 menyebutkan dari 171 posyandu di Kabupaten Fakfak, 83 di antaranya merupakan posyandu Pratama (48,5%), 56 Posyandu Madya (32,7%), 20 Posyandu Purnama (11,7%) dan 12 posyandu Mandiri (7,0%). Perbedaan ke-4 tingkatan posyandu tersebut sebagai berikut:

- a. Posyandu tingkat Pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas
- b. Posyandu tingkat Madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%.
- c. Posyandu tingkat Purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%.



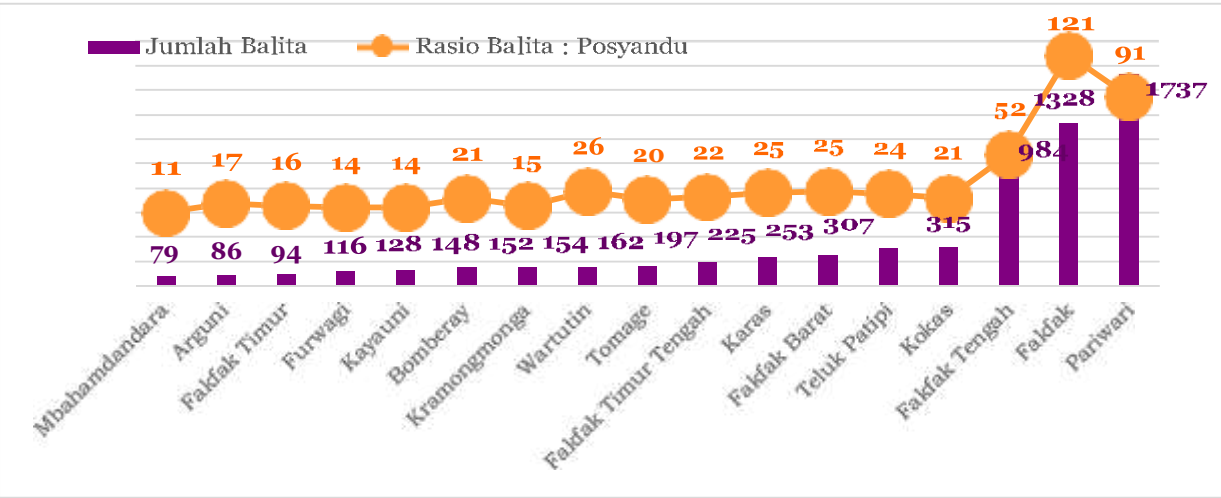
Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat yang masih sederhana.

- d. Posyandu mandiri sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK.

Posyandu-posyandu Mandiri baru terdapat di 3 distrik, yakni Fakfak, Kokas dan Arguni. Sedangkan posyandu Purnama terdapat di 4 Distrik: Karas, Kokas, Arguni dan Mbahamdandara. Gambar II.18 mengilustrasikan distribusi posyandu berdasarkan strata dan distrik hingga tahun 2018 di Kabupaten Fakfak.

Untuk mengetahui rasio posyandu per jumlah balita, dalam pembahasan ini digunakan data jumlah posyandu dan jumlah balita yang tersedia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2018. Dengan jumlah 171 posyandu dan jumlah balita 6,464 anak, maka diperoleh rasionya adalah 1 posyandu melayani 38 balita, atau tersedia 26 posyandu per 1000 balita. Dengan menggunakan proyeksi jumlah balita per distrik, diketahui bahwa posyandu-posyandu di distrik perkotaan, yakni Distrik Fakfak, Pariwari dan Fakfak Tengah memiliki rasio yang rendah, yakni 1 posyandu melayani 121 balita (Fakfak), 91 balita (Pariwari) dan 52 balita (Fakfak Tengah). Sedangkan posyandu-posyandu di 14 distrik lainnya melayani paling banyak 26 balita. Gambar II.19 berikut menampilkan distribusi rasio balita per posyandu berdasarkan distrik, tahun 2018.

Gambar II.19 Distribusi Balita dan Rasio Posyandu terhadap Balita Berdasarkan Distrik di Kabupaten Fakfak, 2018



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2018

H. Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan



pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jumlah Posbindu PTM tahun 2019 di Kabupaten Fakfak sebanyak 31 Posbindu. Menurut Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat, capaian ini menempatkan Kabupaten Fakfak sebagai kabupaten dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak di tingkat provinsi hingga tahun 2019.

I. Kader dan Tim Malaria Kampung

Dalam rangka percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Fakfak, sejak tahun 2017 dilaksanakan program UKBM berupa penguatan kader di kampung-kampung prioritas, yakni 55 kampung dengan angka kejadian yang tinggi. Program ini dinamai Bela Kaca (Bebas Malaria Kampung Bercahaya) sebagai bagian dari program unggulan Kabupaten Fakfak; Gerbang Kaca. Kegiatan ini didukung oleh mitra pembangunan antara lain KOMPAK, UNICEF dan LSM Nasional Perdhaki sebagai penerima hibah Global Fund, serta melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

Kader malaria kampung/kelurahan dilatih oleh petugas Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengobatan malaria, antara lain dalam pemetaan daerah penularan, penemuan kasus secara dini dan rujukan serta pelaporan. Hingga tahun 2020, ada 4 kampung di distrik Pariwari dan Fakfak Barat yang melaksanakan kegiatan Tim Malaria Kampung yang diinisiasi oleh KOMPAK. Selain Dinas Kesehatan dan puskesmas, pendampingan juga dilaksanakan oleh Kantor Distrik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. UKBM lainnya berjalan di kampung yang merupakan wilayah dampingan SSR Perdhaki/GF. Berjalannya kegiatan ini masih sangat tergantung dari keaktifan pendamping dari pihak puskesmas dan distrik

2.3.1.2.2 SDM Kesehatan

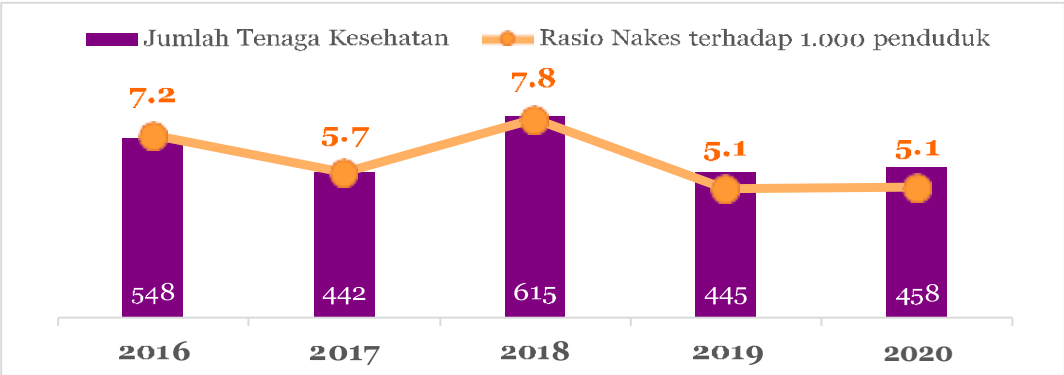
Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. SDM kesehatan merupakan kunci dalam pembangunan kesehatan, yang berperan antara lain meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Pembahasan mengenai SDMK pada dokumen ini mencakup jumlah dan cakupan tenaga kesehatan

di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Fakfak, tanpa pemilahan antara puskesmas dan rumah sakit.

A. Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Fakfak mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, yang tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 615 orang, daan terendah di tahun 2019 sebanyak 445 orang. Perubahan jumlah tersebut juga mempengaruhi rasionya terhadap jumlah penduduk yang dilayani, yang dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 5,1 per 1000 penduduk hingga 7,8 per 1000 penduduk. Fluktuasi tersebut ditunjukkan dalam Gambar II.20.

Gambar II.20 Perkembangan Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Fakfak, 2016 - 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2021

Pilahan data tenaga kesehatan berdasarkan jenis ketenagaannya, yang dilaporkan pada Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2018, menunjukkan adanya perbedaan jumlah tenaga kesehatan karena laporan ini mencakup juga jenis-jenis tenaga yang tidak termasuk dalam data di atas. Dalam Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2018 terdapat 518 tenaga kesehatan dengan distribusi jenis tenaga sebagaimana Tabel II.36.

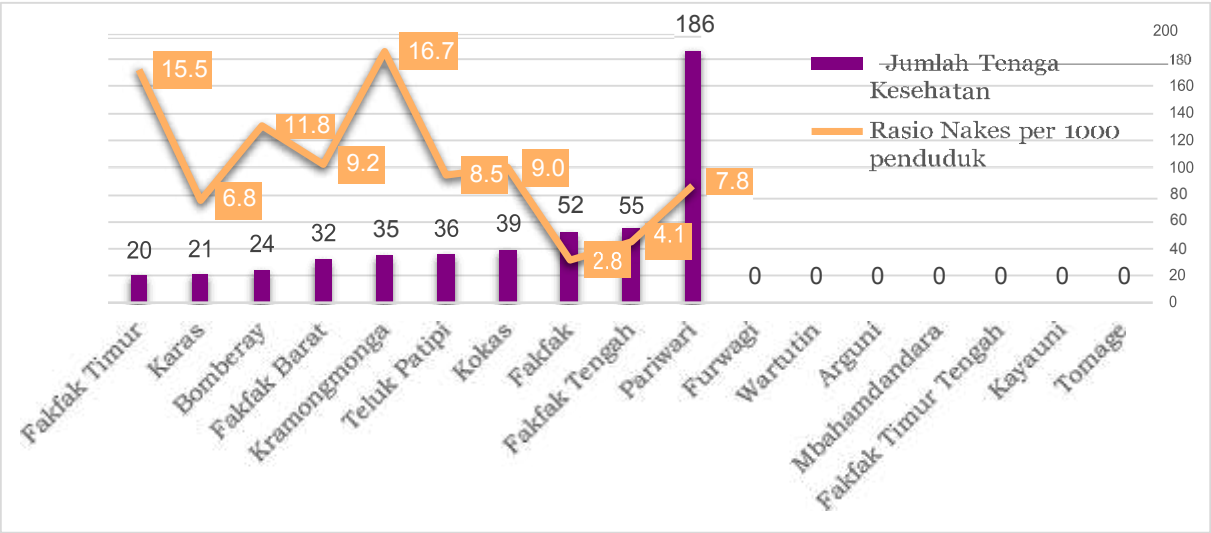
Tabel II.36 Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan, 2018

No	Jenis Nakes	Jumlah
1	Dokter Spesialis	9
2	Dokter Umum	26
3	Dokter Gigi	3
4	Perawat	329
5	Perawat Gigi	9
6	Bidan	97
7	Apoteker, S1 dan D3 Kefarmasian	17
8	Kesehatan Masyarakat	26
9	Sanitarian	14
10	Tenaga Gizi	19
11	Terapi Fisik	3
12	Teknis Medis	21
13	SDM Kesehatan Non Keperawatan	14
Jumlah		587

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2018

Distribusi tenaga kesehatan belum merata di seluruh distrik di Kabupaten Fakfak. Data BPS tahun 2021 menyatakan bahwa tidak ada tenaga kesehatan yang terdaftar bekerja di 7 distrik antara lain Furwagi, Wartutin, Arguni, Mbahamdandara, Fakfak Timur Tengah, Kayauni dan Tomage. Hal ini terjadi karena petugas kesehatan di ke-7 distrik itu tercatat sebagai tenaga kesehatan di distrik lain tempat puskesmas berlokasi. Sementara di antara 10 distrik yang memiliki puskesmas, jumlah tenaga kesehatan terbanyak terdapat di Distrik Pariwari, yang juga merupakan lokasi RSUD, yakni sebanyak 186 orang. Namun rasio yang tertinggi antara jumlah tenaga kesehatan terhadap 1000 penduduk terdapat di Distrik Kramongmongga (16,7 nakes per 1000 penduduk) dan Fakfak Timur (15,5 nakes per 1000 penduduk). Gambar II.21 berikut menunjukkan distribusi dan rasio nakes per distrik di Kabupaten Fakfak.

Gambar II.21 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Fakfak, 2020

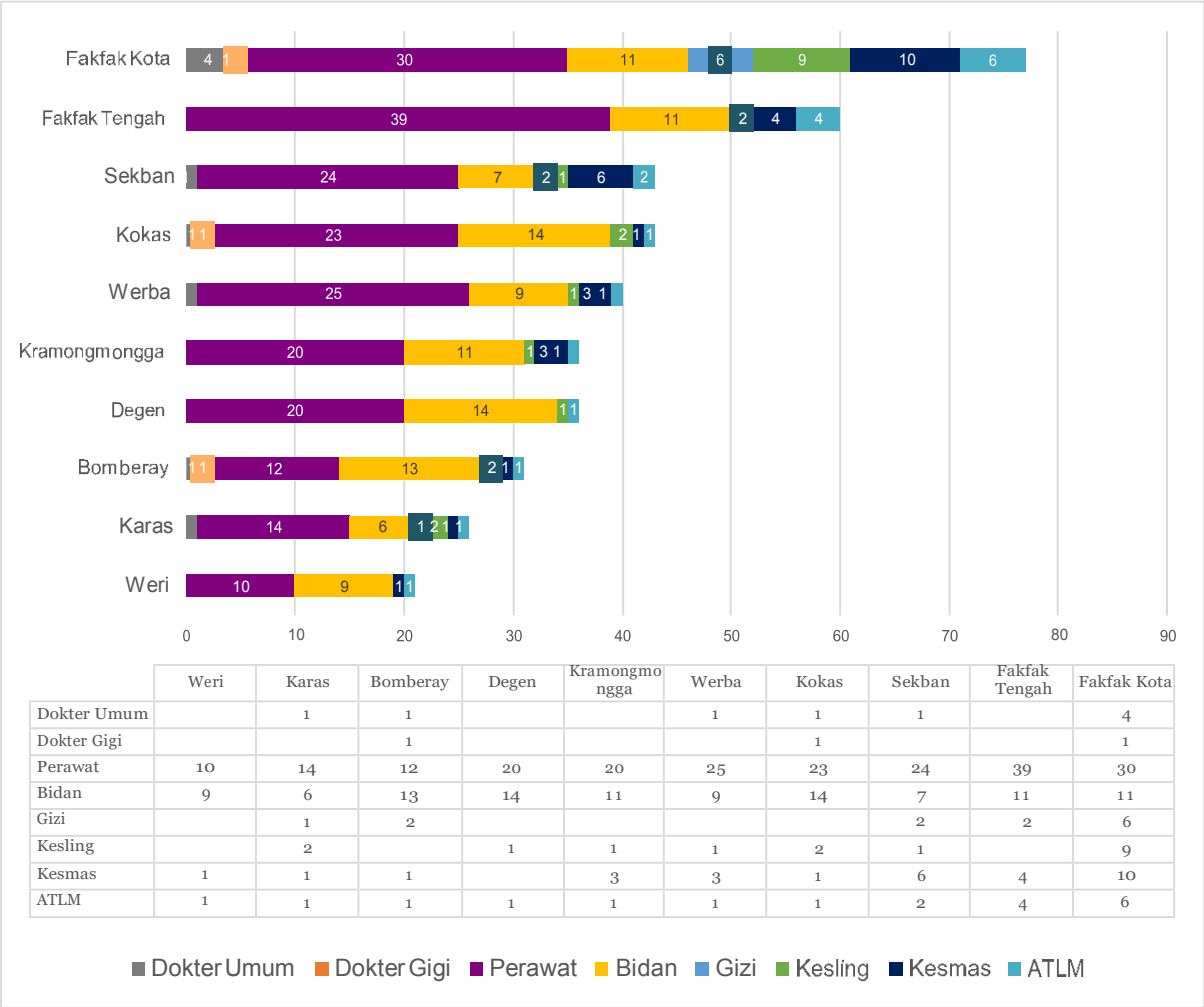


Sumber: Kabupaten Fakfak dalam Angka, BPS 2021

Salah satu indikator dalam pelayanan puskesmas adalah kecukupan 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut. Di Kabupaten Fakfak, berdasarkan data Pusdatin Kemenkes RI, terdapat 413 orang tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas-puskesmas pada tahun 2020. Jika dipilah berdasarkan jenis ketenagaannya, hanya Puskesmas Fakfak Kota yang telah memenuhi standar tersebut, Gambar II.22

menunjukkan distribusi tenaga kesehatan di puskesmas pada tahun 2020 (dalam data Pusdatin tidak disebutkan jumlah tenaga kefarmasian).

Gambar II.22 Distribusi Tenaga Kesehatan Puskesmas Berdasarkan Jenis Ketenagaannya di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021

B. Tenaga Medis

Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2020 tenaga medis yang bekerja di Kabupaten Fakfak berjumlah 45 orang, berdasarkan data BPS dan Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak. Dokter umum yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 tercatat sebanyak 32 orang (BPS 2021). Jumlah ini menghasilkan rasio dokter terhadap penduduk sebesar 1 : 2782, atau 0,36 dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini masih di bawah standar nasional yakni minimal 1 dokter untuk 2500 penduduk. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, dengan jumlah dokter umum sebanyak 26 orang. Namun dalam 4 tahun terakhir, jumlah dokter umum yang bekerja di Kab. Fakfak mengalami penurunan, dari 36 orang di tahun 2017, menjadi 35 orang di tahun 2018 dan 2019 (BPS 2016-2021).



Di antara 17 distrik di Kabupaten Fakfak, distrik yang memiliki dokter hanya separuhnya, yakni 8 distrik. Dokter terbanyak bekerja di Distrik Pariwari, yang juga merupakan lokasi RSUD Kabupaten Fakfak, yakni sebanyak 21 dokter. Selanjutnya, 4 dokter bekerja di Distrik Fakfak. Enam distrik lainnya, yakni Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kokas, Karas, Bomberay dan Teluk Patipi masing-masing memiliki 1 dokter.

Mengenai ketersediaan tenaga dokter spesialis, di Kabupaten Fakfak terdapat 9 dokter spesialis (Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak 2018), yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasionya 1 dokter spesialis berbanding 9.891 penduduk atau 1,01 dokter spesialis per 10.000 penduduk. Angka ini cukup baik karena melampaui standar nasional, yakni 1:16.000.

Adapun jumlah tenaga Dokter Gigi di Kabupaten Fakfak masih sangat terbatas, di tahun 2018 hanya terdapat 3 dokter gigi dan bertambah menjadi 4 orang di tahun 2020. Dengan demikian rasio dokter gigi terhadap penduduk di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 adalah 1 dokter gigi untuk 22.254 penduduk atau 0,45 dokter gigi per 10.000 penduduk.

2.3.1.2.3 Kesehatan Keluarga

A. Angka Kematian Ibu

Definisi kematian ibu (AKI) dalam indikator ini adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup. Selain karena indikator ini sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas untuk menilai keberhasilan program kesehatan, yang pada akhirnya menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Fakfak yang tersedia pada tahun 2018 dilaporkan sebesar 5 Kasus atau 3,32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi daripada angka nasional berdasarkan SUPAS tahun 2015 yakni 3,05 per 1000 kelahiran hidup. Angka provinsi pada periode 2015-2020 tidak dapat dihitung berhubung ketidaklengkapan laporan. Namun dari hasil olahan dari data jumlah kasus kematian ibu yang dilaporkan, diperoleh angka 2,96 per 1000 kelahiran hidup (2018). Angka ini kemungkinan lebih kecil daripada keadaan yang sesungguhnya mengingat system pencatatan dan pelaporan yang belum baik dari tingkat kampung hingga provinsi. Sementara



target SDG adalah 0,7 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030. Mengenai penyebab kematian ibu, tidak tersedia data di tingkat kabupaten. Namun sebagai gambaran, di wilayah Provinsi Papua Barat penyebab terbanyak adalah perdarahan (40%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (22%), Hipertensi kehamilan (12%), gangguan sistem peredaran darah (3%) dan lainnya (23%).

B. Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menunjukkan cakupan K4 pada tahun 2016 sebesar 62,3% dan terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut, yakni 66,8%(2017), 73,7% (2018) dan 77,75 (2019), namun menurun cukup banyak pada tahun 2020 menjadi 25,7%. Kondisi ini berhubungan dengan pembatasan kontak fisik selama berlangsungnya pandemi Covid-19.

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani, yang merupakan manfaat dari pemeriksaan kehamilan yang teratur, pada tahun 2016 mencapai 84,5% tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 32,2% (2017), 34,6% (2018), 48,0% (2019) dan 40,2% (2020).

C. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Yang dimaksud tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter umum, dokter spesialis kebidanan-kandungan, bidan dan perawat. Pada tahun 2016 cakupan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan mencapai 86,7% namun menurun pada tahun 2017 menjadi 64,0%. Pada tahun 2018 dan 2019 capaiannya kembali meningkat menjadi 71,3% dan 72,8%. Namun pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 68,4%.

D. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yang dianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat



dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tahun 2016 cakupan pelayanan ibu nifas lengkap di Kabupaten Fakfak menunjukkan capaian 64,3% dan meningkat selama periode tahun 2017 dan 2018 yakni berturut-turut 76,4% dan 80,2% Capaian itu menurun di tahun 2019 menjadi 72,9% dan di tahun 2020 kembali menurun menjadi 68,0%.

E. Angka Kematian Anak

Dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak diketahui bahwa pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah kematian anak berjumlah 17 kasus, terdiri dari 7 bayi dan 10 balita (12 – 59 bulan). Tidak tersedia data mengenai jumlah kematian neonatus (usia 0 -28 hari). Jika dihitung angka insidensnya, maka di Kabupaten Fakfak Angka kematian Bayi sebesar 4,64 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita sebesar 6,61 per 1.000 kelahiran hidup. Secara nasional berdasarkan SUPAS 2015, angka kematian balita sebesar 25,74 per 1000 kelahiran hidup. Karena perbedaan tahun pengumpulan data, maka angka kabupaten Fakfak tidak dapat dibandingkan dengan angka nasional ini. Namun perbedaan yang sangat jauh ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaklengkapan pencatatan dan pelaporan kematian di Kabupaten Fakfak. Adapun target SDGs tahun 2030 ialah menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 kelahiran hidup.

Mengenai penyebab kematian pada anak di Kabupaten Fakfak menurut Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat penyebab kematian neonatal pada tahun 2019 terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, sepsis, dan lainnya. Tidak ada catatan untuk penyebab kematian pada usia bayi dan balita, namun pada tingkat provinsi penyebab kematian terbanyak pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan adalah diare, disusul oleh pnemonia, malaria dan lainnya. Demikian juga pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) data provinsi menyhebutkan penyebab kematian terbanyak adalah diare dan pneumonia.

F. Cakupan Pelayanan Neonatal

Masa neonatal (0-28 hari) merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini antara lain dengan mengupayakan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.



Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari. Data Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat menyebutkan pada tahun 2018 cakupan KN1 Kabupaten Fakfak sebesar 60%, lebih tinggi dari pada angka rata-rata provinsi yakni 47%.

Indikator lain yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal ini yaitu cakupan pelayanan neonatal komplikasi yang ditangani. Capaian Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 sebesar 69,3%, namun pada tahun-tahun berikutnya menurun cukup tajam, yakni menjadi 10,5% (2017), 31,4% (2018), 31,3% (2019) dan 32,9% (2020). Persentase ini didapat dari jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih dibagi 15% dari jumlah bayi lahir hidup (angka proyeksi kasus neonatal dengan komplikasi).

G. Cakupan Pelayanan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah proporsi bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu masing-masing 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 11 bulan. Cakupan pelayanan ini di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 sebesar 63,6% dan cenderung meningkat selama 3 tahun berikutnya, yakni 81,8%, 97,2% dan 87,6% pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Cakupan ini kembali menurun di tahun 2020 menjadi 71,6%.

H. Imunisasi

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2019, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di Kabupaten Fakfak sebesar 6,3%. Capaian ini lebih rendah daripada angka Provinsi Papua Barat, yakni sebesar 8,2% dan masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%.

I. Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

Menurut Profil Kesehatan Indonesia 2020, di Provinsi Papua Barat belum ada laporan mengenai kampung/ kelurahan yang mencapai Universal



Child Immunization (UCI), yakni kampung/ kelurahan dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 59,8% kampung/ kelurahan yang telah mencapai UCI. Capaian ini sedikit meningkat pada tahun 2017 (62,8%) dan 2018 (63,3%), tetapi menurun lagi sejak tahun 2019 (51,4%) sampai 2020 (52,7%). Capaian ini masih belum mencapai target nasional yakni 78% pada tahun 2020.

J. Pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita adalah proporsi anak usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar usianya. Dalam 5 tahun terakhir cakupan pelayanan balita di Kabupaten Fakfak berfluktuasi, dari 61,2% pada tahun 2016, kemudian menjadi 40,9% di tahun 2017, 51,4% di tahun 2018, 63,47% di tahun 2019 dan 44,2% di tahun 2020.

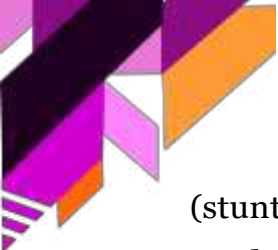
K. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah. Salah satu indikator dalam pelayanan ini adalah cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat. SD/MI yang dicakup di Kab. Fakfak pada tahun 2016 telah mencapai 93,4%, namun capaian ini berfluktuasi dalam 4 tahun berikutnya menjadi 43,3% (2017), 87,5% (2018), 93,0% (2019) dan 76,7% (2020).

2.3.1.2.4 Kondisi Gizi

A. Status Gizi

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), yang disebut *underweight* di Kabupaten Fakfak diperoleh prevalensi sebesar 14,55%. Angka ini terdiri dari 4,22% balita dengan BB sangat kurang, dan 10,33% balita dengan BB kurang. Angka ini cukup tinggi, namun masih lebih baik daripada angka provinsi Papua Barat yakni sebanyak 19,24% Balita *underweight*. Sedangkan berdasarkan pengukuran TB/U untuk menilai anak *stunted* (pendek), berdasarkan Riskesdas 2018 didapatkan angka 18,02% balita stunting di wilayah Kabupaten Fakfak. Prevalensi ini terdiri dari 8,81% balita sangat pendek



(stunting berat) dan 9,21% balita pendek (stunting ringan) Angka ini lebih rendah daripada angka provinsi sebesar 27,75%.

Riskesdas tahun 2018 menemukan prevalensi KEK di Kabupaten Fakfak sebesar 13,83% pada ibu hamil dan 25,34% pada perempuan tidak hamil. Angka-angka ini menunjukkan masih tingginya masalah gizi pada wanita usia reproduktif di Kabupaten Fakfak, meskipun dengan prevalensi yang lebih rendah dibandingkan angka provinsi. Pada tingkat Provinsi, Ibu Hamil mengalami KEK berdasarkan hasil riset yang sama ditemukan sebanyak 23,21%, dan pada Perempuan Tidak Hamil sebanyak 20,83%. *Catatan: tidak tersedia data sebaran gizi buruk per distrik di Kabupaten Fakfak hingga tahun 2020.*

B. Pemantauan Pertumbuhan

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan setiap balita mendapatkan penimbangan minimal 8 kali setahun dan pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun. Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 menyebutkan cakupan balita yang ditimbang di kabupaten Fakfak pada tahun 2018 sebesar 72,0%. Capaian ini lebih baik daripada angka rata-rata provinsi yang mencapai 60,7%. *Catatan: Tidak tersedia laporan mengenai cakupan penimbangan berdasarkan distrik, demikian pula untuk cakupan pengukuran tinggi badan pada balita.*

C. Perawatan Balita Gizi Buruk

Salah satu penanganan yang dilakukan untuk mengatasi gizi buruk pada balita adalah dengan melalui Pemberian makanan tambahan (PMT). PMT untuk balita adalah suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dengan formulasi khusus dan dilengkapi dengan vitamin dan mineral, baik untuk pemulihan atau pemenuhan status gizi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menyebutkan bahwa cakupan perawatan gizi buruk dari tahun ke tahun sejak 2016 hingga 2019 selalu mencapai 100% (tidak tersedia data tahun 2020). Capaian 100% ini mencakup 33 balita gizi buruk pada tahun 2016, 73 balita tahun 2017 dan masing-masing 126 balita pada tahun 2018 dan 2019.

D. Pemberian Kapsul Vitamin A

Berdasarkan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak



2 kali. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU. Hasil Riskesdas Provinsi Papua Barat Tahun 2018 mendapatkan pemberian Vitamin A pada anak usia 6-59 bulan di Kabupaten Fakfak mencapai 75,15%, namun hanya sebagian di antaranya (37,51%) yang sesuai standar. Cakupan pemberian kapsul Vitamin A di Kabupaten Fakfak sedikit lebih tinggi daripada angka rata-rata provinsi yakni 73,91%, namun pemberian yang sesuai standar lebih rendah daripada angka provinsi (43,32%).

2.3.1.2.5 Pengendalian Penyakit

A. Penyakit Menular

Tuberkulosis

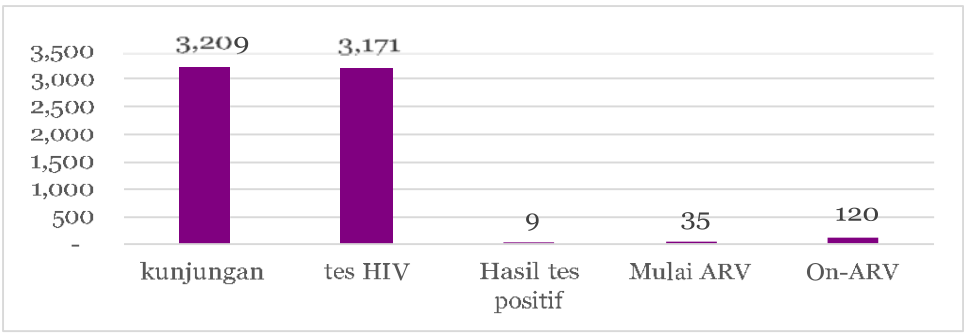
Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan (SDGs). Keberhasilan penanganan tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (*Treatment Coverage*, TC). Data yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak adalah data yang terkait dengan indikator SPM Bidang Kesehatan yaitu cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, yang mencapai 59,63% pada tahun 2018 (Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak 2018) Definisi indikator ini adalah proporsi orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan seluruh kasus terduga TB.

Indikator lainnya yang terkait dengan penemuan kasus adalah Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif. Cakupan indikator ini di Kabupaten Fakfak tergolong rendah, yakni sebesar 12,6% pada tahun 2020. Cakupan ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 12,5% pada tahun 2016, 12,3% tahun 2017 dan 12,4% tahun 2019. Hanya pada tahun 2018 dilaporkan cakupan yang cukup tinggi yakni 35,4%. *Catatan: Tidak tersedia data mengenai cakupan pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Fakfak, namun untuk tingkat provinsi, Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa capaian angka keberhasilan pengobatan TB Provinsi Papua Barat sebesar 60,1% (target nasional 90%).*

Human Immunodeficiency Virus (HIV)- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

Sampai akhir 2020, Provinsi Papua Barat menduduki urutan ke 15 dari 34 provinsi dengan jumlah kasus kumulatif 6.139 orang (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021). Tidak tersedia data jumlah kasus kumulatif untuk Kabupaten Fakfak. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan selama tahun 2020 di Kabupaten Fakfak ditemukan hanya 9 kasus HIV baru. Jumlah orang yang dites dalam periode 1 tahun ini sebanyak 3.171 orang, sehingga *positivity rate*-nya 0,28% (LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2020). Klien yang memulai pengobatan dengan ARV di tahun 2020 sebanyak 35 orang (termasuk kasus yang telah dinyatakan positif pada tahun sebelumnya). Jumlah ODHA yang sedang dalam terapi ARV (on ARV) hingga tahun 2020 berjumlah 120 orang.

Gambar II.23 Jumlah Kunjungan dan Tes HIV serta Pengobatan ARV di Kabupaten Fakfak, 2020



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2020

Pneumonia

Program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Fakfak sangat tinggi. Capaian pada tahun 2020 sebesar 201,3% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya, cakupan penemuan balita pneumonia selalu di atas 100%, yakni 102,2% (2016), 143,3% (2017), 153,5% (2018) dan 235,3% (2019). Dibandingkan dengan cakupan tingkat provinsi yang besarnya 45,7% pada tahun 2020, ada kemungkinan terdapat perbedaan penggunaan variabel penyebut/ denominator pada penghitungan

cakupan balita pneumonia di Kabupaten Fakfak sehingga menyebabkan capaian yang melebihi angka 100%.

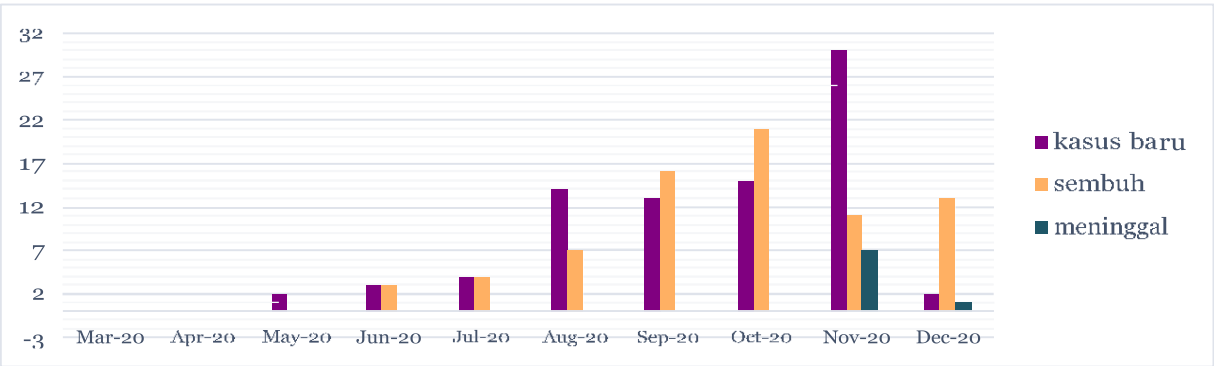
Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Capaian Penemuan Penderita Diare di Kabupaten Fakfak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka tersebut dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berturut-turut adalah: 57,7%, 90.8%, 0%, 79,3% dan 42,3%. Angka tahun 2020 ini lebih tinggi daripada angka rata-rata Provinsi Papua Barat sebesar 10,2%.

Covid-19

Kejadian Luar Biasa yang berawal di China pada akhir 2019 ini hingga Akhir 2020 telah menyebar ke 220 negara di dunia. Tercatat 25 juta orang tercatat telah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan berat ini, dan hampir 2 juta di antaranya meninggal dunia. Kasus Covid-19 pertama di Kabupaten Fakfak muncul pertama kali pada bulan Mei 2020 sebanyak 2 kasus, yang kemudian terus nertambah setiap bulan dengan puncak penambahan kasus pda bulan November 2020.

Gambar II.24 Jumlah Kasus Covid-19 Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal per Bulan di Kabupaten Fakfak, 2020

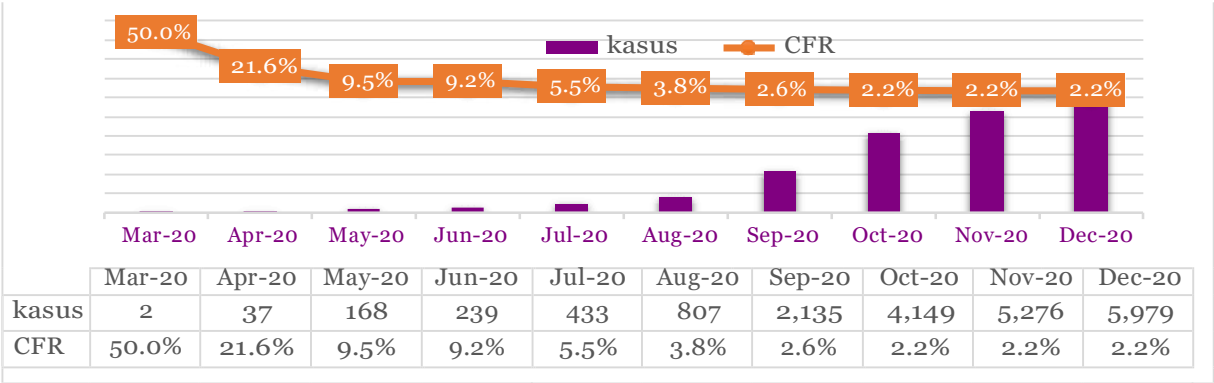


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2021

Secara kumulatif pada tahun 2020 terjadi 83 kasus, dengan jumlah kasus sembuh 75 orang (tingkat kesembuhan 90,4%) dan 8 kasus meninggal (Angka kematian kasus atau Case fatality Rate/ CFR 9,6%). Gambar II.24 menunjukkan perkembangan kasus Covid-19 selama tahun 2020. Pola penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Fakfak serupa dengan kejadian di provinsi maupun secara nasional, dengan puncak kasus pada tahun 2020 di

bulan November. Dibandingkan angka Provinsi Papua Barat, CFR di Kabupaten Fakfak tergolong tinggi. Provinsi Papua Barat hingga akhir 2020 sebesar 2,2%. Gambar II.25 berikut memberikan gambaran penambahan kasus dan CFR di Provinsi Papua Barat.

Gambar II.25 Kumulatif Kasus Covid-19 dan Case Fatality Rate per Bulan di Provinsi Papua Barat, 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional, target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

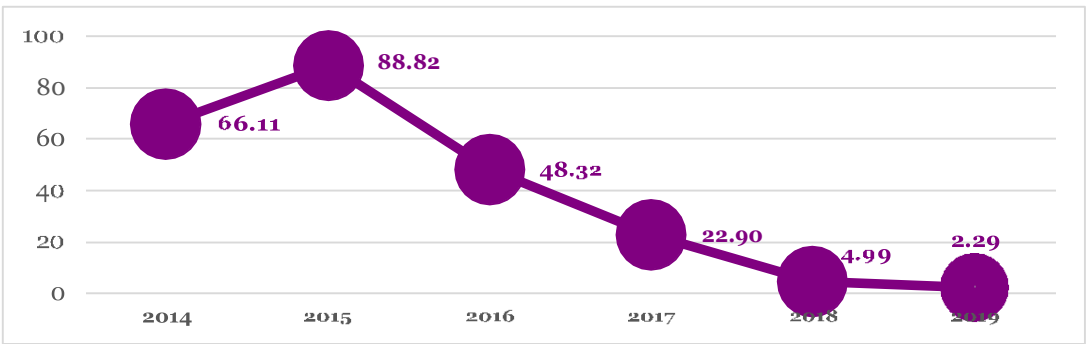
Pada tahun 2020, baru terdapat 3 (tiga) provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Papua Barat merupakan 1 dari 3 provinsi di Indonesia bagian timur yang belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, bersama Provinsi Maluku dan Papua.

Angka Kesakitan Malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk di wilayah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Penanggulangan malaria di Kabupaten Fakfak menunjukkan keberhasilan yang ditunjukkan dengan makin menurunnya API sejak tahun 2015. Belum tersedia angka API di tahun 2020, namun angka API di tahun 2020 diproyeksikan makin rendah dengan melihat kecenderungan penurunannya dalam 5 tahun terakhir. Grafik di bawah ini menunjukkan penurunan API yang dimaksud.

Angka API Kabupaten Fakfak di tahun 2019 lebih rendah daripada angka Provinsi Papua Barat, yang mencapai 7,48 per 1000 penduduk (*Profil*

Kesehatan Indonesia Tahun 2020). Keberhasilan kabupaten Fakfak dalam menanggulangi malaria didapat dari pendekatan utama yakni pemberdayaan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang diintegrasikan kedalam model penguatan kelembagaan kemitraan inklusif yang disebut Malaria Center. Program Malaria Center sebagai wadah menghimpun dan menggerakkan, serta mengkoordinasikan segenap potensi dan sumber daya, kemudian di sinergikan dengan gerakan manajemen dari program unggulan Kabupaten Fakfak yakni Gerakan Membangun Kampung Bercahaya (GERBANG KACA). Gerbang Kaca kemudian dapat menjadi paying terhadap program Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga di Kampung, karena Gerbang Kaca merupakan Gerakan manajemen yang menyatukan seluruh upaya kesehatan yang bersifat multi sektoral.

Gambar II.26 Perkembangan Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk di Kabupaten Fakfak, 2014 - 2019



Sumber: (1) Dinas Kesehatan Kab. Fakfak, 2018
(2) Profil Kesehatan Prov.Papua Barat 2018 dan 2019

Dalam Gerbang Kaca, penanggulangan malaria dilaksanakan melalui inovasi-inovasi program pengendalian malaria, seperti *Participatory Learning and Action* (PLA) atau pemberantasan malaria bersama masyarakat dan Program Bebas Malaria Kampung Bercahaya (Bela Kaca) yang digerakkan oleh Kader atau Juru Malaria Kampung (JMK).

B. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi Penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/ rematik/ encok. PTM merupakan 70% penyebab kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, namun lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun.



Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, menyebutkan jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 167.778 kasus. Penyakit Diabetes Melitus masih menempati proporsi terbesar, yaitu sebesar 40,26%, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Hipertensi sebesar 5,69%. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Papua Barat. Meskipun tidak diperoleh data mengenai prevalensi kasus-kasus PTM di Kabupaten Fakfak, namun tersedia data cakupan pelayanan kesehatan terhadap penyakit yang tercakup dalam SPM Bidang Kesehatan tahun 2018. Tabel II.37 merupakan rangkuman capaian pelayanan 3 penyakit pada tahun 2016-2018.

Tabel II.37 Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi, Diabetes dan Gangguan Jiwa di Kabupaten Fakfak, 2016-2018

No	Penyakit	Cakupan Pelayanan per Tahun		
		2016	2017	2018
1	Hipertensi	13.9	27.8	42.8
2	Diabetes Melitus	9.3	14	20.5
3	Orang dengan Gangguan Jiwa	0	0	16.0

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2018

Upaya Pengendalian PTM dilakukan melalui pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular di puskesmas. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Sampai tahun 2020, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas berjumlah 70 kabupaten/kota dari 103 yang ditargetkan, atau hanya 13,62% dari seluruh kabupaten/kota. Di Provinsi Papua Barat, belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas (Profil Kesehatan Indonesia 2021).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Perkembangan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.38. Berdasarkan informasi yang disajikan didalam tabel tersebut, proporsi panjang jalan baik mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 menuju tahun 2017, namun setelahnya berangsur-angsur mengalami kenaikan meskipun sampai dengan tahun 2020 masih menunjukkan angka proporsi yang lebih rendah dari tahun 2016. Apabila diamati dari data pada tahun 2016 menuju 2017, proporsi jalan dengan kondisi sedang rusak justru meningkat cukup

tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut, terdapat penurunan kualitas jalan yang semula berkondisi baik menjadi kondisi sedang rusak. Dengan kata lain, kurangnya perawatan jalan kabupaten.

Tabel II.38 Panjang Jaringan Jalan berdasarkan Kondisi di Fakfak, 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019*	2020*
1	Kondisi Baik	km	328.558	238.625	253.848	177.711	191.278
2	Kondisi Sedang Rusak	km	10.858	91.148	98.148	1.706	28.787
3	Kondisi Rusak	km	26.813	30.819	30.819	34.239	21.731
4	Kondisi Rusak Berat	km	380.945	354.396	332.173	288.418	275.878
TOTAL		km	747.174	714.988	714.988	502.074	517.674
Persentase Jalan Kondisi Baik		%	43,97	33,37	35,50	35,40	36,95

**Perlu menjadi catatan ada terdapat indikasi basis sumber data yang berbeda untuk tahun 2019 dan tahun 2020 jika dilihat dari perubahan total keseluruhan panjang jalan*
 Sumber: Fakfak Dalam Angka 2021

2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk merupakan indikator yang dapat mengindikasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Adapun Tabel II.39 menunjukkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Fakfak. Secara umum, nilai rasio menunjukkan angka yang relatig konstan, yaitu dengan nilai berada di sekitar angka 9. Artinya, setiap 1 km jalan di Kabupaten Fakfak, melayani sekitar 9 penduduk.

Tabel II.39 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panjang Jalan (km)	747.174	714.988	714.988	714.988	714.988
2	Jumlah Penduduk	74.772	76.102	77.381	78.686	87.894
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		9,99	9,40	9,24	9,09	8,13

Sumber: Buku Profil Kabupaten Fakfak 2021

2.3.1.3.3 Jalan Penghubung dari Ibukota Distrik ke kawasan Permukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4)

Indikator ini ingin menggambarkan akses transportasi, lebih spesifiknya menggambarkan keterjangkauan akses kendaraan roda 4 terhadap permukiman penduduk. Apabila Kawasan permukiman penduduk bisa di akses oleh kendaraan roda 4, maka penduduk bisa lebih mudah untuk bermobilitas, dan begitu sebaliknya. Mobilitas merupakan kegiatan yang amat ditentukan oleh sarana transportasi (jalan), dan sangat menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan



perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan perlu di bangun merata terhadap seluruh Kawasan, termasuk pedesaan. Tabel II.40 akan menunjukan persentase permukiman yang dapat dilakui kendaraan roda 4.

Tabel II.40 Persentase Kawasan permukiman yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kawasan Permukiman Penduduk yang belum dilalui Kendaraan Roda 4	3	3	3	3	3
2	Jumlah Seluruh Kawasan Permukiman Penduduk	17	17	17	17	17
Persentase		17,65	17,65	17,65	17,65	17,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.3.4 Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Indikator ini ingin melihat performa dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Hal tersebut dilakukan dengan serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya, serta upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dalam keadaan baik. Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.41. Dapat terlihat pada tabel tersebut bahwa nilai persentase masih relatif rendah, dan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018 menuju tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten perlu melakukan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi.

Tabel II.41 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	15	20	25	35	35
2	Luas Irigasi Kabupaten	130	130	130	230	230
Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		11,5	15,3	19,2	15,2	15,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.3.5 Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Untuk mempertahankan sempadan sungai dapat dilakukan:

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar tidak bertanggul dan 50 meter di kiri dan kanan anak sungai tidak bertanggul harus berada di luar permukiman.
- b. Untuk sungai bertanggul di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter atau disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
- c. Pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di Kabupaten Fakfak

adalah terdistribusi di seluruh distrik di Kabupaten Fakfak yang terdapat sungai dan anak sungainya.

Dan khususnya pada daerah sempadan sungai pada kabupaten fakfak yang terbagi pada distrik-distrik tidak terdapat bangunan liar sehingga daerah sekitar sungai dapat terjaga secara baik.

2.3.1.3.6 Jaringan Drainase

Jaringan drainase merupakan prasarana penting untuk memastikan limpasan air permukaan akan dialirkan ke badan air sehingga menghindari terjadinya genangan air dan banjir. Indikator ini berusaha untuk menyajikan data panjang drainase tersumbat, dimana keadaan ini akan menghambat aliran air. Perawatan jaringan drainase dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penyumbatan. Tabel II.42 menunjukkan persentase drainase tersumbat dari tahun 2016 menuju tahun 2020.

Tabel II.42 Persentase Drainase dalam kondisi Tersumbat Kab.Fakfak

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	15	20	25	35	35
2	Panjang Seluruh drainase (km)	130	130	130	230	230
3	Persentase Drainase tersumbat (%)	11,5	15,3	19,2	15,2	15,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.3.7 Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi

Sistem sanitasi mencakup pengolahan air limbah perlu dimaksimalkan dalam pelayanan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Limbah manusia seperti urine dan feses dan limbah-limbah rumah tangga dapat menjadi sumber masalah kesehatan bila tidak diolah dalam sistem yang baik. Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari tahun 2016-2020 dapat dilihat di Tabel II.43 sebagai bahan komparasi, tabel tersebut juga menyajikan data untuk Provinsi Papua Barat. Meskipun mengalami peningkatan proporsi rumah tinggal yang bersanitasi yang cukup tinggi selama kurun waktu lima tahun dari 45,49%ke 75,60%, dapat dilihat bahwa fakfak masih tertinggal dari rata-rata persentase rumah tinggal yang bersanitasi di Papua Barat.

Tabel II.43 Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Fakfak	45,49	48,47	65,83	68,25	75,60
Papua Barat	64,55	65,3	73,95	76,39	78.71

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2016-2021



2.3.1.3.8 Persentase Penduduk dengan Sumber Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Salah satu pendekatan untuk melihat akses penduduk terhadap sumber air bersih adalah dengan melihat data jumlah pelanggan air bersih, baik dalam satuan rumah tangga (Tabel II.44) maupun satuan penduduk (Tabel II.45). Akses penduduk terhadap terhadap air bersih masih sangat rendah, bahkan hanya mencapai 7,02 persen saja pada tahun 2020.

Tabel II.44 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Air Bersih Kab. Fakfak

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan Pengguna Air Bersih	5.169	5.345	5.345	5.952	6.254
2	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	21.988	25.803	20.224	21.435	23.020
3	Persentase	23,5	20,71	26,42	27,76	27,16

Sumber: Fakfak Dalam Angka 2021

Tabel II.45 Persentase Penduduk Pelanggan Air Bersih Kab. Fakfak

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan yang Mendapatkan Akses Air Minum	5.169	5.345	5.345	5.952	6.254
2	Jumlah Penduduk	76.102	77.381	78.686	87.894	89.015
3	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	6,79	6,9	6,79	6,77	7,02

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

Selain ketersediaan air bersih, indikator lain yang relevan adalah mengukur akses masyarakat terhadap air minum layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum, air minum merupakan air yang layak diminum dengan atau tanpa proses pengeolahan yang memenuhi syarat Kesehatan. Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber air bersih dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Tabel II.46 akan memperlihatkan perbandingan data sumber air minum antara tahun 2019 dan tahun 2020, sementara Gambar II.27 akan mengilustrasikan proporsi penggunaannya. Berdasarkan laporan Susenas, penggunaan sumber air minum dari air hujan masih mendominasi disebabkan oleh belum terjamahnya wilayah-wilayah

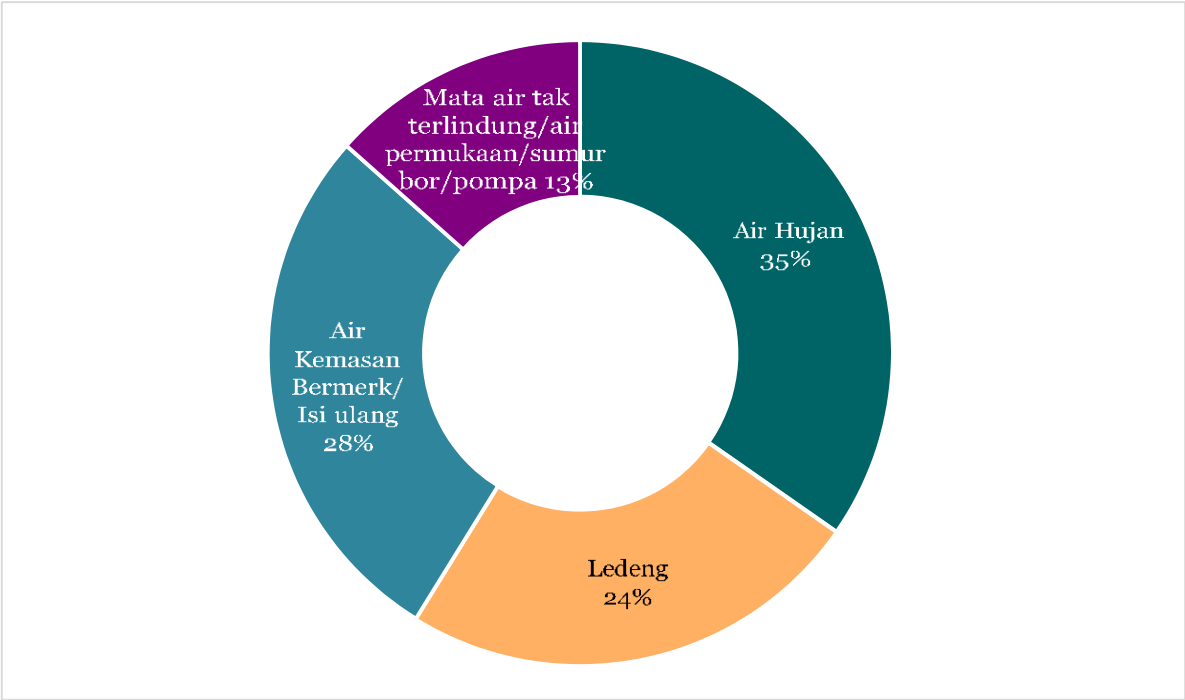
tertentu oleh jaringan pipa PDAM. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan air minum dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Tabel II.46 Sumber Air Minum Kab. Fakfak Tahun 2018 dan Tahun 2020

Sumber Air	2018	2019	2020
Air Hujan	36,97	36,92	34,69
Ledeng	28,27	28,87	24,12
Air Kemasan Bermerk/Isi ulang	23	27,65	27,74
Mata air tak terlindung/air permukaan/sumur bor/pompa	10,79	6,56	13,45

Sumber: Susenas 2018, 2019, 2020

Gambar II.27 Persentase penggunaan sumber air minum Kab. Fakfak Tahun 2020



Sumber: Susenas 2020

2.3.1.4.9 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
Sesuai dengan arah tata ruang Kabupaten Fakfak khusus berkaitan dengan sarana prasarana pemakaman bahwa jumlah areal pemakaman umum Kabupaten Fakfak adalah sebanyak 3 TPU sedangkan TPBU sebanyak 25 TPBU dan Tempat Pemakaman Khusus sebanyak 1 TPK.

2.3.1.4.10 Penataan Ruang

Urusan penataan ruang salah satunya meliputi pengukuran indikator yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merupakan ruang yang memiliki banyak fungsi, misalnya pencegahan banjir, pemenuhan sarana dan prasarana sosial, pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanagh, dan lain sebagainya. Indikator yang perlu diukur



berkaitan dengan RTH adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, dan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Luas RTH di Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan signifikan, dari 98,65 Ha pada Tahun 2016 menjadi 594,71 Ha pada tahun 2020. Luas Wilayah ber HPL/HGB tidak diketahui luasannya, sehingga indikator untuk rasio ruang terbuka hijauh per satuan wilatah ber HPL/HBG tidak dapat diketahui Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Fakfak berdasarkan data resmi hanya menunjukkan sebesar 4,15% saja, dengan kata lain masih dibawah standar minimal 20%.

Tabel II.47 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	98,65	N/A	N/A	N/A	594,71
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Luas Wilayah (Ha)	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (%)	0,68	-	-	-	4,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4.1 Persentase Rumah Layak Huni

Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dasar. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehatm serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam rangka melihat capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah, dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas tempat hunian. Tabel II.48 Menunjukkan data rasio rumah layak hni pada Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan rasio rumah layak huni pada Tabel II.48 adalah dengan membagi rumah layak huni per satuan KK. Apabila diasumsikan bahwa 1 KK menghuni 1 rumah, maka rasio rumah layak huni adalah 15.19 persen saja. Hal ini memberikan informasi bahwa cakupan rumah layak huni di Kabupaten Fakfak masih sangat rendah.

Tabel II.48 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

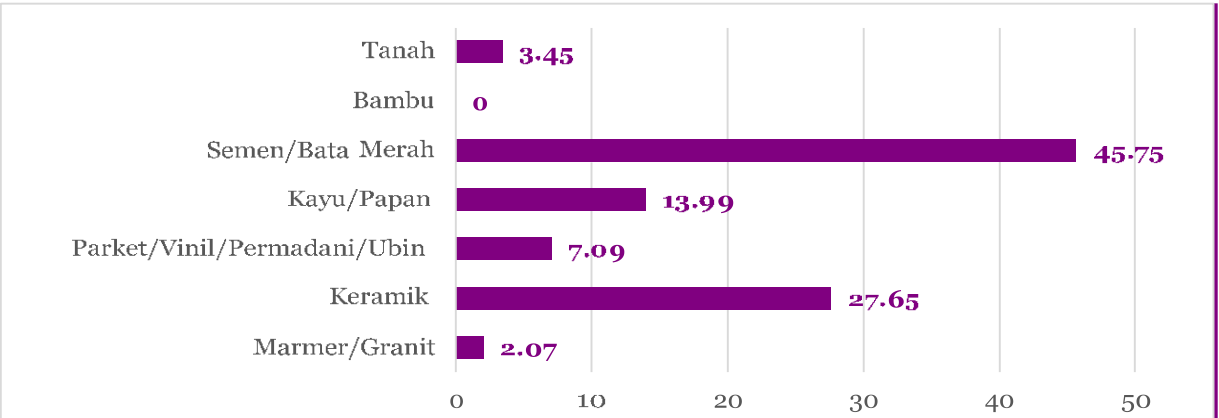
NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Layak Huni	-	-	--	-	13.527
2	Jumlah Penduduk (KK)	-	--	-	-	89.015
3	Rasio Rumah Layak Huni		-		-	15,19

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

Berdasarkan versi penilaian dari BPS, rumah layak huni ditinjau dari kondisi rumah tinggal, yaitu; (1) Persentase rumah tangga menurut jenis

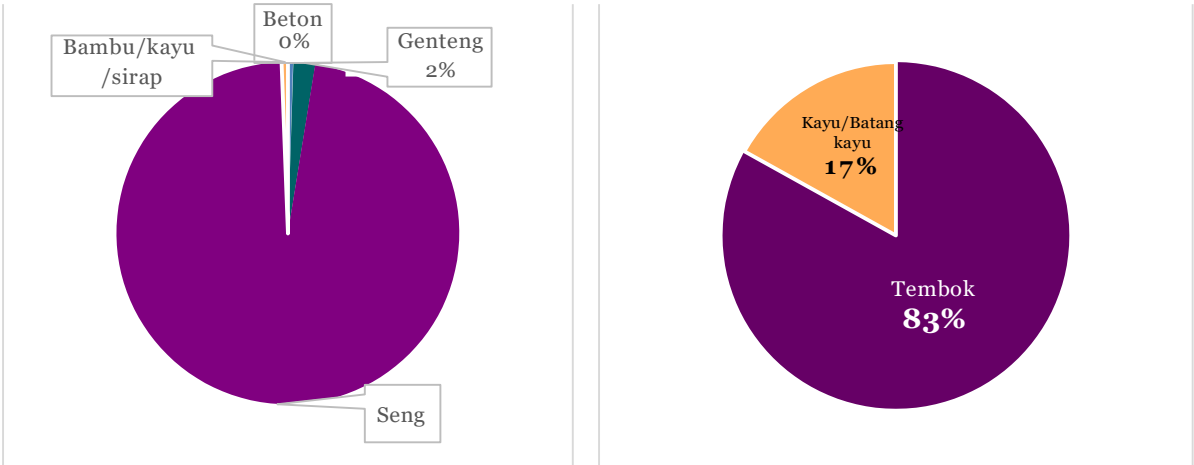
lantai terluas (Gambar II.28); (2) Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas (Gambar II.29); dan (3) Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas (Gambar II.29). Dengan kata lain, tiga faktor digunakan dalam penilaian kondisi rumah adalah atap, dinding dan lantai. Kondisi ketiga faktor penentu kelayakan rumah tersebut akan didukung oleh data pada 2018.

Gambar II.28 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Fakfak tahun 2018



Sumber: Susenas, 2018

Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap (Kiri) dan Dinding (Kanan) Terluas di Kabupaten Fakfak tahun 2018



Sumber: Susenas, 2018

Syarat lantai pada rumah sehat adalah tidak berdebu pada musim kemarau, dan tidak lembab pada musim hujan. Di Kabupaten Fakfak, jenis lantai didominasi oleh jeni semen/bata merah, sejalan dengan keadaan di Papua Barat secara umum. Rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dianggap tidak layak huni. Masih adanya rumah tangga yang memiliki lantai tanah di Kab. Fakfak perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, hampir seluruh penduduk Kabupaten Fakfak menempati rumah yang atapnya terbuat dari seng (95,94%). Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah rumah dengan jenis atap

bambu/kayu/sirap. Untuk jenis dinding terluas yang digunakan sebagai tempat tinggal penduduk adalah tembok (82,43%). Kabupaten Fakfak termasuk kabupaten di Papua Barat yang memiliki persentase rumah dengan dinding tembok yang tinggi. Secara umum dilihat dari jenis dinding dan atap, rumah di Kabupaten Fakfak dapat dikatakan layak.

2.3.1.4.2 Lingkungan Pemukiman Kumuh

Selain rumah layak huni, permukiman kumuh merupakan permasalahan yang tidak bisa terlepas dari perkembangan sebuah daerah. Tanpa adanya penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat, maka isu permukiman kumuh akan muncul. Tabel II.49 menunjukkan data persentase luas kawasan kumuh di Kab. Fakfak. Tahun 2019 dan tahun 2020, luasan Kawasan permukiman kumuh di Kab. Fakfak adalah 0,9 Ha.

Tabel II.49 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan kumuh(ha)	-	-	-	129,5	129,5
2	Luas Wilayah(Km2)	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
3	Persentase	-	-	-	0,9	0,9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.4.3 Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Kondisi permukiman di Kabupaten Fakfak pada umumnya mengikuti pola mengelompok, disamping ada juga yang mengikuti pola linier mengikuti pola jaringan jalan. Lokasi kawasan permukiman di Kabupaten Fakfak pada umumnya terkonsentrasi di pusat pemerintahan baik pusat pemerintahan distrik maupun kampung. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah secara fisik merupakan dataran tinggi dengan kemiringan >40%. Kawasan permukiman di Fakfak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. **Permukiman perkotaan**, terdapat di Distrik Fakfak, Pariwari dan Fakfak Tengah. Pola permukiman pada kawasan ini adalah pola mengelompok yang pada umumnya mengikuti kemiringan lahan yang mengarah ke wilayah pesisir. Tingkat kepadatan permukiman pada kawasan perkotaan adalah tinggi, dimana batas antar rumah sangat dekat dan sangat jarang sekali ada ruang terbuka.
- b. **Permukiman perkampungan** yang terdapat pada Distrik Karas, Teluk Patipi, Furwagi, Fakfak Barat, Wartutin, Kramomongga, Kayauni, Kokas, Mbamdandara, Arguni, Bomberay, Tomage, Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah. Pola permukiman kawasan perdesaan adalah pola mengelompok dan linier mengikuti jaringan jalan. Pada permukiman perdesaan ini sangat berbeda dengan permukiman perkotaan, dimana

permukiman perdesaan pada umumnya daerah yang relatif datar dengan tingkat kepadatan bangunan rendah. Disamping itu ada peruntukan ruang terbuka yang digunakan untuk pemanfaatan tanaman produktivitas misalnya tanaman hortikultura dan apotik hidup.

Dukungan kondisi permukiman masyarakat dalam menunjang aktivitas tersedia infrastruktur dan utilitas lingkungan walaupun secara keseluruhan belum terpenuhi. Salah satu utilitas lingkungan permukiman yang menjangkau pelayanan masyarakat adalah penerangan rumah tangga yang dominan menggunakan PLN. Dilihat dari data pemenuhan kebutuhan penerangan masyarakat telah terjadi peningkatan. Demikian pula terhadap infrastruktur lainnya sejalan dengan perkembangan permukiman.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan petugas perlindungan masyarakat atau linmas adalah waga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu dalam memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan pelayanan minimal, artinya capaian pelayanan idealnya perlu mencapai 100%.

2.3.1.5.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP memiliki tugas untuk *menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*. Salah satu indikator untuk mengukur cakupan peran linmas adalah dengan menghitung Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung per 10.000 penduduk, yang dapat dilihat pada Tabel II.50. Rasio jumlah Satpol PP di Kabupaten Fakfak ternyata justru menurun dari tahun 2016 ke 2020, karena kenaikan jumlah penduduk justru diikuti dengan menurunnya jumlah Satpol PP.

Tabel II.50 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak, 2016 - 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah polisi pamong praja	199	206	203	201	193
Jumlah penduduk	76.102	77.381	78.686	87.894	89.015
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	26,15	26,62	25,79	22,86	21,68
Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3	20 kali	25 kali	25 kali	27 kali	30 kali

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Fakfak, 2021



2.3.1.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

Tingkat penyelesaian K3 merupakan indikator yang melihat langsung cakupan penyelesaian pelanggaran K3. Jenis pelayanan ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seperti yang tertera pada Tabel II.51 tingkat penyelesaian K3 sudah mencapai 100% setiap tahunnya, yang berarti sudah memenuhi SPM.

Tabel II.51 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	5	10	15	10	17
2	Jumlah pelanggaran K3	5	10	15	10	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Pelayanan bencana kebakaran kabupaten juga merupakan SPM, dimana cara mengukur indikator ini adalah dengan membagi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dengan luas wilayah kabupaten/kota. Namun, belum ada data yang menunjang perhitungan tersebut. Namun , Tabel II.52 menunjukkan data jumlah mobil pemadam kebakaran, dimana selama tahun 2019 dan 2020 hanya tersedia 1 unit saja. Tentu saja unit jumlah tersebut belum cukup untuk dapat melayani jangkauan wilayah dengan maksimal.

Tabel II.52 Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab. Fakfak

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah mobil pemadam kebakaran	N/A	N/A	N/A	1	1

Sumber: Kantor Satpol PP Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.5.4 Tingkat Waktu Tangga Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sesuai dengan SPM, tingkat waktu tanggap di Wilayah Manajemen Kebakaran seharusnya dapat ditangani dalam kurun waktu maksimal 15 menit saja. Dapat dilihat pada Tabel II.53 bahwa waktu tindakan pemadam kebarakan di Fakfak rata-rata bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit.

Tabel II.53 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
2	Jumlah kejadian kebakaran	7	2	14	27	2

Sumber: BPBD Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut PERDA dan Peraturan Kepala Daerah. Apabila terjadi pelanggaran PERDA dan peraturan Kepala Daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Tercatat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.54 Persentase Penegakkan PERDA Tahun 2016-2020 Kabipaten Fakfak adalah 100%.

Tabel II.54 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	5	10	15	10	17
2	Jumlah pelanggaran PERDA	5	10	15	10	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol Kab. Fakfak, 2020

2.3.1.6 Sosial

2.3.1.6.1 Sarana sosial

Sarana sosial merupakan elemen penting dalam menunjang kegiatan masyarakat Kabupaten Fakfak untuk keperluan kemasyarakatan dalam bidang sosial, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis), maupun korban bencana baik secara materil maupun psikis. Tabel II.55 menunjukkan jumlah sarana sosial berupa panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.55 diketahui bahwa sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Fakfak masih terbatas yaitu 4 unit panti asuhan. Dalam hal ini, Kabupaten Fakfak belum memiliki panti jompo maupun panti rehabilitasi.

Tabel II.55 Sarana Sosial Kabupaten Fakfak Tahun 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panti Asuhan	4	4	4	4	4
2	Panti Jompo	-	--	-	-	--
3	Panti Rehabilitasi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kab. Fakfak, 2021

2.3.1.6.2 Penanganan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah peroreingan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial. Penanganan PMKS dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, tertib,



efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Tabel II.56 diketahui persentase PMKS yang menerima bantuan sosial tahun 2019 adalah 100% dan mengalami penurunan menjadi 91,66% pada 2020. Meskipun demikian, persentase penanganan PMKS di Kabupaten Fakfak masih sangat rendah yaitu 1,73% (tahun 2017); 3,01% (tahun 2018); 3,7% (tahun 2019); 0,91% (tahun 2020).

Tabel II.56 Penanganan PMKS di Kabupaten Fakfak Tahun 2016- 2020

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	-	-	-	187	187
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	164	187	204	187	204
	Persentase	-	-	-	100	91,66
Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	-	21	36	50	2
	Jumlah PMKS yang ada	265	1.209	1.198	1.351	219
	Persentase	-	1,73	3,01	3,7	0,91

Sumber: Dinas Sosial Kab. Fakfak, 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

2.3.2.1.1 Pencari kerja yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja (dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten). Berdasarkan informasi pada Tabel II.57 persentase pencari kerja yang ditempatkan masih sangat rendah yaitu dibawah 20% saja.

Tabel II.57 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan	127	209	266	-	-
2	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	945	1.073	2.170	-	-
3	Persentase	13,49	19,47	12,25	-	-

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.3.2.1.2 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Indikator ini ingin melihat kualitas sumber daya manusia yang bekerja di daerah, dengan asumsi semakin banyak jumlah pekerja yang lulusan S1/S2/S3, maka semakin baik kualitasnya. Seperti yang dilihat pada Tabel II.58 proporsi tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 di Fakfak berkisar 40%.

Tabel II.58 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk usia <15 thn + usia >65	-	31.921	28.705	27.878	28.010
2	Jumlah penduduk usia 15-64	-	76.662	58.319	60.162	60.293
3	Rasio	-	41,63	49,22	46,33	46,45

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

2.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

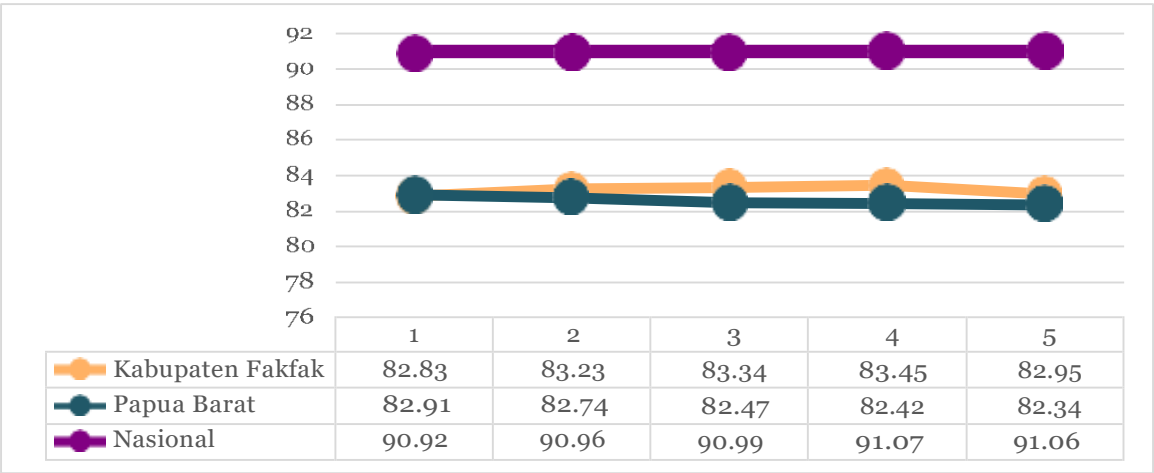
Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender di Kabupaten Fakfak dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Gambar II.30 akan memperlihatkan perbandingan IPG antara Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dan Nasional dari Tahun 2016-2020. Berdasarkan gambar tersebut, dapat terlihat bahwa Kabupaten Fakfak memiliki IPG yang lebih rendah dibandingkan dengan Papua Barat, namun pada akhirnya menyusul pada Tahun 2020. Namun, baik Kabupaten Fakfak maupun Papua Barat masih jauh dibawah rata-rata IPG nasional.

Jumlah penduduk perempuan yang besar merupakan potensi sumber daya manusia dalam mewujudkan kemakmuran di daerah. Kaum perempuan tidak hanya berpotensi mendidik generasi muda yang berkualitas, namun perempuan yang berkualitas juga secara nyata akan meningkatkan kemakmuran. Meskipun pembangunan kesetaraan dan keadilan gender telah diupayakan di seluruh wilayah di Indonesia, namun tidak semua wilayah dapat mencapai tingkat keberhasilan yang sama. Capaian tersebut sangat tergantung pada sumber daya manusia, keterlibatan pemerintah daerah dan



masyarakat, serta pengaruh sosial kultural yang menyertai kehidupan masyarakat di suatu daerah.

Gambar II.30 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Fakfak 2016-2020

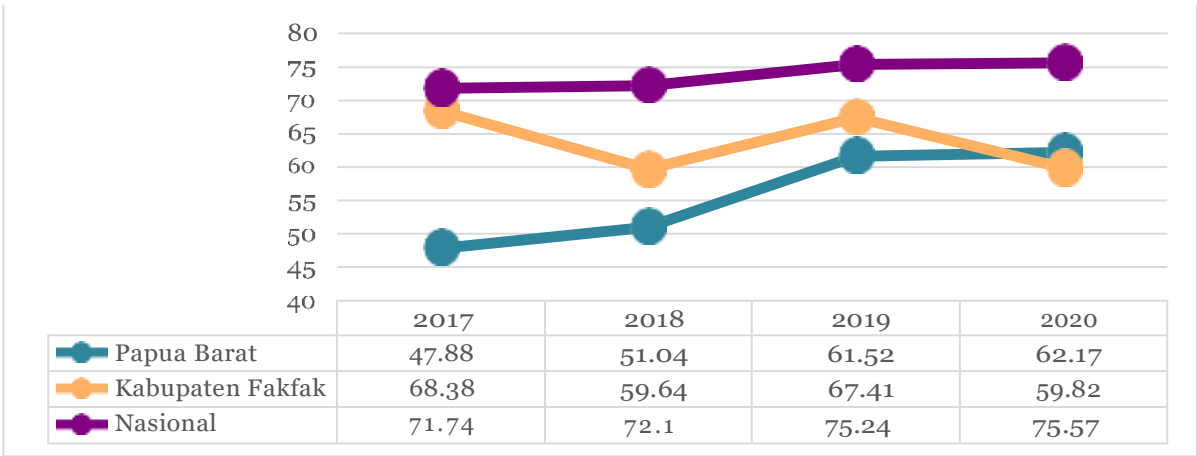


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2021

2.3.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi. Gambar II.31 akan memperlihatkan perbandingan IDG antara Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan Nasional. Kabupaten Fakfak memiliki nilai IDG yang relatif lebih tinggi dari pada Papua Barat, tapi masih tertinggal dibawah nasional.

Gambar II.31 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Fakfak 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2021

2.3.2.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini mengukur pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan. Indikator ini penting untuk melihat partisipasi perempuan di dalam lembaga pemerintah, yang merepresentasikan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Berdasarkan Tabel II.59 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020. Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah menunjukkan trend yang positif selama lima tahun kebelakang, dan mencapai angka 45,33% pada tahun 2020.

Tabel II.59 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.060	2.456	2.599	2.557	2.659
2	Jumlah pekerja perempuan	5.345	6.607	5.750	5.819	5.865
3	Persentase	38,54	37,17	45,2	43,94	45,33

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.2.4 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di Lembaga swasta secara umum lebih tinggi dari pada partisipasi di Lembaga pemerintah. Namun, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Tabel II.60 partisipasi perempuan di Lembaga swasta justru mengalami trend menurun selama lima tahun terakhir.

Tabel II.60 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	3.285	4.151	3.151	3.262	3.206
2	Jumlah pekerja perempuan	5.345	6.607	5.750	5.819	5.865
3	Persentase	61,45	62,82	54,8	56,05	54,66

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.2.5 Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 rumah tangga. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan



memenuhi hak-haknya. Tabel II.61 akan memberikan data rasio KDRT di Kabupaten Fakfak. Dari 1000 rumah tangga, terhitung ada sebanyak 1,47 kasus KDRT yang terlapor pada Tahun 2020.

Tabel II.61 Rasio KDRT Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	38	20	8	26	34
2	Jumlah Rumah Tangga	21.988	25.803	20.224	21.435	23.020
3	Rasio KDRT	1,73	0,77	0,39	1,21	1,47

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.2.6 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Berdasarkan data penyebaran Tenaga Kerja di kabupaten Fakfak presentasi jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 0% dimana angka partisipasi tenaga kerja yang bekerja baik disektor formal maupun informal di kabupaten Fakfak pada umumnya sesuai dengan umur angkatan kerja yang diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan.

2.3.2.2.7 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan kerja perempuan Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.62. Angkatan kerja perempuan di Kabupaten Fakfak memberikan angka yang cukup besar, namun sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, perempuan Angkatan kerja yang bekerja porsinya masih sangat kecil dan perkembangannya masih berfluktuatif sehingga belum memberikan trend yang positif.

Tabel II.62 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	3.398	4.434	5.635	17.539	11.217
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	29.933	12.731	24.662	36.540	40.220
3	Persentase	11,35	34,82	22.85	48	27,89

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.2.8 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Aparatur pemerintah/masyarakat dilatih dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana. Di kabupaten Fakfak, telah tercapai 100% tindak lanjut tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh petugas yang berwenang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.63.

Tabel II.63 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	38	21	12	35	68

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	38	21	12	35	68
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.3 Pertanian

2.3.2.3.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sesuai dengan hak kepemilikan lahan yang ada di kabupaten Fakfak sebagian besar merupakan hak milik adat/ulayat yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian status hukum lahan yang sebagian besar masih bermasalah. Untuk itu kedepan dalam rangka penyelesaian status kemilikan lahan maka pemerintah Kabupaten Fakfak akan melakukan pemetaan terhadap luas lahan yang dimiliki baik oleh individu maupun juga komunal. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong investasi di daerah dimana salah satu syarat utama adalah adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah atau lahan yang dimiliki.

2.3.2.3.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus sengketa terhadap tanah dapat timbul oleh beberapa alasan, seperti perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan tanah. Sengketa tanah negara yang tercatat oleh dinas dapat diselesaikan 100% selama lima tahun ke belakang.

Tabel II.64 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	10	12	3	13	1
2	Jumlah kasus yang terdaftar	10	12	3	13	1
3	Presentase	100	100	100	100	100

Sumber: Data DLHP 2021

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

2.3.2.4.1 Indeks Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting yang perlu dibahas di Kabupaten Fakfak, ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Fakfak. IKLH merupakan hasil komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berikut merupakan



nilai IKLH untuk Kabupaten Fakfak berdasarkan dari Buku IKLH tahun 2019.

Tabel II.65 IKLH Kabupaten Fakfak Tahun 2019

Komponen Lingkungan	Nilai Indeks
Kualitas Air	80,00
Kualitas Udara	80,39
Kualitas Tutupan Lahan	86,90
IKLH	82,88

Sumber: Buku IKLH Papua Barat, 2019

2.3.2.4.2 Persentase Penanganan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan hasil produksi dari kegiatan manusia yang perlu dikelola secara holistic dari hulu sampai hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Apabila tidak tertangani dengan baik, sampah tidak hanya akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, tetapi juga akan berdampak buruk bagi lingkungan. Dalam lingkungan yang padat penduduk, seringkali sampah menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Maka dari itu, penting untuk mengukur ketercapaian proporsi sampah yang sudah ditangani atau dikelola. Paling tidak, bentuk pengelolaan dalam hal ini minimal adalah dengan pola sentralisasi, yaitu dengan pelaksanaan system open dumping di TPA. Tabel II.66 akan memberikan informasi mengenai persentase volume sampah yang telah ditangani di Kabupaten Fakfak.

Tabel II.66 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sampah yang ditangani	22.464 m ³	26.500 m ³	31.642 m ³	30.206 m ³	30.888 m ³
2	Jumlah Volume Produksi Sampah	30.732 m ³	26.500 m ³	31.642 m ³	30.206 m ³	30.888 m ³
3	Presentase	73.1 %	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.4.3 Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan sentralistik, maka perlu ada titik-titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersebar di wilayah, utamanya di permukiman penduduk. Di Kabupaten Fakfak, selama lima tahun terakhir terdapat 64 jumlah titik TPS dengan kapasitas total seluruhnya dapat menampung 155,2 m² sampah. Tabel II.67 akan menyajikan data rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Dengan

meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun namun tidak diikuti dengan penambahan TPS, maka nilai rasio kian menurun. Artinya, untuk mengikuti kapasitas daya tampung sampah di TPS, produksi maksimum sampah untuk setiap penduduk akan semakin kecil.

Tabel II.67 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPS	64	64	64	64	64
2	Jumlah Daya Tampung TPS	155,2 m ²	155,2 m ²	155,2 m ²	155,2 m ²	155,2 m ²
3	Jumlah Penduduk	76.102	77.381	78.686	87.894	89.015
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	2,04	2,01	1,97	1,76	1,74

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.4.4 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal

Analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup”. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan merupakan erbandingan antara pengawasan terhadap elaku usaha terkait pelaksanaan dokumen lingkungan dengan pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan dinyatakan dalam persentasi (Tabel II.68). Di Kabupaten Fakfak, capaian cakupan untuk indikator ini mengalami trend menurun, dan hanya mencapai 50% saja ada tahun 2020.

Tabel II.68 Persentase Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang telah di awasi	3	2	0	1	1
2	Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL	4	3	0	2	2
3	Presentase	75%	75%	0%	50%	50%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.4.5 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu uaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyarakat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi. Pada tahun 2020, terdapat satu kasus lingkungan dan diselesaikan oleh Pemda.



Tabel II.69 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kab. Fakfak

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Lingkungan yang diselesaikan Pemda	-	-	-	-	1
Jumlah Kasus Lingkungan yang ada	-	-	-	-	1
Presentase	-	-	-	-	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang urusan ini merupakan salah satu urusan penting dalam tata pemerintahan daerah maupun nasional. Dengan memiliki database yang lengkap dan akurat, nantinya para perumus kebijakan akan menggunakan database ini sebagai acuan perumusan dan perencanaan pembangunan agar tepat sasaran.

2.3.2.5.1 Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk

Penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas. Perkembangan rasio penduduk berKTP di Kabupaten Fakfak selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang sangat positif, dan mencapai angka 91,27% pada tahun 2020 yang sebelumnya hanya sebesar 45,84% saja tahun 2016 (lihat Tabel II.70).

Tabel II.70 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Kab. Fakfak

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk usia >17 yang ber KTP	29.955	49.126	44.854	50.395	52.967
Jumlah Penduduk usia >17	65.350	76.326	57.050	56.959	58.036
Rasio	45,84	64,36	78,62	88,48	91,27

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.5.2 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat, seperti Pendidikan dan Kesehatan. Dengan kata lain, akta lahir merupakan dokumen kependudukan yang sangat mendasar bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tabel II.71 akan menunjukkan persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Fakfak.

Tabel II.71 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	20.351	31.194	38.479	36.599	27.847
2	Jumlah penduduk	76.102	77.381	78.686	87.894	89.015
3	Persentase	26,74	40,31	48,9	41,64	31,28

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.5.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akta nikah adalah dokumen yang penting dalam sebuah keluarga. Pencatatan pernikahan dianggap sah secara hukum oleh negara apabila ada akta nikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, hak untuk mendapatkan akta lahir bagi anak juga bisa di proses apabila orang tua memiliki akta nikah. Oleh karena itu, sangat penting melihat kinerja pemerintah dalam menerbitkan akta nikah. Tabel II.72 akan menunjukan capaian untuk indikator rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020.

Tabel II.72 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan nikah yang berakte nikah	6.411	14.081	12.771	14.250	14.650
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	40.800	41.493	32.396	33.038	33.478
Rasio	15,71	33,93	32,39	43,13	43,76

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.5.4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Fakfak telah di gunakan pada Tahun 2008 sedangkan penerapan KTP elektronik (E-KTP) di gunakan pada Tahun 2012 dengan jumlah pemilik KTP pada Tahun 2020 sebanyak 52.967 KTP dengan perbandingan jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 87.894 jiwa. Untuk pembuatan KTP berbasis NIK pada Tahun 2020 tetap berlanjut dengan target seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang berusia >17 tahun ke atas dan yang sudah menikah dapat memiliki KTP elektronik (E-KTP).

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2.3.2.6.1 Indeks Desa Membangun (IDM)

Menurut Undang–undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa/kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata sosialnya.



Tabel II.73 Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

NO	KLASIFIKASI	RENTANG NILAI IDM
1	kampung sangat tertinggal	$0,270 \leq \text{IDM} \leq 0,491$
2	kampung tertinggal	$0,491 < \text{IDM} \leq 0,599$
3	kampung berkembang	$0,599 < \text{IDM} \leq 0,707$
4	kampung maju	$0,707 < \text{IDM} \leq 0,815$
5	kampung mandiri	$0,815 < \text{IDM} \leq 0,920$

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pemberdayaan merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Fakfak dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Kabupaten Fakfak berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.73. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitasi pemajuan kampung di Kabupaten Fakfak menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel II.74 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Fakfak

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Status IDM Kabupaten Fakfak	0,4909	N/A	N/A	0,4867	0,5416	0,5429
	Tertinggal	N/A	N/A	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen “Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Berdasarkan Tabel II.74 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2016-2020, status IDM Kabupaten Fakfak masih berada dalam kategori “**tertinggal**” dengan skor 0,5429 pada tahun 2021. Meskipun demikian, terdapat peningkatan status IDM kampung di Kabupaten Fakfak yang signifikan dari “sangat tertinggal” pada tahun 2019 menjadi “tertinggal” pada tahun 2021.

2.3.2.6.2 Implementasi Dana Desa

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Fakfak tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. Dana Desa sebagai wujud implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan kampung di Kabupaten Fakfak.

Kampung tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Tabel II.75 diketahui bahwa terdapat peningkatan alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat ke kampung di Kabupaten Fakfak, dengan jumlah total Rp.89,69 milyar (142 kampung) pada tahun 2016 menjadi Rp.138,52 milyar (142 kampung) pada tahun 2020. Meningkatnya alokasi Dana Desa ini berbanding lurus dengan meningkatnya nilai IDM Kabupaten Fakfak, sehingga mengindikasikan kontribusi Dana Desa terhadap perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung.

Tabel II.75 Jumlah Kampung Penerima dan Alokasi Dana Desa (Ribuan Rupiah) di Kabupaten Fakfak

WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kampung Penerima	142	142	142	142	142
Alokasi Dana Desa (Ribuan Rupiah)	89.688.622	113.154.978	114.330.889	138.140.255	138.519.829

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

2.3.2.6.3 Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021 menetapkan bahwa sebagian dana Otonomi Khusus Papua Barat dialokasikan untuk Pendataan Orang Asli Papua (OAP) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Untuk Provinsi Papua Barat, salah satu wujud program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada TA 2020 dan TA 2021 adalah Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung - OTSUS dalam rangka peningkatan pembangunan kampung untuk kesejahteraan masyarakat khususnya OAP, melalui sinergi pendataan OAP serta pemberdayaan masyarakat dan kampung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kampung dan kader masyarakat kampung.

Dengan merujuk pada Undang-Undang dan kedua Peraturan Pemerintah di atas maka Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Dana Otonomi Khusus, yang di dalamnya ada kegiatan pendataan OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+), telah memiliki pijakan hukum yang kuat. Karena itu, program ini perlu dilaksanakan dalam konteks penguatan dan afirmasi OAP untuk meningkatkan kesejahteraan baik di tingkat Kampung, Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Keberlanjutan program Pendataan OAP melalui SAIK+ serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini juga telah disepakati oleh



Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Fakfak) dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani pada Rapat Koordinasi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Papua Barat pada tanggal 5 November 2021 di Manokwari dan tanggal 18 November 2021 di Kota Sorong.

Sesuai dengan UU Desa dan PP No. 106 Tahun 2021 serta PP No. 107 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kampung, selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada kampung. Dengan pertimbangan itu, Program Strategis Pembedayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat harus dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan pelaksanaan UU Desa, termasuk dalam hal bantuan teknis dan pendampingan melalui P3MD.

Gambar II.32 Sinergi Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



Sumber: Pedoman Pelaksanaan PROSPPEK OTSUS Papua Barat

Salah satu komponen utama program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung adalah Sistem informasi dan Administrasi Kampung (SAIK+). SAIK+ mempunyai 4 (empat) komponen utama yaitu:

1. Kelembagaan pengelola SAIK+
2. Variabel data SAIK+
3. Aplikasi dan arsitektur jaringan SAIK+
4. Kader Kampung

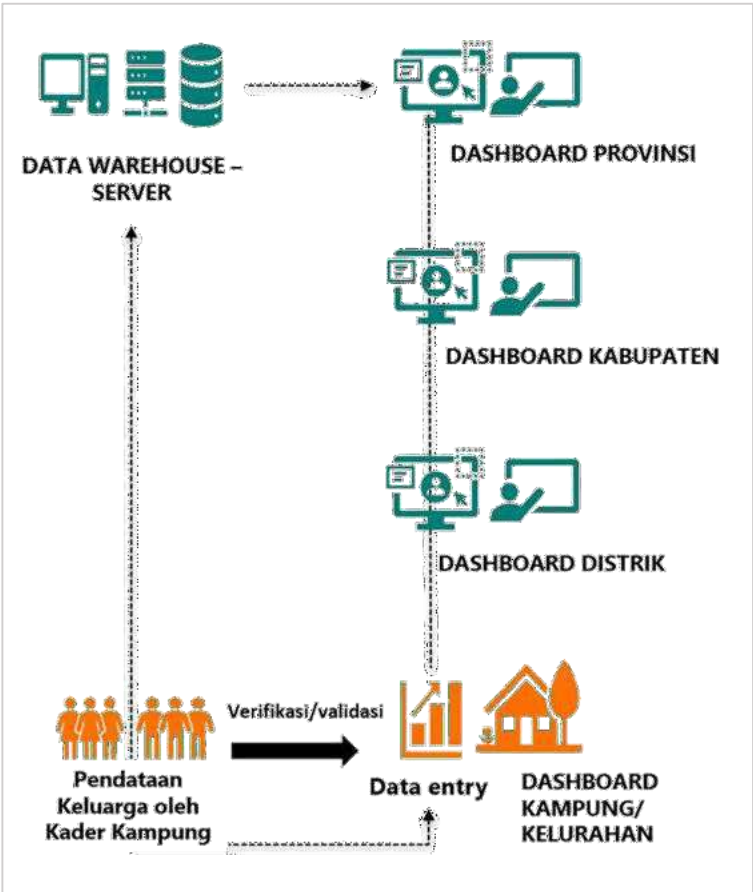
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

(DPMK) adalah kelembagaan utamadi tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selain itu SAIK+ juga berjalan dengan baik jika didukung oleh Distrik dan Pemerintahan Kampung.

SAIK+ adalah pendataan keluarga yang mencakup data mengenai seluruh anggota keluarga. Variabel data SAIK+ mencakup kondisi sosial (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll) dan ekonomi penduduk dengan memilah OAP dan Non-OAP sehingga sesuai dengan mandat UU Nomor 2 Tahun 2021.

Arsitektur jaringan SAIK+ ditampilkan dalam Gambar II.33. Berdasarkan Gambar II.33 diketahui bahwa pengumpulan dan input data dilakukan oleh Kader Kampung yang merupakan pemuda yang berasal dari kampung tersebut, sehingga mengenal dengan baik lingkungan dan penduduk yang disurvei. Data SAIK+ selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kampung, baik yang dilaksanakan oleh Disktrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pada tahun 2021 dan 2022 sudah ada beberapa kampung yang memanfaatkan data SAIK+ untuk perencanaan di tingkat kampung, terutama dalam merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP.

Gambar II.33 Skema Penyelenggaraan SAIK+



2.3.2.6.4 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Tabel II.76 menunjukkan jumlah kelompok binaan PKK berdasarkan distrik di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.76 diketahui jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 143 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016. Distrik dengan jumlah kelompok binaan PKK terbanyak terdapat di Kokas, Fakfak Tengah dan Teluk Patipi.

Tabel II.76 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Fakfak Tahun 2016 - 2020

NO	DISTRIK	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jumlah PKK	Jumlah kelompok binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah kelompok binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah kelompok binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah kelompok binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah kelompok binaan	Rata-rata Jumlah PKK
1	Fakfak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Fakfak Tengah	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3	Fakfak Barat	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4	Fakfak Timur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Kramongmonga	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Kokas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7	Karas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	Bomberay	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9	Teluk Patipi	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
10	Furwagi	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	Wartutin	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	Arguni	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Kayauni	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
14	Fakfak Timur Tengah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	Mbahamdandara	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
16	Tomage	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	Pariwari	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

Sumber: BPM Kab. Fakfak, 2021

Tabel II.77 menunjukkan jumlah LSM aktif, PKK aktif dan posyandu aktif di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.77 terdapat peningkatan jumlah PKK aktif dan posyandu aktif dari tahun 2016-2017. Adapun persentase LSM, PKK dan posyandu aktif terhadap jumlah LSM, PKK dan posyandu keseluruhan di Kabupaten Fakfak telah mencapai 100%.

Tabel II.77 Jumlah LSM Aktif, PKK Aktif dan Posyandu Aktif di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LSM Aktif	Jumlah LSM terdaftar	-	2	2	2	2
	Jumlah LSM tidak aktif	-	0	0	0	0
	Jumlah LSM aktif (1-2)	-	2	2	2	2
Persentasi PKK Aktif	Jumlah PKK aktif	97	142	142	142	142
	Jumlah PKK	97	142	142	142	142
	Persentasi	100	100	100	100	100
Persentasi Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif	97	142	142	142	142
	Total posyandu	97	142	142	142	142
	Persentasi	100	100	100	100	100

Sumber: BPM Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3.2.7.1 Rasio akseptor KB

Akseptor KB merupakan anggota masyarakat yang mengikuti Gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Sementara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah pasangan suami istri yang usia perempuannya adalah 15-49 tahun. Melihat indikator rasio akseptor KB dapat memberikan informasi mengenai seberapa banyak cakupan masyarakat untuk memilih kontrasepsi. Untuk meningkatkan banyaknya rasio akseptor KB, maka dinas daerah yang memegang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. Tabel II.78 menunjukkan data rasio akseptor KB Kabupaten Fakfak pada tahun 2016-2020. Diketahui bahwa rasio akseptor KB di Kabupaten Fakfak masih perlu di tingkatkan, terlebih lagi angka menunjukan bahwa pada tahun 2020 justru menunjukan bahwa rasio akseptor KB justru menurun cukup signifikan.

Tabel II.78 Rasio Akseptor KB Kabupaten Fakfak Tahun 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB	5.761	8.336	7.906	8.170	6.778
2	Jumlah pasangan usia subur	13.886	14.137	-	-	18.366
3	Rasio akseptor KB	41,48	58,96	-	-	36,9

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.7.2 Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasanagn usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tabel II.79 menunjukkan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020.

Tabel II.79 Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Kab. Fakfak, 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta program KB aktif	4.965	6.456	6.597	6.758	5.388
2	Jumlah pasangan usia subur	13.886	14.137	-	-	18.366
3	Persentase	35,75	45,66	-	-	29,06

Sumber: BPPKB Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8 Perhubungan

Sarana transportasi merupakan bagian penting yang harus dimiliki suatu daerah dalam membantu tercapainya tujuan pembangunan. Sarana transportasi merupakan bagian krusial dalam menunjang arus perpindahan arus barang, jasa, maupun informasi pendukung pembangunan.

2.3.2.8.1 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Sementara angkutan umum pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan perjalanan masyarakat di daerah akan terus meningkat apabila daerah tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kegiatannya. Terlebih lagi, sarana angkutan umum penumpang terbukti lebih efisien dalam energi.

Tabel II.80 akan menunjukkan jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2016-2020, dengan data yang tersedia adalah dengan menggunakan moda kapal, dan pesawat. Berdasarkan Tabel II.80 Terlihat bahwa moda kapal menempati urutan pertama sebagai pilihan masyarakat dalam bermobilisasi. Terdapat penurunan jumlah penumpang pada tahun 2020, diindikasikan karena pandemi Covid-19.

Tabel II.80 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Fakfak 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	-	-	-	-	--
2	Jumlah Penumpang Kereta Api	-	-	-	-	-
3	Jumlah Penumpang Kapal Laut	30.005	20.225	35.450	40.320	1.325
4	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	11.393	3.068	18.968	23.099	3.004
5	Total Jumlah Penumpang	41.398	23.293	54.418	63.419	4.329

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.2 Rasio Ijin Trayek

Trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Sementara izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil. Izin trayek angkutan umum jalan bermacam-macam, namun pada Tabel II.81 hanya disajikan data untuk izin trayek perkotaan dan izin trayek pedesaan.

Trayek perkotaan merupakan angkutan dari satu tempat lain yang masih berada di kotamadya, dan jumlah izin yang dimiliki angkutan umum di Kabupaten Fakfak untuk trayek tersebut hanya 1. Trayek angkutan desa merupakan angkutan dari satu desa ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota. Tercatat terdapat 7 izin trayek angkutan umum untuk trayek pedesaan.

Tabel II.81 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ijin Trayek Perkotaan	1	1	1	1	1
2	Ijin Trayek Perdesaan	7	7	7	7	7
3	Jumlah Ijin Trayek	8	8	8	8	8

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Penduduk	74.772	76.102	77.381	78.686	87.894
5	Rasio Ijin Trayek	0,0107	0,0105	0,0103	0,0091	0,008

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Transportasi juga harus memiliki standar keselamatan. Dalam hal ini, penyedia transportasi umum wajib melakukan tes uji KIR pada kendaraannya. Uji KIR merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor (truk, pickup, angkot, bis, dll) dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Dinas Perhubungan Daerah melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengeluarkan izin layak operasi, sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bermotor yang tidak layak beroperasi. Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor lain. Data jumlah Uji KIR di Kabupten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.82 Dapat dilihat bahwa persentase pelaksanaan Uji Kir terhadap angkutan umum di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah.

Tabel II.82 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Fakfak, 2016-2020

NO	URAIAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil Penumpang Umum	830	240	28,91	832	250	30,05	835	225	26,94	839	246	29,32	845	148	17,51
2	Mobil Bus	18	2	11,11	18	2	11,11	19	3	15,26	19	1	5,26	19	3	15,78
3	Mobil Barang	900	175	19,44	915	207	22,62	930	200	21,50	943	207	21,95	962	188	19,54
4	Keretan Gandengan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
5	Kereta Tempelan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
Jumlah		1.748	417	59,46	1.765	459	63,77	1.784	428	64,22	1.801	454	56,53	1826	339	52,83

Sumber: Dinas Perhubung Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.83. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah prasarana transportasi tersebut di Kabupaten Fakfak stagnan selama 5 tahun terakhir.

Tabel II.83 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut	4	4	4	4	4
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bis	3	3	3	3	3
Jumlah		8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Jumlah penumpang angkutan darat tidak tersedia datanya sehingga capaian untuk indikator persentase layanan angkutan darat tidak dapat dihitung. Namun, bisa dilihat pada Tabel II.84 bahwa jumlah angkutan darat terus meningkat, hal ini tentunya akan sejalan dengan meningkatnya mobilitas penumpang angkutan darat.

Tabel II.84 Persentase Angkutan Darat Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Darat	597	984	1.002	1.344	1.345
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.6 Pemasangan Rambu-rambu

Meningkatnya jumlah rambu yang dipasang mengindikasikan semakin meningkatnya penyediaan perlengkapan dan fasilitas pada jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas selalu lebih rendah dari pada kebutuhan yang sesungguhnya, berdasarkan Tabel II.85 Pada Tahun 2020, hanya 4 rambu-rambu saja dari total kebutuhan 29 rambu-rambu, atau hanya 13,78% saja.

Tabel II.85 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Kab Fakfak, 2016– 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	2	4	4	54	4
2	Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2	14	24	24	29
3	Persentase	100	28,57	16,67	22,5	13,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.8.7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya pergerakan penduduk di Kabupaten Pegunungan Arfak, maka kebutuhan akan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi juga akan meningkat. Jalan merupakan salah satu moda transportasi, yang berfungsi untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, teratur dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Jalan diharapkan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan daerah. Tabel rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel II.86.

Tabel II.86 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kab. Fakfak, 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan (km)	488,679	451,598	517,674	530	553
2	Jumlah Kendaraan	597	17.072	17.453	17.432	17.433
3	Rasio	81,85	28,45	29,66	30,4	31,72

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.3.2.8.8 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan. Sementara angkutan umum pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan perjalanan masyarakat di daerah akan terus meningkat apabila daerah tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kegiatannya. Terlebih lagi, sarana angkutan umum penumpang terbukti lebih efisien dalam energi. Jumlah penumpang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada Tabel II.87 Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah penumpang selalu meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa pergerakan penduduk semakin banyak.

Tabel II.87 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Fakfak, 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penumpang Kapal Laut	30.005	20.225	35.450	40.320	1.325
2	Penumpang Pesawat Udara	11.393	3.068	18.968	23.099	3.004
3	Total Jumlah Penumpang	41.398	23.293	54.418	63.419	4.329

Sumber:Dinas Perhubungan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting saat ini untuk memudahkan interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang terintegrasi baik di dalam wilayah kabupaten maupun dalam lingkup yang lebih luas.

2.3.2.9.1 Jumlah jaringan komunikasi

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Fakfak telah menjangkau hampir ke seluruh distrik. beberapa perusahaan telekomunikasi dan operator telepon seluler yang beroperasi di Kabupaten Fakfak antara lain Telkom, Indosat, Telkomsel dan Excelindo telepon seluler. Namun untuk Distrik karas, dan Distrik Fakfak Timur tengah hanya memiliki jaringan Indosat yang mampu dijangkau sementara untuk Distrik Arguni Distrik Mbahmdandara, Kayauni,Kokas, Teluk Patipi, Furuwagi, Kramongmongga jaringan telekomunikasi belum terjangkau. Selain itu, di Kabupaten Fakfak juga sudah memiliki jaringan internet melalui V-Satelit dan penyediaan layanan Indi-home. Tabel II.88 menunjukkan jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.88 dapat diketahui terdapat



peningkatan stasioner jaringan telepon genggam dari 25 unit pada tahun 2016 menjadi 38 unit pada tahun 2019.

Tabel II.88 Jumlah jaringan komunikasi Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan telepon genggam	3	3	3	3	3
2	Stasioner	25	25	25	38	38
3	Total	28	28	28	41	41

Sumber: Dinas Kom. & Info. Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.9.2 Jumlah surat kabar nasional/lokal

Komunikasi pembangunan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa sebagai salah satu media masyarakat untuk memahami dan mengkritisi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Tabel II.89 dapat diketahui terdapat 2 (dua) surat kabar nasional/lokal di Kabupaten Fakfak yaitu Radar Sorong dan Papua Pos.

Tabel II.89 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Fakfak Tahun 2020

NO	JENIS SURAT KABAR NASIONAL/LOKAL YANG MASUK KE DAERAH
1	Radar Sorong
2	Papua Pos

Sumber: Dinas Kom. & Info. Kab. Fakfak, 2020

2.3.2.9.3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Pada Kabupaten Fakfak telah tersedia sarana prasarana penyiaran Radio yaitu RRI Kabupaten Fakfak dengan beberapa jenis penyiaran antara Lain Program Pro 1 dan Pro 2 yang menjangkau sampai tingkat Kampung sedangkan khusus penyiaran TV Lokal untuk kabupaten Fakfak belum memiliki Siaran TV Lokal Kabupaten.

2.3.2.9.4 Website milik pemerintah daerah

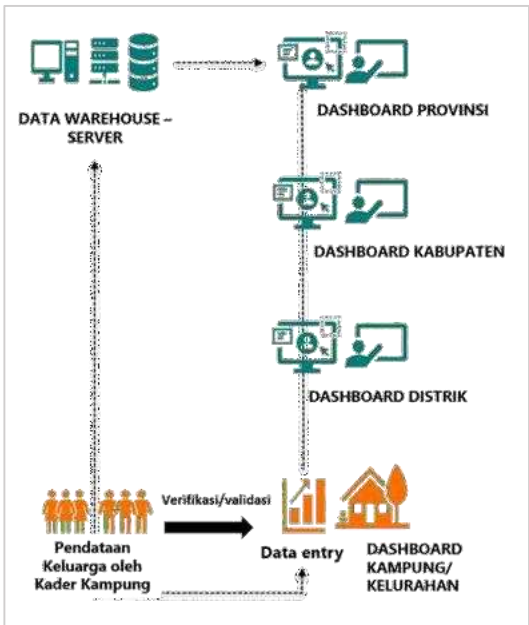
Pada Kabupaten Fakfak telah tersedia sarana Website Pemerintah Kabupaten Fakfak yaitu www.fakfakkab.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Fakfak, dalam website berisi infomasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Fakfak dan website tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak maupun dari luar.

2.3.2.9.5 Sistem Administrasi dan Informasi Kampung – OTSUS

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) – Otonomi Khusus adalah pendataan keluarga yang mencakup data mengenai seluruh anggota keluarga. Variabel data SAIK+ mencakup kondisi sosial (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll) dan ekonomi penduduk dengan memilah OAP dan Non-OAP sehingga sesuai dengan mandat UU Nomor 2/2021. Data

dikumpulkan dan dimasukkan ke aplikasi dan jaringan SAIK+ yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk mengakses SAIK+ secara online dapat melalui <https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>.

Gambar II.34 Skema Penyelenggaraan SAIK+



Sistem informasi dan Administrasi Kampung (SAIK+) adalah komponen utama Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) adalah kelembagaan utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Selain itu SAIK+ juga berjalan dengan baik jika didukung oleh Distrik, pemerintah kampung dan kader kampung. Di Kabupaten Fakfak, kelembagaan berupa Sekber telah diatur didalam SK Bupati Fakfak No 100-209 Tahun 2020 pada Juli, 2020. Kabupaten Fakfak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan kemajuan pendataan SAIK+ yang tinggi mengikuti Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari.

Dengan adanya data SAIK+, maka daerah memiliki data pendukung sebagai basis perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Data terpilah OAP dan Non OAP baik yang makro maupun mikro juga akan sangat bermanfaat utamanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kampung. Perencanaan Kampung seterusnya akan dimuat didalam RPJMKampung. Bila mengacu pada perencanaan Kabupaten, perencanaan kampung seyogyanya perlu selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten yang akan termuat dalam RPJMD ini.



2.3.2.10 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.10.1 Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Berdasarkan Tabel II.90 diketahui terdapat peningkatan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Fakfak dari 47 unit pada 2016 menjadi 81 unit pada 2020. Meskipun demikian, apabila melihat persentase koperasi aktif terhadap jumlah koperasi, dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Fakfak relative kecil yaitu sebesar 25% pada tahun 2020.

Tabel II.90 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Fakfak Tahun 2016– 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	47	55	48	58	81
2	Jumlah Koperasi	301	297	294	294	294
3	Persentase Koperasi Aktif	15,61	16,61	20,08	25	25

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.10.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Tabel II.91 menunjukkan jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.91 diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah UKM di Kabupaten Fakfak dari 497 UKM pada 2016 menjadi 1136 UKM pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi di masyarakat yang dapat menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Tabel II.91 Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seluruh UKM	497	340	600	720	1.136
2	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	-	-	-	-	-

Sumber: Fakfak Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.11 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan Tabel II.92 dapat diketahui bahwa mulai tahun 2020 terdapat 1 investor PMDN dan 1 investor PMA di Kabupaten Fakfak.

Tabel II.92 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Fakfak Tahun 2016 - 2020

JUMLAH INVESTOR	2016	2017	2018	2019	2020
PMDN	-	--	-	-	1
PMA	--	-	-	-	1
TOTAL			-	-	2

Sumber: DPMPTSP, 2021

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendorong investasi di daerah maka telah dilakukan berbagai kebijakan serta strategi baik yang berkaitan dengan aspek regulasi maupun juga penyediaan infrastruktur serta aspek lainnya. Namun demikian terkait dengan realisasi invetasi di Kabupaten Fakfak yang di lakukan oleh PMDN maupun PMA sejak Tahun 2016–2020 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk realisasi penanaman modal dalam negeri diketahui sebagian besar dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan sejak Tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan karena berkaitan dengan regulasi pusat. pada Tahun 2020 realisasi nilai investasi oleh PMDN yaitu sebesar Rp. 52.794.000.000,- sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 806.530.000.000,-

2.3.2.12 **Kepemudaan dan Olahraga**

2.3.2.12.1 **Jumlah organisasi pemuda**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, organisasi kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda sebagai wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi kepemudaan jyga berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Jumlah organisasi Pemuda di Kabupaten Fakfak jumlah nya stagnan selama lima tahun kebelakang (Tabel II.93). Organisasi pemuda banyak dibentuk di Distrik Fakfak dan Fakfak Tengah.

Tabel II.93 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Fakfak, 2016–2020

NO	DISTRIK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	25	25	25	25	25
2	Fakfak Tengah	15	15	15	15	15
3	Fakfak Barat	4	4	4	4	4
4	Fakfak Timur	2	2	2	2	2
5	Kramongmonga	2	2	2	2	2
6	Kokas	4	4	4	4	4
7	Karas	4	4	4	4	4
8	Bomberay	4	4	4	4	4
9	Teluk Patipi	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR, 2021

2.3.2.12.2 **Jumlah Organisasi Olah Raga**

Organisasi Olah Raga merupakan basis adanya pengembangan sumber



daya untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat. Tabel II.94 menunjukkan jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Fakfak.

Tabel II.94 Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Fakfak, 2016-2020

NO	DISTRIK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	11	11	11	11	11
2	Fakfak Tengah	3	3	3	3	3
3	Fakfak Barat	2	2	2	2	2
4	Fakfak Timur	2	2	2	2	2
5	Kramongmonga	2	2	2	2	2
6	Kokas	3	3	3	3	3
7	Karas	2	2	2	2	2
8	Bomberay	2	2	2	2	2
9	Teluk Patipi	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2021

2.3.2.12.3 Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan kepemudaan merupakan representasi dari pemembrdayaan pemuda, untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Kegiatan kepemudaan yang dimaksud bisa difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat ataupun organisasi kepemudaan. Tabel berikut menunjukkan data jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Fakfak berdasarkan Distrik pada tahun 2016-2020.

Tabel II.95 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Fakfak, 2016 - 2020

NO	DISTRIK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	33	33	33	33	33
2	Fakfak Tengah	27	27	27	27	27
3	Fakfak Barat	17	17	17	17	17
4	Fakfak Timur	13	13	13	13	13
5	Kramongmonga	13	13	13	13	13
6	Kokas	17	17	17	17	17
7	Karas	17	17	17	17	17
8	Bomberay	17	17	17	17	17
9	Teluk Patipi	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR, 2021

2.3.2.12.4 Jumlah Kegiatan Olah Raga

Kegiatan olahraga melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga baik secara masal maupun individu untuk memperoleh kebugaran ataupun menuju daya saing dalam hal prestasi. Dengan ikutsertanya masyarakat dalam berolahraga diharapkan tujuan olahraga dapat tercapai, yaitu membudayakan olahraga guna menciptakan masyarakat yang sehat dan bugar. Tabel II.96 memberikan informasi jumlah kegiatan olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020.

Tabel II.96 Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Fakfak, 2016 - 2020

NO	DISTRIK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fakfak	11	11	11	11	11
2	Fakfak Tengah	8	8	8	8	8

NO	DISTRIK	2016	2017	2018	2019	2020
3	Fakfak Barat	6	6	6	6	6
4	Fakfak Timur	2	2	2	2	2
5	Kramongmonga	2	2	2	2	2
6	Kokas	5	5	5	5	5
7	Karas	5	5	5	5	5
8	Bomberay	5	5	5	5	5
9	Teluk Patipi	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR, 2021

2.3.2.12.5 Gedung dan Lapangan Olah Raga

Kesadaran dan minat masyarakat Kabupaten Fakfak dalam berolahraga dipengaruhi salah satunya dengan ketersediaan sarana olahraga seperti gedung dan lapangan olahraga yang memadai. Di Kabupaten Fakfak, terdapat 1 gedung olahraga dan 9 buah lapangan dari kurun waktu 2016-2020, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.97.

Tabel II.97 Rasio Gedung dan Lapangan Olah Raga Kabupaten Fakfak

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Gedung Olah Raga	1	1	1	1	1
Lapangan olah raga	3	9	9	9	9

Sumber: Dinas Pendidikan & OR Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.12.6 Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.98. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Fakfak terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Meningkatnya jumlah klub ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan pembinaan dari Dinas, agar bisa meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Tabel II.98 Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk Kab. Fakfak

TAHUN	JUMLAH KLUB OLAH RAGA	JUMLAH PENDUDUK	RASIO
2016	275	74.772	36,78
2017	280	76.102	29,55
2018	290	77.381	33,14
2019	290	78.686	38,09
2020	300	87.894	36,78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab.Fakfak, 2021

2.3.2.13 Statistik

2.3.2.13.1 Buku “Kabupaten dalam Angka”

Pada Kabupaten sudah tersedia Buku Kabupaten Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Fakfak Setiap Tahun antara lain: Fakfak Dalam Angka Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018 serta tahun 2019 yang sudah selesai disusun namun belum dilaunching dan Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Bappeda bekerjasama dengan BPS Kabupaten dalam penyusunan Produk Indikator Ekonomi Daerah yang salah satunya adalah Buku “Fakfak Dalam Angka” per tahun.



2.3.2.13.2 Buku “PDRB Kabupaten”

Pada Kabupaten sudah tersedia Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Fakfak Setiap Tahun antara lain: Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 serta Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Bappeda bekerjasama dengan BPS Kabupaten dalam penyusunan Produk Indikator Ekonomi Daerah yang salah satunya adalah Buku “Produk Domestik Regional Bruto” (PDRB) per tahun.

2.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membawa arah baru dalam **pembangunan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan** dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban.

Di tingkat daerah, pemerintah bisa meningkatkan nilai budaya daerah melalui berbagai program dan kegiatan, yang tentunya bisa bersifat kontekstual sesuai dengan budaya daerah. Namun sebagai pengukuran baku, terdapat indikator-indikator yang telah tertuang sebagai alat ukur capaian pembangunan daerah pada urusan kebudayaan, yakni; (1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya; (2) sarana penyelenggaraan seni dan budaya; (3) benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan (4) jumlah grup kesenian.

2.3.2.14.1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Untuk melaksanakan kegiatan seni dan budaya, ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya tentunya akan sangat mendukung. Tercatat pada Tahun 2016, terdapat 4 sarana penyelenggaraan seni dan budaya, sementara untuk tahun-tahun kedepannya tidak tercatat sama sekali (Tabel II.99) . Meskipun begitu, perlu diingat bahwa menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya tidak memerlukan sarana khusus, melainkan bisa menggunakan ruang publik lainnya.

Tabel II.99 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	JUMLAH SARANA
1	2016	4
2	2017	----
3	2018	
4	2019	
5	2020	

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.14.2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan fesitival seni dan budaya kerap diselenggarakan oleh Kabupaten Fakfak, kecuali pada Tahun 2020 (Tabel II.100). Mengingat bahwa pada tahun tersebut sedang terjadi puncak pandemi Covid-19, penyelenggaraan seni dan budaya memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Tabel II.100 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kab. Fakfak

NO	TAHUN	JUMLAH FESTIVAL
1	2016	1
2	2017	2
3	2018	2
4	2019	1
5	2020	-

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.14.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan UURI No. 11 Tahun 2010, “*cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dab/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan*”. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Fakfak, pada tahun 2016-2020 terdapat total 9 buah benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dan semuanya dilestarikan.

Tercatat dalam Direktori Tinggalan Arkeologi (Cagar Budaya) yang disusun oleh Kemendikbud, terdapat banyak sekali tinggalan arkeologi, yang sangat berpotensi untuk dijadikan cagar budaya. Idealnya, setiap kabupaten/kota memiliki tim ahli cagar budaya untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan pengapusan cagar budaya. Kedepannya, diharapkan terdapat lebih banyak lagi total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Fakfak.





Tabel II.101 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	9	9	9	9	9
2	Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	9	9	9	9	9
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.14.4 Jumlah Grup Kesenian

Grup kesenian merupakan komunitas yang bisa turun punya peran penting untuk menjaga terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Selama kurun lima tahun, jumlah grup kesenian di Kabupaten Fakfak terus meningkat dan tidak pernah mengalami penurunan (Tabel II.102).

Tabel II.102 Jumlah Grup Kesenian Per10.000 Penduduk Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

TAHUN	JUMLAH GRUP KESENIAN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO
2016	135	74.772	18,05
2017	147	76.102	19,31
2018	147	77.381	18,99
2019	152	78.686	19,31
2020	152	87.894	17,29

Sumber:Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.15 Perpustakaan

2.3.2.15.1 Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Tabel II.103 Menunjukkan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020. Kabupaten Fakfak memiliki jumlah perpustakaan terbanyak pada tahun 2019, namun terjadi pengurangan jumlah perpustakaan pada tahun 2020 sehingga hanya 1 perpustakaan saja yang dipertahankan. Hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pengelolaan perpustakaan, termasuk faktor-faktor eksternal lainnya seperti minat membaca masyarakat.

Tabel II.103 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	3	3	4	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3	Total Perpustakaan (1+2)	1	3	3	4	1

Sumber: Kantor Perpustakaan & Kearsipan Kab. Fakfak, 2021



2.3.2.15.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah anggota perpustakaan dan total pengunjung perpustakaan dapat menjadi gambaran minat baca masyarakat, dimana datanya dapat dilihat pada Tabel II.104. Apabila dilihat dari jumlah anggota perpustakaan, jumlahnya terus meningkat signifikan dari tahun 2017 menuju tahun 2020. Namutotal keseluruhan pengunjung perpustakaan menurun tajam dari tahun 2016 menuju tahun 2017, dan terus stagnan pada angka 8000an pengunjung dari tahun 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan daerah belum mampu menarik minat pengunjung baru.

Tabel II.104 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota Perpustakaan	47	9	10	123	463
2	Total pengunjung perpustakaan	17.225	8.616	8.491	8.491	8.491

Sumber: Kantor Perpustakaan & Kearsipan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.15.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Minat baca yang semakin meningkat harus didukung oleh ketersediaan jumlah dan koleksi buku yang beragam, dimana kedepannya diharapkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah semakin meningkat. Koleksi buku ini tidak terbatas pada buku (monograph), tapi juga dapat merupakan serial (majalah dan bulletin), koleksi digital, dan koleksi audio. Adapun data jumlah koleksi buku di Perpustakaan Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada Tabel II.105.

Tabel II.105 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	285	182	-	306	-
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	495	872	-	13.000	-

Sumber: Kantor Perpustakaan & Kearsipan Kab. Fakfak, 2021

2.3.2.16 Kearsipan

2.3.2.16.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Arsip juga dapat berfungsi sebagai bukti perekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan dapat menjadi memori kolektif yang berguna sebagai pembelajaran untuk pembangunan daerah



kedepannya. Untuk mengukur indikator kinerja pembangunan bidang kearsipan, maka perlu diukur persentase pengelolaan arsip secara baku Kabupaten Fakfak, yang bisa dilihat pada Tabel II.106. Dapat diketahui bahwa di Kabupaten Fakfak, mayoritas OPD telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, yaitu sebesar 95,55%.

Tabel II.106 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku	43	43	43	43	43
2	Jumlah OPD	45	45	45	45	45
3	Persentasi	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55

Sumber: Kantor Perpustakaan & Kearsipan Kab. Fakfak, 2021

Kedepannya, arsip daerah yang telah terdigitalisasi juga dapat dikembangkan. OPD diharapkan dapat menerapkan arsip secara baku, memiliki tenaga arsip yang telah diberi pembekalan dan pelatihan sistem kearsipan, dan menggunakan dapat mengelola arsip dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis). Penataan arsip diharapkan telah berdasarkan kode klasifikasi, serta OPD menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengarsipan yang efektif dan efisien.

2.3.2.16.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan sangat penting untuk dilakukan untuk menyiapkan SDM yang punya kompetensi untuk mengelola arsip, serta kerap mengetahui perkembangan teknik mengelola arsip yang lebih terbaru untuk peningkatan efisiensi. Di Kabupaten Fakfak telah dilakukan kegiatan untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.107, Jumlah kegiatan tersebut juga ditingkatkan kuantitasnya pada tahun 2019 (2 kegiatan) dan tahun 2020 (3 kegiatan).

Tabel II.107 Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kab. Fakfak

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	2	3

Sumber: Kantor Perpustakaan & Kearsipan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3 Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.3.3.1.1 Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB

Potensi sumberdaya alam pesisir dan kelautan merupakan sumberdaya yang paling menonjol di Kabupaten Fakfak terutama dengan keberadaan

hutan mangrove, estuaria, terumbu karang dan padang lamun yang masih alami yang menjadi tempat berkembangbiak dan tumbuh hidup aneka ikan dan biota laut. Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Fakfak terdiri dari tiga sumber yaitu pelagik, demersal, dan biota laut lainnya. Tabel II.108 menunjukkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.108 diketahui bahwa terdapat penurunan kontribusi sektor perikanan dari Rp 713,09 milyar (17,48%) pada tahun 2016 menjadi Rp. 868,51 milyar (16,67%) pada tahun 2020. Hal ini perlu diantisipasi dengan peningkatan bina kelompok nelayan dan pemberian bantuan dari Pemda Kabupaten Fakfak.

Tabel II.108 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (juta) Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kontribusi PDRB dari Sektor perikanan	713.089,09	765.675,35	813.557,50	860.095,48	868.507,75
2	Jumlah PDRB	4.078.847,29	4.495.038,30	4.904.662,10	5.271.400,01	5.206.934,37
3	Persentase	17,48	17,03	16,59	16,31	16,67

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020

2.3.3.1.2 Produksi Perikanan

Tabel II.109 menunjukkan persentase produksi perikanan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.109 dapat diketahui terdapat peningkatan produksi ikan dari 976,19 ton pada tahun 2016 menjadi 1.739,00 ton pada tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 927,8 ton. Apabila dibandingkan dengan target daerah sebesar 2.100 ton per tahun, capaian produksi ikan di Kabupaten Fakfak rata-rata adalah 54,01% per tahun, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 82,81%, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020.

Tabel II.109 Persentase Produksi Perikanan Kabupaten Fakfak, 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (Ton)	976,19	983,85	1.044,12	1.739,00	927,8
2	Target daerah (Ton)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	Persentase	46,48	46,85	49,72	82,81	44,18

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3.1.3 Konsumsi ikan

Sebagai daerah penghasil ikan yang cukup besar, konsumsi ikan merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Berdasarkan Tabel II.110 diketahui bahwa terdapat



peningkatan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Fakfak dari 1.492 kg pada tahun 2016 menjadi 1.694 kg pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target konsumsi ikan daerah sebesar 1.500 kg, dapat disimpulkan capaian konsumsi ikan di Kabupaten Fakfak telah melebihi target pada tahun 2020 yaitu mencapai 112,93%.

Tabel II.110 Persentase Komsunsi Ikan Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komsumsi ikan (kg)	1.492	1.447	1.468	2.216	1.694
2	Target daerah (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Persentase	99,47	96,47	99,87	97,86	112,93

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3.1.4 Cakupan bina kelompok nelayan

Bina kelompok nelayan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam memproduksi ikan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Tabel II.111 menunjukkan persentase cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Fakfak pada 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.111 diketahui terdapat penurunan jumlah kelompok nelatan yang mendapat bantuan Pemda dari 123 kelompok (39,17%) pada tahun 2016 menjadi 109 kelompok (30,53%) pada tahun 2020.

Tabel II.111 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	123	116	126	132	109
2	Jumlah kelompok nelayan	314	336	341	341	357
3	Persentase	39,17	34,52	36,95	38,7	30,53

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Fakfak, 2021

Tabel II.112 menunjukkan persentase produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.112 diketahui terdapat penurunan jumlah produksi ikan kontribusi kelompok nelayan dari 725,33 ton pada tahun 2016 menjadi 562,43 ton pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target jumlah produksi ikan daerah sebesar 2.100 ton, maka terjadi penurunan kontribusi hasil kelompok nelayan dari 34,53% pada tahun 2016 menjadi 26,78% pada tahun 2020.

Tabel II.112 Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	725,33	1.327,18	1.021,75	612,197	562,431
2	Jumlah produksi ikan di daerah	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	Persentase	34,53	63,19	48,65	29,15	26,78

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Fakfak pada masa yang akan datang . Jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan meliputi wisata peninggalan sejarah, wisata budaya hingga wisata alam. Untuk rencana pengembangan wisata alam (*ecotourism*) sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Kabupaten Fakfak tanpa merusak lingkungan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Fakfak didasarkan pada wilayah-wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata serta memungkinkan dibangun akses dan prasarana sarana dengan memadai, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.113.

Tabel II.113 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Fakfak

KATEGORI	OBJEK WISATA		LOKASI
WISATA BUDAYA	1	Tugu Perjuangan Merah Putih	Kampung Nemiwikarya Distrik Fakfak
	2	Tugu perjuangan Trikora	Kampung Rumbati di Distrik Teluk Patipi
	3	Tugu Perang Dunia II	Distrik Kokas
	4	Masjid Tua Wertuar	Kampung Patimburak Distrik Kokas
	5	Tugu Pepera	Distrik Fakfak
	6	Lukisan Telapak Tangan	Distrik Kokas
	7	Acara perkawinan, kelahiran, inisiasi dan kematian	seluruh wilayah Kabupaten Fakfak
	8	Festival pariwisata dan budaya Fakfak	Distrik Fakfak
WISATA ALAM	1	Pantai Pasir Putih I	Pasir Putih, Distrik Fakfak Tengah
	2	Pantai Pasir Putih II	Wayati, Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur
	3	Pantai Wayob	Pulau Panjang, Werpigan, Distrik Fakfak Barat
	4	Sungai Air Besar	Air Besar, Distrik Fakfak Tengah
	5	Air Terjun Maredred	Pasir Putih, Distrik Fakfak Tengah
	6	Air Terjun Kali	Werba, Distrik Fakfak Barat dan Kampung Weri, Distrik Fakfak Timur
	7	Pasir Pantai	Kampung Weri, Sanggaram
	8	Goa Alam	Distrik Fakfak
	9	Wisata Bahari	Distrik Fakfak, Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Timur dan Distrik Kokas
	10	Lubang Kayu Merah	Kampung Kayu Merah, Distrik Tengah
	11	Cagar Alam Pegunungan Fakfak	sepanjang Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah dan di Distrik Fakfak Timur
	12	Cagar Alam Pegunungan Kumawa	Distrik Karas
WISATA BUATAN	1	Kolam renang Air Besar	Air Besar Distrik Fakfak Tengah
	2	Kolam Air Kamandir	Sanggaram di Distrik Fakfak Timur
	3	Kolam Ikan Iskompors	Kampung Weri dan Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur
	4	Lukisan Telapak Tangan	Distrik Kokas
	5	Penangkaran Ikan Duyung	Kiat, Distrik Barat

Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan



komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran. Tabel II.114 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata dan sektor pembentuknya terhadap PDRB Kabupaten Fakfak 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.114 diketahui terdapat peningkatan kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak dari 21,08% pada tahun 2017 menjadi 21,86% pada tahun 2020.

Tabel II.114 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Fakfak 2016-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
SEKTOR PARIWISATA		21,08	21,20	21,70	21,86
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,61	11,83	12,01	12,46
2	Transportasi dan Pergudangan	5,54	5,37	5,59	4,92
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,16	1,17	1,20
4	Informasi dan Komunikasi	2,77	2,84	2,93	3,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak, 2021

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat dapat dikatakan belum optimal dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Meskipun demikian, berdasarkan Tabel II.115 terlihat adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Fakfak dari 5.761 orang pada 2016 menjadi 6.520 orang pada tahun 2020.

Tabel II.115 Persentase Kunjungan Wisata Kabupaten Fakfak, 2016– 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata	1.247	-	-	-	-
2	Jumlah seluruh kunjungan wisata	5.761	6.860	5.908	13.010	6.520
3	Persentase	21,65	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Fakfak, 2021

Tabel II.116 menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.116 diketahui bahwa pelaksanaan pameran/expo di Kabupaten Fakfak dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2020 tidak terdapat pameran/expo sebagai respon pencegahan penularan Covid-19.

Tabel II.116 Jumlah Pameran/Expo yang Dilaksanakan di Kab. Fakfak

NO	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH PAMERAN/EXPO YANG DILAKSANAKAN	0	1	1	1	0

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.3.3.3 Pertanian

Pertanian dan perkebunan di Kabupaten Fakfak telah berkembang sejak lama dengan komoditi utama pala dan kelapa, juga cengkeh. Pengembangan ruang bagi sektor pertanian di Kabupaten Fakfak dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

Tabel II.117 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (juta) Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB dari sektor pertanian /perkebunan	713.089,09	765.675,35	813.557,50	860.095,48	868.507,75
2	Jumlah PDRB	4.078.847,29	4.495.038,30	4.904.662,10	5.271.400,01	5.206.934,37
3	Persentase	17,48	17,03	16,59	16,31	16,67

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020

2.3.3.3.2 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Tabel II.118 menunjukkan jumlah produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.118 diketahui bahwa terdapat peningkatan produksi padi dari 18,75 ton pada tahun 2018 menjadi 56 ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi padi ini merupakan implikasi dari peningkatan luas areal tanaman padi dari 5 ha pada 2018 menjadi 17,5 ha pada tahun 2020. Apabila melihat kondisi produksi bahan pangan utama lokal (ubi kayu, ubi jalar, keladi), terdapat kondisi produksi yang fluktuatif. Terdapat penurunan produksi bahan pangan utama lokal dari 328,58 ton pada tahun 2016 menjadi 284,07 ton pada tahun 2018, kemudian terjadi peningkatan menjadi 450,3 ton pada 2019, serta penurunan menjadi 115,53 ton pada tahun 2020. Tingginya produksi bahan pangan utama lokal dibandingkan dengan produksi padi di Kabupaten Fakfak mengindikasikan bahwa rumah tangga di Kabupaten Fakfak memiliki preferensi lebih besar pada konsumsi pada tanaman pangan ubi jalar, keladi dan ubi kayu sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan permodalan petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan lokal sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan Kabupaten Fakfak.

Tabel II.118 Jumlah Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tanaman padi (ton)	0	0	18,75	50,4	56
2	Produksi bahan pangan utama lokal; (ubi kayu, ubi jalar, keladi) (ton)	328,58	263,99	284,07	450,3	115,53
3	Luas area tanaman padi (ha)	0	0	5	14	17,5
4	Luas Bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	13	8	8	13	9

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3.3.3 Cakupan Bantuan Kelompok Petani

Tabel II.119 menunjukkan persentase cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.119

diketahui terdapat peningkatan jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dari 85 kelompok pada tahun 2016 menjadi 115 kelompok pada tahun 2020. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang meningkat setiap tahunnya, maka cakupan bantuan kelompok tani mengalami penurunan dari 36,6% pada 2016 menjadi 34,7% pada tahun 2020.

Tabel II.119 Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	85	87	131	132	115
2	Jumlah kelompok tani	232	247	273	315	331
3	Persentase	36,6	35,2	47,9	41,9	34,7

Sumber: Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Fakfak, 2021

2.3.3.4 Kehutanan

2.3.3.4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel II.120 menunjukkan persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.120 dapat diketahui terdapat penurunan cakupan luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dari 8 ha (0,15%) pada 2019 menjadi 6 ha (0,11%) pada 2020.

Tabel II.120 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	-	-	-	8	6
2	Luas total hutan dan lahan kritis	-	-	-	5.276	5.445
3	Persentase	-	-	-	0,15	0,11

Sumber: UPTD KPHP Unit XVI Fakfak, 2021

2.3.3.4.2 Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel II.121 menunjukkan persentase kerusakan Kawasan hutan di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.121 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan luas kerusakan hutan di Kabupaten Fakfak dari 5316 ha (2,48%) pada 2019 menjadi 5490 ha (2,57%) pada 2020.

Tabel II.121 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas kerusakan kawasan hutan	-	-	-	5.316	5.490
2	Luas kawasan hutan (Wilayah KPHP)	-	-	-	213.741	213.741
3	Persentase	-	-	-	2,48	2,57

Sumber: UPTD KPHP Unit XVI Fakfak, 2021



2.3.3.4.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Tabel II.122 menunjukkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.122 dapat diketahui terdapat peningkatan nilai PDRB sektor kehutanan dari 713,09 milyar pada tahun 2016 menjadi 868,51 milyar pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan nilai, namun terdapat penurunan persentase/kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dari 17,48% pada tahun 2016 menjadi 16,67% pada tahun 2020.

Tabel II.122 Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB dari sektor kehutanan (juta)	713.089,09	765.675,35	813.557,50	860.095,48	868.507,75
2	Jumlah PDRB	4.078.847,29	4.495.038,30	4.904.662,10	5.271.400,01	5.206.934,37
3	Persentase	17,48	17,03	16,59	16,31	16,67

Sumber: Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.5.1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Pengembangan sektor pertambangan didasarkan pada kekayaan sumber daya alam mineral di Kabupaten Fakfak, yaitu kandungan minyak dan gas bumi, batubara, pasirkwarsa, batu pasir maupun bahan galian lain. Saat ini sudah dilakukan eksplorasi kandungan bahan tambang tersebut dan sedang dalam proses penilaian kelayakan pengembangannya. Minyak dan gas bumi di Bomberay dan Karas berpotensi menjadi sektor andalan bagi pertumbuhan perekonomian kabupaten, hal ini juga dapat terjadi dengan penggalian bahan tambang lain.

Tabel II.123 menunjukkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.123 dapat diketahui terdapat peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dari 58,91 milyar pada 2016 menjadi 62,44 milyar pada 2020. Meskipun mengalami peningkatan nilai absolut, namun kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan dari 1,44% pada 2016 menjadi 1,19 pada 2020.

Tabel II.123 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (juta) Kabupaten Fakfak, 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB dari sektor pertambangan	58.912,08	62.560,87	61.052,48	65.202,48	62.438,10
2	Jumlah PDRB	4.078.847,29	4.495.038,30	4.904.662,10	5.271.400,01	5.206.934,37
3	Persentase	1,44	1,39	1,24	1,23	1,19

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020

2.3.3.5.2 **Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Hampir semua distrik dan kampung di Kabupaten Fakfak telah tersedia listrik. Meskipun demikian, pasokan listrik saat ini masih belum optimal dalam mendukung pengembangan berbagai sektor ekonomi, terutama mendukung pertambangan, dan agropolitan di Bomberay dan sekitarnya. Dengan posisi strategis bumi Papua diantara *Pacific ocean* dan *Indian ocean* berimplikasi pada potensi besar konversi energi ombak (*wave energy conversion*) di sepanjang garis pantai, menjadi daya listrik. Dengan demikian dapat menjadi alternatif dalam pengembangan wilayah dan pengembangan sumber energi wilayah, yaitu pengembangan pembangkit listrik tenaga ombak (PLTO). Tabel II.124 menunjukkan persentase rumah tangga di Kabupaten Fakfak yang menggunakan listrik pada tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.124 diketahui bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan dari 8225 rumah tangga (38,15%) pada 2016 menjadi 17.544 rumah tangga (76,21%) pada 2020.

Tabel II.124 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kab. Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah RT pengguna listrik	8.225	11.978	9.300	13.138	17.544
3	Jumlah rumah tangga	21.558	21.435	20.224	21.435	23.020
4	Persentase	38,15	55,88	45,98	61,29	76,21

Sumber: Fakfak Dalam Angka 2021

2.3.3.6 **Perdagangan**

2.3.3.6.1 **Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi strategis di Kabupaten Fakfak. Tabel II.125 menunjukkan persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.125 diketahui terdapat peningkatan nilai dan kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Fakfak dari 335,90 milyar (11,39%) pada tahun 2016 menjadi 440,04 milyar (12,79%) pada tahun 2020.

Tabel II.125 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (juta) Kab. Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB dari sektor perdagangan	335.896,95	337.930,22	413.381,24	436.839,11	440.039,03
2	Jumlah PDRB	2.948.829,28	3.159.027,98	3.367.230,08	3.545.307,64	3.440.577,18
3	Persentase	11,39	10,69	12,27	12,04	12,79

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020

2.3.3.6.2 **Jumlah Sarana Perdagangan**

Pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari ketersediaan sarana perdagangan seperti pasar, toko, kios dan warung sebagai lokasi transaksi antara penjual dan pembeli. Tabel II.126



menunjukkan jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Tabel II.126 diketahui terdapat peningkatan sarana perdagangan dari 338 unit pada tahun 2016 menjadi 3563 unit pada tahun 2020. Dalam hal ini, sarana perdagangan yang paling banyak di Kabupaten Fakfak adalah kios (tahun 2020: 3025 unit) dan toko (2020: 430 unit).

Tabel II.126 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar/Market	3	3	5	8	21
2	Toko/ Store	150	154	160	160	430
3	Kios	155	160	170	220	3025
4	Warung	30	34	34	50	87
Jumlah Total		338	350	393	438	3563

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.3.3.6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari bantuan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemda kepada pedagang atau pelaku usaha. Tabel II.127 menunjukkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.127 diketahui terdapat peningkatan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan Pemda dari 150 kelompok pada tahun 2016 menjadi 350 kelompok pada tahun 2019, namun mengalami penurunan menjadi 150 kelompok pada tahun 2020. Apabila meninjau jumlah kelompok pedangan/usaha informal yang semakin meningkat dari 1904 pada tahun 2016 menjadi 3003 pada tahun 2020, maka pembinaan kelompok pedagang perlu menjadi prioritas Pemda.

Tabel II.127 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	150	150	310	350	150
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	1.904	1.917	2.010	2.411	3.003
3	Persentase	7,88	7,82	15,42	14,52	5

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021

2.3.3.7 Perindustrian

2.3.3.7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Perindustrian di Kabupaten Fakfak terdiri dari industri mikro dan kecil. Skala usaha di Kabupaten Fakfak baru sebatas industri rumah tangga dengan nilai investasi dan industri yang masih terbilang kecil. Industri yang ada di Kabupaten Fakfak mencakup industri makanan, meubel kayu, konveksi. Sol

sepatu, penjahit pakaian, jok kursi, sablon, reparasi alat pendingin, reparasi elektronik, reparasi arloji, salon kecantikan, anyaman pemecahan batu, batu semen, pandai besi, bengkel kendaraan roda 4, bengkel kendaraan roda 2, tambal ban.

Apabila dibandingkan dengan sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan dan perdagangan, nilai dan kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Fakfak relatif kecil dan stabil. Berdasarkan Tabel II.128 diketahui nilai dan kontribusi PDRB sektor industri sebesar 117,56 milyar (3,99%) pada tahun 2016 dan menjadi 131,21 milyar (3,81%) pada tahun 2020.

Tabel II.128 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (Juta) di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB sektor industri	117.557,00	121.981,29	125.862,79	129.632,95	131.207,67
2	Jumlah PDRB	2.948.829,28	3.159.027,98	3.367.230,08	3.545.307,64	3.440.577,18
3	Persentase	3,99	3,86	3,73	3,66	3,81

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2021

Tabel II.129 menunjukkan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.129 diketahui sektor industri rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 100% terhadap total PDRB sektor industri di Kabupaten Fakfak. Kegiatan perindustrian di Kabupaten Fakfak di dominasi oleh industri makanan dengan jumlah perusahaan sebanyak 31 perusahaan. Selanjutnya kegiatan industri terbanyak di Kabupaten Fakfak yaitu industri bengkel kendaraan roda 4 dan bengkel kendaraan roda 2 dengan jumlah perusahaan masing-masing yaitu 23 dan 21 perusahaan. Sedangkan menurut jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu 76 tenaga kerja, kemudian disusul oleh industri pemecahan batu (71 tenaga kerja) dan industri makanan (66 tenaga kerja) hal ini mengindikasikan bahwa ketiga industri tersebut lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibanding industri lainnya. Adapun jumlah perusahaan perindustrian di Kabupaten Fakfak sebanyak 186 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 620, jumlah investasi sebesar 7.246.000 rupiah dan total nilai produksi 11.897.370 rupiah.

Tabel II.129 Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB industri rumah tangga	143.673,58	152.403,85	159.764,00	167.260,71	171.462,07
2	Jumlah PDRB sektor industri	143.673,58	152.403,85	159.764,00	167.260,71	171.462,07
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kab. Fakfak, 2020



2.3.3.7.2 Cakupan bina kelompok pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sektor industri di Kabupaten Fakfak, khususnya dalam meningkatkan daya saing SDM di bidang industri. Tabel II.130 menunjukkan cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.130 diketahui bahwa bantuan binaan Pemda terhadap kelompok pengrajin dilakukan pada tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 82 kelompok (22,28%) pada tahun 2018 dan 86 kelompok (23,37%) tahun 2019.

Tabel II.130 Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	0	0	82	86	0
2	Jumlah kelompok pengrajin	355	355	368	368	368
3	Persentase	0	0	22,28	23,37	0

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Fakfak, 2021

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Layanan Pemerintahan Umum

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

2.3.4.2.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah

Sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025, dimana Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dua Puluh Tahunan.

2.3.4.2.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2021, dimana Dokumen RPJMD ini menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan.

2.3.4.2.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasioanal mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak tiap tahun dalam lima Tahun RPJMD 2016-2021 Kabupaten Fakfak, dimana Dokumen RKPD ini menjadi acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan satu tahun.

2.3.4.2.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Tabel II.131 penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.131 diketahui terdapat kondisi jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan yang melebihi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan, dengan cakupan 101,16% (tahun 2017); 100,58% (tahun 2019); dan 101,16% (tahun 2020). Kesesuaian antara program dalam RPJMD dan RKPD perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak mengingat dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.

Tabel II.131 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	170	175	169	174	175
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan	173	173	173	173	173
3	Persentase	98,26	101,16	97,69	100,58	101,16

Sumber: Bappeda Kab. Fakfak, 2021

2.3.4.2.5 Ketaatan terhadap RTRW

Tabel II.132 menunjukkan rasio ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031 dalam realisasi pembangunan tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.132 diketahui bahwa terdapat peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Fakfak dari 0,41 pada tahun 2016



menjadi 0,50 pada tahun 2020.

Tabel II.132 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW (%)	35	37	39	42	45
2	Rencana Peruntukan RTRW (%)	85	86	87	88	89
3	Rasio (1./2.)	0,41	0,43	0,45	0,48	0,5

Sumber: RTRW Fakfak 2011 – 2031

2.3.4.2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel II.133 menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.133 diketahui terdapat penurunan jumlah kegiatan pembinaan kepada LSM, ormas dan OKP dari 11 kegiatan pada tahun 2017 menjadi 8 kegiatan pada tahun 2020. Selain itu juga terdapat penurunan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dari 7 kegiatan pada tahun 2017 menjadi 5 kegiatan pada tahun 2020. Penurunan jumlah kegiatan ini dapat bernilai positif apabila disebabkan karena adanya konsolidasi/pemadatan materi pembinaan sehingga kualitas output pembinaan tetap dapat terjaga.

Tabel II.133 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN	
		PEMBINAAN LSM, ORMAS, DAN OKP	PMBINAAN POLITIK DAERAH
1	2016	5	5
2	2017	11	7
3	2018	10	7
4	2019	8	6
5	2020	8	5

Sumber: Badan KesbangPol & Linmas Kab. Fakfak, 2021

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Tabel II.134 menunjukkan pengeluaran per kapita di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.134 diketahui bahwa secara umum pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Fakfak masih lebih rendah dibandingkan dengan angka Provinsi Papua Barat dan Nasional. Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Fakfak mengalami trend peningkatan dari 6.935 ribu rupiah/orang/tahun pada 2016 menjadi 7.599 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019,

meskipun demikian terjadi trend penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menjadi 7.599 ribu rupiah/orang/tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada 2016-2019 dan penurunan daya beli pada 2019-2021 sebagai dampak pandemi covid-19.

Tabel II.134 Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
FAKFAK	6.935	7.057	7.357	7.608	7.599
PAPUA BARAT	7.175	7.493	7.816	8.125	8.086
INDONESIA	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen “Papua Barat Dalam Angka 2016-2021”

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang diterima petani terhadap indek harga yang di bayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan serta merupakan indikator untuk mengukur daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun di produksi. Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat di ketahui bahwa nilai NTP Kabupaten Fakfak lebih kecil dari 100 artinya pendapatan yang diterima oleh petani atas penjualan hasil produksi tidak sebanding dengan pengeluaran petani dalam membeli kebutuhan lainnya baik kebutuhan usaha/produksi maupun kebutuhan konsumsi lainnya hal ini disebabkan tingkat kemampuan atau daya beli petani khususnya di Kampung-kampung masih rendah dibanding harga kebutuhan barang yang mengalami peningkatan.

2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Tabel II.135 menunjukkan persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.135 diketahui terdapat penurunan persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dari 62,87% pada tahun 2016 menjadi 47,16% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Fakfak didominasi konsumsi pangan dengan cakupan >50%.

Tabel II.135 Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Total pengeluaran RT non pangan	639.518	398.330	554.784	656.004	687.539
Total pengeluaran	1.017.119	865.702	1.128.329	1.332.250	1.457.757
Persentase	62,87	40,01	49,17	49,24	47,16

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021



2.4.1.4 Jenis dan jumlah bank dan cabang

Ketersediaan sarana perbankan merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana perbankan pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana perbankan untuk melangsungkan kegiatan baik kegiatan ekonomi. Tabel II.136 menunjukkan jenis dan jumlah bank dan kantor cabangnya di Kab. Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.136 diketahui terdapat 4 unit bank umum, 2 unit bank swasta dan 1 unit bank BPR di Kabupaten Fakfak pada tahun 2016-2020.

Tabel II.136 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Fakfak

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bank Umum	4	4	4	4	4
2	Bank Swasta	2	2	2	2	2
3	Bank BPR	1	1	1	1	1
Jumlah		7	7	7	7	7

Sumber: Buku Profil Fakfak, 2020

2.4.1.5 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Tabel II.137 menunjukkan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya di Kabupaten Fakfak tahun 2012–2016. Berdasarkan Tabel II.137 diketahui terdapat 3 Perusahaan Asuransi Kerugian dan 4 Perusahaan Asuransi Jiwa di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020.

Tabel II.137 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di Kabupaten Fakfak Tahun 2012–2016

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perusahaan Asuransi Kerugian	3	3	3	3	3
2	Perusahaan Asuransi Jiwa	4	4	4	4	4
Jumlah		7	7	7	7	7

Sumber: Buku Profil Fakfak, 2020

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Angka Kriminalitas

Tingkat keamanan wilayah menjadi faktr penting dalam mendukung iklim investasi daerah. Tabel II.138 menunjukkan angka kriminalitas di Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.138 diketahui terdapat peningkatan jumlah tindak kriminal di Kabupaten Fakfak dari 183 kasus pada tahun 2016 menjadi 297 kasus pada tahun 2020.

Tabel II.138 Angka Kriminalitas di Kabupaten Fakfak Tahun 2016 - 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tindak kriminal yang terjadi	183	196	245	282	297

Sumber: Fakfak Dalam Angka Kab. Fakfak, 2021

Tabel II.139 menunjukkan angka kriminalitas dan jenis tindak kriminal Kabupaten Fakfak Tahun 2019-2020. Berdasarkan Tabel II.139 diketahui bahwa jenis tindak kriminal tertinggi yang terdapat di Kab. Fakfak adalah kasus penganiayaan sebanyak 51 kasus (tahun 2019) dan 46 kasus (tahun 2020). Pada 2019-2020 terdapat peningkatan total jumlah tindak kriminal dari 282 kasus pada 2019 menjadi 297 kasus pada 2020.

Tabel II.139 Angka Kriminalitas dan Jenis Tindak Kriminal di Kab. Fakfak

NO	JENIS KRIMINAL	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	5
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	10	10
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	51	46
5.	Jumlah kasus Pencurian	15	15
6.	Jumlah kasus Penipuan	6	6
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun		282	297
Jumlah Penduduk		87.894	89.015
Angka Kriminalitas (8)/(9)		0,0032	0,0033

Sumber: Data Kepolisian Resort Fakfak, 2021

Tabel II.140 menunjukkan Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel II.140 diketahui bahwa pemicu demonstrasi di Kabupaten Fakfak didominasi bidang politik dan ekonomi. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah demonstrasi di Kab. Fakfak dari 3 kasus pada tahun 2018 menjadi 5 kasus pada tahun 2020.

Tabel II.140 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	4	-1	3	2	3
2	Ekonomi		-	1	1	2
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa		5	-	3	3	5

Sumber: Fakfak Dalam Angka, 2021

2.4.2.2 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Berdasarkan Tabel II.141 diketahui belum terdapat Perda terkait ketenagakerjaan dan lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Fakfak. Perda yang telah dirumuskan dan disahkan dalam mendukung iklim usaha di Kabupaten Fakfak adalah Perda terkait perijinan sebanyak 2 Perda.





**Tabel II.141 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Fakfak Tahun 2016–2020**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda terkait perijinan	1	1	1	2	2
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	--	-	-	--
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan		-		-	-

Sumber: Bagian Hukum dan Ham Setda Kab. Fakfak, 2021

2.4.2.3 Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan penerimaan daerah selain bersumber dari dana perimbangan juga melalui pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Selama ini arah kebijakan dan strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sumber pajak dan retribusi adalah diarahkan pada peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi baik terhadap obyek pajak maupun juga terhadap cakupan potensi pajak yang diusahakan.

Dalam rangka mendukung iklim investasi di daerah peran pajak dan retribusi sebagai salah satu strategi untuk memberikan kemudahan terhadap investasi di daerah masih sangat terbatas. Sebab fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pembangunan di daerah masih bertumpu pada sumber pendapatan dari pajak dan retribusi. Oleh karena itu kedepan diharapkan agar orientasi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi dapat di kembangkan melalui pemberian insentif terhadap kegiatan-kegiatan investasi di daerah maupun kegiatan ekonomi lainnya sehingga diharapkan dengan insentif tersebut usaha di bidang investasi maupun kegiatan ekonomi lainnya dapat berkembang sehingga hal tersebut menjadi potensi bagi penerimaan daerah.

2.4.2.4 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Berdasarkan gambaran umum jumlah Kampung sebanyak 142 Kampung secara keseluruhan belum menjadi tentang kondisi Kampung di Kabupaten Fakfak dapat di gambarkan bahwa dari Kampung yang berstatus swasembada walaupun telah dilakukan pengembangan kampung dengan pendekatan pemberdayaan dan kemandirian seperti pencanangan kampung mandiri pangan namun belum dapat menciptakan kemandirian kampung sehingga kedepan diharapkan agar upaya untuk mendorong kemandirian kampung melalui model pendekatan kampung mandiri dapat diimplementasikan sehingga tercipta kehidupan kampung yang mampu berswasembada dan tidak tergantung pada bantuan program maupun bantuan pendanaan.





BAB III

Gambaran Keuangan Daerah



Bab ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

Keuangan daerah menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan tersebut menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah merupakan penjelasan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berdasarkan literatur dan *best practice* menyatakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, maka dari itu perlu mencermati hubungan integral dan keseimbangan antara *revenue* dan *expenditure*. Hal tersebut penting dilakukan untuk menciptakan keberlanjutan fiskal daerah serta perspektif pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD berfungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

- 
3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proposi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis, yaitu kapasitas fiskal.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD TA 2016-2020

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Fakfak meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020 (RpJuta)

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	R
4	Pendapatan Daerah	1,202,756,092,249	1,309,272,986,343	1,220,020,884,376	1,305,790,181,975	1,346,388,053,430.29	3.04%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	48,072,905,377	39,017,229,046	39,808,022,201	40,601,327,620	48,867,903,938.29	1.39%
4.2	Dana Perimbangan	913,356,533,169	960,832,343,727	875,285,276,022	936,790,612,498	966,752,671,511.00	1.63%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241,326,653,703	309,423,413,570	304,927,586,153	328,398,241,857	330,767,477,981.00	8.80%
5	Belanja Daerah	1,240,381,697,861	1,245,364,493,865	1,143,802,311,474	1,328,512,450,734	1,370,430,162,089.84	2.89%
5.1	Belanja Tindak Langsung	534,238,914,241	551,144,049,201	554,476,367,068	635,862,924,403	770,294,206,442.00	9.90%
5.2	Belanja Langsung	706,142,783,620	694,220,444,664	589,325,944,406	692,649,526,331	600,135,955,647.84	-3.16%
	SURPLUS/DEFISIT	(37,625,605,612)	63,908,492,478	76,218,572,902	(22,722,268,760)	(24,042,108,660)	-93.65%
6	Pembiayaan Daerah	78,077,475,925	36,319,844,969	97,228,340,447	174,480,500,727	148,734,231,966.92	44.73%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81,077,475,925	39,319,844,969	100,228,340,447	177,480,500,727	151,734,231,966.92	41.49%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	40,451,870,313	100,228,337,447	173,446,913,349	151,758,231,967	124,692,123,307	

Sumber: DJPK Kemenkeu



Tabel III.1 menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,04 persen per tahun. Selama periode 2016-2017 total realisasi pendapatan selalu mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020, realisasi pendapatan kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, realisasi total pendapatan Kabupaten Fakfak sebesar Rp1,2 triliun meningkat menjadi Rp1,35 triliun pada tahun 2020. Sementara itu, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pendapatan daerah yang mencapai rata-rata sebesar 2,89 persen pertahun, dari sebesar Rp1,24 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1,37 triliun pada tahun 2020. Sama seperti realisasi pendapatan, selama periode 2016-2017 belanja daerah mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020, realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Selanjutnya, dari segi realisasi pembiayaan, indikator pembiayaan netto mengalami peningkatan yaitu mencapai rata-rata sebesar 44,73 persen per tahun pada periode 2016-2020, dari sebesar Rp78,08 miliar pada 2016 menjadi sebesar Rp148,73 miliar pada 2020.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2016 terjadi defisit anggaran sebesar Rp37,63 miliar. Pada tahun 2017-2018 terjadi surplus anggaran masing-masing sebesar Rp63,91 miliar dan Rp76,22 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2019-2020 kembali mengalami mengalami defisit anggaran masing-masing sebesar Rp22,72 miliar dan Rp24,04 miliar. Pertumbuhan rata-rata belanja yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata pendapatan menunjukkan kemampuan mendanai mengalami penurunan. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya SiLPA yang relatif besar karena realisasi pendapatan melebihi target, dan realisasi belanja di bawah target.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

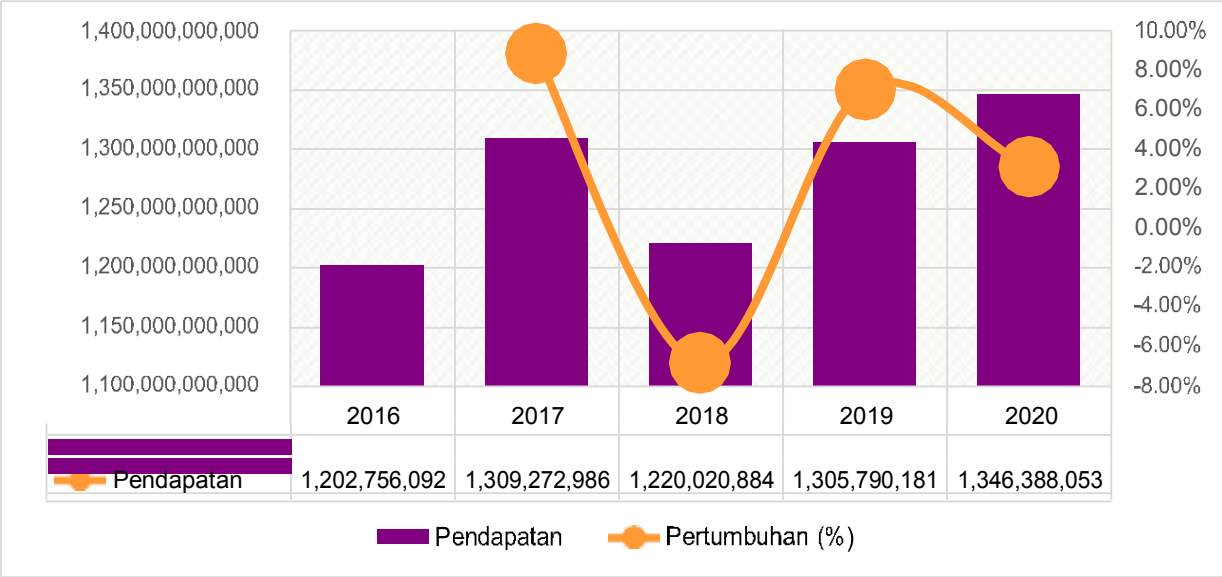
Tabel III.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016-2020

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	R
4	Pendapatan Daerah	1,202,756,092,249	1,309,272,986,343	1,220,020,884,376	1,305,790,181,975	1,346,388,053,430.29	3.04%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	48,072,905,377	39,017,229,046	39,808,022,201	40,601,327,620	48,867,903,938.29	1.39%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	6,837,407,450	12,112,972,730	6,287,017,640	7,421,940,319	6,367,057,395.00	8.22%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,916,005,438	4,850,198,869	4,610,215,937	5,014,824,674	1,873,426,884.00	-15.04%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,883,875,397	-	1,844,989,074	3,113,302,116	3,716,783,785.00	-3.96%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29,435,617,092	22,054,057,447	27,065,799,550	25,051,260,510	36,910,635,874.29	9.39%
4.2	Dana Perimbangan	913,356,533,169	960,832,343,727	875,285,276,022	936,790,612,498	966,752,671,511.00	1.63%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69,343,732,673	48,758,336,527	58,840,079,187	125,378,842,414	201,768,071,863.00	41.25%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	671,139,627,000	666,020,055,000	668,545,841,000	696,155,450,223	648,774,068,000.00	-0.76%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	172,873,173,496	246,053,952,200	147,899,355,835	115,256,319,861	116,210,531,648.00	-4.70%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241,326,653,703	309,423,413,570	304,927,586,153	328,398,241,857	330,767,477,981.00	8.80%
4.3.1	Pendapatan Hibah	646,513,000	5,580,966,700	9,149,327,423	9,867,629,378	11,753,920,000.00	213.54 %
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7,033,798,752	10,799,948,728	8,990,474,335	15,034,912,479	10,604,004,981.00	18.64%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	218,817,965,000	249,685,411,810	279,791,390,000	303,495,700,000	273,709,553,000.00	6.21%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,157,928,951	-	-	-	-	-
4.3.6	Pendapatan Lain-Lain	12,670,448,000	43,357,086,332	6,996,394,395	-	34,700,000,000.00	79.16%

Sumber: DJPK Kemenkeu

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2020 realisasi total pendapatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp1,20 triliun yang mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,31 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan mengalami penurunan hingga mencapai sebesar Rp1,22 triliun. Selanjutnya, pada periode tahun 2019-2020, realisasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,35 triliun pada tahun 2020. Secara keseluruhan pada periode 2016-2020, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Fakfak masih berasal dari dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana perimbangan masih cukup tinggi. Pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 1,39 persen pertahun. Dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 1,63 persen per tahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sebesar 8,80 persen per tahun. Peningkatan PAD dalam masa pandemi Covid tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi daerah khususnya yang tercermin dari objek-objek PAD di Kab. Fakfak tergolong cukup stabil.

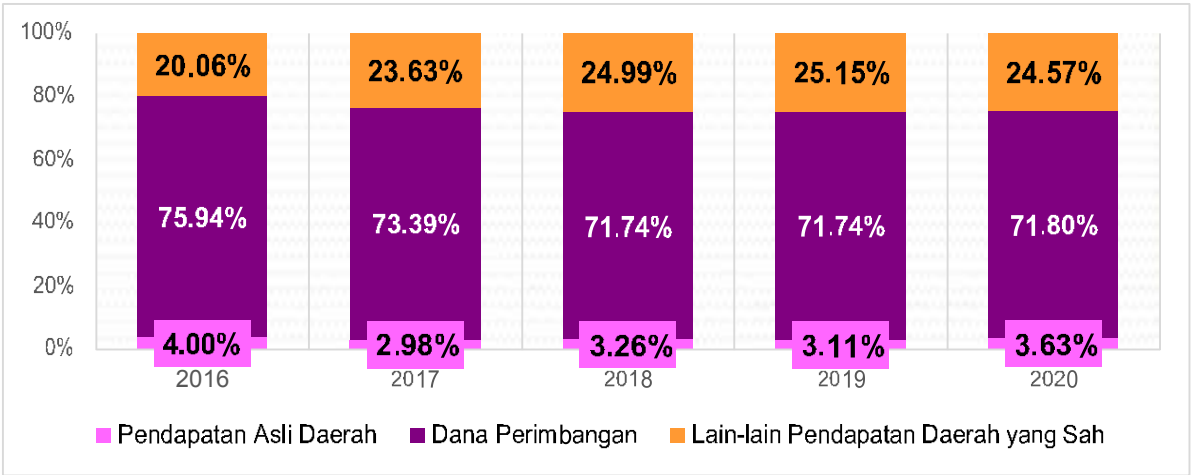
Gambar III.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Fakfak dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum. Pendapatan Asli Daerah masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan sumber pendapatan lainnya.

Gambar III.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu

Gambar III.2 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Fakfak sepanjang tahun 2016-2020. Pada periode tersebut terlihat bahwa Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah namun mengalami tren penurunan nilai kontribusi setiap tahunnya. Kontribusi dana perimbangan yakni sebesar 75,94 persen pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 71,80 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, lain-lain daerah yang sah merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah, namun mengalami fluktuasi kontribusi pada total pendapatan. Pada tahun 2016, kontribusi lain-lain daerah yang sah sebesar 20,06 persen meningkat menjadi 24,57 persen pada tahun 2020. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi dengan kisaran angka 2,98 persen sampai dengan 4,00 persen per tahun.

Selama periode 2016-2020, pada tahun 2016 dan 2018 realisasi pendapatan daerah berada di bawah target dengan nilai persentase sebesar 86,91 persen dan 98,17 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017, 2019, dan 2020, pendapatan daerah Kabupaten Fakfak selalu melebihi target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 107,6 persen hingga 110,37%.

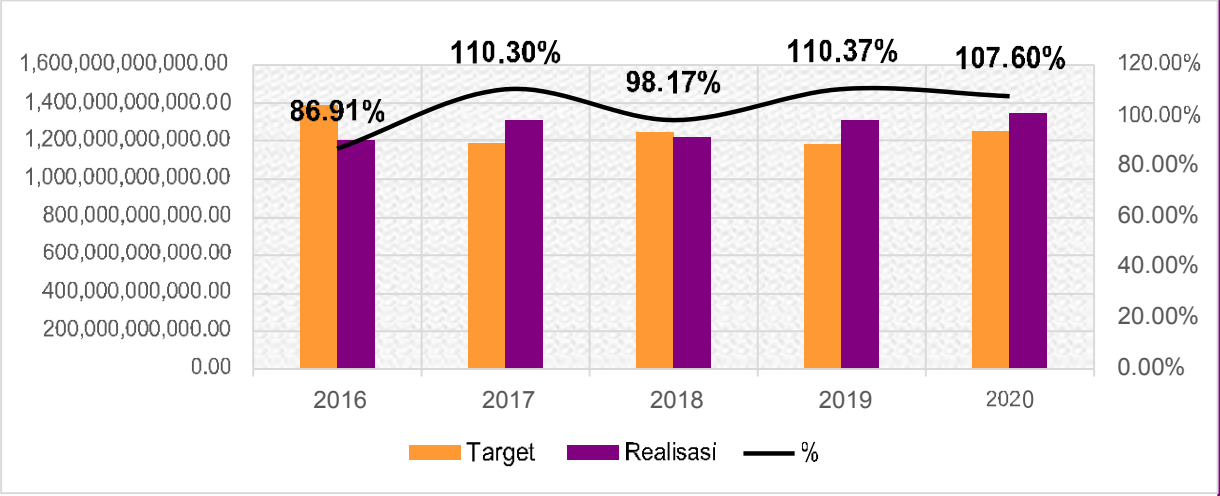
Tabel III.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak, 2016-2020

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2016	1,383,914,167,228.20	1,202,756,092,248.72	86.91	-181,158,074,979.48
2017	1,186,958,868,815.80	1,309,272,986,343.29	110.30	122,314,117,527.49
2018	1,242,815,605,966.21	1,220,020,884,376.00	98.17	-22,794,721,590.21
2019	1,183,058,101,499.04	1,305,790,181,974.72	110.37	122,732,080,475.68
2020	1,251,254,690,051.00	1,346,388,053,430.29	107.60	95,133,363,379.29

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)



Gambar III.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Fakfak, 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu

3.1.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2017, jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan. Kemudian pada periode tahun 2019-2020, realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,24 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1,25 triliun pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2018, terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup signifikan menjadi Rp 1,14 triliun. Selanjutnya, pada dua tahun berikutnya, realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 1,37 triliun pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020 belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,89 persen per tahun.

Tabel III.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016-2020

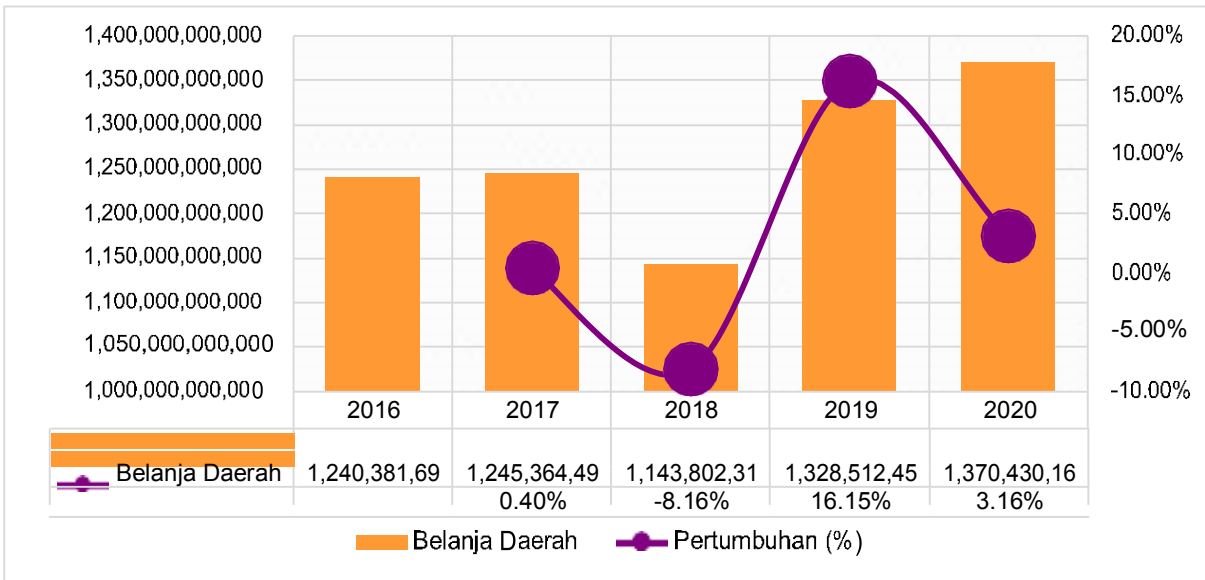
KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	R
5	Belanja Daerah	1,240,381,697,861	1,245,364,493,865	1,143,802,311,474	1,328,512,450,734	1,370,430,162,089.84	2.89%
5.1	Belanja Tindak Langsung	534,238,914,241	551,144,049,201	554,476,367,068	635,862,924,403	770,294,206,442.00	9.90%
5.1.1	Belanja Pegawai	347,068,424,483	339,244,748,552	348,764,884,362	355,654,174,699	427,809,905,325.00	5.70%
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
5.1.4	Belanja Hibah	36,018,314,949	22,861,084,151	16,159,022,920	24,575,554,530	79,332,959,552.00	52.26%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,329,750,000	12,886,350,000	11,638,951,200	24,899,537,500	12,968,192,977.00	11.57%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	868,890,531	-	865,500,000	1,248,150,022	1,317,664,646.00	24.89%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	135,193,143,778	175,509,008,998	176,899,508,586	227,821,065,885	245,524,734,111.00	16.79%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	760,390,500	642,857,500	148,500,000	1,664,441,767	3,340,749,831.00	257.30%
5.2	Belanja Langsung	706,142,783,620	694,220,444,664	589,325,944,406	692,649,526,331	600,135,955,647.84	-3.16%
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	83,184,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	321,330,801,956	299,815,055,692	320,382,502,402	409,015,531,095	368,448,288,014.84	4.48%
5.2.3	Belanja Modal	384,811,981,664	394,405,388,972	268,943,442,004	283,550,811,236	231,687,667,633.00	-10.54%

Sumber: DJPK Kemenkeu

Belanja tidak langsung Kabupaten Fakfak rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 9,90 persen, sementara komponennya yaitu belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata 5,70 persen per tahun. Belanja tak terduga mengalami peningkatan rata-rata 257,30 persen per tahun karena adanya peningkatan signifikan pada belanja jenis ini pada tahun 2020.

Selama periode yang sama, pada pos belanja langsung, belanja modal dan belanja barang dan jasa menyumbang kontribusi paling besar. Selama periode tersebut belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen sementara belanja modal mengalami penurunan sebesar 10,54 persen. Selanjutnya, belanja pegawai dalam komponen belanja langsung hanya muncul pada tahun 2019. Pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020 terjadi peningkatan belanja tidak terduga. Pada tahun 2020, belanja tidak terduga mencapai nilai nominal sebesar Rp 3,34 miliar atau meningkat sebesar 100,71 persen dari tahun sebelumnya. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Gambar III.4 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak 2016-2020

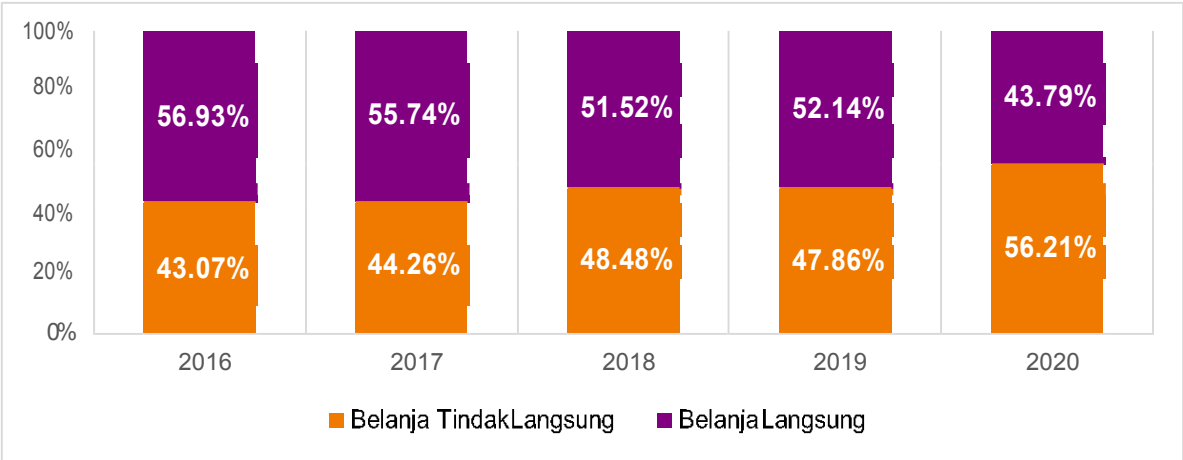


Sumber: DJPK Kemenkeu

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka diketahui bahwa alokasi belanja langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis belanja tidak langsung selama tahun 2016 hingga 2019. Namun pada tahun 2020, belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis belanja langsung. Belanja Daerah Kabupaten Fakfak paling besar digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Selama periode tersebut rata rata kontribusi jenis belanja barang dan jasa terhadap total belanja mencapai sebesar 27,13 persen, sementara belanja modal memiliki rata-rata

kontribusi sebesar 24,89 persen. Terakhir, rata-rata kontribusi belanja pegawai terhadap total belanja selama periode yang sama mencapai sebesar 28,74 persen. Berdasarkan komposisi yang lebih besar pada belanja pegawai mengindikasikan rendahnya sisa ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

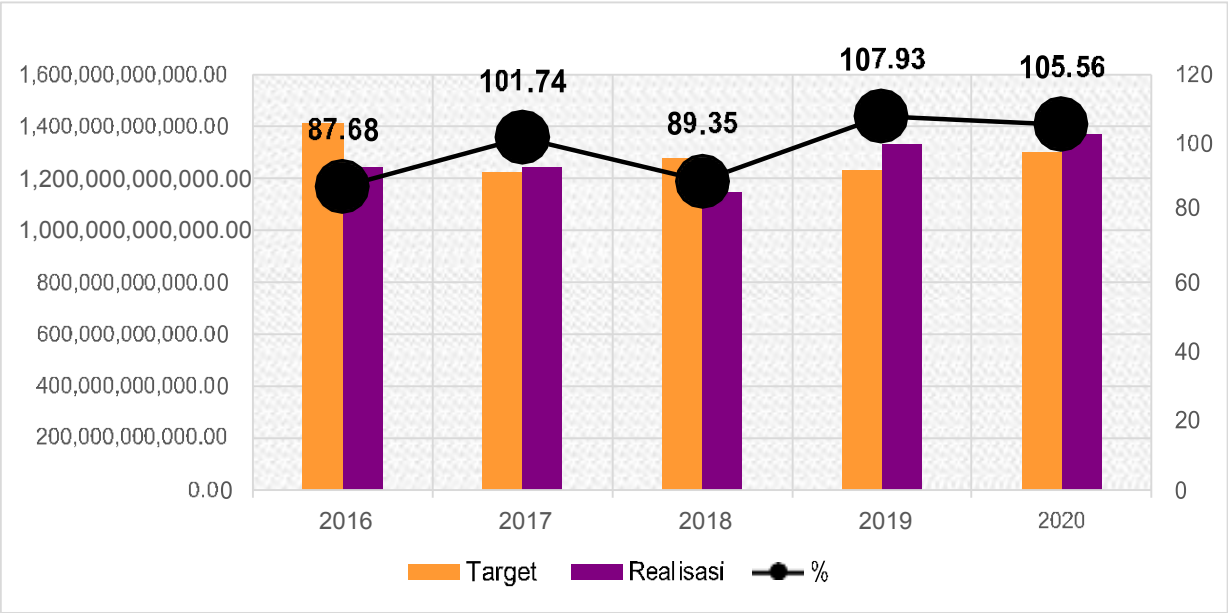
Gambar III.5 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Fakfak 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu

Selama periode 2016-2020, pada tahun 2016 dan 2018 realisasi belanja daerah berada di bawah target dengan nilai persentase sebesar 87,68 persen dan 89,35 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017, 2019, dan 2020, Belanja daerah Kabupaten Fakfak selalu melebihi target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 101,74 persen hingga 107,93%.

Gambar III.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kab. Fakfak, 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu



Tabel III.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Fakfak, 2016-2020

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2016	1,414,740,171,415.70	1,240,381,697,861.00	87.68	-174,358,473,554.70
2017	1,224,119,404,375.80	1,245,364,493,865.33	101.74	21,245,089,489.53
2018	1,280,100,074,145.53	1,143,802,311,474.00	89.35	-136,297,762,671.53
2019	1,230,888,701,802.42	1,328,512,450,734.44	107.93	97,623,748,932.02
2020	1,298,254,690,051.00	1,370,430,162,089.00	105.56	72,175,472,038.00

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel III.6 menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Fakfak tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Fakfak sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel III.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016-2020

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	R
6	Pembiayaan Daerah	78,077,475,925	36,319,844,969	97,228,340,447	174,480,500,727	148,734,231,966.92	44.73%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81,077,475,925	39,319,844,969	100,228,340,447	177,480,500,727	151,734,231,966.92	41.49%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81,077,475,925	39,319,844,969	100,228,340,447	173,480,500,727	151,734,231,966.92	40.99%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	
6.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	4,000,000,000	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000.00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000.00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.2.5	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	
6.2.6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
6.2.7	Lainnya	-	-	-	-	-	

Sumber: DJPK Kemenkeu



3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Fakfak pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami kenaikan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada periode ini rata-rata pertumbuhan total aset mencapai sebesar 5,25 persen per tahun. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 2,65 triliun yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3,03 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 3,20 triliun dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3,21 triliun. Kemudian, pada tahun 2020, nilai total aset meningkat menjadi Rp 3,23 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Tabel III.7 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Fakfak Tahun 2014-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r
TOTAL ASET	2,649,303,210,679	3,025,560,854,124	3,196,340,090,702	3,211,828,208,395	3,232,704,525,586	5.25%
ASET LANCAR	87,578,101,208	127,246,223,937	245,713,436,769	178,852,625,406	174,429,751,511	27.18%
Kas dan Setara Kas	39,319,844,969	100,233,671,053	173,500,092,743	151,765,097,605	125,609,752,701	49.56%
Investasi Jangka Pendek	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			-33.33%
Piutang Pendapatan		9,055,288,898	6,573,419,134	2,617,277,954	3,459,488,544	-18.47%
Piutang Lainnya	17,288,039,564	945,001,271	4,133,082,231			47.61%
Penyisihan Piutang		(8,769,983,584)	(4,486,233,672)			-74.42%
Beban dibayar Dimuka						
Persediaan	26,970,216,675	21,782,246,299	61,993,076,333	24,470,249,847	45,360,510,265	47.55%
Aset untuk Dikonsolidasikan						
Aset Lancar Lainnya						
INVESTASI JANGKA PANJANG	66,351,756,774	68,558,017,823	72,791,424,942	75,973,915,293	79,770,899,799	4.72%
Investasi Nonpermanen						
Investasi Permanen	66,351,756,774	68,558,017,823	72,791,424,942	75,973,915,293	79,770,899,799	4.72%
ASET TETAP	2,461,654,286,681	2,788,881,086,330	2,843,301,742,863	2,921,138,286,569	2,924,966,429,132	4.53%
Tanah	390,216,716,281	490,801,814,244	543,039,401,319	553,485,646,319	635,818,886,328	13.30%
Peralatan dan Mesin	297,158,960,526	308,537,305,019	323,135,110,926	380,633,508,700	433,505,683,096	10.06%
Gedung dan Bangunan	808,008,519,988	835,859,063,121	863,420,975,969	892,993,817,516	940,606,524,198	3.88%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,455,305,952,437	1,682,530,080,101	1,847,637,302,814	1,953,704,612,054	2,004,795,945,651	8.45%
Aset Tetap Lainnya	13,299,902,380	12,391,518,124	12,529,074,324	12,682,053,570	15,407,695,853	4.25%
Konstruksi dalam Pengerjaan	98,846,290,030	106,026,593,134	41,970,228,988	91,944,662,118	66,340,056,288	9.52%
Akumulasi Penyusutan	(601,182,054,961)	(647,265,287,413)	(788,430,351,477)	(964,306,013,708)	(1,171,508,362,282)	18.32%
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-					
ASET LAINNYA	33,719,066,015	40,875,526,035	34,533,486,127	35,863,381,127	53,537,445,144	14.71%
Tagihan Jangka Panjang	8,624,380,587	7,881,556,337	7,881,556,337	7,881,556,337	8,207,875,260	-1.12%



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,133,520,000	1,133,520,000	1,133,520,000	1,133,520,000	1,133,520,000	0.00%
Aset Tak Berwujud	6,660,093,400	7,858,953,400	2,662,921,825	3,992,816,825	5,132,841,825	7.59%
Aset Lain-Lain	17,301,072,028	24,001,496,298	22,855,487,965	22,855,487,965	39,063,208,059	26.22%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,649,303,210,679	3,025,560,854,124	3,196,340,090,702	3,211,828,208,395	3,232,704,525,586	5.25%
KEWAJIBAN	86,786,752,219	452,975,365	476,824,153	464,110,397	1,522,835,334	32.81%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236,840,296	452,975,365	476,824,153	464,110,397	1,522,835,334	80.49%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	236,840,296	5,330,606	29,179,394	6,865,638	5,129,394	61.97%
Utang Bunga						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima di Muka						
Utang Belanja		68,000,000	68,000,000	68,000,000		-33.33%
Utang Jangka Pendek Lainnya		379,644,759	379,644,759	389,244,759	1,517,705,940	97.48%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	86,549,911,923	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri						100.00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	86,549,911,923					
EKUITAS	2,562,516,458,460	3,025,107,878,759	3,195,863,266,549	3,211,364,097,998	3,231,181,690,252	6.20%
EKUITAS	2,562,516,458,460	3,025,107,878,759	3,195,863,266,549	3,211,364,097,998	3,231,181,690,252	6.20%
Ekuitas	2,562,516,458,460	3,025,107,878,759	3,195,863,266,549	3,211,364,097,998	3,231,181,690,252	6.20%
Balance/ Unbalance	-	-	-	-	-	

Sumber: DJPK Kemenkeu



Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada periode ini rata-rata pertumbuhan kewajiban mencapai sebesar 32,81 persen per tahun. Pada tahun 2016, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Fakfak mencapai nilai sebesar Rp 86,79 miliar kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp 452,98 juta. Pada tahun 2018, jumlah kewajiban daerah kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 476, 82 juta. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Fakfak mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar Rp 464,11 juta. Kemudian, di tahun 2020, mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar Rp 1,52 miliar.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas pemerintah Kabupaten Fakfak terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,20 persen per tahun. Pada tahun 2016 nilai ekuitas daerah Kabupaten Fakfak mencapai nilai sebesar Rp 2,56 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga hingga mencapai Rp 3,23 triliun. Secara rinci perkembangan nilai total aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca keuangan Kabupaten Fakfak dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan



aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel III.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Fakfak, 2016-2020 (Rp juta)

RUMUS	2016	2017	2018	2019	2020
RASIO LIKUIDITAS					
Aset Lancar	87,578.10	127,246.22	245,713.44	178,852.63	174,429.75
Kewajiban Jangka Pendek	236.84	452.98	476.82	464.11	1,522.84
Rasio Lancar	369.78	280.91	515.31	385.37	114.54
Aset Lancar Persediaan	26,970.22	21,782.25	61,993.08	24,470.25	45,360.51
Kewajiban Jangka Pendek	236.84	452.98	476.82	464.11	1,522.84
Quick Ratio	113.88	48.09	130.01	52.73	29.79
RASIO SOLVABILITAS					
Total Hutang	86,786.75	452.98	476.82	464.11	1,522.84
Total Aset	2,649,303.21	3,025,560.85	3,196,340.09	3,211,828.21	3,232,704.53
Rasio Total Hutang (%)	3.28%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
Total Hutang	86,786.75	452.98	476.82	464.11	1,522.84
Total Ekuitas	2,562,516.46	3,025,107.88	3,195,863.27	3,211,364.10	3,231,181.69
Rasio Hutang/Modal (%)	3.39%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan perhitungan, kinerja neraca daerah Kabupaten Fakfak di tahun 2020 cukup baik terutama pada rasio lancar dan rasio cepat. Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Fakfak mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Fakfak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2020 mencapai 111,54 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Fakfak adalah 111,54 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan



perhitungan, diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2016-2020 rasio cepat di Kabupaten Fakfak selalu menunjukkan nilai diatas 1 yaitu dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 130,01.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2020 sebesar 0,05 persen artinya sebesar Rp 0,05 dari setiap Rp 1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva pemerintah Kabupaten Fakfak yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,05 persen, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan pada 2016- 2020, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kab. Fakfak.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2016-2020 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel III.9 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Fakfak, 2016-2020

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PERSENTASE
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2016	347,068,424,483	1,243,381,697,861	27.91%
2017	339,244,748,552	1,248,364,493,865	27.18%
2018	348,764,884,362	1,146,802,311,474	30.41%
2019	355,737,358,699	1,331,512,450,734	26.72%
2020	427,809,905,325	1,373,430,162,090	31.15%
Rata-rata	363,725,064,284	1,268,698,223,205	28.67%

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Fakfak mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2016, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 347,07 miliar kemudian turun hingga mencapai Rp 339,24 miliar di tahun 2017. Pada tiga tahun berikutnya, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat hingga mencapai Rp 348,76 miliar kemudian meningkat hingga mencapai Rp 355,74 miliar di tahun 2019. Pada tahun 2020, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat hingga mencapai Rp 427.81 miliar. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Fakfak juga berfluktuasi. Pada tahun 2016 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah mencapai 27,91 persen, kemudian turun hingga 27,18 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 30,41 persen yang kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga mencapai 26,72 persen. Selanjutnya, pada tahun 2020 proporsi belanja untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 31,15 persen yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2016-2020.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Fakfak selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Fakfak, 2016-2020 (Rp Juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1,202,756.09	1,309,272.99	1,220,020.88	1,305,790.18	1,346,388.05
2	Belanja Daerah	1,240,381.70	1,245,364.49	1,143,802.31	1,328,512.45	1,370,430.16
	Surplus/Defisit	(37,625.61)	63,908.49	76,218.57	(22,722.27)	(24,042.11)
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	81,077.48	39,319.84	100,228.34	177,480.50	151,734.23
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Pembiayaan Netto	78,077.48	36,319.84	97,228.34	174,480.50	148,734.23
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	40,451.87	100,228.34	173,446.91	151,758.23	124,692.12

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pembiayaan netto Kabupaten Fakfak mencapai nilai sebesar Rp 78,08 miliar, mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 yakni menjadi Rp 36,32 miliar. Pada tahun 2018, pembiayaan netto mengalami peningkatan sehingga nilai pembiayaan netto mencapai Rp 97,23 miliar. Pada tahun 2019, nilai pembiayaan netto Kabupaten Fakfak kembali mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 174,48 miliar. Selanjutnya, di



tahun 2020, pembiayaan netto mengalami penurunan hingga menjadi Rp 124,69 miliar.

Tabel III.11 Surplus/Defisit Riil Kabupaten Fakfak, 2016-2020 (Rp Juta)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,202,756.09	1,309,272.99	1,220,020.88	1,305,790.18	1,346,388.05
Dikurangi						
2	Realisasi Belanja Daerah	1,240,381.70	1,245,364.49	1,143,802.31	1,328,512.45	1,370,430.16
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Surplus/ Defisit Riil	(40,625.61)	60,908.49	73,218.57	(25,722.27)	(27,042.11)

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Tabel III.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Fakfak (Rp Juta)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81,077.48	39,319.84	100,228.34	173,480.50	151,734.23
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	4,000.00	-

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)



Tabel III.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Fakfak (Rp Juta)

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	81,077.48	100,00%	39,319.84	100,00%	100,228.34	100,00%	173,480.50	100,00%	151,734.23	100,00%
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Pembiayaan Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	78,077.48	96.30%	36,319.84	92.37%	97,228.34	97.01%	174,480.50	100.58%	148,734.23	98.02%
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat (earmarked; ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Formula perhitungan ruang fiskal adalah:

Ruang Fiskal

=

(Total Pendapatan + silpa) - Pendapatan Mengikat - Belanja Wajib Daerah

Pendapatan Mengikat

=

DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus

Belanja Wajib

=

Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + belanja wajib lainnya

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Menurut Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005), ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan Ruang Fiskal Kab. Fakfak tahun 2016-2020 ditemukan ruang fiskal Kabupaten Fakfak terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel 3.14 menunjukkan hasil ruang fiskal daerah di Kab. Fakfak tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, ruang fiskal Kabupaten Fakfak mencapai Rp 3,66 miliar namun menurun pada 2017 bahkan hingga mencapai angka negatif yaitu Rp 32,09 miliar. Pada 2018 dan 2019 ruang fiskal Kab. Fakfak terus meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai pencapaian secara berurutan sebesar Rp 23,50 miliar dan Rp 121,07 miliar. Selanjutnya ruang fiskal mengalami ppenurunan pada tahun 2020, hingga mencapai Rp 93,99 miliar.

Tabel III.14 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	1,283,833,568,174	1,348,592,831,312	1,320,249,224,823	1,479,270,682,701	1,498,122,285,397
PENDAPATAN DAERAH	1,202,756,092,249	1,309,272,986,343	1,220,020,884,376	1,305,790,181,975	1,346,388,053,430
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	81,077,475,925	39,319,844,969	100,228,340,447	173,480,500,727	151,734,231,967
PENDAPATAN MENGIKAT	392,337,651,496	501,320,330,710	436,840,073,258	428,619,649,239	401,674,004,648
DAK	172,873,173,496	246,053,952,200	147,899,355,835	115,256,319,861	116,210,531,648
Hibah	646,513,000	5,580,966,700	9,149,327,423	9,867,629,378	11,753,920,000
Dana Penyesuaian	218,817,965,000	249,685,411,810	279,791,390,000	303,495,700,000	273,709,553,000
BELANJA MENGIKAT	347,937,315,014	339,244,748,552	349,630,384,362	356,985,508,721	429,127,569,971
Belanja Pegawai	347,068,424,483	339,244,748,552	348,764,884,362	355,737,358,699	427,809,905,325
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	868,890,531	-	865,500,000	1,248,150,022	1,317,664,646
BELANJA WAJIB	539,899,416,108	540,114,361,910	510,277,153,692	572,592,597,776	573,322,565,627
Belanja Pendidikan 20%	248,076,339,572	249,072,898,773	228,760,462,295	265,702,490,147	274,086,032,418
Belanja Kesehatan 10%	124,038,169,786	124,536,449,387	114,380,231,147	132,851,245,073	137,043,016,209
Belanja Infrastruktur (25%*DAU)	167,784,906,750	166,505,013,750	167,136,460,250	174,038,862,556	162,193,517,000
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	1,280,174,382,618	1,380,679,441,172	1,296,747,611,312	1,358,197,755,736	1,404,124,140,246
RUANG FISKAL	3,659,185,556	-32,086,609,860	23,501,613,510	121,072,926,965	93,998,145,151
Persentase	0.3%	-2.4%	1.8%	8.2%	6.3%

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)



3.2.2.2 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

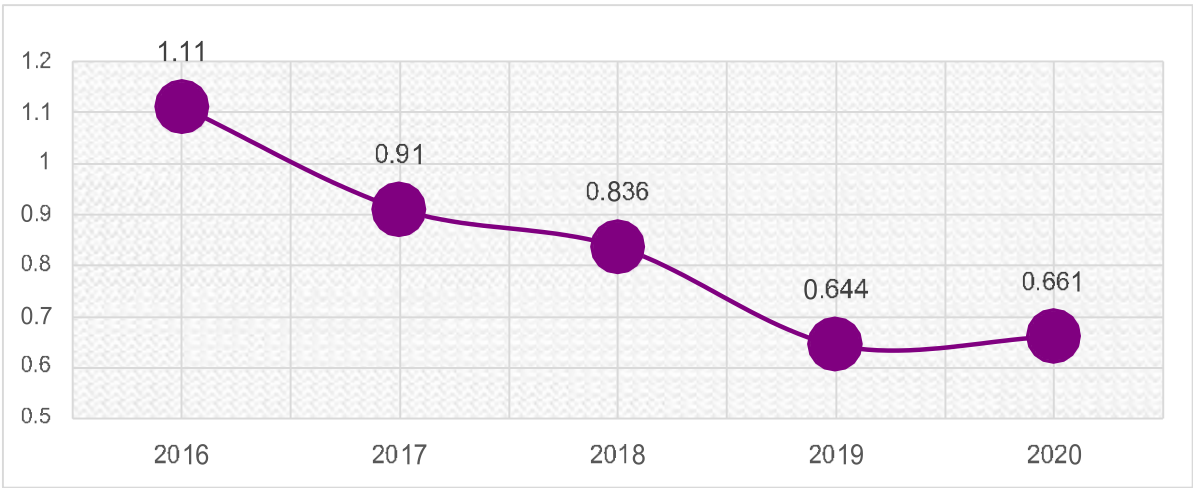
$$= \frac{(+ + + + +) -}{\text{Keterangan}}$$

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD =Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer= Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk
- Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka

dapat dikemukakan, nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kabupaten Fakfak dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2016, nilai IKF Kabupaten Fakfak menunjukkan nilai sebesar 1,11 atau masuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2017, nilai IKF Kabupaten Fakfak mengalami penurunan yakni menjadi 0,91 sehingga turun ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Fakfak terus mengalami penurunan dengan nilai IKF mencapai 0,84 pada tahun 2018 dan 0,64 pada tahun 2019 sehingga masuk ke dalam kategori rendah. Kemudian, pada tahun 2020, nilai IKF Kabupaten Fakfak sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,66 namun tetap masuk dalam kategori rendah.

Gambar III.7 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kab. Fakfak



Sumber: DJPK Kemenkeu

3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Fakfak mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Fakfak pada tahun 2016 yakni sebesar 1,03. Mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni menjadi sebesar 1,08. Kemudian pada tahun 2018, kemampuan mendanai belanja daerah kembali meningkat menjadi 1,15. Pada tahun 2019, terjadi penurunan sehingga kemampuan mendanai belanja daerah menjadi 1,11.

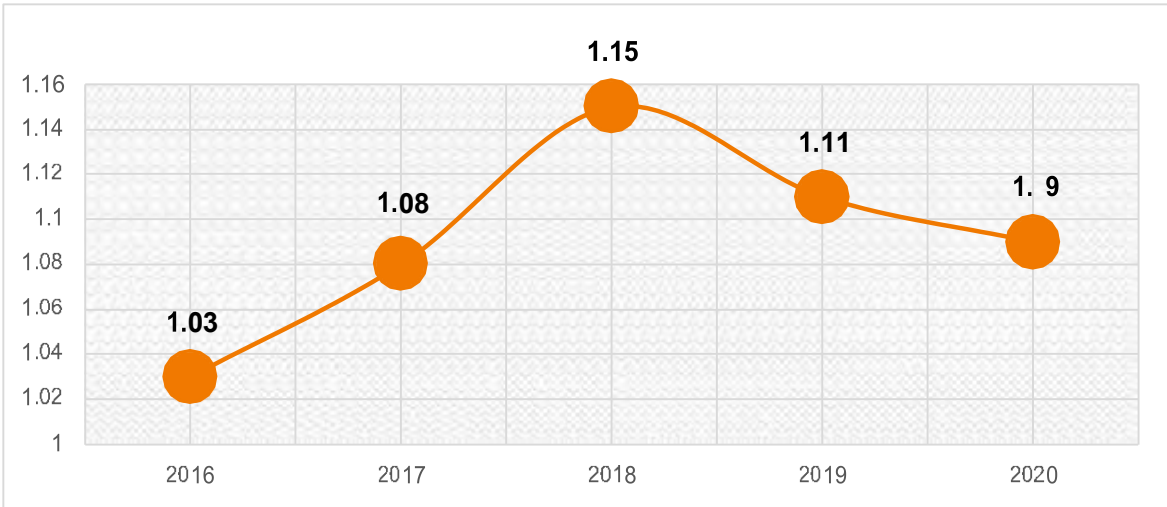
Selanjutnya, pada tahun 2020 kemampuan mendanai belanja daerah kembali menurun hingga menjadi 1,09. Berkaitan dengan kondisi tersebut, meskipun tahun 2020 telah mengalami peningkatan, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel III.15 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kab. Fakfak, 2016-2020

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENGELUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
2016	1,202,756	81,077	1,283,834	1,240,382	3,000	1,243,382	1.03
2017	1,309,273	39,320	1,348,593	1,245,364	3,000	1,248,364	1.08
2018	1,220,021	100,228	1,320,249	1,143,802	3,000	1,146,802	1.15
2019	1,305,790	177,481	1,483,271	1,328,512	3,000	1,331,512	1.11
2020	1,346,388	151,734	1,498,122	1,370,430	3,000	1,373,430	1.09

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Gambar III.8 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Fakfak, 2016-2020



Sumber: DJPK Kemenkeu

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang.

3.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Fakfak dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Fakfak tahun

2020. Hal ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para stakeholders pengelolanya. Proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026 sangat dipengaruhi berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi baik kondisi internal maupun eksternal. Pandemi covid - 19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Fakfak pada bulan maret 2020 telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kinerja keuangan daerah terutama yang bersumber dari dana transfer ke daerah serta Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi mengalami tekanan. Adanya pemberlakuan pembatasan social melalui sejumlah kebijakan memberi implikasi terhadap kinerja perekonomian daerah terutama pada aspek produksi, distribusi maupun konsumsi yang mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat hal ini juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai pertumbuhan minus di tahun 2020. Namun demikian dengan melihat perkembangan kasus pandemi covid-19 yang semakin menurun serta kondisi perekonomian yang mulai stabil dengan adanya rencana beberapa kegiatan investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Fakfak maupun kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan wilayah khususnya di Provinsi Papua Barat maka diharapkan kebijakan tersebut akan memberi pengaruh positif terhadap kinerja perekonomian daerah serta penerimaan dari dari berbagai sumber baik dari transfer pemerintah pusat (TKDD) maupun dari Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah diterima oleh daerah. Dengan mendasarkan atas beberapa asumsi tersebut maka dibuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.16.

Data APBD Kabupaten Fakfak tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan daerah menunjukkan nilai sebesar Rp 1,20 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi, pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 1,26 triliun dan menjadi Rp 1,53 triliun pada tahun 2026. Selama periode 2022-2026, proyeksi laju pertumbuhan pendapatan daerah adalah 5,51 persen per tahun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, khususnya yang terkait dengan dana bagi hasil sumber daya alam dan juga dana otonomi khusus Papua.

Tabel III.16 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak, 2022-2026 (Rp)

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	R
4. Pendapatan Daerah	1.203.002.650.782	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745	5,51%
41. Pendapatan Asli Daerah	61.824.900.033	64.537.017.296	67.373.366.589	70.339.818.300	73.442.526.099	76.687.940.793	4,40%
411. Pajak Daerah	8.557.023.618	8.813.734.327	9.078.146.356	9.350.490.747	9.631.005.469	9.919.935.634	3,00%
412. Retribusi Daerah	4.325.000.000	4.454.750.000	4.588.392.500	4.726.044.275	4.867.825.603	5.013.860.371	3,00%
413. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.074.363.332	6.256.594.232	6.444.292.059	6.637.620.821	6.836.749.445	7.041.851.929	3,00%
414. Lain-lain PAD yang Sah	42.868.513.083	45.011.938.737	47.262.535.674	49.625.662.458	52.106.945.581	54.712.292.860	5,00%
42. Pendapatan Transfer	1.132.770.850.749	1.215.881.895.281	1.278.906.333.816	1.344.376.385.121	1.413.614.589.437	1.484.615.895.344	5,56%
421. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.126.202.238.000	1.209.050.538.022	1.271.801.722.267	1.336.987.589.110	1.405.930.241.585	1.476.624.173.578	5,57%
422. Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.568.612.749	6.831.357.259	7.104.611.549	7.388.796.011	7.684.347.852	7.991.721.766	4,00%
43. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.406.900.000	8.911.314.000	9.445.992.840	10.012.752.410	10.613.517.555	11.250.328.608	6,00%
433. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.406.900.000	8.911.314.000	9.445.992.840	10.012.752.410	10.613.517.555	11.250.328.608	6,00%
5. Belanja Daerah	1.226.800.670.588	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745	5,09%
51. Belanja Operasi	869.096.526.341	907.774.961.381	948.198.038.672	990.445.472.430	1.034.600.663.467	1.080.750.871.600	4,46%
511. Belanja Pegawai	427.609.481.821	444.713.861.094	462.502.415.538	481.002.512.159	500.242.612.645	520.252.317.151	4,00%
512. Belanja Barang dan Jasa	400.338.148.620	420.355.056.051	441.372.808.854	463.441.449.296	486.613.521.761	510.944.197.849	5,00%
515. Belanja Hibah	32.268.145.900	33.558.871.736	34.901.226.605	36.297.275.670	37.749.166.696	39.259.133.364	4,00%
516. Belanja Bantuan Sosial	8.880.750.000	9.147.172.500	9.421.587.675	9.704.235.305	9.995.362.364	10.295.223.235	3,00%
52. Belanja Modal	151.133.630.003	164.591.657.548	179.715.866.543	195.081.105.969	211.907.473.319	228.082.672.026	8,58%
53. Belanja Tidak Terduga	6.456.769.243	6.844.175.398	7.186.384.167	7.545.703.376	7.922.988.545	8.319.137.972	5,20%
531. Belanja Tidak Terduga	6.456.769.243	6.844.175.398	7.186.384.167,46	7.545.703.375,83	7.922.988.544,62	8.319.137.971,85	5,20%
54. Belanja Transfer	200.113.745.001	210.119.432.251	220.625.403.864	231.656.674.057	243.239.507.760	255.401.483.148	5,00%
541. Belanja Bagi Hasil	-200.113.745.001						
542. Belanja Bantuan Keuangan	(23.798.019.806)	210.119.432.251	220.625.403.864	231.656.674.057	243.239.507.760	255.401.483.148	5,00%
SURPLUS/DEFISIT	23.798.019.806	-	-	-	-	-	
6. Pembiayaan Daerah	26.798.019.806	-	-	-	-	-	
61. Penerimaan Pembiayaan	26.798.019.806	-	-	-	-	-	
611. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.000.000.000	-	-	-	-	-	
62. Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	-	-	-	-	-	
622. Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-	-	-	-	-	

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah mengalami perubahan yang sejalan. Pada APBD tahun 2021 menunjukkan bahwa belanja daerah menunjukkan nilai sebesar Rp 1,22 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi, belanja daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 1,28 triliun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, nominal proyeksi belanja daerah terus meningkat, hingga menjadi Rp 1,57 triliun pada tahun 2026. Selama periode 2022-2026, proyeksi laju pertumbuhan belanja daerah adalah 5,09% per tahun.

3.2.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan diperlukan untuk mengukur sejauh mana fleksibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Fak fak dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Fak fak Tahun 2021-2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitung ruang fiskal daerah adalah:

1. **Langkah pertama:** menghitung total penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan TA sebelumnya.
2. **Langkah kedua:** menghitung jumlah pengeluaran wajib dan mengikat daerah tahun 2022-2026. Pengeluaran ini terutama terdapat pada belanja pegawai dan belanja transfer pada kampung dan desa.
3. **Langkah ketiga:** menghitung kapasitas riil keuangan daerah dengan pengurangan antara total penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat selama periode tahun 2022-2026.
4. **Langkah keempat:** menghitung kebutuhan belanja prioritas I, yaitu belanja pendidikan dan kesehatan.
5. **Langkah kelima:** menghitung kebutuhan belanja untuk prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Fak Fak tahun 2022-2026 menunjukkan angka yang cukup stabil dengan kenaikan dan penurunan yang kecil seiring dengan dinamika fluktuasi perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2022 kapasitas riil keuangan daerah angka sebesar Rp 1,28 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp 1,35 triliun pada tahun 2023, pada tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp 1,42 triliun, pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,49 triliun serta menjadi sebesar Rp 1,57 triliun pada tahun 2026. .



Tabel III.17 Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	1.229.800.670.588	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745
PENDAPATAN DAERAH	1.203.002.650.782	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	26.798.019.806	-	-	-	-	-
Dikurangi						
BELANJA MENGIKAT	627.723.226.822	654.833.293.345	683.127.819.401	712.659.186.216	743.482.120.405	775.653.800.299
Belanja Pegawai	427.609.481.821	444.713.861.094	462.502.415.538	481.002.512.159	500.242.612.645	520.252.317.151
Belanja Transfer	200.113.745.001	210.119.432.251	220.625.403.864	231.656.674.057	243.239.507.760	255.401.483.148
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	602.077.443.766	634.496.933.232	672.597.873.845	712.069.769.616	754.188.512.685	796.900.364.446

Tabel III.18 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Fak Fak Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%
1	Prioritas I	520.040.201.176	86,4%	547.224.067.973	86,2%	505.146.181.397	75,1%	530.546.413.492	74,5%	557.309.786.236	73,9%	585.065.557.001	73,4%
	· Pendidikan	245.360.134.118		257.866.045.315		271.145.138.649		284.945.791.166		299.534.126.618		314.510.832.949	
	· Kesehatan	122.680.067.059		128.933.022.658		65.554.792.748		68.732.059.826		72.063.668.993		75.557.133.896	
	- Infrastruktur	152.000.000.000		160.425.000.000		168.446.250.000		176.868.562.500		185.711.990.625		194.997.590.156	
2	Prioritas II	82.037.242.590	13,6%	87.272.865.259	13,8%	167.451.692.448	24,9%	181.523.356.124	25,5%	196.878.726.449	26,1%	211.834.807.445	26,6%
				-		-		-		-		-	
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	602.077.443.766		634.496.933.232		672.597.873.845		712.069.769.616		754.188.512.685		796.900.364.446	

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)





Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih cepat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi perimbangan pendapatan dan belanja tersebut akan dapat terjaga dengan syarat adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Fak Fak Tahun 2021-2026 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam dua kelompok prioritas:

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja *mandatory* mengikat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan; serta
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan juga alokasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan maka selama periode tahun 2022-2026 dapat dikemukakan bahwa jumlah alokasi belanja untuk prioritas I mencapai kisaran 73 s.d 86 persen terhadap total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Sedangkan jumlah alokasi prioritas II yang merupakan program prioritas kepala daerah di luar bidang pendidikan dan kesehatan mencapai kisaran 13-25% dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.



BAB IV

Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis Daerah

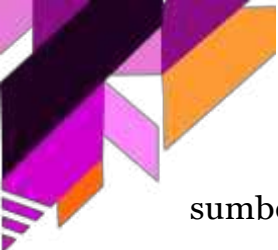
Bab ini memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Fakfak dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sementara itu, isu strategis pembangunan daerah di Fakfak merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Fakfak. Pembangunan daerah Kabupaten Fakfak ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi, dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan. Hal ini perlu dirumuskan secara tepat, komprehensif dan berdasarkan data dan informasi yang riil serta akurat serta mencermati kondisi internal maupun eksternal sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan, strategi maupun program dan kegiatan pembangunan guna member pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian pembangunan pada berbagai bidang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah di Kab. Fakfak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator



sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Fakfak; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, pemerintah harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan Kabupaten Fakfak yang lebih baik. Adapun permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Fakfak adalah:

1. Rendahnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Rendahnya daya saing potensi sumberdaya alam sesuai dengan potensi unggulan dan kearifan lokal
3. Rendahnya tata kelola pemerintahan yang baik dan konsisten
5. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar air bersih, listrik, perumahan, sanitasi lingkungan, telekomunikasi) serta infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara
6. Mulai memudarnya nilai - nilai budaya dan kearifan lokal
7. Belum optimalnya peran penataan ruang dalam menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial budaya serta ekosistem terpadu
8. Kurangnya keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).

Permasalahan pokok pembangunan tersebut diperoleh berdasarkan diidentifikasi berbagai permasalahan setiap urusan, dengan kriteria penilaian meliputi:

1. **Besaran Dampak:** Kriteria ini untuk melihat pengaruh atau dampak dari suatu masalah melalui cakupan dampak suatu masalah dan frekuensi kejadian masalah dari tahun ke tahun.
2. **Urgensi:** Kriteria ini untuk melihat seberapa mendesaknya suatu masalah untuk segera ditangani. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka semakin strategis.
3. **Kemungkinan untuk diatasi:** Kriteria ini untuk melihat peluang dilakukannya tindakan untuk segera direspon. Selanjutnya hasil penilaian yang berupa perumusan permasalahan utama menjadi bahan



penyusunan permasalahan pembangunan daerah yang diintegrasikan dengan permasalahan TPB.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Fakfak menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun khususnya dalam 5 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan:

- a. Kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Fakfak yang pada tahun 2020 mencapai angka 14,37 tahun, dari angka sebelumnya 13,51 tahun di 2016,
- b. Kenaikan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Fakfak tahun 2020 sebesar 8,84 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan angka 8,22 tahun. C apaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak sudah hampir mencapai target program pendidikan dasar 9 tahun.
- c. Penduduk Kabupaten Fakfak yang berusia 15 tahun ke atas, terbanyak menamatkan jenjang SLTA (30,6%). Pada peringkat berikutnya adalah penduduk yang menamatkan jenjang SD (20,4%) dan SLTP (16,9%). Proporsi penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tinggi masih rendah (di bawah 11%)
- d. Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 Ssebanyak 58.1%, meningkat dari 42,0% di tahun 2016.

Kondisi penyelenggaraan pendidikan formal di Kabupaten Fakfak dalam keadaan cukup baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator-indikator berikut:

- a. APS yang tinggi terutama pada kelompok usia 7-15 tahun.
- b. APK yang tinggi terutama pada jenjang SD/MI, dan SMP/ MTs, Sedangkan APM, terdapat perbedaan yang berkisar antara 10-30% lebih rendah untuk masing-masing jenjang pendidikan
- c. Jumlah peserta didik per rombongan belajar tingkat SD/MI dan SMP/MTs, yaitu berturut-turut 14 dan 26 siswa per rombel, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.
- d. Jumlah sekolah sudah memadai, namun distribusinya belum merata berdasarkan distrik. Data tahun 2020 menunjukkan hampir semua sekolah berada dalam keadaan baik. Hanya 1 SD dan 1 SMP yang kondisinya tidak baik.

- e. Rasio guru terhadap murid di tingkat SD, Kabupaten Fakfak telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan Di antara seluruh guru di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Fakfak, persentase guru yang berijazah dengan kualifikasi S1 atau D-IV pada tahun 2020 mencapai 86,93%
- f. Angka Kelulusan siswa pada jenjang SD dan SLTA pada tahun 2020 di Kabupaten Fakfak mencapai 100% dan pada tingkat SLTP mencapai 99,43%.
- g. Angka Melanjutkan Sekolah dari tingkat SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2020 mencapai 92,52%, sedangkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai 91,99%.

Tabel IV.1 merupakan rangkuman dari permasalahan-permasalahan bidang pendidikan yang diuraikan di atas.

Tabel IV.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan belum memadai	1	Sebaran fasilitas pendidikan belum merata	1	Dari 17 distrik, baru 12 distrik yang memiliki SLTP dan 7 distrik yang memiliki SLTA
			2	Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan secara umum belum memadai untuk semua jenjang pendidikan
	2	Jumlah dan kualitas tenaga pendidik belum memadai serta penyebarannya belum merata	1	Jumlah dan penempatan tenaga pendidik belum merata untuk semua distrik terutama pada jenjang pendidikan SD dan SLTA
			2	Persentase guru yang berijazah dengan kualifikasi S1 atau D-IV cukup memadai, namun belum terdistribusi merata
	3	Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal	1	Angka Melanjutkan Sekolah hingga jejang SLTA cukup baik, namun persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi masih rendah
			2	Cukup banyak siswa pada jenjang pendidikan SD hingga SLTA yang berusia tidak sesuai dengan usia standar pada jenjang pendidikannya

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.1.2 Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Fakfak masih berada di bawah angka nasional (Tahun 2020 AHH Fakfak 68,47, nasional 71,46). Sementara itu data mengenai angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Fakfak menunjukkan tingkat yang baik, namun ada kemungkinan rendahnya angka-angka itu karena ketidaklengkapan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kampung/ kelurahan hingga ke



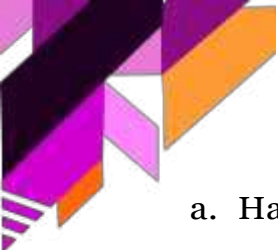
kabupaten. Rendahnya derajat kesehatan ini nampak pula dari masalah gizi buruk yang dihadapi Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2018, prevalensi balita *underweight* di Kabupaten Fakfak sebesar 14,55% dan balita *stunted* (pendek) 18,02%. Sedangkan prevalensi KEK sebesar 13,83% pada ibu hamil dan 25,34% pada perempuan tidak hamil. Permasalahan-permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Berikut rincian permasalahan yang dihadapi Kabupaten Fakfak berdasarkan capaian program-program kesehatan hingga tahun 2020:

4.1.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Distribusi puskesmas baru mencakup 10 dari 17 distrik yang ada di Kabupaten Fakfak. Baru 4 puskesmas yang terakreditasi hingga tahun 2020. Rasio puskesmas per penduduk yang dilayani sudah melebihi standar nasional kecuali Puskesmas Fakfak Kota. Terdapat beberapa sarana pelayanan puskesmas maupun pustu dalam kondisi rusak (rumah dinas, pusling dan kendaraan dinas).
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak memiliki Rasio Tempat sebesar 1,5 Tempat Tidur per 1000 penduduk (melebihi standar WHO, 1 : 1.000 penduduk).
- c. Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten Fakfak pada tahun 2018 menunjukkan rasio 1 posyandu : 38 balita. Jumlah posyandu sudah mencukupi, hanya distrik Fakfak yang rasionya melebihi 1: 100 balita. Di antara 171 posyandu yang ada, sebagian besar dengan strata Pratama dan Madya (81,2%). Selain posyandu dan Posbindu PTM, UKBM yang telah berjalan di Kabupaten Fakfak adalah Kader dan Tim Malaria Kampung untuk percepatan eliminasi malaria, yang berjalan di 55 kampung prioritas dengan nama Bela Kaca (Bebas malaria Kampung Bercahaya).
- d. Layanan telemedicine belum berjalan dengan baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

4.1.1.2.2 SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat belum memadai serta penyebarannya belum merata, ditunjukkan dengan kondisi tahun 2019-2020 sebagai berikut:

- 
- a. Hanya 1 puskesmas (5,9%) yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Persentase ini lebih rendah dari angka Provinsi Papua Barat yakni 8,5%. Secara keseluruhan, Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Fakfak adalah 5,1 per 1000 penduduk.
 - b. Rasio dokter terhadap penduduk sebesar 1:2782, (standar nasional 1:2500). Tetapi dokter umum hanya tersedia di 8 distrik. Demikian juga jumlah dokter gigi sangat terbatas, yakni 3 dokter gigi yang bertugas di Kabupaten Fakfak.

4.1.1.2.3 Kesehatan Keluarga

- a. Ibu hamil yang memperoleh pelayanan oleh tenaga kesehatan, tahun 2020: K4 sebesar 25,7% (capaian provinsi 46,6%.)
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 68,4% (Angka provinsi 83,2%)
- c. Pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap 68,0%, di atas capaian provinsi 30,7%,
- d. Cakupan Kunjungan Neonatal KN1 60,0%, lebi tinggi dari angka provinsi KN1 47%,
- e. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi sangat rendah yakni 6,3%, lebih rendah daripada angka Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar 8,2%.
- f. Kampung/kelurahan di Kabupaten Fakfak yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) sebesar 52,7%
- g. Prevalensi masalah gizi pada balita cukup tinggi (balita *underweight* 14,55% dan balita *stunted* (pendek) 18,02%). Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Demikian pula intervensi spesifik yang dijalankan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak belum mencapai target yang ditetapkan, antara lain:
 - 1) Balita yang minimal 1 kali dalam 12 bulan terakhir melakukan penimbangan berat badan 72,0%
 - 2) Pemberian Vitamin A pada anak usia 6-59 bulan 75,15%, namun hanya 37,51% yang sesuai standar.

4.1.1.2.4 **Penanggulangan Penyakit**

Cakupan pelayanan penyakit menular di Kabupaten Fakfak secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, namun sebagian belum mencapai target-target yang ditetapkan. Berikut capaian beberapa upaya penanggulangan penyakit:

- a. Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 12,6%.
- b. Cakupan penemuan pnemonia sebesar 201,3% (Papua Barat: 45,7%). Kemungkinan terdapat perbedaan denominator dalam penghitungan indikator ini.
- c. Cakupan pelayanan penderita diare pada balita 42,3%. (Provinsi Papua Barat: 10,2%).
- d. Hingga akhir Tahun 2020 kasus Covid-19 di Kabupaten Fakfak mencapai 83 orang, dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 9,6% (Provinsi Papua Barat: 2,2%).
- e. *Annual Paracite Incidence* (API) Malaria cukup rendah, yakni 2,29 per 1000 penduduk. Kabupaten Fakfak berpotensi untuk mencapai eliminasi lebih awal daripada kabupaten/ kota endemis malaria lainnya di Papua Barat.
- f. Tercatat 9 kasus baru HIV di Kabupaten Fakfak tahun 2020, dan jumlah ODHA yang sedang dalam terapi ARV berjumlah 120 orang.
- g. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan penderita Hipertensi sebesar 42.8%, Diabetes Melitus 20,5%) serta Orang dengan Gangguan Jiwa 16.0%

4.1.1.2.5 **SPM Bidang Kesehatan dan Renstra Kemenkes**

Secara umum pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Fakfak masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain yang memerlukan pendampingan dan perbaikan tata kelola meliputi juga pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat. Tabel IV.2 merupakan rangkuman dari permasalahan-permasalahan kesehatan yang diuraikan di atas.

Tabel IV.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Tujuh distrik di Kabupaten Fakfak belum memiliki puskesmas. Dari 10 puskesmas yang ada, baru 4 yang sudah terakreditasi
			2	Sebagian sarana pelayanan kesehatan di puskesmas

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
belum memadai				(rumah dinas, pusling roda 4 dan pusling perairan) tidak dalam kondisi baik
			3	Layanan telemedicine belum berjalan
			4	Rasio posyandu per jumlah balita cukup baik, namun sebagian besar posyandu masih berstrata pratama dan madya
			5	Kabupaten Fakfak memiliki inovasi UKBM untuk mempercepat pencapaian eliminasi malaria, namun keberlanjutan kegiatannya masih tergantung kapasitas pendampingan dari tingkat distrik dan kabupaten
	2	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata	1	Jumlah dan penempatan tenaga kesehatan masih belum mencakup semua distrik, terutama dokter gigi dan tenaga preventif-promotif (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, ATLM, Kefarmasian dan Gizi)
			2	Hanya 1 puskesmas (10%) yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup
	3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
			2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, mencakup pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, ibu nifas, neonatus dan bayi.
			3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) masih tinggi dan belum terdapat pemilahan data berdasarkan distrik untuk menentukan prioritas wilayah
			4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
			5	Posbindu PTM telah dijalankan oleh puskesmas-puskesmas namun cakupannya belum mencapai $\geq 80\%$ puskesmas.
			6	Pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga terjadi pemusatan sumber daya untuk penanggulangannya serta pembatasan-pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan.
			7	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
	4	Tingginya prevalensi balita stunting	1	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
			2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan stunting masih rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang berfungsi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan administrasi di sub urusan kebinamargaan, sumber daya air, air bersih, air limbah, persampahan, drainase, jasa konstruksi serta penataan ruang. Berdasarkan Tabel IV.3 terdapat 5 (lima) rumusan masalah yang

teridentifikasi di Kabupaten Fakfak yaitu: (1) Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi; (2) Belum optimalnya akses air minum dan air bersih; (3) Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air; (4) Belum optimalnya akses persampahan dan sanitasi layak; serta (5) Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang.

Tabel IV.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Ketimpangan infrastruktur wilayah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan jembatan)	1	Masih terdapat jalan kabupaten belum mantap
				2	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
				3	Pembangunan jalan belum merata menjangkau seluruh permukiman penduduk
				4	Perawatan jalan kabupaten yang belum optimal sehingga kualitas pekerasan jalan tidak terjaga dengan baik
		2	Belum optimalnya akses air minum dan air bersih	1	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM
				2	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber air baku
				3	Terdapat daerah rawan banjir luapan belum tertangani dengan baik
				4	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		3	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
		4	Belum optimalnya akses persampahan dan sanitasi layak	1	Belum adanya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
				2	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
2	Belum optimalnya implementasi rencana tata ruang	1	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
				2	Masih rendahnya pembangunan rumah/gedung yang memiliki izin membangun
				3	Masih rendahnya tingkat ketaatan terhadap PERDA RTRW. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tataruang.
				4	Rendahnya kapasitas SDM perencana tata ruang dalam melakukan analisis keruangan yang terintegrasi dan berkelanjutan
				5	Perubahan lingkungan strategis mengakibatkan perlu direvisinya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalaian pemanfaatan ruang
				6	Belum tuntasnya penataan batas dengan kabupaten tetangga di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				7	Belum optimalnya penyelesaian sengketa penataan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				8	Belum optimalnya -penyelenggaraan penataan ruang daerah dengan berpedoman pada Hak Ulayat
				9	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana pemakaman umum

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Akses permukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman (sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel IV.4). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi komponen pembangun dalam pemenuhan kriteria rumah layak huni. Dari standar rumah layak huni yang dipakai oleh BPS, menunjukan masih adanya keluarga yang tinggal dengan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar layak. Selain itu, ketersediaan utilitas seperti sanitasi juga menjadi fokus perhatian utama di Fakfak. Data mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak pada tahun 2020 sebesar 75,60%. Selain itu, pendataan kepemilikan rumah layak huni bagi OAP juga belum dilakukan.

Selain itu, dengan kondisi geografis yang ekstrem maka indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Fakfak termasuk tinggi. Kegiatan mengangkut material bangunan membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan pemenuhan rumah layak huni membutuhkan biaya yang besar. Di samping itu, pemerintah daerah masih terkendala dengan permasalahan hak ulayat dalam pengadaan lahan (akan dijelaskan lebih lanjut di urusan pemerintahan bidang pertanahan).

Tabel IV.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	1	Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1	Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga
			2	Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap air bersih, air minum dan sanitasi layak
			3	Masih ada keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
			4	Rendahnya kepemilikan rumah dengan kontruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
			5	Sulitnya pengadaan lahan karena tanah ulayat
			6	Terdapat beberapa lokasi kumuh yang belum tertangani
	2	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya	1	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/ kota dengan berpedoman pada Hak Ulayat

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.1.5
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketentraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pada prakteknya, Satpol PP selaku aparaturn pemerintah yang bertugas untuk menegakan Perda tersebut masih mengalami kendala. Salah satu akar utama mengapa kendala tersebut muncul, dikarenakan belum berjalannya tugas dan fungsi Satpol PP. Selain itu, penegakan Perda memerlukan kolaborasi antar lembaga. Saat ini, kolaborasi tersebut belum berjalan optimal. Misalnya, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wahana untuk menjaga kerujunan belum terlihat. Adanya pendatang yang membawa budaya luar juga menjadi ancaman, apabila tidak di intervensi dengan baik.

Kabupaten Fakfak juga memiliki kelas risiko bencana multi ancaman (banjir, longsor, angin puting beliung). Hal tersebut judapat mengganggu ketentraman masyarakat. Belum optimalnya kapasitas aparaturn daerah dalam penanggulangan bencana masih belum mampu mengatasi ancaman bencana tersebut. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya bencana tersebut juga menambah kendala bagi aparaturn untuk memberikan perlindungan apabila masyarakat sedang terpapar oleh bencana-bencana tersebut. Tabel IV.5 akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan pada bidang urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penanganan	1	Belum optimalnya implementasi	1	Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
			2	Belum optimalnya penegakan Perda



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat		keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	3	Belum maksimalnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum
			4	Belum optimalnya peran komunitas adat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
	2	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	1	Kurangnya sarana pendeteksi adanya bencana (banjir, longsor, angin putting beliung, dll)
			2	Implementasi tentang SOP Bencana yang belum di jalankan dan belum diketahui banyak oleh masyarakat
			3	Belum sinerginya kesiapsiagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana
			4	Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana
	3	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanganan kebakaran	1	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
			2	Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.1.6 Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Berikut ini pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Kab. Fakfak.

Tabel IV.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1	Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi risiko bencana sosial maupun bencana alam	1	Belum optimalnya pencapaian target SPM Bidang Sosial Kabupaten
			2	Tingkat kemiskinan masih tinggi
			3	Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
			4	Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan PMKS
			5	Belum optimalnya penyediaan peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/ logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2	Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan perlindungan sosial	1	Belum otimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
	3	Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1	Belum memadainya SDM yang terdidik/ terlatih di bidang rehabilitasi sosial

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	4	Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1	Kurangnya koordinasi antara kepala distrik, kepala kampung dan dinas

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

4.1.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Fakfak masih relative rendah. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasi masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan tenaga kerja di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda Fakfak	1	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja	1	Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
			2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	2	Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal	3	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja yang memberikan pendidikan/ pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Barat hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja
			1	Informasi pasar kerja yang belum optimal
			2	Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
			3	Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hiduo masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Fakfak masih tertinggal jauh di bawah nasional. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Fakfak dapat dilihat dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1	Masih belum optimalnya pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
	2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga serta belum tepatnya pola pengasuhan anak
			2	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu:
				a. kepemilikan akte kelahiran;
				b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
				c. puskesmas ramah anak,
				d. kampung anak sejahtera;

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				e. sekolah ramah anak;
				f. pusat kreatifitas anak;
				g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
				h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah;
				i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
			3	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak, serta kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur
			4	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
	3	Partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan masih rendah	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan paritisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menajdi sulit
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum efektifnya peran satgas perlindungan Anak dan Perempuan
			2	Belum optimalnya peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.3 Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Belum optimalnya kecukupan pangan daerah	1	Masih terbatasnya cadangan pangan rumah tangga dalam mengantisipasi kerawanan pangan
			2	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			3	Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal masih terbatas
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan	1	Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan.
			2	Kualitas pangan di pedagang pengumpul belum diawasi secara baik

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		kebutuhan barang-barang konsumsi	3	Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1	Rendahnya kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani
			2	Belum optimalnya peran penyuluh swadaya atau mandiri

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.4 Bidang Pertanian

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Kabupaten Fakfak. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Kabupaten Fakfak yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.10.

Tabel IV.10 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pertanian di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat	1	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1	Belum adanya <i>database</i> /pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat
			2	Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki kepastian batas dan luas tanah pemda yang dikuasai oleh pihak lain
			3	Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
	2	Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	1	Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
			2	Belum maksimalnya pengakuan negara/pemerintah daerah atas tanah adat/ulayat
			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.5 Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Fakfak. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.11.

**Tabel IV.11 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Fakfak**

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	1	Penerapan pola penanganan/ pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (<i>reduce, reuse and recycle</i>).
			2	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan
			3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa
	2	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
			3	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi hak-nya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Fakfak. Pemetaan permasalahan pembangunan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.12.



**Tabel IV.12 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0–16 tahun belum tercapai dan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun belum optimal
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan nonOAP belum 100%
			4	Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk update database
			5	Banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
			2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan
	3	Belum optimalnya tata kelola administrasi kependudukan	1	Belum optimalnya penerapan Kebijakan SATU DATA Kependudukan

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.7 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.13.

**Tabel IV.13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Fakfak**

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya	1		1	Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana		Rendahnya akseptor KB aktif	2	Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
			3	Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
			4	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka panjang
			5	Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
			6	Terbatasnya tenaga penyuluh dan kader KB
	2	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.8 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung berperan penting dalam mengembangkan potensi masyarakat serta mengelola institusi lokal masyarakat kampung. Bidang urusan ini memiliki nilai strategis karena kampung berperan penting sebagai unit pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.14.

Tabel IV.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas	1	Masih lemahnya pemahaman mayarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran kepada setiap aparat kampung.
			4	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).





POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
sumber daya kampung		pembangunan kampung.	5	Belum optimalnya sinergi pengembangan BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)
			6	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung.
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan kampung
			2	Masih rendahnya kompetensi aparatur kampung
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrumen kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimalnya pembangunan kampung	1	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
			2	Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data by name by address terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung
			3	Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.9 Bidang Perhubungan

Urusan bidang perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang berperan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi serta pembinaan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan transportasi, serta pelayaran di Kabupaten Fakfak. Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakefektifan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.15.

Tabel IV.15 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya konektivitas	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan	1	Minimnya sarana prasarana angkutan darat dan laut



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
transportasi antar moda yang belum ditunjang dengan prasarana dan moda transportasi publik yang mendukung mobilitas barang dan jasa		dan keandalan pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	2	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			3	Tingginya biaya transportasi
	2	Angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
	3	Belum optimalnya tata kelola urusan perhubungan	1	Belum optimalnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikai dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.16.

Tabel IV.16 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	1	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				2	Terbatasnya SDM di tingkat kabupaten, distrik dan kampung yang menguasai keahlian bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/management sistemE-Government termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem e-Government, serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				4	Belum optimalnya pelembagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) di tingkat kabupaten hingga kampung.
				5	Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan 4G/5G) belum sampai ke semua Distrik dan kampung

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.17.

Tabel IV.17 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1	Proporsi koperasi sehat sangat rendah	1	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
				2	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
				3	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
				4	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1	Lemahnya kapasitas produksi, pemasaran dan pembiayaan UMKM	1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
				2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
				3	Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha
				4	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal
				5	Mayoritas UMK memiliki manajemen usaha yang masih lemah serta tidak berbadan usaha

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.12 Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.18.

Tabel IV.18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Masih rendahnya realisasi serta kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1	Belum optimalnya perkembangan pengusaha asli papua dalam kegiatan ekonomi
			2	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang izin usaha dan izin lokasi
			3	Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah
	2	Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan <i>investor needs</i> dan pengembangan potensi unggulan daerah	1	Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat
			2	Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
			3	Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah
			4	Belum optimalnya Sistem Perizinan Online Daerah
	3	Lemahnya tata kelola penanaman modal	1	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan
			3	Belum optimalnya promosi investasi daerah

Sumber: Hasil analisis, 2021

4.1.2.13 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan bidang kepemudaan dan olah raga merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menyelenggarakan pembinaan pemuda serta kegiatan keolahragaan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan umum bidang kepemudaan dan olah raga yang ditemukan di Kabupaten Fakfak. Adapun pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.19.

Tabel IV.19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pengembangan daya saing	1	Belum optimalnya pembudayaan dan	1	Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana olah raga serta kurangnya fasilitas latihan
			2	Pelajar berprestasi olah raga sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga		pembinaan prestasi olahraga	3	Keterbatasan SDM pertandingan
			4	Terbatasnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
	2	Belum optimalnya peran sosial pemuda	1	Lemahnya orientasi pemuda di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga
			2	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika
	3	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuai kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.14 Bidang Statistik

Urusan bidang statistik merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang berperan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perumusan kebijakan daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan statistik di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.20.

Tabel IV.20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Statistik di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perumusan kebijakan daerah	1	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	1	Terdapat <i>respondent burden</i> atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS
			2	Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh Statistik dengan data yang disajikan oleh OPD
			3	Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPS
			4	Belum optimalnya penyusunan profil desa/kelurahan pada tahun berjalan
			5	Ketepatan waktu rilis (<i>timeliness</i>) yang masih belum optimal
			6	Data makro statistil belum didukung data by name by address terpilah OAP dan nonOAP dengan cakupan 100%
			7	Belum optimalnya upaya integrasi/berbagi pakai data antara statistik BPS dengan data terpilah OAP dan nonOAP by name by address yang dikumpulkan berbasis kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
			8	Sumber Daya Manusia di bidang statistik masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi dan standar kompetensi

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia
	2	Belum optimalnya penerapan layanan unggulan Digital Government Services (DGS)	1	Pemanfaatan sumber data baru (di antaranya adalah <i>big data</i> dan <i>data administrative</i>) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.15 Bidang Persandian

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib non pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan informasi dan integrasi bangsa. Meskipun demikian, secara umum terdapat permasalahan pola penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Fakfak yang belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang persandian di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.21.

Tabel IV.21 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Persandian di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian	1	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1	Belum optimalnya penerapan SOP pengamanan informasi di OPD
			2	Peralatan sandi kurang memenuhi Standart Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.16 Bidang Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Fakfak, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membawa arah baru dalam **pembangunan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan** dan peradaban Kabupaten Fakfak. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter masyarakat, memperteguh persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan, melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang kebudayaan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.22.

**Tabel IV.22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Fakfak**

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	1	Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal	1	Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul, arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
	2	Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya
			2	Belum adanya roadmap dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Kabupaten Fakfak untuk masa yang akan datang.
			3	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya skala kabupaten representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
			4	Belum adanya museum etnografi sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.17 Bidang Perpustakaan

Urusan bidang perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar yang berperan dalam pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memnuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perpustakaan di Kab. Fakfak terdapat dalam Tabel IV.23.

**Tabel IV.23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Fakfak**

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan perpustakaan	1	Belum optimalnya upaya pembinaan perpustakaan	1	Masih rendahnya kecakapan membaca
			2	Masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat
			3	Belum terlaksananya penyelenggaran dan pengembangan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, khususnya sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.2.18 Bidang Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam

rangka penciptaan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Arsip juga dapat berfungsi sebagai bukti perekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan dapat menjadi memori kolektif yang berguna sebagai pembelajaran untuk pembangunan daerah kedepannya. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perpustakaan di Kab. Fakfak terdapat dalam Tabel IV.24.

Tabel IV.24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kearsipan	1	Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	1	Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip
			2	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip
			3	Belum semua OPD memiliki SDM kearsipan/arsiparis

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.

4.1.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan pemerintahan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.25.

Tabel IV.25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perikanan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH
Masih rendahnya pendapatan masyarakat Fakfak di sektor perikanan dan kelautan	1	Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
			2	Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
			3	Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir
			4	Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan
			5	Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan
			6	Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan perikanan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	2	1	Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
		2	Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan
	3	1	Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
		2	Belum optimalnya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3.2 Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Kab. Fakfak terdapat dalam Tabel IV.26.

Tabel IV.26 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pariwisata di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah Kabupaten Fakfak	1	1	Belum terstrukturnya data potensi pariwisata yang dapat mendorong masuknya investasi.
		2	Terbatasnya atraksi di destinasi wisata sehingga belum mampu mendorong peningkatan lama kunjung wisatawan
		3	Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna endemik
		4	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya
		5	Kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata masih sangat terbatas
		6	Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata
		7	Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat
	2	1	Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi di sektor pariwisata masih belum optimal dikembangkan di Kabupaten Fakfak
	3	1	Belum optimalnya kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat
		2	Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
		3	Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2021



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai
				3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
3	Usaha peternakan di kawasan Bomberai yang belum optimal dikelola dari hulu ke hilir	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	1	Belum optimalnya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)
				2	Belum optimalnya pendataan hewan ternak
		2	Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	1	Jumlah dokter hewan terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten
				1	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran peternakan yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		4	Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan	1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
				2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah sharring knowledge peternak
				3	Belum optimalnya pembinaan bagi kelompok ternak

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3.4 Bidang Kehutanan

Urusan pemerintahan bidang kehutanan menyangkut urusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Penyelenggaraan kehutanan di Kabupaten Fakfak harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan di Kabupaten Fakfak harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang kehutanan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.28.

Tabel IV.28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kehutanan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dalam memastikan pengelolaan yang	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor kehutanan dan lahan	1	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah
	2	Belum optimalnya	1	Belum optimalnya penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
berkelanjutan di bidang kehutanan		pengelolaan hutan adat		dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			2	Belum optimalnya peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3.5 Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.29.

Tabel IV.29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1	Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
			2	Terbatasnya konektivitas antarwilayah dalam menyebabkan tingkat kemahalan
			3	Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
			4	Peran serta Orang Asli Papua di Kabupaten Fakfak yang masih rendah dalam sektor perdagangan
			5	Rendahnya sarana-prasarana perdagangan dan pasar rakyat
	2	Belum adanya standar mutu komoditas	1	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
			2	Penurunan komoditas ekspor komoditas unggulan lokal
			3	Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis komoditas unggulan lokal
			4	Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan
	3	Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1	Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
			2	Belum optimalnya jaminan harga yang terjangkau

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3.6 Bidang Perindustrian

Urusan pemerintahan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya pertumbuhan industri manufaktur dan industri kecil di masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal	1	Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	1	Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu
			2	Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/persampahan dalam pengembangan industri
			3	Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2	Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1	Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
			2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal berbasis komoditas unggulan yang dapat dipasarkan (seperti industri pertanian, perikanan, perkebunan maupun pengolahan pala)
	3	Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1	Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
			2	Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.3.7 Bidang Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang transmigrasi di Kabupaten Fakfak ditampilkan dalam Tabel IV.31.

Tabel IV.31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pembangunan Satuan	1	Belum berkembangnya pusat pertumbuhan	1	Belum optimalnya hasil pertanian di Kawasan Transmigrasi di Bomberai dan Tomage

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Permukiman dan Pusat Pelayanan Kawasan baru di Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada pengembangan pertanian, jasa (pemasaran, distribusi, dan keuangan), serta Industri pengolahan.		ekonomi di kawasan transmigrasi di Kabupaten Fakfak	2	Masih rendahnya kualitas SDM Transmigrasi dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian
	2	Rendahnya kualitas sarana prasarana di kawasan transmigrasi	1	Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi,telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifikasi)
			2	Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar kampung di dalam kawasan dan antar kawasaan transmigrasi
			3	Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan transmigrasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4 Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

4.1.4.1 Bidang Pemerintahan Umum

Urusan bidang pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemeirntah Daerah. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang mencakup urusan pemeirntahan umum adalah: (1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; (2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya; (4) penanganan konflik sosial; (5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan; (6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; serta (7) pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Tabel IV.32 menunjukkan pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.32 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya birokrasi	1	Belum optimalnya kelembagaan	1	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i>

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel		dan tata laksana pemerintahan umum	2	Kuatnya prinsip <i>money follow function</i> dan <i>money follow organization</i>
			3	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan
			2	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			4	Belum maksimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4.2 Bidang Aparatur dan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan daerah terkait urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan upaya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian secara garis besar terkait peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Berikut ini pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.33 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1	Belum optimalnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
			2	Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan
			3	Masih belum terpenuhinya kewajiban peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan
			4	Belum optimalnya pengembangan mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
	2	Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	1	Belum efektifnya sosialisasi sistim penilaian beban kerja pegawai
			2	Belum berkembangnya sistem reward untuk ASN berprestasi dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
			3	Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan OPD lain
			4	Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
			5	Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
	3	Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
			2	Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
			3	Model <i>e-government</i> masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi
			4	Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4.3 Bidang Keuangan Daerah

Urusan pemerintahan bidang keuangan daerah berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Berikut ini pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.34 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Keuangan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
			2	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
			2	Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
			6	Prinsip <i>value for money</i> dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan
			7	Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus, khususnya pasca UU No 2 Tahun 2021
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4.4 Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, pembangunan daerah ditampilkan dalam Tabel IV.35.

Tabel IV.35 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1	Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya
			2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
			3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
			4	Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah
			5	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
	2	Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1	Belum optimalnya koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan
			2	Perencanaan lima tahunan yang berubah-ubah, sehingga tidak sesuai dengan desain perencanaan pembangunan jangka panjang Fakfak
			3	Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai
			4	Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up)

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
			5	Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/ kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah
			6	Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah
	3	Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan
			2	Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan
			3	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
			4	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah
			5	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum sepenuhnya SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound</i>) dan terstruktur dalam cascading
			6	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dimanfaatkan untuk kebijakan perencanaan penganggaran dan untuk pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah penanggung jawab program/kegiatan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4.5 Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Tabel IV.36 menunjukkan pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak.

Tabel IV.36 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan	1	Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1	Belum optimalnya reviu terhadap dokumen Perencanaan Anggaran dan Dokumen-dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
			2	Belum optimalnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemda Fakfak
			3	Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
dalam pembangunan daerah	2	Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi
			2	Terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, serta terdapat pekerjaan tidak tepat waktu
			3	SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.1.4.6 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Fakfak terdapat dalam Tabel IV.37.

Tabel IV.37 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Fakfak

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya inovasi, penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Fakfak	1	Masih rendahnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Fakfak	1	Masih lemahnya kapasitas lembaga Pemerintah Daerah pelaksana fungsi litbang
			2	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan
			3	Belum sinergisnya program-program berbasis kelitbangan antar Perangkat Daerah
			4	Masih terbatasnya kolaborasi instansi/ lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/ pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat
			5	Masih kurangnya hasil kelitbangan yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
			6	Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kabupaten Fakfak
	2	Masih lemahnya tumbuh kembang inovasi daerah	1	Pelaksanaan inovasi di daerah masih bersifat parsial, belum menjadi kebijakan Pemda secara luas dan masif
			2	Belum terbangunnya kerangka kebijakan Pemda yang berorientasi menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi
			3	Belum terbangunnya infrastruktur inovasi daerah
			4	Adanya gap implementasi inovasi di daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam



perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Fakfak di masa yang akan datang. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Isu Strategis Kabupaten Fakfak dalam Konteks Internasional;
2. Isu Strategis Kabupaten Fakfak dalam Konteks Nasional;
3. Isu Strategis Kabupaten Fakfak dalam Konteks Pembangunan Provinsi Papua Barat;
4. Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kabupaten Fakfak antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Fakfak;
5. Isu Strategis dari penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2024;
6. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak adalah: (1) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); (2) peluang investasi asing dan kerjasama internasional; (3) transformasi digital; serta (4) pandemi Covid-19.

4.2.1.1 Agenda Tujuan Pembangunan Berlanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan Kabupaten Fakfak menyesuaikan dengan agenda global, secara khusus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak ini selaras pula dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Papua Barat.

TPB atau SDGs merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa - Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Adapun keseluruhan tujuan global tersebut adalah:

1. **Tanpa kemiskinan**, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. **Tanpa kelaparan**, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian



berkelanjutan;

3. **Kehidupan sehat dan sejahtera**, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. **Pendidikan berkualitas**, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. **Kesetaraan gender**, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. **Air bersih dan sanitasi layak**, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. **Energi bersih dan terjangkau**, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. **Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. **Industri, inovasi dan infrastruktur**, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. **Berkurangnya kesenjangan**, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. **Kota dan komunitas berkelanjutan**, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab**, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Penanganan perubahan iklim**, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. **Ekosistem laut**, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. **Ekosistem daratan**, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. **Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan

membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. **Kemitraan untuk mencapai tujuan**, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

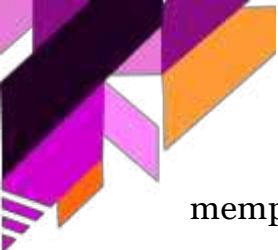
Gambar IV.1 Sustainable Development Goals/
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



4.2.1.2 **Peluang Investasi Asing dan Kerjasama Internasional**

Pembangunan Kabupaten Fakfak memiliki sejarah panjang yang terbuka dengan dunia global, baik dalam konteks perdagangan, investasi, dan sosiologis dalam masyarakat di wilayah Fakfak. Dari sisi komoditas yang dimiliki Fakfak, yakni pala, menjadi bagian dari sejarah perdagangan Nusantara dan internasional melalui Jalur Rempah (Spice Road). Dalam sejarah ekonomi Fakfak, penduduk Fakfak juga telah melakukan ekspor pala ke berbagai negara di dunia internasional. Hal ini merupakan potensi dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi wilayah Fakfak. Saat ini, wilayah Fakfak juga memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan oleh investasi asing, baik di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, minyak, kehutanan, maupun proses hilirisasi industri di wilayah Fakfak maupun daerah-daerah sekitar Kabupaten Fakfak.

Investasi yang ditanamkan pada berbagai sektor di Fakfak diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan



mempercepat pemulihan ekonomi wilayah Fakfak. Investasi asing langsung memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir ke negaraterbelakang. Selain itu investasi asing langsung dapat mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan sendiri lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing.

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

4.2.1.3 Transformasi Digital

Pembangunan Kabupaten Fakfak dipengaruhi oleh factor transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat memungkinkan pengembangan *smart city* dan *smart services*. *Smart City* adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan *smart services* dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, *internet of things*, *cloud computing*, *big data*, *data analytic*, *space/geographical information integration*, dan lain sebagainya.

Istilah Industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era Industry 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi machine-to-machine, komunikasi human-to-machine, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Beberapa dasar faktor penggerak. Pertama adalah peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Peran SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill serta meningkatkan keterampilan SDM industri yang dominan low/middle ke level *high skill*.



4.2.1.4 Pandemi Covid-19

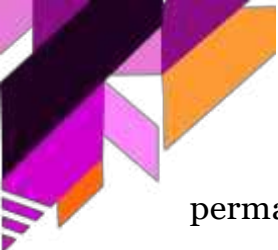
Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang berawal di China pada akhir tahun 2019 kemudian menjadi pandemi dan hingga Akhir 2020 telah menyebar ke 220 negara di dunia. Tercatat 25 juta orang tercatat telah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan berat ini, dan hampir 2 juta di antaranya meninggal dunia.

Kasus Covid-19 pertama di Kabupaten Fakfak muncul pertama kali pada bulan Mei 2020 sebanyak 2 kasus, yang kemudian terus bertambah setiap bulan dengan puncak penambahan kasus pada bulan November 2020. Secara kumulatif pada tahun 2020 terjadi 83 kasus, dengan jumlah kasus sembuh 75 orang (tingkat kesembuhan 90,4%) dan 8 kasus meninggal (Angka kematian kasus atau Case fatality Rate/ CFR 9,6%). Sementara di Provinsi Papua Barat, pada periode yang sama kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 5.979 kasus, dengan kematian tercatat 130 jiwa (CFR 2,2%)

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini berdampak bukan saja pada bidang kesehatan, tetapi pada hampir semua sektor kehidupan. Dampak negatif covid-19 terasa di seluruh perekonomian dunia, yang membawa kontraksi yang sangat buruk termasuk Indonesia dan Papua Barat khususnya. Salah satu indikatornya, PDRB ADHB Papua Barat yang sempat mencapai pada tahun 2018 sebesar 10,94%, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar -0,93%.

Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, terjadi refocusing anggaran di semua tingkatan pemerintahan yang menyebabkan pendanaan banyak sektor pembangunan berkurang cukup signifikan. Pandemi ini juga menyebabkan capaian indikator-indikator pembangunan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada sektor kesehatan, misalnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta gizi buruk menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang tentunya berdampak pada peningkatan angka kematian dan penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Sektor-sektor yang mengalami penurunan ekonomi selama pandemi antara lain transportasi, akomodasi dan kuliner, perdagangan, jasa perusahaan, listrik dan gas, serta pertanian dan perikanan. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada bidang sosial ekonomi, antara lain terjadinya PHK di banyak industri dan pengurangan pendapatan yang diikuti dengan menurunnya daya beli. Pada sektor pendidikan, dengan diambilnya kebijakan belajar di rumah secara online diikuti dengan berbagai



permasalahan, mulai dari sarana, kebutuhan jaringan internet, penguasaan teknologi yang masih rendah.

Dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, perencanaan pembangunan pun wajib mempertimbangkan segala faktor yang terkait dan/atau terdampak pandemi. Selain itu upaya penanggulangan dan pemulihan yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung masih tetap diperlukan hingga kondisi kehidupan masyarakat telah beradaptasi dengan Covid-19 sebagai salah satu penyakit endemis.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak adalah: (1) arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tentang pembangunan wilayah Papua Barat; (2) Kebijakan Otonomi Khusus pasca penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; serta (3) arahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

4.2.2.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Tentang Pembangunan Wilayah Papua Barat

Pembangunan Kabupaten Fakfak diselaraskan pula dengan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Tema RPJMN Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Dalam konteks pembangunan Kab. Fakfak, desain pembangunan Fakfak disesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dinyatakan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2.2 Kebijakan Otonomi Khusus

Dasar hukum penyelenggaraa otonomi khusus di Kabupaten Fakfak adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pokok pemberian otonomi khusus adalah pengakuan dan penghormatan karakteristik sebuah daerah yang spesifik, sekaligus sebagai upaya untuk memperkokoh integrasi nasional yang ditempuh melalui penghargaan secara setara atas keragaman kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan pemberian otonomi khusus adalah sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 maka ditetapkan peraturan turunannya yaitu **PP Nomor 106 Tahun 2021** tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, serta **PP Nomor 107 Tahun 2021** tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Dalam Gambar IV.2 dapat terlihat bahwa secara umum terdapat 5 norma pengaturan dalam PP No.106 Tahun 2021 dan PP No.107 Tahun 2021, yaitu:

1. Kewenangan khusus;
2. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
3. DPRP dan DPRK yang diangkat;

4. Keuangan Otsus dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP); serta
5. Pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Gambar IV.2 Norma Pengaturan PP Nomor 106 Tahun 2021
dan PP Nomor 107 Tahun 2021**

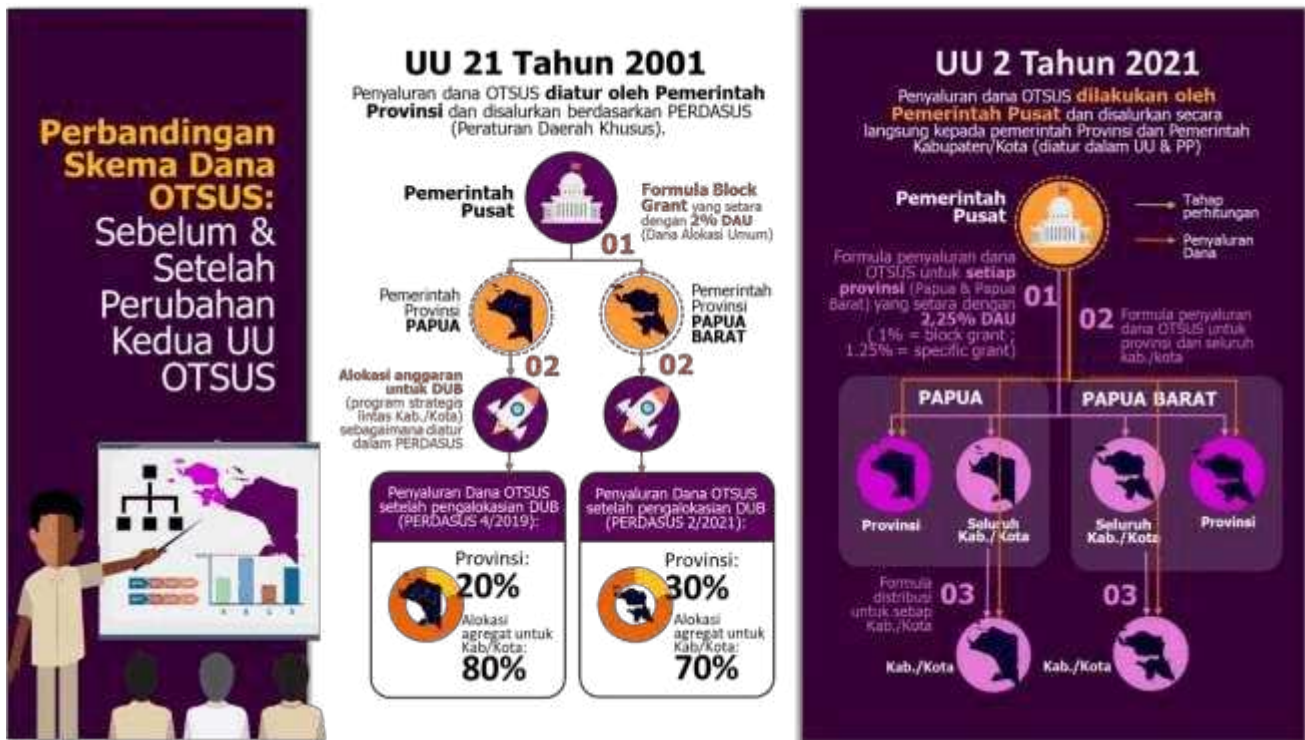


Terdapat perubahan kebijakan penyaluran dan kewenangan yang signifikan pada pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 dibandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2% DAU) diatur oleh Pemerintah Provinsi dan disalurkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2,25% DAU) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan disalurkan secara langsung kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 serta PP Nomor 107 Tahun 2021 (lihat Gambar IV.3). Hal ini berimplikasi pada menguatnya peran kabupaten/kota termasuk Kabupaten Fakfak dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus, peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam provinsi secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga kesenjangan antara Provinsi Papua Barat dan daerah lain bisa dimoderasi, dan hak-hak dasar penduduk Asli Papua mulai bisa dipenuhi. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menekankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan

pemerintahan yang harus bertumpu pada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.

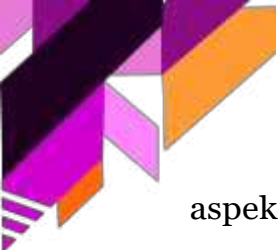
Gambar IV.3 Perbandingan Skema Dana Otonomi Khusus: Sebelum dan Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus



Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Untuk menjalankan mandat tersebut, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang menyasar OAP, pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) agar seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan tepat sasaran. Beberapa kabupaten telah menjalankan kegiatan tersebut, sehingga cakupan data yang terkumpul relatif lengkap. Sedangkan kabupaten/kota yang lain masih belum memahami dan karenanya belum dapat melaksanakan SAIK+. Ke depan perlu kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kampung agar kegiatan yang sangat penting ini dapat terlaksana dengan baik dan cakupan data mencapai 100%.

Otonomi khusus yang menjadi basis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat mencakup aspek kewenangan dan tugas pemerintahan yang sangat luas, bukan hanya aspek pemerintahan umum yang berlaku di semua tempat, namun aspek-aspek spesifik yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hak azasi manusia. Aspek-



aspek kewenangan yang secara spesifik harus menjadi perhatian pemerintah provinsi mencakup perlindungan dan pengembangan masyarakat adat, pengembangan ekonomi orang asli Papua, keterjaminan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, konservasi lingkungan hidup, dan hubungan antar umat beragama yang bersendi toleransi/ penghargaan. Kewenangan-kewenangan tersebut secara spesifik menekankan pada perlakuan yang bersifat afirmatif untuk masyarakat asli Papua. Bentuk afirmasi lain berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan kepemimpinan politik, dimana Orang Asli Papua memiliki saluran yang lebih luas melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan prioritas dalam kepemimpinan politik di provinsi dan kabupaten/kota.

4.2.2.3 Arahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pada awal Triwulan IV tahun 2020 ini, Presiden RI telah memberikan menginstruksikan seluruh kementerian untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden menginstruksikan pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat, dan zona ekologis. Selain itu juga diperintahkan percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis kecamatan dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau. Dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah harus lebih diutamakan, demikian perintah yang tertuang dalam dokumen Inpres tersebut. Kemudian, diperlukan adanya pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 menyebut pembiayaan dibebankan APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan. Adapun agenda percepatan dalam Inpres adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1:

Percepatan pembangunan SDM unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua yang dikhususkan kepada OAP.

2. Strategi 2:

Percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang

berkualitas dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keterkaitan wilayah, kota kampung, wilayah adat, kemitraan pelaku ekonomi dan potensi sektor ekonomi yang dikelola terpadu dari hulu ke hilir dan terfokus kepada OAP.

3. Strategi 3:

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi.

4. Strategi 4:

Peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang wilayah berbasis kearifan lokal.

5. Strategi 5:

Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai kemanusiaan serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Provinsi Papua Barat, strategi-strategi percepatan dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 juga perlu di manifestasikan di dalam sasaran, strategi dan program pembangunan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Tabel IV.38 akan menyajikan pemetaan sinergi antara Bidang Urusan Pembangunan dan strategi percepatan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

**Tabel IV.38 Strategi Pembangunan di Papua Barat
Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2020**

POIN STRATEGI PERCEPATAN DALAM INPRES	MANIFESTASI BENTUK PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN
1	Penyediaan akses masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi [akademik, profesi, dan vokasi	Pendidikan
	Pemerataan akses layanan pendidikan dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	
	Penurunan angka tuna aksara melalui pendidikan keaksaraan	
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	
	Penerapan pendidikan kurikulum kontekstual papua	

POIN STRATEGI PERCEPATAN DALAM INPRES	MANIFESTASI BENTUK PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN
	Pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk putra-putri OAP	Kesehatan
	Peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak	
	Penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
	Penyediaan tenaga kesehatan yang merata dan strategis	
	Pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan <i>telemedicine</i>	Sosial
	Peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat adat	
	Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan	
2	Pengembangan komoditas unggulan	Perkebunan
	Pengembangan destinasi wisata alam dan budaya	Pariwisata
	Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal papua, beserta kewirausahaan mama-mama papua	Perdagangan, UMKM
	Peningkatan industri peternakan sesuai dengan potensi wilayah adat	Peternakan
	Peningkatan industri perikanan melalui pemberdayaan ekonomi nelayan	Perikanan
3	Peningkatan kedaulatan pangan lokal	Pangan
	Pemenuhan energi listrik	Energi
	Penyediaan akses air minum	Pekerjaan Umum
	Pembangunan terminal penumpang dan barang	Perhubungan
	Peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan sungai	
	Peningkatan bandar udara dan bandar udara perintis, beserta pelayanan jembatan udara	
	Meningkatkan akses untuk konektivitas antar provinsi, antar kabupaten dan antar distrik dan kampung	
4	Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli papua	Kehutanan
	Pemetaan dan penataan daerah rawan bencana untuk penyusunan langkah rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pascabencana	Penataan ruang
	Meningkatkan cakupan administrasi kependudukan, catatan sipil, dan statistik hayati yang inklusif, lengkap, akurat dan tepat waktu	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Inpres Nomor 9 Tahun 2020

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Papua Barat

.Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat 2023-2026, terdapat 8 (delapan) isu strategis pembangunan dan 4 isu strategis lintas sektor (*cross cutting*) di Papua Barat sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar IV.4.

Gambar IV.4 Isu Strategis Pembangunan dan Isu Strategis lintas Sektor (Cross Cutting) Papua Barat 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026

4.2.3.1 Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan Otonomi Khusus

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam berbagai urusan dan bidang kewenangan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima, disamping adanya kebijakan-kebijakan kontekstual khusus penyelenggaraan Pembangunan di Papua Barat terkait dengan kebijakan otonomi khusus Papua.

Otonomi Khusus di Papua telah dilaksanakan selama 20 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua tersebut berdampak pada kemajuan pembangunan dari sisi ekonomi, tatanan demokrasi, sosial, kebudayaan, serta pelayanan publik oleh pemerintah di Papua. Namun demikian, meski telah berjalan 20 tahun, pemberian Otonomi Khusus tersebut belum mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umum pembangunan di Wilayah Papua, antara lain (1) rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia; (2) belum berkembangnya pengelolaan potensi unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3) rendahnya aksesibilitas,



konektivitas wilayah, sarana-prasarana dasar perumahan, elektrifikasi, air minum, telekomunikasi dan informatika; (4) belum terjaganya kualitas lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan; serta (5) rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan serta tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan secara matang, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Adanya perubahan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus secara akuntabel, efektif dan efisien, transparan, serta tepat sasaran. Selain itu, perubahan Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan alokasi dana Otonomi Khusus dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Wilayah Papua yang pada akhirnya akan mewujudkan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN



menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik hingga ke kampung-kampung.

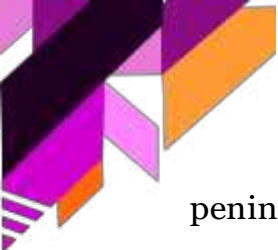
4.2.3.2 Rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan & kesehatan)

Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi isu yang strategis bukan saja karena pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang, tetapi juga karena dengan pencapaian yang baik atas indikator-indikator yang ditetapkan dalam kedua bidang urusan ini merupakan sumbangan terbesar untuk keberhasilan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif menjadi arah kebijakan dan strategi dalam RIPPP 2022-2041.

Dalam bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator untuk mengukur dampak pembangunan bidang pendidikan. Isu-isu yang perlu ditangani antara lain peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penjaminan mutu dan tatakelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Barat saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal. Selain ke-3 kondisi tersebut, tingginya prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat juga merupakan isu strategis mengingat stunting adalah kondisi yang dapat dicegah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Oleh karenanya prevalensi stunting juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di Papua Barat, bersama dengan Angka Harapan Hidup.

Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup



peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tatakelola fasilitas pelayanan kesehatan.

4.2.3.3 Belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal secara produktif & inovatif

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multistakeholder di Papua Barat. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi periode sebelumnya menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya sektor penggerak ekonomi di Papua Barat dalam mengungkit kesejahteraan rumah tangga masyarakat Papua terutama OAP, serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan intervensi program konvergen dengan memperhatikan lokus wilayah prioritas kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat miskin ekstrem di Papua Barat, dan memfokuskan kepada 5 (lima) wilayah prioritas melalui Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Beberapa konvergensi instrument kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan **dan perlu dilanjutkan** di 5 kabupaten prioritas dengan jumlah penduduk 12.360 orang yang tersebar di 34 distrik dan 185 kampung di Papua Barat pada tahun 2021 yaitu:

1. Menurunkan Beban Pengeluaran melalui beberapa Program Strategis antara lain:
 - a. Program strategis peningkatan pembangunan kampung (PROSPPEK) Provinsi Papua Barat;
 - b. Program Jaminan Kesehatan, terutama untuk OAP;
 - c. Program Pemberdayaan Sosial;
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terutama untuk OAP;
 - e. Program “Tangan Kasih” (pekerja formal, informal, disabilitas dan lintas agama);
 - f. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Meningkatkan Pendapatan melalui beberapa kegiatan antara lain:



- a. Pemberdayaan UMKM, terutama UMKM OAP
 - b. Pengembangan ekonomi Lokal; dan
 - c. Penyuluhan pertanian
3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan melalui beberapa kegiatan antara lain:
- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas lokal serta berbasis kampung yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

4.2.3.4 Ketahanan wilayah & kota yang rentan atas perubahan iklim, demografi, bencana & polusi

Derajat kerentanan wilayah dan kota dalam menghadapi berbagai macam dinamika atau perubahan beranekaragam, dan hal tersebut di tentukan berdasarkan kapasitas wilayah dan daerah yang bersangkutan. Kapasitas dalam hal ini mencakup kapasitas fisik (infrastruktur), ekonomi/fiskal, dan sosial. Maka dari itu, isu strategis ini sangat berkaitan dengan pembangunan di ketiga sektor tersebut. Disisi lain, perubahan yang dimaksud juga memiliki banyak konteks, misalnya perubahan sistem lingkungan dan fisik, maupun institusi. Contohnya, untuk perubahan lingkungan dan fisik bisa diakibatkan oleh perubahan iklim dan kejadian bencana. Sementara perubahan institusi bisa diakibatkan adanya pergeseran kebijakan atau perubahan struktur birokrasi. Papua Barat, baik di tingkat Provinsi maupun Daerah merupakan sebuah entitas wilayah yang dalam kadar tertentu memiliki risiko untuk mengalami perubahan-perubahan ini di masa yang akan datang, yang mungkin akan mengganggu sistem untuk mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, isu strategis dipersempit terhadap kerentanan terhadap tiga kondisi yang saat ini dianggap menjadi tiga faktor dominan yang akan menimbulkan perubahan



sistem, yaitu; (1) Perubahan iklim; (2) Demografi; dan (3) Bencana dan Polusi.

Perubahan iklim merupakan isu global, yang ditandai dengan meningkatnya kadar emisi gas rumah kaca. Fenomena ini memiliki dampak terhadap dunia, tidak terkecuali di Papua Barat. Masyarakat rentan secara sosial (tidak berdaya secara ekonomi) dan yang hidup di lingkungan yang memiliki risiko terhadap perubahan iklim seperti fenomena banjir, perlu menjadi perhatian utama. Namun disisi lain, Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki sumber daya kehutanan yang merupakan Kawasan konservasi menyumbang potensi untuk memitigasi perubahan iklim, Maka dari itu, sumberdaya perlu tersebut perlu di pertahankan. Papua Barat juga memiliki kerentanan terhadap perubahan demografi, dalam hal ini pergeseran komposisi penduduk. Tren tingkat rasio ketergantungan di Papua Barat cenderung meningkat. Apabila tidak di mitigasi dengan kebijakan yang tepat, kerentanan penduduk usia produktif terhadap beban pembiayaan hidupnya akan meningkat. Papua Barat juga memiliki risiko dan kerentanan terhadap bencana, utamanya banjir dan kekeringan. Pada wilayah kabupaten yang memiliki tingkat bahaya terhadap bencana tersebut, risiko akan terpaparnya bencana akan semakin tinggi ketika kerentanan wilayah tinggi. Pada intinya, ketahanan dalam konteks di poin ini merupakan kemampuan wilayah dan kota untuk kembali pulih ketika ada suatu hal mengganggu atau berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.3.5 Penurunan kualitas lingkungan hidup serta terdapat potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif

Pemeliharaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup merupakan sesuatu yang perlu dianggap strategis di seluruh wilayah, tidak terkecuali di Papua Barat. Pembangunan merupakan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak ada upaya untuk memitigasi penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembangunan tersebut. Tentunya, dalam konteks ini yang dimaksud dengan pembangunan maupun dan lingkungan akan bersifat sangat luas. Maka dari itu, proses perencanaan pembangunan telah mengisyaratkan adanya kajian-kajian khusus lingkungan, misalnya KLHS. Operasionalisasi mitigasi terhadap ancaman kerusakan lingkungan perlu di detilkan lagi dalam dokumen strategis berbagai sektor. Kebijakan, arahan dan program yang pro-lingkungan perlu di prioritaskan. Isu global perubahan iklim, selain memerlukan upaya mitigasi juga memerlukan upaya adaptasi. Adaptasi perubahan iklim bisa berada di berbagai level, dari level



komunitas sampai dengan level nasional. Di level provinsi, upaya adaptasi sulit terlihat operasionalisasinya, namun bisa diupayakan dengan penyusunan kebijakan untuk mendorong adanya upaya adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang terdampak. Untuk itu, Papua Barat perlu memetakan tingkat kerentanan perubahan iklim dilihat dari lokasi dan karakter masyarakatnya.

4.2.3.6 Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta konektivitas daerah

Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat yang belum signifikan juga dipengaruhi oleh rendahnya kinerja infrastruktur. Konektivitas wilayah di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Provinsi Papua Barat serta banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar kampung dan distrik akibatnya rendah, karena minimnya pengembangan jalan yang menghubungkan akses mereka untuk bermobilisasi. Selain itu, permasalahan konektivitas juga di pengaruhi oleh keadaan geografis yang ekstrim, sehingga moda angkutan umum di Papua Barat sangat terbatas.

4.2.3.7 Belum optimalnya pembangunan berbasis gender & perlindungan terhadap anak serta lanjut usia

Pembangunan berbasis gender bertujuan untuk memastikan tidak adanya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, termasuk memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi besar sebagai subyek dan obyek pembangunan. Perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan yang tercermin dalam dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Untuk itulah, untuk memaksimalkan peran yang begitu besar tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Kualitas manusia, baik laki-laki atau perempuan, dapat dikatakan tinggi jika memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, maupun pendapatan.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah generasi penerus sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial sehingga terpenuhi kesejahteraannya merupakan hak



setiap anak. Tidak hanya itu, anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar pemenuhan hak-hak anak tidak mengalami hambatan yang berarti. Memberikan pengasuhan, pemenuhan hak, serta perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, namun memastikan terselenggaranya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Papua Barat.

Perlindungan terhadap lanjut usia sebagai salah satu kelompok rentan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga lanjut usia. Meskipun secara tidak langsung, perlindungan terhadap lanjut usia berpotensi meningkatkan IPM melalui peningkatan Angka Harapan Hidup karena menurunnya angka kematian pada usia yang lebih muda serta pelayanan publik ramah lansia yang lebih berkualitas. Perlindungan sosial untuk warga lanjut usia (lansia) menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian pemerintah di tingkat pembangunan nasional, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun kebijakan dan program perlindungan sosial saat ini telah diarahkan untuk memperkuat implementasi jaminan sosial untuk lansia, pengembangan sarana dan prasarana ramah lansia, serta penghormatan dan pemberdayaan warga lansia.

4.2.3.8 Masih terjadi konflik horizontal & kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah

Penciptaan kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan program-program pembangunan di Papua Barat. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

Potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan yang ada di antara berbagai golongan dan kelompok masyarakat bisa saja meruncing jika tidak difasilitasi dan dimoderasi oleh pihak berwenang. Sekecil apapun potensi konflik sosial harus dilakukan deteksi dan pencegahan dini, itulah pentingnya kearifan lokal guna menciptakan keserasian sosial di masyarakat, tentunya diperlukan peran serta seluruh elemen di masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga aparat keamanan harus sinergi dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini potensi konflik



sosial di masyarakat. Selanjutnya potensi konflik sekecil apapun yang ada dalam masyarakat selayaknya harus tetap ada dalam kendali dan pengawasan pihak berwenang dalam kerangka menjaga kondusivitas wilayah Provinsi Papua Barat, berbagai strategi dan pendekatan untuk menjaga kondunsivitas wilayah Papua Barat harus terus diupayakan oleh Pemda agar kehidupan yang harmonis tetap berlangsung.

Beberapa kebijakan yang terus digalakkan dalam kerangka menjaga kondunsivitas wilayah Papua Barat ini antara lain: **Pertama**, Memperkuat sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Papua Barat. **Kedua**, Penguatan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga terciptanya kondunsivitas daerah. **Ketiga**, Penguatan sistem keamanan dan ketertiban yang sudah terselenggara selama ini. **Keempat**, Penguatan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan diseminasi penciptaan kondisi yang aman dan kondusif.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Fakfak

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Identifikasi permasalahan dan Isu Strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang terkait sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat 5 (lima) Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Fakfak tahun 2019-2024. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya- upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu- isu strategis Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

4.2.4.1 Isu Strategis 1: Pembangunan Manusia yang Berkeadilan

Untuk mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkeadilan di Kabupaten Fakfak, terdapat 7 aspek yang menjadi isu strategis Kabupaten Fakfak yaitu:

1. Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Kesempatan Kerja;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pengarusutamaan Gender;
6. Perlindungan Sosial Masyarakat;
7. Ketahanan Keluarga.

4.2.4.2 Isu Strategis 2: Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal

Isu Strategis berkaitan dengan penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 5 aspek sebagai berikut.

4.2.4.2.1 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2020 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Fakfak adalah Lima juta rupiah per tahun. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Fakfak dari tahun 2012-2017 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Fakfak, ternyata kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Fakfak yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

4.2.4.2.2 Pengelolaan Potensi Daerah dan Penguatan Daya Saing Wilayah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (business friendly), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi lokal di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah. Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini



dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada.

4.2.4.2.3 Penguatan Daya Saing UMKM

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri.

4.2.4.2.4 Penguatan Daya Saing Industri dan Perdagangan

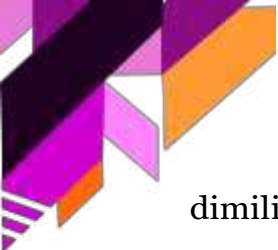
Sektor industri pengolahan di Kabupaten Fakfak memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kabupaten Fakfak mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Fakfak, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

4.2.4.2.5 Penguatan Daya Saing Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kabupaten Fakfak. Perkembangan pariwisata Kabupaten Fakfak akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Fakfak cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kabupaten Fakfak adalah dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kabupaten Fakfak.

4.2.4.3 Isu Strategis 3: Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumberdaya yang



dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumberdaya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.

Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan sumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Penataan ruang merupakan satu proses pembangunan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Dalam menyusun suatu rencana tata ruang yang baik, nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan berkelanjutan mengaitkan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, ekosistem terpadu yang menopangnya harus terjaga dengan baik. Karena itu aspek lingkungan perlu diinternalisasikan ke dalam pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pembangunan ekonomi tidak akan membuat kesenjangan dalam masyarakat sehingga terjadi pemerataan dan kestabilan.

4.2.4.4 Isu Strategis 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Responsif

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

1. Mental Aparatur;	5. Tata Laksana;
2. Pengawasan;	6. SDM Aparatur;
3. Akuntabilitas;	7. Peraturan Perundangan;
4. Kelembagaan;	8. Pelayanan Publik.

4.2.4.5 Isu Strategis 5: Lingkungan Hidup

Beberapa isue strategis daerah yang berhubungan dengan lingkungan hidup sesuai dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS-RPJMD) Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Kabupaten Fakfak;
2. Adanya dampak dan resiko kerusakan lingkungan;
3. Kinerja layanan jasa ekosistem (Jasa Lingkungan Hidup);
4. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; serta
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragaman hayati (*biodiversity*).



BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan



Bab ini menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 yang didasarkan pada konsolidasi visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Kabupaten Fakfak, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan.

5.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan kata lain Visi merupakan suatu cita- cita atau keinginan untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Visi Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam jangka menengah tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT FAKFAK YANG TERDEPAN, SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL DAN MANDIRI (TERSENYUM)”

- 1. Terdepan**, menjadikan Kabupaten Fakfak sebagai kabupaten terdepan di wilayah selatan Papua Barat dalam hal pembangunan karakter, pembangunan sektor sumberdaya manusia, infrastruktur, ekonomi, pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan melalui filosofi **SATU TUNGKU TIGA BATU IDU IDU MANININA** dengan memperhatikan nilai-nilai luhur kearifan lokal.
- 2. Sejahtera**, menjadikan Kabupaten Fakfak Yang Sejahtera adalah suatu kondisi kabupaten dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan



masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kabupaten yang sejahtera. Kabupaten yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Sejahtera adalah kondisi dimana dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin, secara adil dan merata. Dalam terminologinya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan papan, terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia. Sejahtera dimaksudkan pula sebagai jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Fakfak dengan indikator berdasarkan tingkat ekonomi yang layak dan mapan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dibidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata.

- 3. Nyaman**, memiliki arti terwujudnya masyarakat Fakfak yang merasa aman dan damai, terlepas dari segala ancaman dan gangguan, bagi masyarakat dalam beraktifitas maupun dalam iklim investasi. Secara harfiah diartikan sebagai suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kabupaten Fakfak yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti air, sarana prasarana lingkungan dan infrastruktur pendukungnya terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang- ruang kota dan kampung responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya.
- 4. Unggul**, menjadikan Kabupaten Fakfak yang unggul dalam hal sumberdaya manusia untuk dapat mengelola potensisumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kabupaten. Kabupaten Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya, memahami kondisi permasalahannya, dan mengatur/ mengambil tindakan berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan **Kabupaten Fakfak yang cerdas dan sehat**.



Kabupaten Cerdas merupakan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kabupaten. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan Kabupaten Fakfak.

Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

- 5. Mandiri**, menjadikan Kabupaten Fakfak yang Mandiri dicerminkan dalam kemandirian ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan **6 (enam) misi jangka menengah yaitu:**

1. Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang Cerdas, Sehat, Religius dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.
2. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelauatan.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel Berbasis Pelayanan Elektronik.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi.
5. Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak.
6. Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan, melalui kearifan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

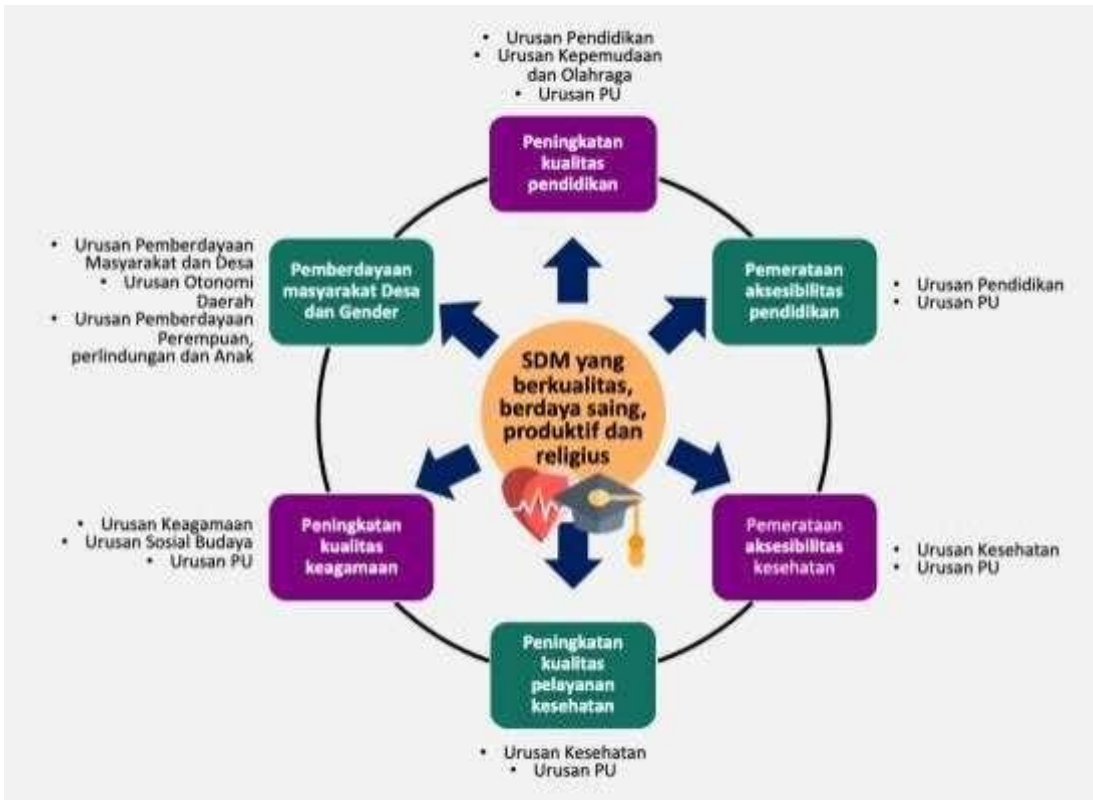
5.2 MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN FAKFAK 2021-2026

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan 6 misi jangka menengah yaitu:

5.2.1 Misi 1: Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat religius dan produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.

Misi Pertama, dengan tujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran antara lain di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan non formal, standardisasi sarana prasarana pendidikan, kemitraan atau kerja sama, beasiswa, kapasitas pendidikan, IT pendidikan, pengembangan kurikulum, literasi pendidikan, sertifikasi, pengembangan olah raga dan prestasi, perbekalan dan akkes kesehatan, status RSUD, kerja sama kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana kesehatan. Di bidang keagamaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana prasarana peribadatan, peningkatan kualitas keimanan, peningkatan organisasi keagamaan dan nilai-nilai keagamaan.

Gambar V.1 Perencanaan Terintegrasi Misi 1



Meningkatnya daya saing dan produktivitas sumber daya manusia Kabupaten Fakfak yang berkualitas dengan mewujudkan kehidupan yang



sejajar dan sederajat dengan daerah lain, dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan terampil melalui peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; meningkatkan kualitas dan relevansi ketenagakerjaan, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi; dan pemberdayaan masyarakat termasuk gender.

5.2.2 Misi 2: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelautan

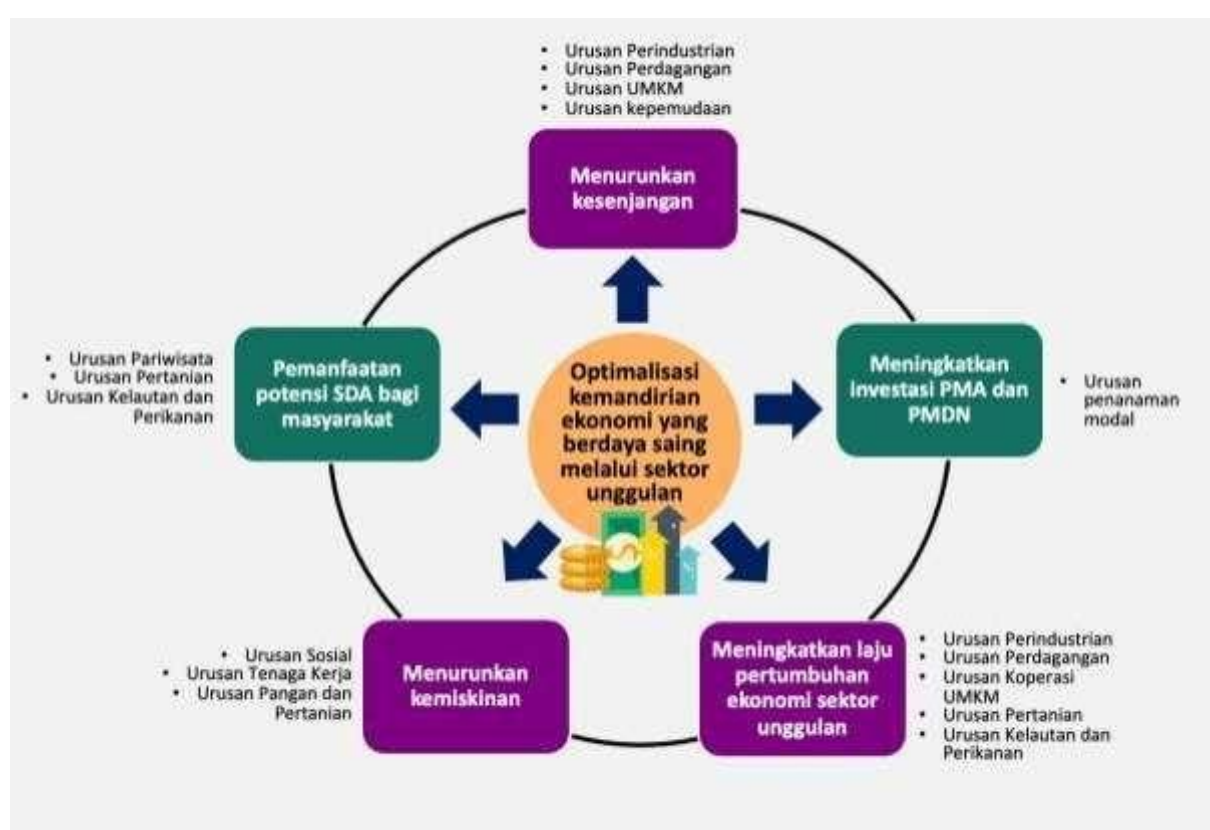
Misi kedua dengan tujuan membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak melalui upaya meningkatkan sentra-sentra produksi, pelayanan perdagangan dan jasa, kelembagaan ekonomi, pengembangan investasi, industri rumahan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Misi kedua difokuskan pengembangan potensi pariwisata daerah disamping penguatan pada kelompok petani, pelaku usaha dan rumah tangga, kapasitas manajemen usaha, jaringan kemitraan, peningkatan nilai tambah produktif, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pembangunan ekonomi, sarana prasarana kapasitas produksi, jiwa kewirausahaan, perwilayahan komoditas dan optimalisasi potensi ekonomi.

Mewujudkan Struktur perekonomian Kabupaten Fakfak yang semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata serta sektor lainnya. Kelembagaan ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan IPTEK yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktifitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2026 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah yang berpendapatan tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang terintegrasi untuk menjangkau wilayah kepulauan, pesisir dan pegunungan dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Dalam rangka memantapkan

pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya perekonomian Kabupaten Fakfak sebagai daerah kepulauan, pesisir dan daratan yang tangguh dan berdaya saing adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis kelautan/perikanan dan pertanian dalam arti luas menuju keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbasis teknologi inovatif dan berdaya saing dengan membangun sistem produksi. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan infrastruktur dasar dan utilitas umum.

Gambar V.2 Perencanaan Terintegrasi Misi 2



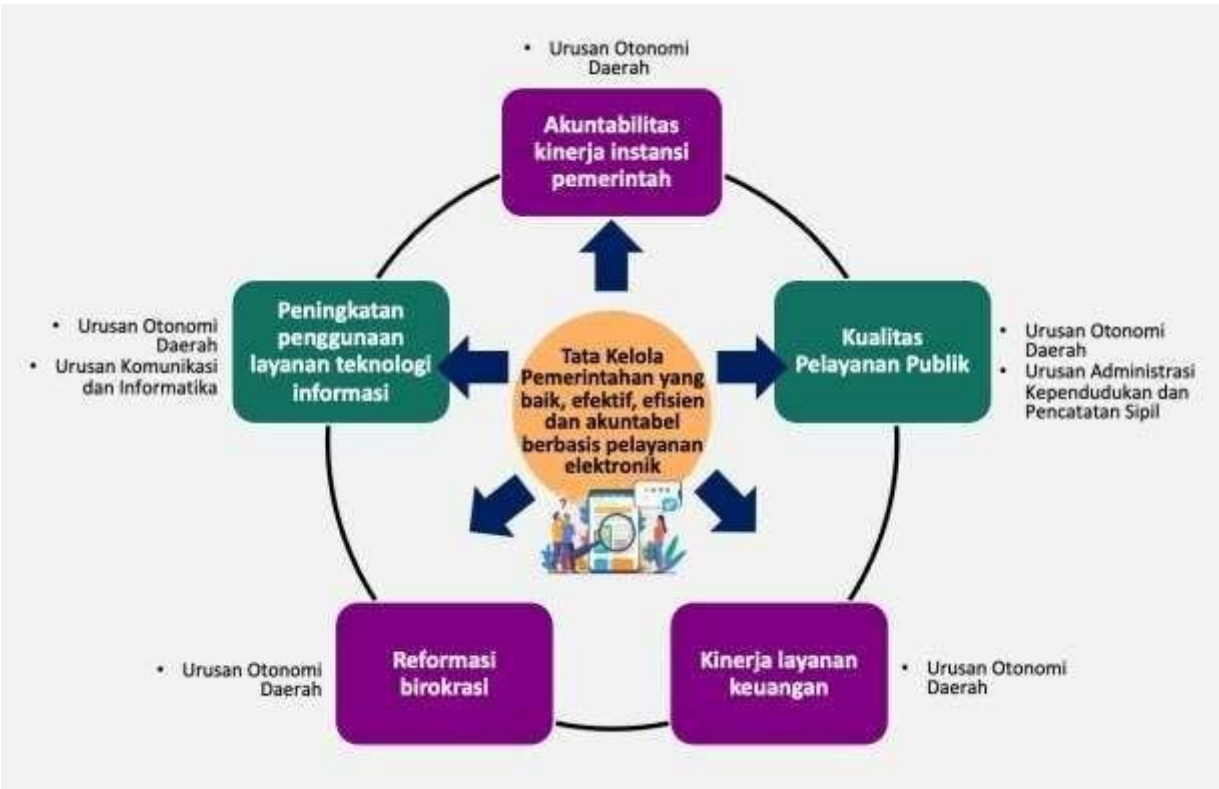
5.2.3 Misi 3: Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik

Misi 3 dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur sipil Negara, peningkatan SDM aparatur struktural dan fungsional, pendidikan dan pelatihan ASN, peningkatan kesejahteraan aparatur, penghargaan ASN, restrukturisasi organisasi birokrasi, penguatan kapasitas

aparatkampung, serta penghargaan kepada pemerintah di tingkat bawah yang berbasis pelayanan elektonik. Pada misi ketiga ini pula dilakukan penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta meningkatkan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dengan sasaran yang akan dicapai adalah tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik, terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan, terciptanya SDM aparatur yang berkualitas, meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya pengawasan, meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah serta asset serta meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang tertib, rapih serta aman dan meningkatnya akses informasi, komunikasi dan layanan publik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa, serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum adalah membangun dan memperkuat peran dan partisipasi politik rakyat, menegakkan supremasi hukum, reformasi hukum dan regulasi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; memperkuat kualitas kemampuan otonomi; dan meningkatkan profesionalisme aparatur daerah serta kualitas pelayanan publik.

Gambar V.3 Perencanaan Terintegrasi Misi 3

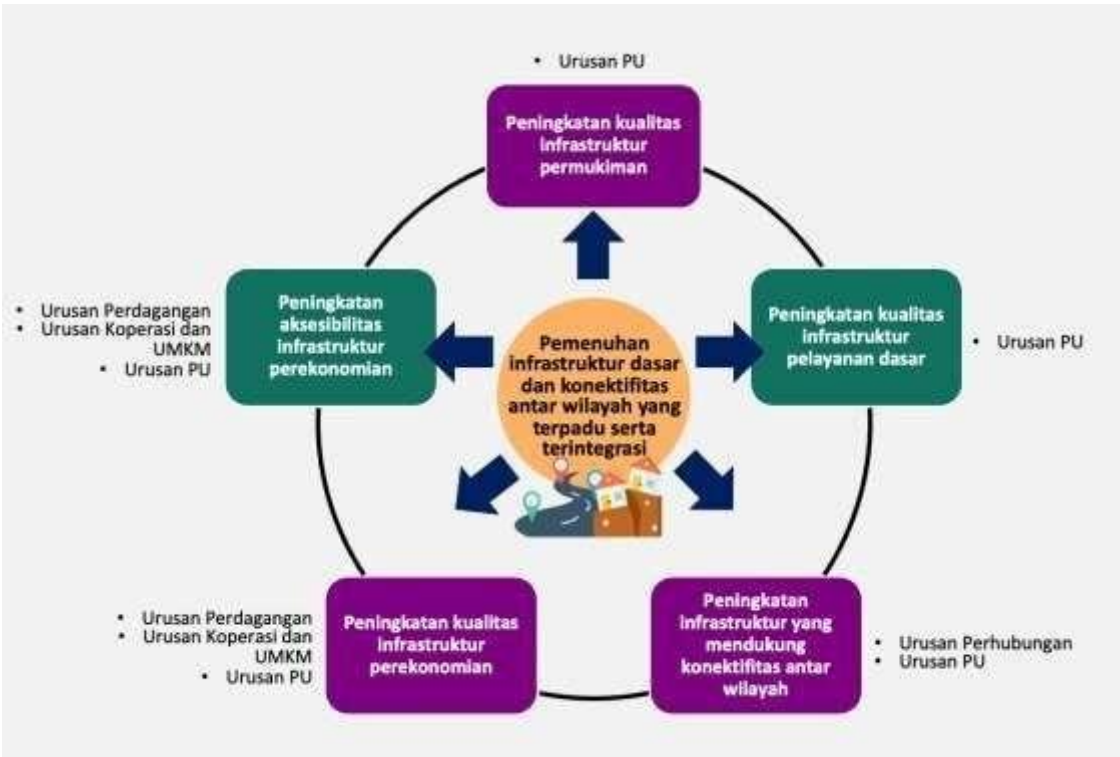


5.2.4 Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan Interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi

Misi 4 dilakukan dengan tujuan peningkatan aksesibilitas daerah, peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan udara, peningkatan infrastruktur lingkungan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, penataan infrastruktur ibu kota distrik, normalisasi aliran sungai, penataan daerah rawan longsor, peningkatan kapasitas air bersih dan air minum, peningkatan energi listrik, telekomunikasi serta utilitas lainnya. Beberapa sasaran yang akan dicapai adalah terciptanya konektivitas antar wilayah, tersedianya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang, serta utilitas dalam meningkatnya kinerja perekonomian daerah.

Terwujudnya infrastruktur dasar dan konektivitas Kabupaten Fakfak yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung perekonomian daerah yang berbasis kelautan/perikanan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif berbasiskan teknologi inovatif dan berdaya saing dengan membangun sistem produksi, distribusi, pelayanan jasa, membangun jejaring antar wilayah, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur ekonomi yang maju.

Gambar V.4 Perencanaan Terintegrasi Misi 4

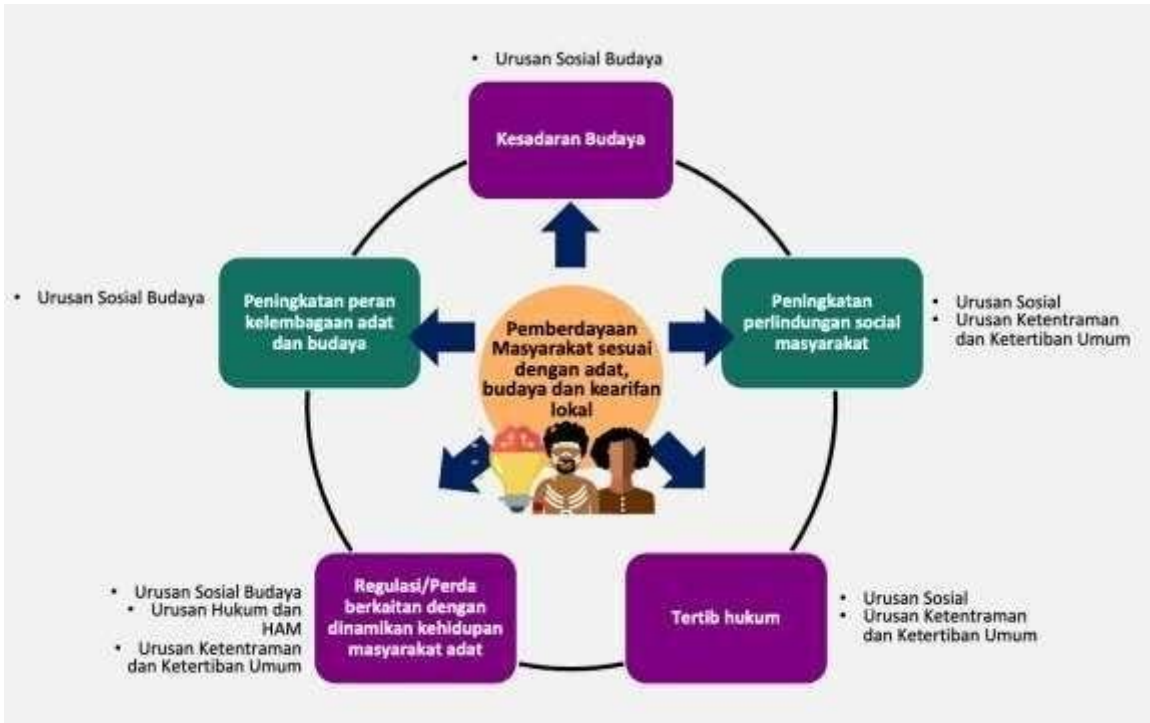


5.2.5 Misi 5: Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak

Misi kelima dilakukan dengan tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, kapasitas adat dan budaya dalam masyarakat, nilai muatan

lokal adat dan budaya, melestarikan adat dan budaya daerah serta mempercepat pembentukan kebijakan hukum daerah dalam pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Beberapa yang menjadi sasaran adalah meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal serta tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat.

Gambar V.5 Perencanaan Terintegrasi Misi 5



Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh yang ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, berakarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila dan budaya lokal yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kabupaten Fakfak yang beragama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi IPTEK. Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat lebih mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan kualitas kehidupan

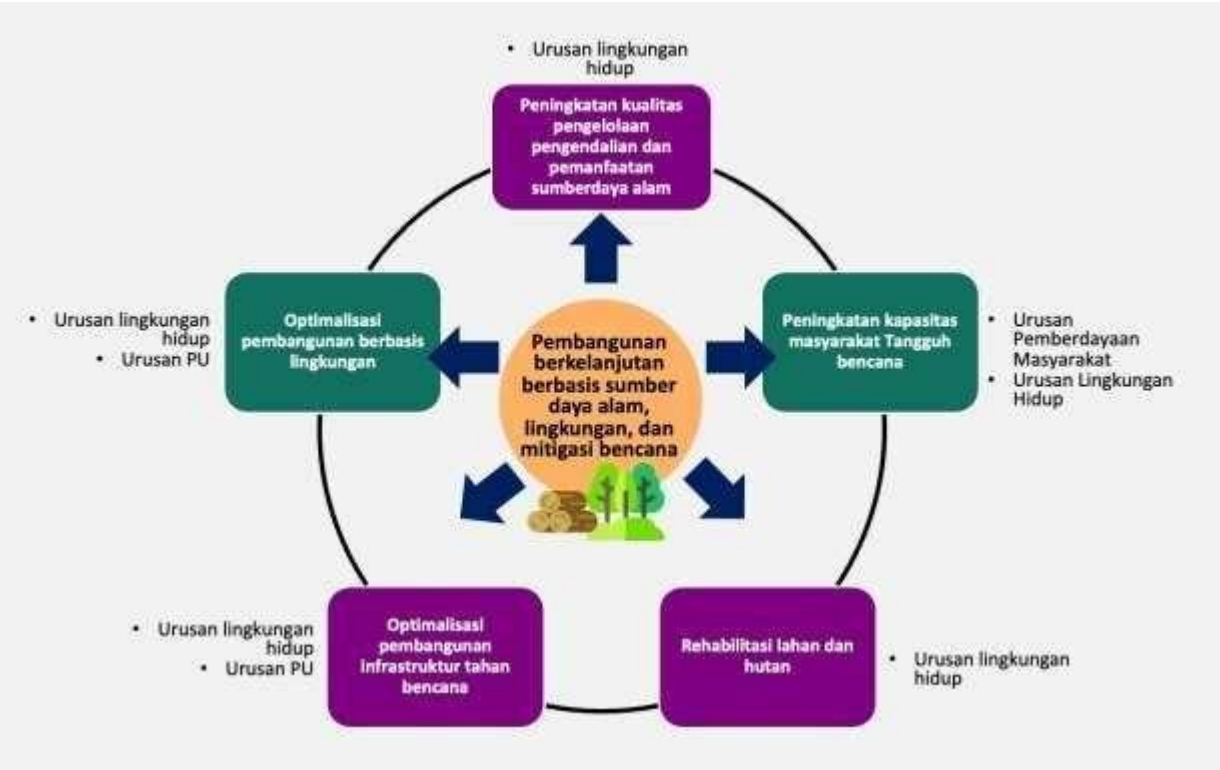


sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.6 Misi 6: Mewujudkan pembangunan Fakfak berkelanjutan melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta Berbasis Mitigasi Bencana.

Misi keenam dilakukan dengan tujuan menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap berkomitmen menjaga ekosistem lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tindakan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam dan non alam.

Gambar V.6 Perencanaan Terintegrasi Misi 6



Misi RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 berpedoman pada Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Papua Barat, sehingga terdapat korelasi yang kuat antar misinya (lihat Tabel V.1).

Tabel V.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Tingkat Nasional dan Provinsi Papua Barat

	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022	RPD* Prov. Papua Barat Tahun 2023-2026	RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026
VISI	Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan	Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat	-	Fakfak yang Terdepan, Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Mandiri

		RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022	RPD* Prov. Papua Barat Tahun 2023-2026	RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026
MISI	EKONOMI	MISI 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	MISI 5: Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata MISI 6: Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat	TUJUAN 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	MISI 2: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengerjakan sektor unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian, dalam arti luas dan kelauatan
	SOSIAL BUDAYA	MISI 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa	MISI 7: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial MISI 8: Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah	TUJUAN 6: Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat	MISI 5: Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Fakfak;
	SARPRAS & WILAYAH	MISI 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan MISI 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	MISI 4: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar	TUJUAN 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah	MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi
	LINGKUNGAN	MISI 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	MISI 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;	TUJUAN 4: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan	MISI 6: Mewujudkan pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.
	SUMBER DAYA MANUSIA	MISI 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	MISI 3: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;	TUJUAN 1: Meningkatkan kualitas SDM unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial	MISI 1: Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan.
	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	MISI 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (<i>good and clean governance</i>) serta otonomi khusus yang efektif	TUJUAN 5: Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik	MISI 3: Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik;

*Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat 2023-2026 disusun sesuai

5.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 1

Misi 1: Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan

Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, dengan faktor kunci keberhasilan: “Mengoptimalkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas, inovasi dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) “. Di era pasar bebas dan persaingan global saat ini, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan. Karena itu program pembangunan manusia perlu menjadi salah satu prioritas agar SDM Fakfak memiliki produktivitas dan daya saing yang memadai dalam memasuki kancah globalisasi.

Strategi utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut ditempuh melalui upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan, yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui pendekatan siklus hidup dan gender. Pendekatan siklus hidup artinya upaya peningkatan kualitas hidup harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sejak janin di dalam kandungan kemudian dalam proses persalinan, masa balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya pendekatan gender dimaksudkan agar upaya peningkatan kualitas SDM lebih memberi perhatian pada peran wanita khususnya kaum ibu, karena dalam kehidupan sehari-hari tugas melahirkan, mengasuh dan membesarkan generasi penerus lebih banyak dilaksanakan oleh kaum wanita. Untuk mewujudkan Misi pertama Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak periode 2021-2026, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran).

T1.1. Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan daya saing.

S1.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan formal dan non-formal.

Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah

S1.1.2. Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat

Indikator: Peningkatan kunjungan ke perpustakaan

S1.1.3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan



Indikator: Angka Harapan Hidup

S1.1.4. Percepatan penanganan dan pencegahan stunting

Indikator: Prevalensi Balita Stunting

S1.1.5. Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah

Indikator: Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan yang aktif

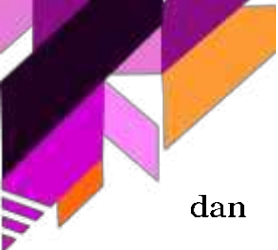
S1.1.6. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Indikator: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 2

Misi 2: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelautan

Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh dapat diwujudkan dengan memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan daya tarik yang dimiliki Kabupaten Fakfak. Perubahan struktur perekonomian Fakfak berjalan cukup cepat tidak diikuti oleh perkembangan unsur-unsur yang lainnya, seperti serapan tenaga kerja. Sampai sekarang ini struktur tenaga kerja belum mengalami transformasi yang berarti sebagaimana transformasi struktur produksi. Sejalan dengan pernyataan Visi Fakfak Tahun 2026 menjadikan “Masyarakat Fakfak Yang Terdepan, Sejahtera, Nyaman, Unggul Dan Mandiri (TERSENYUM)”.Maka upaya-upaya peningkatan daya saing daerah menjadi faktor penting bagi pertumbuhan perekonomian Fakfak ke depan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tujuan tersebut maka keberadaan visi Pemerintah Daerah dapat secara vital mempengaruhi kinerja ekonomi daerah yaitu dengan memainkan peran sebagai “penggerak pertumbuhan” dengan menjalankan kebijakan pembaharuan yang diperlukan sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan suatu lingkungan yang dapat mendorong suatu pertumbuhan ekonomi dengan cepat serta menciptakan kesempatan kerja lebih banyak kepada masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka, prioritas Pertama dalam kaitannya dengan pengembangan struktur perekonomian daerah adalah menumbuhkan daya saing agar masyarakat kita tetap memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dengan adanya era globalisasi sekarang ini. Untuk menembus pasar



dan memenangkan persaingan harus menjadi gerakan bersama dan tekanannya bukan hanya dari sisi produksi saja, tetapi seluruh sistem harus mendukungnya (sistem produksi, sistem pemasaran, dan sistem kelembagaan pendukung harus semakin baik) khususnya dalam mengembangkan bisnis unggulan Fakfak dengan membangun kemitraan jaringan usaha bersama antara pemerintah dengan dunia usaha, yaitu sektor: perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian dan kehutanan, Pariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Prioritas Kedua adalah pembangunan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, menghilangkan kemiskinan dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah tertinggal. Hal ini menjadi penting, karena lapisan terbesar dari masyarakat Fakfak adalah masyarakat yang masih sulit mengikuti era persaingan global. Oleh karenanya upaya pembangunan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menghilangkan kemiskinan dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah tertinggal, maupun keseimbangan pembangunan antara kampung dan kota, menjadi sangat strategis guna mengurangi terjadinya kesenjangan yang makin melebar yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Memperhatikan hal tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran.

T2.1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi

S2.1.1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Indikator: Jumlah Pengangguran/Tingkat Pengangguran

S2.1.2. Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang bidang strategis daerah

Indikator: Laju pertumbuhan investasi daerah

S2.1.3. Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang pariwisata, pertanian dan kelautan

Indikator:

- *Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata pertahun*
- *Pertumbuhan produksi perikanan*
- *Pertumbuhan produksi pertanian*

S2.1.4. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah

Indikator: Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB

S2.1.5. Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM

Indikator:

- *Cakupan UKM yang diberdayakan*

- *Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standar*

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 3

Misi 3: Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik

Misi ketiga Kabupaten Fakfak berkaitan dengan pemantapan kinerja pemerintah daerah, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah Daerah sejalan dengan tuntutan masyarakat akan *good governance* dan *clean goverment*. Pada dasarnya pemantapan kinerja pemerintah daerah adalah upaya untuk menempatkan kembali posisi dan fungsi pemerintah, yaitu pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemerintah berprinsip bahwa masyarakat sebagai konsumen yang harus dilayani dengan baik dan menempatkan pada posisi pertama. Fungsi pembangunan pada dasarnya memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya atau selalu berusaha untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam mewujudkan *good governance*, fungsi pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi perlu adanya interaksi tiga unsur pelaku pembangunannya, yaitu pemerintah, termasuk birokrasi di dalamnya, masyarakat dan unsur dunia usaha. Fungsi pengaturan merupakan fungsi dalam menciptakan keteraturan di masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Selain itu fungsi pengaturan dapat pula dikatakan sebagai bagian dari fungsi pelayanan yang dilakukan secara tidak langsung melalui penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan simultan dan bentuk kebijakan lainnya yang memungkinkan stakeholder di luar pemerintah untuk mengambil bagian dari pelayanan tersebut. Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi pemerintah untuk menjadikan masyarakat mempunyai akses dalam memenuhi kebutuhan minimal seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menjadi kemandirian. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 10 sasaran.

T3.1. Meningkatnya sinergitas, produktivitas dan akuntabilitas





manajemen pemerintah daerah, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

S3.1.1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Indikator:

- *Opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Fakfak*
- *Pertumbuhan PAD*

S3.1.2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari sectoral maupun spasial

Indikator: Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

S3.1.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik perangkat daerah

Indikator: Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

S3.1.4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator: Skor Maturitas SPIP

S3.1.5. Meningkatnya kompetensi aparatur

Indikator: Cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas

S3.1.6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung

Indikator: Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri

S3.1.7. Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Indikator: Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA

S3.1.8. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator: Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap

S3.1.9. Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung

Indikator: Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung

S3.1.10. Meningkatnya ketransparan dan ketertiban masyarakat

Indikator: Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 4

Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi

Misi keempat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan konektivitas antar wilayah yang terpadu dan terintegrasi. Ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran untuk mewujudkan misi ini.

T4.1. Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan yang terintegrasi serta terpadu.

S4.1.1. Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah

Indikator: Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

S4.1.2. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan

Indikator: Cakupan rumah tangga yang memiliki rumah layak huni

S4.1.3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah

Indikator: Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi

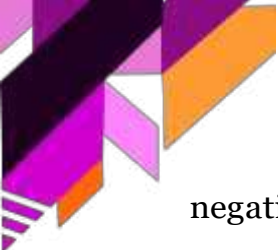
S4.1.4. Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda

Indikator: Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 5

Misi 5: Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak

Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat dapat diwujudkan melalui peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama, adat dan budaya daerah, dalam rangka mengantisipasi kekuatan pengaruh



negatif dari luar. Fenomena yang terjadi di seputar kehidupan masyarakat dewasa ini seperti semakin tingginya penyakit masyarakat merupakan refleksi ketidakmampuan masyarakat untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu upaya meningkatkan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai moral merupakan alternatif terbaik yang perlu dikedepankan dalam rangka mengatasi berbagai penyakit masyarakat.

Budaya yang berlaku dalam masyarakat identik dengan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Semakin banyak anggota yang menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, maka akan semakin tinggi pula tingkatan budaya tersebut. Dalam kerangka ini masyarakat Fakfak telah mempunyai falsafah budaya luhur “satu tungku tiga batu” yang menggariskan batas-batas toleransi sosial. Sesuai dengan karakteristik masyarakat yang religius dan pro sosial, maka program-program sosial, agama dan budaya harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Fakfak. Pentingnya prioritas pembangunan pada bidang sosial, agama dan budaya ini antara lain didasarkan pada pertimbangan: Pertama, Pembangunan bidang sosial budaya dan agama diperlukan untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat Fakfak yang kondusif guna menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, agar tidak terhambat oleh ancaman konflik, kerawanan dan gejolak sosial. Kedua, Pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwa program- program pembangunan yang dijalankan melalui pendekatan agama dan budaya daerah dapat lebih diterima masyarakat. Ketiga, Ancaman infiltrasi nilai-nilai dan budaya asing yang destruktif juga perlu mendapat penanggulangan secara seksama agar tidak lebih mengikis pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan jati diri dari budaya daerah. Dari uraian yang dijelaskan, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran untuk mewujudkan Misi 5.

T5.1. Meningkatnya keharmonisan sosial dan apresiasi terhadap adat dan budaya, sedangkan sasaran pembangunan yang dilakukan adalah:

S5.1.1. Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya.

Indikator: Jumlah Lembaga/organisasi adat dan budaya

S5.1.2. Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP

Indikator: Cakupan masyarakat yang mendapatkan bantuan afirmasi perlindungan OAP

S5.1.3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya local

Indikator: Jumlah program/kegiatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal



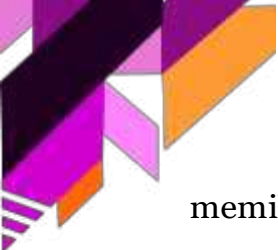
5.3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Misi 6

Misi 6: Mewujudkan pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana

Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan faktor kunci keberhasilan adalah Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi lingkungan”. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Secara harfiah, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya memelihara/mempertahankan kegiatan pembangunan secara terus menerus.

Disadari bahwa pembangunan akan membawa dampak negatif yang nyata seperti berbagai bencana alam. Fenomena itu mengingatkan agar dalam melaksanakan pembangunan ini senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Untuk itu pembangunan Fakfak ke depan perlu lebih mencerminkan dan mempertimbangkan aspek ekologi. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan salah satu faktor utama untuk keberlanjutan pembangunan harus dijaga bersama. Pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dicegah dan diperbaiki. Upaya tersebut harus merupakan suatu gerakan yang membangun kepedulian seluruh *stakeholder* pembangunan akan pentingnya kelestarian lingkungan. Untuk itu maka aliansi strategis antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi serta lembaga penelitian lainnya sangat diperlukan. Selain kerja sama yang harmonis, penting pula upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan.

Bencana alam di berbagai daerah akhir-akhir ini berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan kondisi hutan yang memprihatinkan. Karena itu kebijakan penetapan kawasan lindung minimal 60% dari luas wilayah perlu didukung semua pihak. Salah satu konsekuensinya adalah alokasi pemanfaatan hutan di Fakfak harus dititik beratkan pada aspek produksi yang tidak mengganggu konservasi. Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dikendalikan untuk mendukung keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan lingkungan, kondisi geografis, geologis dan topografis Fakfak yang



memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi juga memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, agar berbagai potensi bencana tersebut dapat dicegah dan dikurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkannya.

T6.1. Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat

S6.1.1. Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60% pada tahun 2026.

Indikator: Persentase pemanfaatan hutan lindung

S6.1.2. Terwujudnya struktur ruang Fakfak serta pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka pengembangan kawasan andalan.

Indikator: Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW

S6.1.3. Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL.

Indikator: Persentase realisasi rencana pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL

S6.1.4. Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

Indikator: Indeks Risiko Bencana

Tabel V.2 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

MISI /TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
M1	Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan										
T1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	68,36	68,82	69,2	69,44	69,64	70,04	70,26	70,26
S1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63	14,9	15,1	15,34	15,55	15,7	15,925	15,93
S2	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	Peningkatan kunjungan ke perpustakaan	persen	5	5	5	5	5	5	5	5,00
S3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	68,47	68,50	68,71	68,91	69,12	69,33	69,53	69,53
S4	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	Prevalensi balita stunting	persen	18,02	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	12,00
S5	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	persen	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
S6	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
M2	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian dalam arti luas dan Kelautan										
T2	Membangun dan meningkatkan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-2,95	1,65	2,12	3,53	4,25	5,35	6,415	6,42



MISI /TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	Jumlah Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan	jiwa	17.720	17.188	16.673	16.420	15.860	15.384	14.978	14977,70
S7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pengangguran/Tingkat Pengangguran	Jiwa	11,45	10,33	9,57	9,46	8,43	7,39	6,82	6,82
S8	Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang bidang strategis daerah	Laju pertumbuhan Investasi daerah	persen	2,16	2,14	2,12	2,09	2,05	2,03	2,00	2,00
S9	Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang Pariwisata, Pertanian dan Kelautan	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata tahunan	persen	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00
		Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50
S10	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB	persen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50
S11	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	Cakupan UKM yang diberdayakan	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
		Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standar	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
M3	Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik										
T3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	rendah	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
S12	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Fak Fak	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



MISI /TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pertumbuhan PAD	persen	20,00	26,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
S13	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	D	D	C	C	B	B	B	B
S15	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor Maturitas SPIP	skor	2	2	2	3	3	3	3	3,00
S16	Meningkatnya kompetensi aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen	70,00	72,00	72,00	73,00	73,00	74,00	74,50	74,50
S17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
S18	Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA	persen	81,79	-	-	-	95,00	-	-	95,00
S19	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00
S20	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung	persen	50,00	60,00	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S21	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentrman, ketertiban, penegakan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



MISI /TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat									
M4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi										
T4	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	Indeks Kemahalan Konstruksi	indeks	135,74	135,74	128,90	125,00	120,00	115,00	110,55	110,55
S22	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
S23	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	persen	15,19	15,19	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
S24	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi	persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
S25	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
M5	Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai – nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak										
T5	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat.	Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
S26	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya	Jumlah lembaga/organisasi adat dan budaya	lembaga	4	1	2	3	4	5	5	5,00
S27	Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	Cakupan masyarakat yang mendapatkan bantuan afirmasi perlindungan OAP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



MISI /TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
S28	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	Jumlah program/ kegiatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	program	5	6	7	8	9	9	10	10,00
M6	Mewujudkan Pembangunan Fakfak berkelanjutan mealui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta berbasis mitigasi bencana										
T6	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
S29	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	Persentase pemanfaatan hutan lindung	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
S30	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW Provinsi maupun daerah	Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW	persen	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
S31	Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL	Persentase realisasi rencana pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
S32	Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Indeks Resiko Bencana	persen	105,20	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	93,00



BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah



Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Fakfak sesuai dengan permasalahan dan dinamika isu strategis pembangunan yang berkembang

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien pada tahun 2021-2026. Strategi pembangunan menunjukkan keinginan kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Keterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1 Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan.					
T1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.	S1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	S1.1	Perluasan penyelenggaraan dan Kualitas Pembelajaran Anak Usia Dini
				S1.2	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun
				S1.3	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Menengah
				S1.4	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Semua Jenjang Pendidikan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				S1.5	Peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
				S1.6	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan non formal
		S2	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	S2.1	Meningkatkan budaya baca dan literasi dalam masyarakat
		S3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	S3.1	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola fasilitas kesehatan daerah
				S3.2	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
				S3.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat
				S3.5	Pengembangan Upaya untuk mengatasi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan
				S3.6	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Puskesmas
				S3.7	Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan
		S4	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	S4.1	Pengembangan sinergisitas multisektor dalam penanganan dan pencegahan stunting
		S5	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	S5.1	Fasilitas peningkatan prestasi olah raga dan seni generasi muda
				S5.2	Pengembangan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan Daerah
				S5.3	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga
		S6	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	S6.1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
MISI 2 Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian dalam arti luas dan Kelautan.					

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
T2	Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	S7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	S7.1	Pengembangan Upaya bagi sektor-sektor ekonomi produktif dengan pendekatan kolaboratif
		S8	Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang bidang strategis daerah	S8.1	Penguatan Implementasi sistem informasi penanaman modal
		S9	Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang Pariwisata,Pertanian dan Kelautan	S9.1	Meningkatkan aktualisasi potensi pariwisata Kabupaten Fakfak
				S9.2	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura
				S9.3	Peningkatan produktivitas Peternakan
				S9.4	Peningkatan ketahanan pangan berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal
		S10	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	S10.1	peningkatan nilai dan jumlah perdagangan produk lokal masyarakat
		S11	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	S11.1	Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM
MISI 3 Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesien dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik.					
T3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	S12	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	S12.1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah, sistem akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan arah kebijaka
		S13	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	S13.1	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, baik dalam tataran spasial, sektoral dan antar organisasi perangkat daerah
		S14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah	S14.1	Peningkatan kualitas legistasi, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah
		S15	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	S15.1	Pengembangan upaya penguatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		S16	Meningkatnya kompetensi aparatur	S16.1	Peningkatan manajemen dan kapasitas ASN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		S17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung	S17.1	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung
		S18	Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	S18.1	Peningkatan taraf sosial dan ekonomi masyarakat kampung
		S19	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	S19.1	Peningkatan cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Yang Prima
		S20	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	S20.1	Peningkatan ketersediaan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
		S21	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	S21.1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi negara
S21.2	Peningkatan pemberdayaan potensi kenyamanan dan ketertiban umum				
MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi.					
T4	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	S22	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	S22.1	Percepatan ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah
				S22.2	Pengembangan sarana infrastruktur pengairan yang memadai
		S23	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	S23.1	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
				S23.2	Peningkatan ketersediaan sumber daya listrik untuk mendukung aktivitas Masyarakat
		S24	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	S24.1	Percepatan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi
		S25	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	S25.1	Percepatan ketersediaan infrastruktur perhubungan antar moda guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Kabupaten Fakfak
MISI 5 Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai - nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak					
T5	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan	S26	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya	S26.1	Peningkatan Fasilitas aktivitas keagamaan dan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	melestarikan budaya dalam masyarakat adat.				kebudayaan di tengah masyarakat
		S27	Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	S27.1	Peningkatan Afirmasi dan Perlindungan OAP
		S28	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	S28.1	Fasilitasi aktualisasi potensi sumber daya adat dan budaya Fakfak
MISI 6 Mewujudkan Pembangunan Fakfak berkelanjutan mealui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta berbasis mitigasi bencana					
T6	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	S29	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	S29.1	Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Struktur Tata Ruang yang terjaga
		S30	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW Provinsi maupun daerah	S30.1	Pemantapan pengembangan wilayah berbasis tata ruang berkelanjutan
		S31	Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL	S31.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL
		S32	Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	S32.1	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan non alam

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Provinsi Papua Barat dab Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Fakfak dapat dilihat dalam Tabel VI.2.



Tabel VI.2 Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
S1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	S1.1	Perluasan penyelenggaraan dan Kualitas Pembelajaran Anak Usia Dini	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan PAUD		√	√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kapasitas guru TK dan tutor PAUD		√	√	√	√
		S1.2	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun		√	√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga pendidik SD dan SMP	√	√	√	√	√
				Peningkatan Manajemen Pendidikan Dasar	√	√	√	√	√
				Penyediaan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin			√	√	√
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah unggulan di tingkat SD dan SMP				√	√
				Pembinaa peningkatan Mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan spritual dan budi pekerti yang baik	√	√	√	√	√
		S1.3	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Menengah	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan menengah			√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru pendidikan menengah dan kejuruan			√	√	√
				Peningkatan Manajemen Pendidikan menengah			√	√	
				Penyediaan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin		√	√	√	√
				Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa		√	√	√	√
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah unggulan pendidikan menengah dan Kejuruan		√			
				Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah			√	√	√
		S1.4	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Semua Jenjang Pendidikan	Peningkatan Sertifikasi Tenaga Pengajar di semua jenjang pendidikan		√	√	√	√
				Pemberian Insentif Tenaga Pengajar	√	√	√	√	√
				Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		S1.5	Peningkatan kualitas substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	Peningkatan cakupan Akreditasi Sekolah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Kerjasama Bagi Peningkatan Kualitas Pemberlajaran Siswa	√	√	√	√	√
		S1.6	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan non formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal			√	√	√
				Pengembangan Pendidikan Keaksaraan			√	√	√
	S2	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	Meningkatkan budaya baca dan literasi dalam masyarakat	Pengembangan perpustakaan daerah				√	
				Pembinaan budaya baca				√	√
				Penyediaan materi baca dan literasi				√	√
				Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah				√	
S3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	S3.1	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola fasilitas kesehatan daerah	Peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan RSUD dan Puskesmas				√	√
				Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas	√	√	√	√	√
				Pembangunan sarana, Prasarana dan fasilitas Kesehatan	√	√	√	√	√
				Pengembangan SDM kesehatan	√	√	√	√	√
				Pembangunan Rumah Sakit Umum baru dan Peningkatan status dari tIpe C ke tIpe B sebagai Rumah Sakit Umum rujukan regional;	√	√	√	√	√
				Pembentukan BLU (Badan Layanan Umum) pada Rumah Sakit Umum;					
				Pemberian imunisasi bayi dan balita			√	√	
		S3.2	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu		√	√	√	√
				Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi Ibu Hamil	√	√	√	√	√
				Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI	√	√	√	√	√
				Pelacakan dan Penanganan Bayi dan Balita Beresiko	√	√	√	√	√
				Pemberian Makanan tambahan dan gizi bagi balita	√	√	√	√	√
				Pengadaan Alat Permainan Edukasi/APE	√	√	√	√	√
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	√	√	√	√	√
					√	√	√	√	√
						√	√	√	√
							√	√	√
								√	√
								√	√
								√	√
								√	√
								√	√
								√	√
								√	√
		S3.4			√	√	√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin		√	√	√	√
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi		√	√	√	√
		S3.5	Pengembangan Upaya untuk mengatasi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi kesehatan lingkungan	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	√	√	√	√	
				Peningkatan Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular		√	√	√	√
				Peningkatan Kesehatan Lingkungan		√	√	√	√
				Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat		√			
		S.3.6	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Puskesmas	Pengembangan sarana prasarana dan Kualitas Pelayanan Puskesmas dan PUSTU	√	√	√	√	√
					√	√	√	√	√
		S3.7	Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan					
				Melaksanakan pengawasan, dan ketersediaan farmasi (stok obat) serta penyediaan makanan tambahan (PMT) bergizi khususnya bagianak usia sekolah;	√	√			
				"Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan"		√	√	√	√
				Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan					
S4	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	S4.1	Pengembangan sinergisitas multisektor dalam penanganan dan pencegahan stunting	Pengembangan kesehatan Ibu, Anak dan Balita		√	√	√	
				Peningkatan gizi dan pangan masyarakat b		√	√	√	√
				Peningkatan sanitasi masyarakat		√	√	√	√
				Sanitasi sekolah		√	√	√	√
				Peningkatan Bantuan sosial Pangan dan Gizi masyarkat		√	√	√	√
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan stuntng	√	√	√	√	√
				Peningkatan olahan produksi perikanan untuk peningkatan gizi masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan kordinasi perempuan dan PKK dalam penanganan Stunting	√	√	√	√	√
S5	Meningkatnya partisipasi dan	S5.1		Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni budaya Daerah	√	√	√	√	√

√ √

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN					
					2022	2023	2024	2025	2026
prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah			Fasilitas peningkatan prestasi olah raga dan seni generasi muda	Peningkatan Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olahraga		√	√	√	√
		S5.2	Pengembangan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Memfasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event event lokal, regional dan nasional	√	√	√	√	√
				Penyuluhan dan sosialisasi tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan	√	√	√	√	
		S5.3	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	Peyediaan Data Potensi Kepemudaaan			√	√	√
				Fasilitasi Pembentukan Organisasi Kepemudaan			√	√	√
S6 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	S6.1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah		Peningkatan pembinaan kelembagaan jender dan perlindungan anak			√	√	√
				Fasilitasi keikutsertaan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Sosialisasi peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan daerah			√	√	√
				Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan			√	√	√
				Fasilitasi kepemimpinan perempuan				√	√
S7 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	S7.1	Pengembangan Upaya bagi sektor-sektor ekonomi produktif dengan pendekatan kolaboratif		Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan Penyaluran Dan Penempatan Tenaga Kerja			√	√	√
				Pembinaan tenaga kerja			√	√	√
				Fasilitasi hubungan industrial			√	√	√
S8 Meningkatkan minat dan laju realisasi investasi di bidang bidang strategis daerah	S8.1	Penguatan Implementasi sistem informasi penanaman modal		Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera	√	√	√	√	√
				Penigkatan promosi investasi		√	√	√	√
				Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah dan tidak berbelit belit		√	√	√	√
S9 Meningkatkan pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang Pariwisata, Pertanian dan Kelautan	S9.1	Meningkatkan aktualisasi potensi pariwisata Kabupaten Fakfak		Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu (Fakfak Berwisata)	√	√	√	√	√
				Peningkatan promosi pariwisata		√	√	√	√
				Peningkatan kerjasama ddan kemitraan dalam pengembangan pariwisata		√	√	√	√
				Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	√	√	√	√	√
	S9.2			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani	√	√	√	√	√



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
			Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Pengembangan aliansi strategis (jaringan) kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi petani dan nelayan dengan model kerjasama yang menguntungkan;	√	√	√	√	√
				Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sektor pertanian, pemanfaatan air tadah hujan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan;	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan potensi agribisnis melalui optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi Perikanan Kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui industrialisasi kreatif lokal kampung;	√	√	√	√	√
				Pengembangan perwilayaan komoditi pertanian maupun perkebunan	√	√	√	√	√
				Pemberian bantuan saprodi pertanian	√	√	√	√	
				Fasilitasi implementasi teknologi pertanian			√ √	√	√
		S9.3	Peningkatan produktivitas Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan			√ √	√	√
				Fasilitasi implementasi teknologi Peternakan			√		
				Penanggulangan penyakit hewan			√	√	
				Peningkatan penyuluhan pertanian dan peternakan				√ √	√
		S9.4	Peningkatan ketahanan pangan berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal	Pengembangan komoditas pangan lokal				√ √	√
				Pengembangan Lumbung Pangan Kampung				√	
				Peningkatan monitoring wilayah rawan pangan	√	√	√	√	
				Penyuluhan ketahanan pangan			√ √	√	√
S10	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	S10.1	peningkatan nilai dan jumlah perdagangan produk lokal masyarakat	Peningkatan promosi perdagangan			√ √	√	√
				Pembinaan kelompok usaha kecil bidang perdagangan			√ √	√	√
				Peningkatan pemasaran hasil komoditas unggulan			√ √	√	√
				Peningkatan perlindungan konsumen			√		
				Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	√	√	√	√	
S11	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	S11.1	Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi			√ √	√	√
				Fasilitasi kelembagaan koperasi			√		
				Peningkatan kapasitas produksi dan Pemasaran hasil produksi unggulan daerah	√	√	√	√	√
S12	Meningkatnya efektivitas dan	S12.1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah, sistem akuntansi, pelaporan dan	Peningkatan Tertib administrasi pelaporan keuangan Daerah		√	√	√	√
				Peningkatan manajemen aset daerah		√	√	√	√
					√	√	√	√	√
						√	√	√	√
					√	√	√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
	efisiensi pengelolaan keuangan daerah		pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan arah kebijaka	Peningkatan disiplin dan kualitas penyusunan APBD dan Perubahan APBD	√	√	√	√	√
				Peningkatan Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	√	√	√	√	√
S13	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	S13.1	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, baik dalam tataran spasial, sektoral dan antar organisasi perangkat daerah	Peningkatan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Perencanaan Pembangunan di bidang pembangunan ekonomi daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Perencanaan Pembangunan di bidang pembangunan sosial budaya	√	√	√	√	√
S14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah	S14.1	Peningkatan kualitas legistasi, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD	√	√	√	√	√
				Pengembangan komunikasi intensif dan setara dengan DPRD	√	√	√	√	√
				Peningkatan Kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan	√	√	√	√	√
				Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
S15	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	S15.1	Pengembangan upaya penguatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi SPIP			√	√	
				pengawasan internal secara reguler dan khusus				√	√
				Tindak lanjut hasil pemeriksaan				√	√
				Gelar pengawasan				√	√
				Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan				√	√
S16	Meningkatnya kompetensi aparatur	S16.1	Peningkatan manajemen dan kapasitas ASN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur secara struktural dan fungsional				√	
				Analisis Jabatan		√	√	√	√
				Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS		√	√	√	
				Seleksi Penerimaan Calon PNS			√	√	√
				Monitoring Kepegawaian			√	√	√
S17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung	S17.1	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung	Pemberian bantuan stimulan pembangunan kampung			√	√	√
				Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Kampung dalam bidang pemerintahan kampung, meliputi perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban			√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
				Peningkatan partsisipasi perempuan dalam pembangunan kampung		√	√	√	√
S18	Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	S18.1	Peningkatan taraf sosial dan ekonomi masyarakat kampung	Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial	√	√	√	√	√
				Pemantapan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung		√	√	√	√
S19	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	S19.1	Peningkatan cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Yang Prima	Pembangunan Sistem Pendaftaran Penduduk		√	√	√	
				Pelayanan Kependudukan Jemput bola		√	√	√	√
				Pendataan dan penyusunan data base kependudukan		√			
				Pengelolaan aplikasi sistem administrasi kependudukan		√	√	√	√
S20	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	S20.1	Peningkatan ketersediaan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Pengembangan data statistik pembangunan daerah					
				Peningkatan Publikasi data statistik pembangunan daerah			√	√	√
				Penyediaan data terpilah OAP			√	√	√
				Peningkatan SAIK dan database berbasis kampung			√	√	√
S21	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	S21.1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan			√	√	√
				Peningkatan kerjasama dan kemitraan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban Lingkungan	√	√	√	√	√
		S21.2	Peningkatan pemberdayaan potensi kenyamanan dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Satpol PP	√	√	√	√	√
				Peningkatan operasional pengamanan lingkungan	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan potensi keamanan lingkungan masyarakat	√	√	√	√	√
S22	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	S22.1	Percepatan ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kawasan	√	√	√	√	√
				Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√
				Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan					
				Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah	√	√	√	√	√
					√	√	√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
				Pengembangan Reklamasi	√	√	√	√	
		S22.2	Pengembangan sarana infrastruktur pengairan yang memadai	Pembangunan Jaringan Air Bersih (Fakfak Banjir)		√	√	√	√
				Peningkatan Normalisasi Saluran Sungai		√	√	√	√
				Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan Gorong-gorong	√	√	√	√	√
				Pembangunan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat					
S23	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	S23.1	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pemukiman	√	√	√	√	√
				Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pemukiman	√	√	√	√	√
				Peningkatan bantuan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	√	√	√	√	√
		S23.2	Peningkatan ketersediaan sumber daya listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat	Pengembangan Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dalam penyediaan energi dan kelistrikan	√	√	√	√	√
				Pengembangan energi listrik tenaga surya di Kampung	√	√	√	√	√
				Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang)	√	√	√	√	√
S24	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	S24.1	Percepatan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Pembangunan Tower celuler daan prasarana telekomunikasi lainnya sampai ke kampung-kampung	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas SDM informasi dan telekomunikasi	√	√	√	√	√
				Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan komunikasi dan informatika	√	√	√	√	√
S25	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	S25.1	Percepatan ketersediaan infrastruktur perhubungan antar moda guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Kabupaten Fakfak	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Darat	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan Pemeliharaan Bandara	√	√	√	√	√
				Penyediaan fasilitas jalan lainnya	√	√	√	√	
				Peningkatan perhubungan laut		√	√	√	√
				Lanjutan pembangunan pelabuhan laut dan perluasan bandar udara;		√	√	√	√
S26		S26.1		Nilai Adat Dan Budata (Fakfak Berbudaya)	√	√	√	√	√
				Pembinaan adat dan budaya masyarakat					

√
√ √
√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya		Peningkatan Fasilitasi aktivitas keagamaan dan kebudayaan di tengah masyarakat	Peningkatan event kebudayaan untuk mendukung pelestarian nilai adat dan budaya	√	√	√	√	√
				Pembinaan dan Pengembangan mental spiritual bidang keagamaan bagi generasi muda, PNS dan Masyarakat Umum	√	√	√	√	√
				Peringatan hari-hari besar keagamaan; Peningkatan kapasitas LPTQ, pesparawi dan pesparani dan lainnya;	√	√	√	√	√
				Penguatan nilai-nilai keagamaan yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran agama / muatan lokal	√	√	√	√	√
S27	Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	S27.1	Peningkatan Afirmasi dan Perlindungan OAP	Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan			√	√	√
				Afirmasi dan perlindungan sosial bagi OAP			√	√	√
				Sosialisasi perlindungan dan afirmasi OAP			√	√	√
S28	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	S28.1	Fasilitasi aktualisasi potensi sumber daya adat dan budaya Fakfak	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		√	√	√	√
				Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya		√	√	√	√
				Pemberdayaan masyarakat adat		√	√	√	√
				Pembentukan desa adat		√	√	√	√
				Penguatan nilai-nilai adat budaya yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati(Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran adat budaya/ muatan lokal		√	√	√	√
S29	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	S29.1	Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Struktur Tata Ruang yang terjaga	Pelaksanaan peraturan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan;	√	√	√	√	
				Pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal 60 persen pada tahun 2025;	√	√	√	√	
				Pemanfaatan hutan Fakfak dari aspek produksi yang tidak mengganggu konservasi;	√	√	√	√	
S30	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW	S30.1	Pemantapan pengembangan wilayah berbasis tata ruang berkelanjutan	Penguatan pemanfaatan struktur ruang	√	√	√	√	√
				Fakfak dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka pengembangan kawasan andalan	√	√	√	√	√
				Penguatan pembangunan yang menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial;	√	√	√	√	√

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
	Provinsi maupun daerah			Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kepentingan masyarakat lokal;	√	√	√	√	√
				Penguatan gerakan sosial lintas pemangku kepentingan dalam LH yang lestari (aliansi strategis dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian);		√	√	√	√
S31	Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL	S31.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL	Pengelolaan lingkunan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL;		√	√	√	√
				Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di seekitaran wilayah aliran sungai	√	√	√	√	√
				Peningkatan kerjasama multisektor penanganan wilayah DAL	√	√	√	√	√
S32	Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	S32.1	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan non alam	Penguatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam, bencana non-alam, pandemi, dan epidemi penyakit;	√			√	√
				Penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana;	√	√	√	√	√
				Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif			√	√	√

6.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang berlandaskan keharmonisan lingkungan alam dan buatan; perwujudan keterpaduan dalam penggunaan SDA; serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Penataan ruang Kabupaten Fakfak merupakan sinergi dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk **mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, serta didukung oleh sektor lainnya**. Arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Fakfak terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2013-2033, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak 2011-2031, khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan ekologis, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Fakfak harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pada tahun 2020-2024 arah pembangunan seluruh wilayah Papua berdasarkan RPJMN adalah *“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan”*. Pendekatan yang diambil dalam pembangunan wilayah dalam RPJMN menekankan adanya integrasi antara pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu, dalam RPJMN telah ditetapkan dua koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan koridor pertumbuhan merupakan pembangunan dengan mengandalkan basis keunggulan di suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Sedangkan pembangunan koridor pemerataan dilakukan dengan mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar koridor pertumbuhan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Adapun Kabupaten Fakfak termasuk dalam **“Koridor Pemerataan”** (lihat Gambar VI.1 dan Tabel VI.3). Terdapat beberapa prioritas pembangunan di Kabupaten Fakfak yang tercantumkan di dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri

2. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting

3. Pengembangan desa digital

4. Pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat

5. Pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan ekonomi lokal

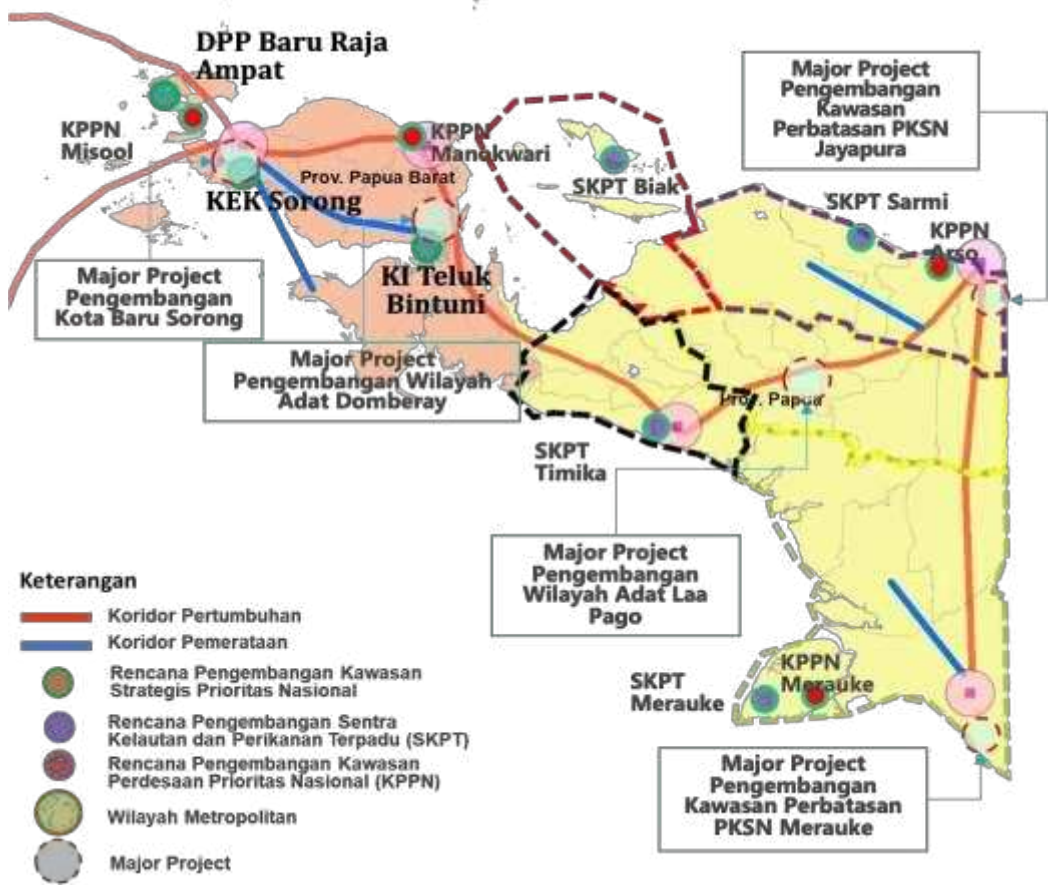
6. Pemasaran produk unggulan

7. Pembangunan embung di wilayah rawan pangan

8. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

9. Pembangunan dan peningkatan jalan

Gambar VI.1 Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan Wilayah Papua dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

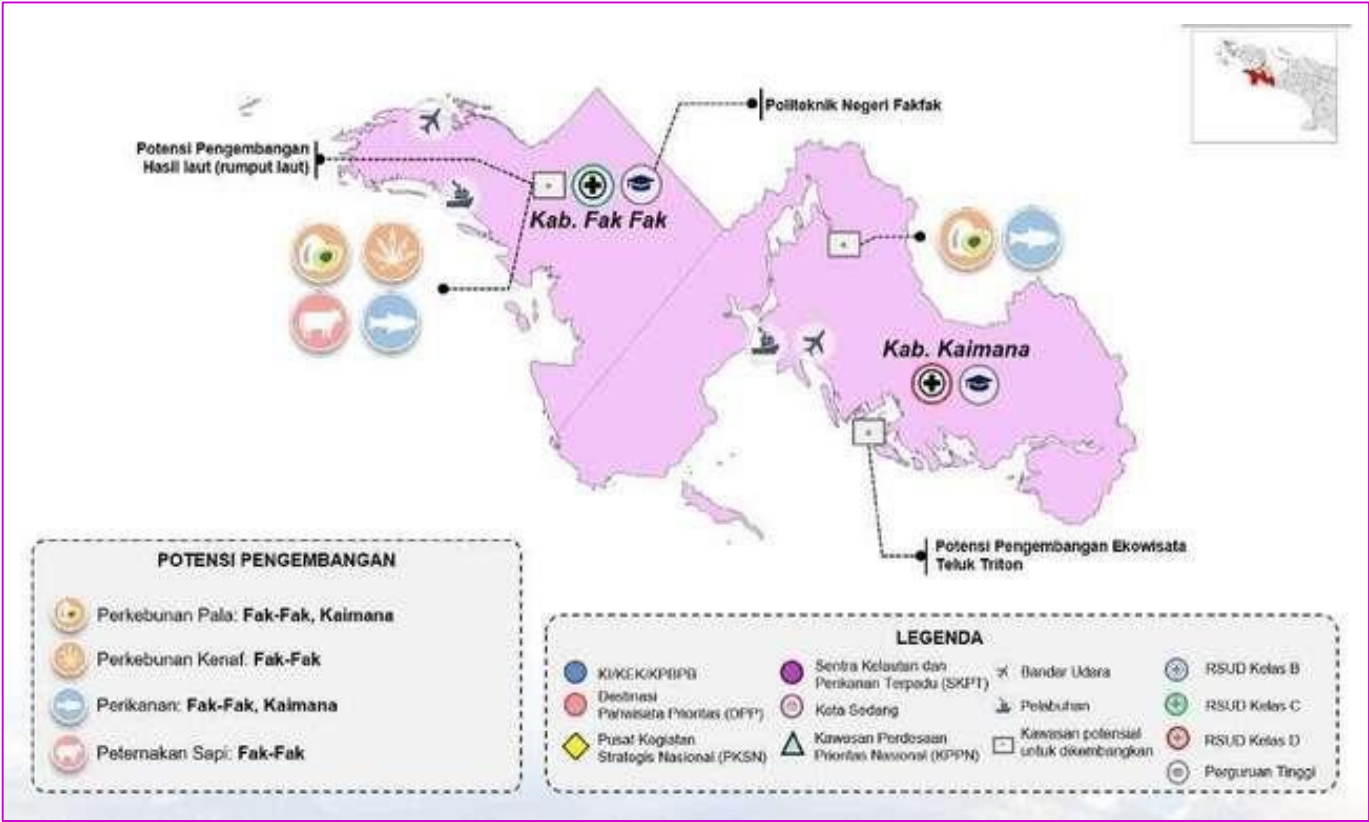
Tabel VI.3 Pemetaan Kabupaten di Provinsi Papua Barat berdasarkan Pendekatan Pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di dalam RPJMN 2020-2024

Pendekatan Pembangunan	Kabupaten/Kota
Pertumbuhan	Kota Sorong
	Kabupaten Sorong
	Kabupaten Tambrow
	Kabupaten Manokwari
	Kabupaten Manokwari Selatan
	Kabupaten Teluk Wondama
Pemerataan	Kabupaten Sorong Selatan
	Kabupaten Maybrat
	Kabupaten Pegunungan Arfak
	Kabupaten Raja Ampat
	Kabupaten Teluk Bintuni
	Kabupaten Fakfak

Sumber: RPJMN 2020-2024

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten di dalam Wilayah Adat Bomberay. Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, arah kebijakan percepatan pembangunan Wilayah Adat Bomberay yaitu **“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan Wilayah Adat Bomberay sebagai sentra perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata alam”** (Gambar VI.2).

Gambar VI.2 Arah Pengembangan Wilayah Adat Bomberay



Sumber: Lampiran I, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041

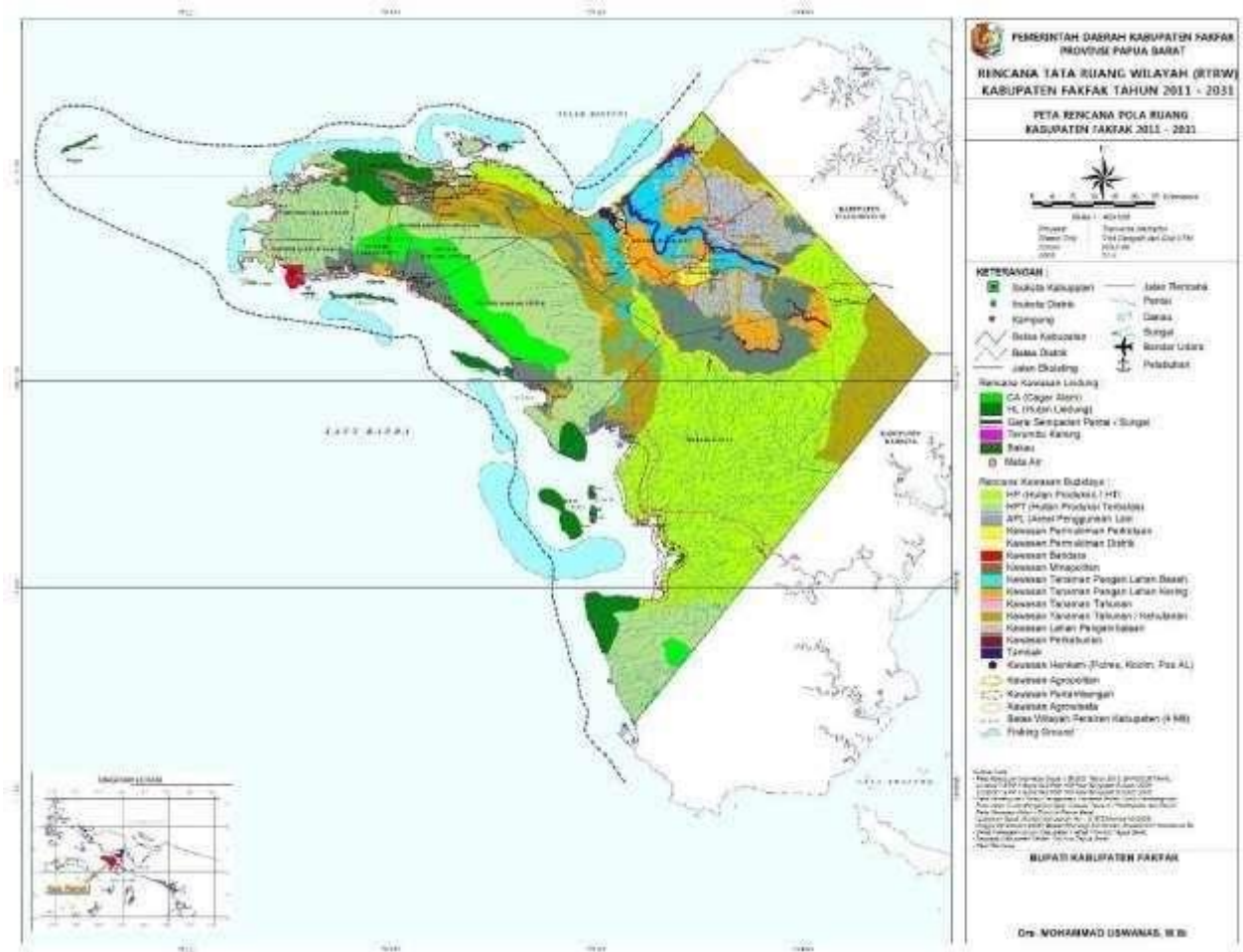
Arah kebijakan pembangunan Wilayah Adat Bomberay dilakukan melalui strategi:

- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan rumah sakit dan puskesmas sesuai standar;
- Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;



- g. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- h. Mengembangkan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL);
- i. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
 - (i) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi dan kemitraan usaha;
 - (ii) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan; dan
 - (iii) Mengembangkan ekowisata alam.

Gambar VI.3 Rencana Pola Ruang Kabupaten Fakfak



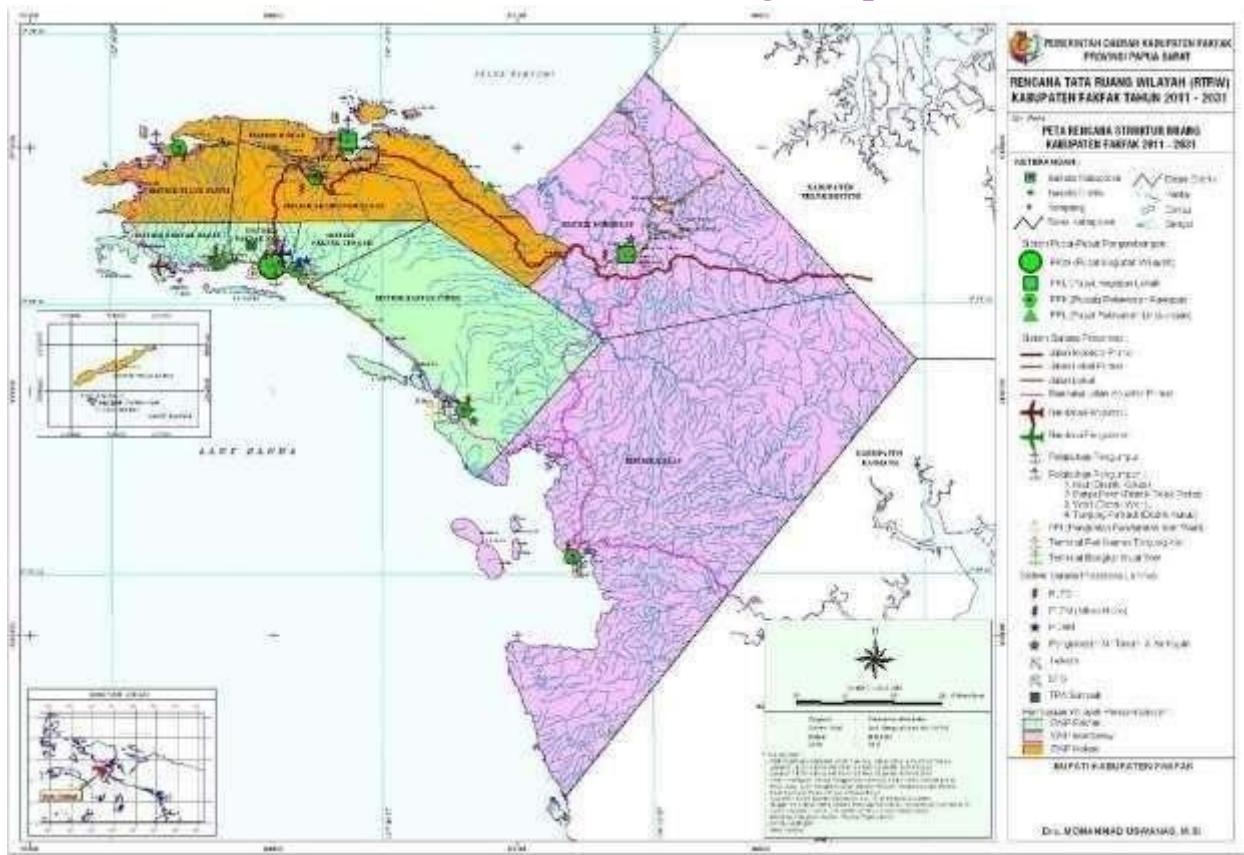
Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

Berdasarkan RTRW Kabupaten Fakfak tahun 2011-2031, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Fakfak terdiri atas:

- a. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pedesaan yang merata dan hirarkis;
- b. Peningkatan akses dengan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan antar pusat perkotaan dan perdesaan yang merata untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Pembangunan berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan;
- d. Pelestarian kawasan lindung; serta
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan penataan ruang tersebut tertuang dalam rencana pola ruang dan rencana struktur ruang sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar VI.3 dan Gambar VI.4.

Gambar VI.4 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Fakfak



Sumber: RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Fakfak yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Fakfak terdiri atas: (1) kawasan hutan lindung; (2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; (5) kawasan rawan bencana alam; (6) kawasan lindung geologi; serta (7) kawasan lindung lainnya. Kawasan Budidaya di Kabupaten Fakfak terdiri atas: (1) Kawasan peruntukkan hutan produksi; (2) pertanian; (3) perikanan; (4) pertambangan; (5) industri; (6) pariwisata; serta (7) permukiman. Adapun rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini, rencana struktur ruang wilayah Fakfak meliputi: (1) pusat-pusat kegiatan; (2) sistem jaringan prasarana utama; serta (3) sistem jaringan prasarana lainnya Adapun arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program tahun 2021-2026 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 terdapat dalam Tabel VI.4.

Tabel VI.4 Arahan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Tahun 2021-2026 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031

NO	MATERI	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	ANGGARAN		
					APBD	APBN	LAINNYA
1	Pengembangan Fasilitas Perkotaan SWP Kokas	a	Pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan (Perguruan Tinggi)	Kawasan Perkotaan Kokas	V		
		b	Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit)	Kawasan Perkotaan Kokas	V		
		c	Pembangunan dan peningkatan fasilitas perdagangan (Pasar + Mall)	Kawasan Perkotaan Kokas	V		
		d	Pengembangan permukiman	Kawasan Perkotaan Kokas	V		
		e	Pengembangan fasilitas sosial (Gedung Olah raga)	Kawasan Perkotaan Kokas	V		
2	Transportasi						
2.1	Transportasi Darat	a	Peningkatan ruas jalan	Ruas Jalan Fakfak-Weri (65 km)	V	V	
				Ruas Jalan Karas-Nusalasi (49 km)	V	V	
				Ruas Jalan Tetar-Teluk Patipi (45 km)		V	
				Ruas Jalan Fakfak-Werba (18 km)		V	
				Ruas Jalan Werba-Siboru (49 km)	V	V	
		b	Pembangunan ruas jalan	Ruas Jalan Weri-Nusalasi (34 km)		V	
				Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay (55 km)	V	V	
				Ruas Jalan Bomberay-Toweri (50 km)	V	V	
		c	Pembangunan jembatan	Jembatan Weri (60 m)		V	
				Jembatan Fakfak-Bomberat (15 m)		V	
				Jembatan Bomberay-SP2		V	
		d	Pembangunan Terminal Kelas B		V		
		e	Pembangunan Terminal Kelas C	Distrik Bomberay	V		
		f	Pembangunan Terminal Barang	Bomberay, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur	V		
2.2	Transportasi Udara	a	Pembangunan Bandara Baru di Siboru	Distrik Fakfak Barat	V	V	
2.3	Transportasi Laut	a	Pembangunan Terminal Peti Kemas di Kiat	Kiat, Fakfak Barat	V	V	
3	Sumber Daya Air	a	Pembangunan Irigasi Tertier di SP 5 dan SP 6	Bomberay	V		
		b	Pengembangan Sistem Air Bersih	Kawasan Perkotaan Fakfak	V		
				Kawasan Perkotaan Bomberay	V		
				Kawasan Perkotaan Kokas	V		
				Ibukota Distrik Weri, Tj Purkadi, Kramongmongga, Patipi Pasir, Werba	V		
4	Jaringan Komunikasi	a	Pengembangan Sistem Komunikasi	Kawasan Perkotaan Fakfak	V		Telkom
				Kokas	V		
				Weri	V		
				Tanjung Purkadi	V		
				Kawasan Perkotaan Bomberay	V		
5	Jaringan Energi	a	Pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di Air Besar	Fakfak Tengah	V		PLN
		b	Peningkatan pelayanan listrik di Bomberay, Karas dan Weri	Bomberay, Karas, Weri, Kokas	V		
		c	Pengembangan dan Pembangunan PLTD di Ibukota Distrik	Ibukota Distrik	V		
6	Perwujudan Prasarana Pengelola Lingkungan						
6.1	Drainase, Limbah dan Sampah	a	Pengembangan "onsite sistem" melalui septic tank limbah rumah tangga dan kantor	seluruh distrik	V		
		b	Pengembangan sistem pewadahan, pengumpulan dan pemindahan untuk sampah	seluruh distrik	V		
		c	Pengelolaan sampah di TPA dengan Sanitary landfill	Distrik Fakfak	V		
6.2	Evakuasi Bencana	a	Perencanaan tingkat detail untuk kawasan evakuasi bencana tsunami	Distrik Bomberay, Distrik Kokas, Distrik teluk Patipi	V		
		b	Perencanaan tingkat detail untuk kawasan evakuasi bencana banjir	Distrik Bomberay	V		
6.3	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat	a	Sempadan Pantai : Perlindungan 100 m dari pasang tertinggi termasuk kawasan hutan bakau	pesisir Kab. Fakfak	V		
		b	Pembangunan tanggul penahan ombak	kampung-kampung pesisir	V		



NO	MATERI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN		
				APBD	APBN	LAINNYA
	Sempadan Pantai					
6.4	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai	a	Sempadan sungai besar: perlindungan 100 m kiri kanan sungai besar	S. Budidi, S. Bomberay, S. Otoweri	V	
		b	Sempadan sungai kecil: perlindungan 50 m kiri kanan sungai kecil	anak sungai Kab. Fakfak	V	
6.5	Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat Sekitar Mata Angin	a	Sekitar mata air: perlindungan 100 m keliling dari mata air	Degen dan Kayuni (10 ha)	V	
7	Perwujudan Kawasan Budidaya					
7.1	Hutan Produksi Terbatas/Tetap	a	Pengawasan HPH terhadap pemanfaatan hasil hayu hutan	Kabupaten Fakfak (2 HPH)	V	
		b	Pembinaan masyarakat di sekitar hutan	Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk Patipi, Fakfak Timur	V	
		c	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan	Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk Patipi, Fakfak Timur	V	
		d	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk Patipi, Fakfak Timur	V	
7.2	Hutan Produksi Konversi/Hutan Tanaman Industri	a	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Distrik Karas dan Distrik Bomberay		swasta
		b	Pengembangan Industri Pengolahan Kertas	Distrik Karas		
7.3	Kawasan Perkebunan	a	Perluasan areal perkebunan rakyat	Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas	V	
		b	Pengadaan bibit unggul untuk perkebunan rakyat	Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas	V	
		c	Penyediaan SAPRODI Perkebunan Rakyat	Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas	V	
		d	Pengembangan Perkebunan besar dengan komoditi: kelapa sawit, karet, kakao, pala	Distrik Karas dan Distrik Bomberay		swasta
		e	Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan	Distrik Karas dan Distrik Bomberay		
7.4	Kawasan Pertanian dan Peternakan	a	Penyusunan database kesesuaian lahan pertanian kab. Fakfak	Kab. Fakfak	V	
		b	Pengembangan SP Trans Pola pertanian tanaman pangan	Bomberay	V	V
		c	Pencetakan sawah dan perluasan pertanian tanaman pangan	Bomberay (SP5 dan SP 6)	V	V
		d	Penyediaan bibit unggul tanaman pangan dan ternak	Bomberay dan seluruh distrik	V	V
		e	Penyediaan SAPRODI	Bomberay dan seluruh distrik	V	V
		f	Pembinaan	seluruh distrik	V	
7.5	Kawasan Pariwisata	a	Promosi Daya Tarik Wisata	Kab. Fakfak	V	
7.6	Kawasan Perikanan Tangkap	a	Pengembangan perikanan tangkap skala kecil dan menengah	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	
		b	Pengembangan armada tangkap, alat penangkapan dan teknologi penangkapan	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	
		c	Pengembangan PPI dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya: cold storage, pasar, bank, pangkalan BBM	Distrik Fakfak Timur	V	
		d	Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	
		e	Pengembangan kapasitas sumber daya nelayan	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	
		f	Peningkatan akses nelayan kepada modal, sarana prasarana tangkap, pemasaran, BBM	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	
7.7	Kawasan Perikanan Budidaya	a	Perencanaan dan Pengembangan Minapolitan Weri	Distrik Weri	V	V
		b	Pengembangan dan pelatihan SDM nelayan untuk budidaya rumput laut, teripang, kerapu, kakap dan lobster	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V	



NO	MATERI	INDIKASI PROGRAM		LOKASI	ANGGARAN		
					APBD	APBN	LAINNYA
		c	Pengembangan kerjasama Pemda, swasta dan masyarakat dalam budidaya mutiara, lobster, teripang yang memerlukan modal besar	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V		swasta
		d	Pengembangan usaha ekonomi produktif untuk istri nelayan	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V		
		e	Pelatihan manajemen pemasaran, mekanisme pemasaran dan rantai pemasaran	Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas dan Karas	V		
7.8	Kawasan Pertambangan	a	Ekplorasi potensi gas dan minyak bumi	Distrik Bomberay dan Distrik Karas			swasta
		b	Penyusunan AMDAL dan cooperate social responsibility (CSR)	Distrik Bomberay dan Distrik Karas			
		c	Pembinaan usaha pertambangan bahan galian C	Distrik Kokas, Fakfak Barat, Kramongmongga	V		
7.9	Kawasan Industri	a	Pembinaan dan Pengembangan industri kecil makanan dan minuman	Distrik Fakfak, Fakfak Barat dan Kokas	V		swasta
		b	Pembinaan industri bahan galian bukan logam	Distrik Bomberay	V		
		c	Pembinaan dan pengembangan kayu, bambu, rotan	Distrik Reluk Patipi dan Kokas	V		
		d	Pembinaan dan pengembangan industri barang dari kertas, industri kimia dan industri logam dasar	Distrik Fakfak	V		
		e	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	Distrik Bomberay dan Karas	V		
8	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten	a	Pengembangan Kawasan Strategis	Kawasan Bomberay dan sekitarnya	V		
				Kawasan Karas dan sekitarnya	V		
				Kawasan Kokas dan sekitarnya	V		
				Kawasan Fakfak dan sekitarnya	V		
				Kawasan Kramongmongga dskt.	V		
				Kawasan Pantai Barat Fakfak dskt.	V		

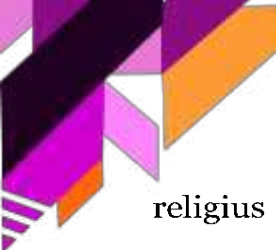
Sumber: Lampiran I, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Fakfak 2011-2031

6.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, selain disusun program-program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi 6 (enam) Urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan non pelayanan dasar serta 8 (delapan) urusan pilihan, juga disusun program unggulan kepala daerah yang merupakan program unggulan (*dedicated*) serta program strategis. Program tersebut selain sebagai upaya untuk merealisasikan janji-janji politik Kepala Daerah, juga diharapkan dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan seperti peningkatan konektifitas wilayah, percepatan kualitas pelayanan publik,reformasi dan tata kelola, juga sebagai trigger pertumbuhan ekonomi daerah. Program unggulan Kepala Daerah tersebut meliputi:

1. Program Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius).

Program penguatan Sumber daya manusia melalui program Fakfak cerdas, Sehat,



religius merupakan program unggulan kepala daerah yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia Fakfak yang unggul dan berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan dan memiliki nilai-nilai religius. Program ini dilakukan melalui pengembangan sekolah- sekolah unggulan terutama pendidikan vokasi, pendidikan kedokteran, pendidikan pilot, serta program- program kejuruan lainnya yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Sejak diberlakukannya Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membawa konsekuensi perubahan yang fundamental, terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap berkomitmen untuk melakukan penataan Organisasi dan tata kelola sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi guna membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel.

3. Program Bantuan 1.500 Beasiswa Bagi Pelajar Asal Fakfak

Pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Fakfak yang menempuh pendidikan baik dalam maupun luar Kabupaten Fakfak merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendorong akses serta kualitas pendidikan bagi putra putri asal Kabupaten Fakfak secara berkeadilan. Selain itu pula Pemerintah Kabupaten Fakfak memberi perhatian serius terhadap pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti program Afirmasi yang tersebar di perguruan tinggi negeri yaitu dengan memberi jaminan perkuliahan selama menempuh pendidikan serta memantau perkembangan perkuliahan Mahasiswa di beberapa perguruan tinggi baik didalam maupun diluar Kabupaten Fakfak.

4. Program Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan

Program ini dimaksudkan memberikan perlindungan serta jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui pemberian kartu fakfak tersenyum yang akan terintegrasi dengan data kependudukan.

5. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih (Fakfak Banjir)



Pembangunan jaringan air bersih adalah di maksudkan untuk penyediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang lebih merata dan menjangkau baik di tingkat kabupaten, distrik maupun kampung. Selain itu melakukan revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana air bersih melalui optimalisasi sumber-sumber air bersih yang tersedia maupun dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber yang ada.

6. Program Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah

Program Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah adalah merupakan upaya untuk menyediakan infrastruktur yang lebih merata, berkualitas serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Proram ini dilakukan melalui pembangunan jaringan transportasi baik inter maupun antar wilayah, pembangunan bandara serta penyediaan jaringan telekomunikasi yang merata dan dapat di akses sampai di tingkat kampung.

7. Program Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat

Program Pengembangan ekonomi masyarakat adalah bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor rill melalui peningkatan ekonomi unggulan daerah di bidang pertanian dalam arti luas serta pariwisata sebagai sektor unggulan, juga memperkuat usaha- usaha kecil mikro dan koperasi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

8. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera

Program ini di lakukan melalui pendekatan kesejahteraan pengelolaan baik ekonomi maupun sosial kemasyarakatan secara terpadu dan komprehensif dengan sasaran menurunkan angka kemiskinan dan penganguran serta mendorong peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Program Pencegahan dan Pengendalian Stunting (Chating Sejak Dini)

Program ini di maksudnkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting di kabupaten fakfak melalui sistim informasi yang cepat dan tanggap sejak dini.

10. Program Pengembangan Reklamasi

Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan fakfak menjadi pusat sentra bisnis (CBD) dan kawasan pengembangan parawisata. Maka kawasan reklamasi menjadi target pencapaian dari RPJMD Fakfak Tersenyum. Kawasan ini selain menjadi pusat rekreasi dan informasi serta edukasi dan sebagai ruang publik akan di lakukan penataan sesuai dengan fungsi ruang.



11. Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu (Fakfak Berwisata)

Program ini sebagai salah satu program unggulan kabupaten Fakfak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan percepatan sektor Pariwisata dengan mengembang potensi destinasi parawisata, budaya, sejarah dan nilai- nilai adat dan budaya. Program ini akan di fokuskan dengan membangun pulau wisata tubir seram-pulau bone-pasir putih-pulau panjang/pulau boyam/wartutin/teluk thumburuni berbasis masyarakat. Selain masyarakat yang menjadi leding sektor dalam mengerjakan kemandirian masyarakat. Disamping itu di lakukan pembangunan kampung wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Target ini dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Fakfak.

12. Program Pengembangan Kepemudaan (Pemuda Melineal)

Program ini di maksudkan meningkatkan peran pemuda di dalam pembangunan melalui kreatifitas dan berinovasi di bidang pembangunan. Bentuk- bentuk kegiatan penguatan komunitas- komunitas kepemudaan di Kabupaten Fakfak.

13. Program Nilai Adat dan Budaya (Fakfak Berbudaya)

Program ini dalam rangka penguatan adat dan budaya yang bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, kapasitas adat dan budaya. Dengan melakukan seniergitas antara pemerintah dan adat dalam pelaksanan pembangunan dan roda pemerintahan di kabupaten fakfak. Beberapa kegiatan di lakukan antara lain percepatan daerah mengenai perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan hukum adat, pembentukan kampung adat dan pelestarian nilai-nilai dan adat dan budaya masyarakat di Kabupaten Fakfak.

14. Program Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang)

Sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan listrik di tingkat kabupaten, distrik dan kampung, maka di dalam visi misi RPJMD di dorong program Fakfak Terang baik dengan memanfaatkan sumber energi listrik yang bersumber dari PLTD yang ada juga dengan mendorong percepatan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas serta memanfaatkan energi listrik terbarukan seperti PLTS regular maupun komunal. Program ini juga bersinergi langsung dengan program Papua terang dalam rangka menyediakan listrik dan meningkatkan kapasitas operasional, membangun sistem jaringan listrik di tingkat ibu kota distrik melalui penyediaan listrik desa.

Selanjutnya gambaran program-program prioritas yang disertai pagu indikatif di Kabupaten Fakfak diuraikan pada Tabel VI.5.

Tabel VI.5 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.														
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius)	Penyediaan beasiswa bagian anak dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD	persen	98,81	98,86	29.714,85	98,91	31.229,48	98,96	32.837,79	99,01	34.509,24	99,06	36.276,11	99,06	164.567,47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA												
				APS SMP	persen	98,11	98,16		98,21		98,26		98,31		98,36		98,36															
				APS SMA	persen	89,81	89,85		89,90		89,94		89,99		90,03		90,03															
				APK PAUD	persen	76,95	77,95		78,95		79,95		80,95		81,95		81,95															
				APS Kesetaraan	persen	28,03	30,03		32,30		34,30		36,03		38,03		38,03															
		Penyediaan sarana dan prasarana bagi tenaga guru di daerah marginal;	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah	persen	6,39	6,57	6.196,55	6,75	6.512,40	6,92	6.847,79	7,10	7.196,34	7,27	7.564,80	7,27	34.317,88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA												
				Rasio guru terhadap murid TK/RA Sederajat	per satuan guru	8,58	9,00		9,45		9,93		10,42		10,94		10,94															
				Rasio guru terhadap murid SD/MI Sederajat	per satuan guru	9,91	10,40		10,92		11,47		12,04		12,64		12,64															
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Sederajat	per satuan guru	9,92	10,42		10,94		11,48		12,06		12,66		12,66															
				Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Sederajat	per satuan guru	15,90	16,70		17,53		18,41		19,33		20,30		20,30															
				Persentase Guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	0,00	9,09		16,67		23,08		28,57		33,33		33,33															
				Persentase Guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	33,33	0,35		36,31		37,61		38,80		39,89		39,89															
				Persentase Guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	47,93	0,48		48,18		48,29		48,38		48,46		48,46															
				2	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi kewilayahan dan sektoral	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD		persen		85,00		90,00		5.679,30				100,00	5.968,79	100,00	6.276,18	100,00	6.595,64	100,00	6.933,33	100,00	31.453,23	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
									Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas		ada/tidak ada		ada		ada						ada		ada		ada		ada		ada			
									Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		Persen		75,00		80,00						95,00		95,00		100,00		100,00		100,00			
									Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan		Persen		80,00		84,00						87,78		91,73		95,86		99,21		99,21			
									Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD		Persen		75,00		78,75						82,29		86,00		89,87		93,91		93,91			
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu					tepat waktu	tepat waktu	200.483,02	tepat waktu	210.702,07	tepat waktu	221.553,23	tepat waktu	232.830,29		tepat waktu	244.751,20	tepat waktu	1.110.319,80		KEUANGAN		BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen					5,00	5,00		4,00		3,00		2,00			2,00		2,00												
		Persentase SILPA terhadap APBD	persen					5,00	5,00		4,00		3,00		2,00			2,00		2,00												
		Persentase belanja pendidikan	persen					20,00	20,00		20,00		20,00		20,00			20,00		20,00												
		Persentase belanja kesehatan	persen					10,00	10,00		10,00		10,00		10,00			10,00		10,00												

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	persen	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Sistem pengendalian internal yang melekat serta efektif	PROGRAM PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN	Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada OBRIK	Persen	-	100,00	4.481,30	100,00	4.709,72	100,00	4.952,27	100,00	5.204,34	100,00	5.470,81	100,00	24.818,45	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	
				Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Persen																
		Kedisiplinan kepegawaian yang mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tersesainya Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan ASN	persen	85,00	86,70	10.046,41	88,87	10.558,50	91,09	11.102,26	93,37	11.667,37	95,70	12.264,74	95,70	55.639,29	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase PNS berkembang karier	persen	-	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00				30,00
				Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00
				Persentase Keterisian Jabatan	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00
				Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00
3	Beasiswa Bagi Pelajar Asal Fakfak	Membangun kerjasama dengan Perguruan tinggi kedinasan dalam rekrutmen mahasiswa pola pembibitan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan jumlah penerima beasiswa pelajar asli Fak fak	persen	100,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	25.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	Persen	80,00	100,00	25.733,39	100,00	27.045,08	100,00	28.437,90	100,00	29.885,39	100,00	31.415,52	100,00	142.517,29	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
4	Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyaratan	Penyediaan Data Base sosial ekonomi masyarakat Kabupaten, Distrik, Kelurahan & Kampung berbasis SAIK(+).	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	persen	100,00	100,00	1.046,65	100,00	1.100,00	100,00	1.156,65	100,00	1.215,52	100,00	1.277,76	100,00	5.796,57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
				Presentase posyandu aktif (status purnama dan mandiri)	persen	18,71	19,84		21,03		22,50		24,07		25,76		25,76				25,76
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	persen	-	60,00	606,03	63,00	636,92	66,15	669,72	69,46	703,81	72,93	739,84	72,93	3.356,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					Presentasi Jumlah Jaringan Internet dan Intranat terintegrasi	persen	-	30,00		31,50		33,08		34,73		36,47		36,47			
					Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100	100		100		100		100		100		100			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	persen	80,00	84,00	5.306,04	88,62	5.576,50	93,49	5.863,69	96,77	6.162,15	100,00	6.477,65	100,00	29.386,03	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	persen	80,00	84,00		88,62		93,49		96,77		100,00		100,00			
					Persentase indikator Program RPJMD bidanginfrastruktur yang tercapai	persen	80,00	84,00		88,62		93,49		96,77		100,00		100,00			
					Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100	100		100		100		100		100		100			
					Persentase DTKS Tervalidasi	persen	100,00	100,00	2.758,81	100,00	2.899,44	100,00	3.048,76	100,00	3.203,94	100,00	3.367,98	100,00	15.278,92		



NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama OAP	DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan jumlah penerima bantuan sosial dan perlindungan afirmasi OAP	persen	60	60		75		85		95		100			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	92,00	93,38	95,65	94,78	100,52	96,20	105,70	97,16	111,08	98,14	116,77	98,14	529,72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial dan/atau rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00	593,50	100,00	623,75	100,00	655,88	100,00	689,26	100,00	724,55	100,00	3.286,95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Cakupan masyarakat OAP yang mendapatkan bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL	
		Peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga ber PHBS	persen	50,00	50,00	95,15	52,50	100,00	55,13	105,15	57,88	110,50	60,78	116,16	60,78	526,96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Cakupan posyandu aktif di kampung kampung	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
5	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak	persen	7,20	7,00	9.693,58	10,00	10.187,69	15,00	10.712,35	20,00	11.257,61	25,00	11.834,00	25,00	53.685,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	persen	-	62,00		65,10		68,36		71,77		75,36		75,36			
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	50,00	51,00	5.564,98	52,00	5.848,64	54,00	6.149,84	56,00	6.462,87	58,00	6.793,77	58,00	30.820,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	persen	53,00	55,00		57,00		59,00		61,00		63,00		63,00			
				Persentase pelaksanaan normalisasi sungai	persen	50,00	60,00		70,00		75,00		80,00		80,00		80,00			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perkebunan	persen			3.823,30		4.018,18		4.225,12		4.440,18		4.667,52	0,00	21.174,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak	persen	75,60	77,11	4.218,04	78,65	4.433,04	80,23	4.661,34	81,83	4.898,61	83,47	5.149,41	83,47	23.360,44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	Peningkatan Interkoneksi AntarWilayah	Pembangunan jalan strategis antar wilayah,	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/ Kota	persen	79,11	80,69	45.880,47	82,31	48.219,09	83,95	50.702,38	85,63	53.283,13	87,34	56.011,22	87,34	254.096,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		antar ibu kota dan antar lingkungan																	DAN PENATAAN RUANG	RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	persen	15,60	17,47	1.384,97	18,87	1.455,57	20,38	1.530,53	22,01	1.608,44	23,77	1.690,79	23,77	7.670,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara	PROGRAM PENGEOLOAAN PENERBANGAN	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	persen	100,00	100,00	9.039,25	100,00	9.500,00	100,00	9.989,25	100,00	10.497,70	100,00	11.035,19	100,00	50.061,39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEOLOAAN PELAYARAN	Persentase pembangunan fasilitas terbangun, pemeliharaan, dan pengawasan pada pelabuhan	persen	100,00	100,00	2.702,07	100,00	2.839,80	100,00	2.986,05	100,00	3.138,04	100,00	3.298,71	100,00	14.964,69	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah kunjungan kapal terlayani	persen		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00					
				Jumlah arus barang terlayani	persen		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00					
			PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen	65,00	68,25	3.145,36	71,66	3.305,69	75,25	3.475,93	79,01	3.652,86	82,96	3.839,88	82,96	17.419,72	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
		Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan Rumah Khusus	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	Persen	80,00	100,00	25.733,39	100,00	27.045,08	100,00	28.437,90	100,00	29.885,39	100,00	31.415,52	100,00	142.517,29	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
		Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	-	40,00	5.102,97	42,00	5.363,08	44,10	5.639,28	46,31	5.926,32	48,62	6.229,75	48,62	28.261,41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	persen	-	60,00	606,03	63,00	636,92	66,15	669,72	69,46	703,81	72,93	739,84	72,93	3.356,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Presentasi Jumlah Jaringan Internet dan Intranet terintegrasi	persen	-	30,00		31,50		33,08		34,73		36,47		36,47			
7	Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat	Pemberian bantuan usaha bagi mama-mama papua	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	persen	60,00	63,00	109,07	64,58	114,63	66,19	120,53	67,84	126,67	69,54	133,15	69,54	604,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan penanaman modal	indeks	60,00	64,50	91,61	69,34	96,28	74,54	101,24	80,13	106,39	86,14	111,84	86,14	507,37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	persen	17,43	18,30	797,27	19,22	837,90	20,18	881,06	21,19	925,90	22,25	973,31	22,25	4.415,44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pembangunan dan penataan pasar	PROGRAM PENINGKATAN	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	persen	5,00	5,00	4.086,26	5,00	4.294,55	5,00	4.515,72	5,00	4.745,57	5,00	4.988,54	5,00	22.630,63	URUSAN PEMERINTAHAN	



NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		tradisional dan pasar modern.	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	khususnya Pasar Rakyat dan PK5														BIDANG PERDAGANGAN		
		Peningkatan dan pengembangan investasi pendukung destinasi pariwisata berbasis masyarakat	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	persen	60,00	63,00	109,07	64,58	114,63	66,19	120,53	67,84	126,67	69,54	133,15	69,54	604,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan penanaman modal	indeks	60,00	64,50	91,61	69,34	96,28	74,54	101,24	80,13	106,39	86,14	111,84	86,14	507,37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pembangunan home industri dalam upaya peningkatan usaha perikanan, pertanian dan perkebunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	persen	17,43	18,30	797,27	19,22	837,90	20,18	881,06	21,19	925,90	22,25	973,31	22,25	4.415,44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	835,02	876,77	11.279,54	898,69	11.854,48	921,16	12.464,99	944,19	13.099,46	967,79	13.770,15	967,79	62.468,61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
				Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	persen	30,00	31,50		33,39		35,73		37,87		40,14					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	18,62	19,56	915,15	20,05	961,80	20,55	1.011,33	21,06	1.062,81	21,59	1.117,22	21,59	5.068,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Cakupan bina kelompok nelayan budi daya		persen	20,00	21,00	22,26		23,82		25,49		27,27							
		Penguatan kelompok petani dan pelaku usaha kecil, menengah dan rumah tangga dalam bidang pertanian	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	persen	17,43	18,30	797,27	19,22	837,90	20,18	881,06	21,19	925,90	22,25	973,31	22,25	4.415,44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase tenaga penyuluh profesional tersertifikasi	persen	10,00	15,00	165,69	20,00	174,14	25,00	183,11	25,00	192,43	30,00	202,28	30,00	917,64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN
		Peningkatan nilai tambah komoditas hasil perikanan, pertanian dan peternakan dengan inovasi teknologi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase peningkatan Produktivitas pertanian per tahun	persen	5,00	5,00	2.528,11	5,00	2.656,97	5,00	2.793,81	5,00	2.936,01	5,00	3.086,33	0,00	14.001,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Peningkatan produksi pangan hewani	persen	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00					
		8	Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera	Penyediaan ruang publik (Ruang Rekreasi, Olahraga, Taman Kota, lingkungan hidup).	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan ketersediaan ruang terbuka untuk publik	persen	75,00	75,00	10.570,70	100,00	11.109,52	100,00	11.681,66	100,00	12.276,25	100,00	12.904,80	100,00	58.542,92
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTH				persen	1,00	1,00	433,02	1,00	455,09	1,00	478,53	1,00	502,89	1,00	528,64	1,00	2.398,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN	Jumlah kunjungan wisata				orang	6520,00	6683,00	1.140,21	6850,08	1.198,32	7021,33	1.260,04	7196,86	1.324,17	7376,78	1.391,97	7376,78	6.314,71	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah ODTW yang dikembangkan sesuai dengan rencana	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BIDANG PARIWISATA	
9	Pencegahan Dan Pengendalian Stunting	Penguatan program stunting melalui rencana aksi kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang terakreditasi	persen	40,00	60,00	56.247,26	80,00	59.114,31	100,00	62.158,70	100,00	65.322,57	100,00	68.667,09	100,00	311.509,93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
				Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	persen	8,84	8,84		8,84		8,84		8,84		8,84					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Pemanfaatan Pangan (IP)	indeks	64,68	67,91	5.143,31	71,31	5.405,48	74,88	5.683,86	78,62	5.973,17	82,55	6.278,99	82,55	28.484,80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak	persen	7,20	7,00	9.693,58	10,00	10.187,69	15,00	10.712,35	20,00	11.257,61	25,00	11.834,00	25,00	53.685,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	persen	-	62,00		65,10		68,36		71,77		75,36		75,36			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak	persen	75,60	77,11	4.218,04	78,65	4.433,04	80,23	4.661,34	81,83	4.898,61	83,47	5.149,41	83,47	23.360,44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga dan anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	437,86	100,00	460,18	100,00	483,88	100,00	508,51	100,00	534,54	100,00	2.424,97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase PKK aktif	persen	100,00	100,00	1.046,65	100,00	1.100,00	100,00	1.156,65	100,00	1.215,52	100,00	1.277,76	100,00	5.796,57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
				Presentase posyandu aktif (status purnama dan mandiri)	persen	18,71	19,84		21,03		22,50		24,07		25,76					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera	persen			1.682,95		1.768,73		1.859,82		1.954,48		2.054,55	0,00	9.320,53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang terakreditasi	persen	40,00	60,00	56.247,26	80,00	59.114,31	100,00	62.158,70	100,00	65.322,57	100,00	68.667,09	100,00	311.509,93	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
				Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	persen	8,84	8,84		8,84		8,84		8,84		8,84		8,84	8,84		
10	Pengembangan Reklamasi	1. Pengembangan Kawasan hasil Reklamasi sebagai Pusat CBD, Wisata/Rekreasi 2. Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Terpadu (Pulau Tubirseram-Pulau Bone-Pasir Putih-Pulau Panjang-Wartutin-Teluk Reklamasi) berbasis masyarakat lokal 3. Pembangunan Destinasi Wisata Fakfak	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan/diikuti per tahun	event	1	1	2.806,42	1	2.949,47	1	3.101,36	1	3.259,22	1	3.426,09	5	15.542,56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi memperoleh HAKI	persen	10,00	10,50	1.189,38	11,03	1.250,00	11,58	1.314,38	12,16	1.381,28	12,76	1.452,00	12,76	6.587,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan / fasilitasi sertifikasi kompetensi	persen	-	5,00	402,85	5,25	423,38	5,51	445,19	5,79	467,85	6,08	491,80	6,08	2.231,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
11	Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu	Pengembangan daya tarik dan kunjungan wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	orang	6520,00	6683,00	1.140,21	6850,08	1.198,32	7021,33	1.260,04	7196,86	1.324,17	7376,78	1.391,97	7376,78	6.314,71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan/ diikuti per tahun	event	1	1	2.806,42	1	2.949,47	1	3.101,36	1	3.259,22	1	3.426,09	5	15.542,56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi memperoleh HAKI	persen	10,00	10,50	1.189,38	11,03	1.250,00	11,58	1.314,38	12,16	1.381,28	12,76	1.452,00	12,76	6.587,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan / fasilitasi sertifikasi kompetensi	persen	-	5,00	402,85	5,25	423,38	5,51	445,19	5,79	467,85	6,08	491,80	6,08	2.231,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
12	Pengembangan Kepemudaan (Pemuda Melineal)	Pemberian stimulan kepada pemuda berprestasi di bidang olahraga, seni, pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	90,19	90,19	2.218,12	91,54	2.331,18	92,92	2.451,23	94,31	2.576,00	95,72	2.707,89	95,72	12.284,42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase peningkatan pemuda pelopor, wirausaha muda, pemudakader	persen	12,00	12,62		12,81		13,01		13,20		13,40		13,40	13,40		
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	persen	45,45	45,45	5.222,72	48,86	5.488,93	52,52	5.771,61	56,46	6.065,39	60,70	6.375,93	60,70	28.924,58	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA-PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET ANGGARAN DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							2021		2022		2023		2024		2025		K	Rp.				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet beerprestasi yang dibina	persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
				Jumlah event kompetisi dan kebudayaan olahraga	kali	-	1		2		2		3		3		11					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	persen	100,00	100,00	713,63	100,00	750,00	100,00	788,63	100,00	828,77	100,00	871,20	100,00	3.952,21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase Bumi Perkemahan yang layak	persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
13	Nilai Adat Dan Budaya (Fakfak Berbudaya)	Meningkatkan apresiasi dan internalisasi adat dan budaya terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	persen	100,00	100,00	951,50	100,00	1.000,00	100,00	1.051,50	100,00	1.105,02	100,00	1.161,60	100,00	5.269,62	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
				Jumlah kampung/kelurahan budaya	kampung/kelurahan	0	1		2		2		5		5		15					
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	-	1,00	190,30	1,00	200,00	1,00	210,30	1,00	221,00	1,00	232,32	1,00	1.053,92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	-	100,00	285,45	100,00	300,00	100,00	315,45	100,00	331,51	100,00	348,48	100,00	1.580,88	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
14	Penyediaan Utilitas	Penyediaan ketenagalistrikan dan sumberdaya energi Kabupaten Fakfak yang berkelanjutan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Persen	55,00	60,39	2.249,93	65,52	2.364,61	71,09	2.486,39	77,14	2.612,95	83,69	2.746,73	83,69	12.460,60	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH		
				Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
				Presentase Kegiatan strategis rumpun bidang ekonomi yang dikoordinasikan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
				Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi yang berkualitas	ada/tidak ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada					
			PROGRAM PENYELENGGA- RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyediaan lampu jalan dan penerangan jalan kabupaten Fakfak	persen	20	20		40		40		50		60		70		Perhubungan	Dinas Perhubungan		



BAB VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah

Bab ini mengemukakan gambaran distribusi penggunaan kapasitas fiskal daerah ke dalam berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan kerangka urusan bidang kewenangan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

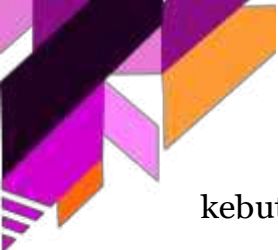
7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

masa lalu dan analisis terhadap berbagai faktor yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Fakfak di masa datang maka diperkirakan adanya perkembangan kapasitas keuangan daerah yang tumbuh moderat dengan ruang fiskal tercipta cukup kecil untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah dalam horizon waktu berlakunya dokumen RPJMD ini. Ke depan tantangan utama bagi Kabupaten Fakfak adalah meningkatkan porsi pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber-sumber potensial yang belum tergali.

Pengalokasian utama belanja daerah terutama akan dialokasikan pada pengeluaran mengikat dan pengeluaran wajib. Pengeluaran daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya gambaran belanja mengikat dan wajib yang terkandung dalam APBD Kabupaten Fakfak, antara lain:

- a. Belanja mengikat untuk membiayai program penunjang urusan provinsi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk belanja gaji, tunjangan dan



kebutuhan rutin lain yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan;

- b. Belanja transfer mengikat terutama terdapat pada dana bantuan kampung, disamping bagi hasil dari beberapa pos Pendapatan Asli daerah tertentu;
- c. Belanja program-program tertentu yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat, seperti misalnya belanja Pengawasan Pembangunan Daerah dan pembinaan aparatur
- d. Belanja fungsi Pendidikan yang mencapai 20 persen dari total belanja daerah yang teralokasi tidak hanya pada Dinas Pendidikan tapi juga pada Dinas terkait lainnya bahkan juga terdapat pada Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada Kabupaten/kota
- e. Belanja Bidang Kesehatan yang mencapai minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji yang juga teralokasi tidak hanya pada Dinas kesehatan tapi juga pada unit kesehatan lainnya termasuk Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada Kabupaten/kota
- f. Belanja Bidang Infrastruktur daerah yang mencapai 40 persen dari total belanja daerah yang terutama berasal dari sumber dana Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otsus (DTI)

Gambaran umum kerangka pendanaan Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 selanjutnya ditampilkan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1 Proyeksi Belanja Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RP	RP	RP	RP	RP	RP
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	1.229.800.670.588	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745
PENDAPATAN DAERAH	1.203.002.650.782	1.289.330.226.577	1.355.725.693.246	1.424.728.955.832	1.497.670.633.091	1.572.554.164.745
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	26.798.019.806	-	-	-	-	-
Dikurangi						
BELANJA MENGIKAT	627.723.226.822	654.833.293.345	683.127.819.401	712.659.186.216	743.482.120.405	775.653.800.299
Belanja Pegawai	427.609.481.821	444.713.861.094	462.502.415.538	481.002.512.159	500.242.612.645	520.252.317.151
Belanja Transfer	200.113.745.001	210.119.432.251	220.625.403.864	231.656.674.057	243.239.507.760	255.401.483.148
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	602.077.443.766	634.496.933.232	672.597.873.845	712.069.769.616	754.188.512.685	796.900.364.446

7.2 KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang





pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	173.377, 99	100,00	182.306,9 6	100,00	191.586,3 8	100,00	201.395,6 0	100,00	211.451,2 6	100,00	960.118,1 9	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD	persen	98,81	98,86	98,91	31.229,4 8	98,96	32.837,79	99,01	34.509,24	99,06	36.276,11	99,11	38.087,37	99,11	172.939,9 9	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				APS SMP	persen	98,11	98,16	98,21		98,26		98,31		98,36		98,40				
				APS SMA	persen	89,81	89,85	89,90		89,94		89,99		90,03		90,08				
				APK PAUD	persen	76,95	77,95	78,95		79,95		80,95		81,95		81,99				
				APS Kesetaraan	persen	28,03	30,03	32,30		34,30		36,03		38,03		38,05				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan jumlah penerima beasiswa pelajar asli Fakfak	orang	-	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,0 0	100,00	25000	500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah mengemba ngkan kurikulum muatan lokal	persen	45,00	50,00	55,00	876,59	60,00	921,74	65,00	968,66	70,00	1.018,25	73,50	1.069,09	73,50	4.854,33	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah	persen	6,39	6,57	6,75	6.512,40	6,92	6.847,79	7,10	7.196,34	7,27	7.564,80	7,63	7.942,50	7,63	36.063,83	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Rasio guru terhadap murid TK/RA Sederajat	per satuan guru	8,58	9,00	9,45		9,93		10,42		10,94		11,49				
				Rasio guru terhadap murid SD/MI Sederajat	per satuan guru	9,91	10,40	10,92		11,47		12,04		12,64		13,27				
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Sederajat	per satuan guru	9,92	10,42	10,94		11,48		12,06		12,66		13,29				
				Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Sederajat	per satuan guru	15,90	16,70	17,53		18,41		19,33		20,30		21,31				
				Persentase Guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	0,00	9,09	16,67		23,08		28,57		33,33		35,00				
				Persentase Guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	33,33	0,35	36,31		37,61		38,80		39,89		41,88				



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				Persentase Guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	47,93	0,48	48,18		48,29		48,38		48,46		50,88		50,88		
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengajuan Ijin pendirian Pendidikan Dasar yang dilayani	persen	60,00	60,00	63,00	150,07	66,15	157,80	69,46	165,83	72,93	174,32	76,58	183,03	76,58	831,05	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	55.791,78	100,00	58.665,06	100,00	61.651,11	100,00	64.807,64	100,00	68.043,48	100,00	308.959,07	DINAS KESEHATAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang terakreditasi	persen	40,00	60,00	80,00	59.114,31	100,00	62.158,70	100,00	65.322,57	100,00	68.667,09	100,00	72.095,63	100,00	327.358,30	DINAS KESEHATAN
				Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	persen	8,84	8,84	8,84		8,84		8,84		8,84						
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek, toko obat alkes, U MOT dan optik yang berijin	persen	100,00	100,00	100,00	24,36	100,00	25,61	100,00	26,92	100,00	28,30	100,00	29,71	100,00	134,90	DINAS KESEHATAN
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase capaian masing- masing peresepan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga ber PHBS	persen	50,00	50,00	52,50	100,00	55,13	105,15	57,88	110,50	60,78	116,16	63,81	121,96	63,81	553,77	DINAS KESEHATAN
				Cakupan posyandu aktif di kampung kampung	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	43.841,14	100,00	46.098,96	100,00	48.445,40	100,00	50.925,80	100,00	53.468,52	100,00	242.779,82	DINAS KESEHATAN (RSUD)

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						100,00	100,00	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEHATAB	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persen	100,00	100,00	100,00	1.276.000.000	100,00	1.246.000.000	100,00	1.246.000.000	100,00	1.246.000.000	100,00	1.246.000.000	100,00	6.260.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aakreditasi Rumah Sakit	tipe	C	C	C	41.533,24	B	43.672,20	B	45.895,12	B	48.244,95	B	50.653,81	B	229.999,32	DINAS KESEHATAN (RSUD)
				Persentase Rumah Tangga Orang Asli Papua (OAP) yang terlayani Jaminan Kesehatan	Persen	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	28.559,19	100,00	30.029,98	100,00	31.558,51	100,00	33.174,31	100,00	34.830,69	100,00	158.152,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	50,00	51,00	52,00	5.848,64	54,00	6.149,84	56,00	6.462,87	58,00	6.793,77	60,90	7.132,98	60,90	32.388,10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	persen	53,00	55,00	57,00		59,00		61,00		63,00		66,15		66,15		
				Persentase pelaksanaan normalisasi sungai	persen	-	-	60,00		63,00		66,15		69,46		72,93		72,93		
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak	persen	7,20	7,00	10,00	10.187,69	15,00	10.712,35	20,00	11.257,61	25,00	11.834,00	26,25	12.424,87	26,25	56.416,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	persen	-	62,00	65,10		68,36		71,77		75,36		79,13		79,13		



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	persen	75,60	77,11	78,65	4.433,04	80,23	4.661,34	81,83	4.898,61	83,47	5.149,41	85,14	5.406,52	85,14	24.548,93	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	15,20	16,00	16,80	675,00	17,64	709,76	18,52	745,88	19,45	784,07	20,42	823,22	20,42	3.737,93	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	persen	60,00	63,00	66,15	7.440,36	69,46	7.823,54	72,93	8.221,75	76,58	8.642,71	80,41	9.074,24	80,41	41.202,59	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kotaa	persen	-	-	44,10	11.109,5 2	46,31	11.681,66	48,62	12.276,25	51,05	12.904,80	53,60	13.549,13	53,60	61.521,35	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/ Kota	persen	79,11	80,69	82,31	48.219,0 9	83,95	50.702,38	85,63	53.283,13	87,34	56.011,22	89,09	58.807,86	89,09	267.023,6 7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem Dan Pengolahan Persampahan Regional	Persen	-	-	100	2.950.00 0	100	2.950.000	100	2.950.000	100	2.950.00 0	100	2.950.00 0	100		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungannya	Persen	-	-	100	550.000	100	550.000	100	550.000	100	550.000	100	550.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya Tenaga Konstruksi Yang Terampil	Persen	-	-	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	persen	70,00	73,50	77,18	367,50	81,03	385,88	85,09	405,17	89,34	425,43	93,81	446,70	93,81	2.030,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN																	

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
			DAN KAWASAN PERMUKIMAN					K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	ha	-	-	10,00	5.109,65	8,00	5.372,80	6,00	5.646,27	4,00	5.935,36	2,00	6.231,71	2,00	28.295,79	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	4	3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	persen	15,19	15,95	16,75	2.625,00	17,58	2.756,25	18,46	2.894,06	19,39	3.038,77	20,36	3.190,70	20,36	14.504,78	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.845,99	100,00	8.250,06	100,00	8.669,99	100,00	9.113,89	100,00	9.568,95	100,00	43.448,89	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	persen	100,00	100,00	100,00	1.438,86	100,00	1.512,96	100,00	1.589,97	100,00	1.671,38	100,00	1.754,83	100,00	7.968,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase Penegakan Perda	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	2,00	100,00	100,00	2.124,14	100,00	2.233,54	100,00	2.347,22	100,00	2.467,40	100,00	2.590,60	100,00	11.762,90	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Presentase Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi, Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	5	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	367,50	100,00	385,88	100,00	405,17	100,00	425,43	100,00	446,70	100,00	2.030,67	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.521,54	100,00	6.857,40	100,00	7.206,45	100,00	7.575,42	100,00	7.953,66	100,00	36.114,47	DINAS SOSIAL
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	92,00	93,38	94,78	100,52	96,20	105,70	97,16	111,08	98,14	116,77	99,12	122,60	99,12	556,67	DINAS SOSIAL
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase eks napi yang memperoleh bantuan untuk pemulangan ke desa/kelurahan asal	persen	-	-	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100		DINAS SOSIAL
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial dan/atau rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00	100,00	623,75	100,00	655,88	100,00	689,26	100,00	724,55	100,00	760,73	100,00	3.454,18	DINAS SOSIAL
				Cakupan masyarakat OAP yang mendapatkan bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	6	5		Persentase DTKS Tervalidasi	persen	100,00	100,00	100,00	2.899,44	100,00	3.048,76	100,00	3.203,94	100,00	3.367,98	100,00	3.536,14	100,00	16.056,25	DINAS SOSIAL

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan jumlah penerima bantuan sosial dan perlindungan afirmasi OAP	persen	60,00	60,00	60,00		75,00		85,00		95,00		100,00		100,00		
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100,00	100,00	100,00	1.200,40	100,00	1.262,22	100,00	1.326,47	100,00	1.394,38	100,00	1.464,00	100,00	6.647,47	DINAS SOSIAL
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	146,24	100,00	153,78	100,00	161,60	100,00	169,88	100,00	178,36	100,00	809,86	DINAS SOSIAL
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.037,24	100,00	5.296,66	100,00	5.566,26	100,00	5.851,25	100,00	6.143,41	100,00	27.894,82	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.484,96	100,00	5.767,43	100,00	6.060,99	100,00	6.371,32	100,00	6.689,44	100,00	30.374,13	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	100,00	27,30	31,80	1.588,29	36,40	1.670,09	38,22	1.755,09	40,13	1.844,95	42,14	1.937,07	42,14	8.795,50	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	persen	-	-	100	805.244	100	855.768	100	974.345	1000	1.071.799	100	1.178.957			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta	persen	9,10	9,83	10,61	432,14	11,46	454.39	12,38	477,52	13,37	501,97	14,44	527,04	14,44	2.393,07	DINAS TRANSMIGRASI

[illegible]

2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	130,00	100,00	136,69	100,00	143,65	100,00	151,01	100,00	158,55	100,00	719,90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Keterjangkauan Pangan (IA)	indeks	65,45	68,72	72,16	546.43	75,77	574.57	79,55	603,81	83,53	634.73	87,71	666,42	87,71	3.025,96	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Pemanfaatan Pangan (IP)	indeks	64,68	67,91	71,31	5.405,48	74,88	5.683,86	78,62	5.973,17	82,55	6.278,99	86,68	6.592,50	86,68	29.934,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tingkat Penanganan Desa Rawan Pangan	persen	6,71	7,52	8,42	551,03	9,43	579,41	10,56	608,90	11,83	640,08	13,25	672,03	13,25	3.051,45	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Ketersediaan peta rawan pangan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada	ada	ada		ada	ada					
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	persen	60,00	63,00	66,15	256,03	69,46	269,22	72,93	282,92	76,58	297,40	80,41	312,25	80,41	1.417,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Luas Tanah Untuk Pembangunan Yang disediakan	persen	-	-	100	105.250	100	105.250	100	105.250	100	105.250	100	105.250			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persen	-	-	100	555.000	100	655.000	100	555.000	100	555.000	100	555.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	persen	-	100,00	100,00	10.915,27	100,00	11.477,41	100,00	12.061,61	100,00	12.679,16	100,00	13.312,23	100,00	60.445,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	10	6	PROGRAM RETRIBUSI TANAH , DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Terlaksananya Program Retribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	-	-	100	330.000	12	330.000	12	330.000	12	330.000	12	330.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	persen	65,00	68,25	71,66	1.281,03	75,25	1.347,00	79,01	1.415,57	82,96	1.488,04	87,11	1.562,34	87,11	7.093,99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.052,11	100,00	6.363,80	100,00	6.687,71	100,00	7.030,13	100,00	7.381,14	100,00	33.514,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan	persen	-	-	20	927.566	40	352.566	60	352.566	80	352.566	100	352.566	100	1.762.830	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan	persen	75,00	76,88	78,80	1.132,60	80,77	1.190,93	82,79	1.251,55	84,86	1.315,63	86,98	1.381,32	86,98	6.272,03	DINAS LINGKUNGAN

VII-12 | Kerangka Pendanaan





KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota																HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	-	-	30,00	455,09	30,00	478,53	30,00	502,89	30,00	528,64	30,00	555,03	30,00	2.520,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Persentase Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	persen	-	-	32,00	50.000	33,00	50.000	34,00	50.000	35,00	50.000	36,00	50.000	36,00	250.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	persen	-	-	70,00	1.024,68	73,50	1.077,45	77,18	1.132,29	81,03	1.190,27	85,09	1.249,70	85,09	5.674,39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persen	-	-	100,00	105.000	100,00	105.000	100,00	105.000	100,00	105.000	100,00	105.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	-	-	65,00	63,40	68,25	66,67	71,66	70,06	75,25	73,65	79,01	77,33	79,01	351,11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	100,00	100,00	100,00	138,98	100,00	146,14	100,00	153,58	100,00	161,44	100,00	169,50	100,00	769,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terlaksananya Program Penangannan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	30,08	31,00	32,55	1.758,47	34,18	1.849,03	35,89	1.943,15	37,68	2.042,64	39,56	2.144,63	39,56	9.737,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	3,08	3,10	3,26		3,42		3,59		3,77		3,96		3,96		

			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.041,74	100,00	6.352,89	100,00	6.676,25	100,00	7.018,08	100,00	7.368,49	100,00	33.457,45	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP	persen	91,26	92,00	92,92	943,56	93,85	992,15	94,79	1.042,65	95,74	1.096,04	96,69	1.150,76	96,69	5.225,15	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
				Cakupan kepemilkan KK	persen	91,26	92,00	92,92		93,85		94,79		95,74		96,69		96,69		
				Cakupan kepemilikan KIA	persen	91,26	92,00	92,92		93,85		94,79		95,74		96,69		96,69		
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran, perkawinan, perceraian	persen	31,28	32,84	34,49	842,47	36,21	885,85	38,02	930,94	39,92	978,61	41,92	1.027,47	41,92	4.665,35	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
				Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.	persen	43,76	45,95	48,25		50,66		53,19		55,85		58,64		58,64		
				Persentase bayi memiliki akta kelahiran.	persen	31,68	33,26	34,93		36,67		38,51		40,43		42,45		42,45		
				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	persen	31,68	33,26	35,13		37,09		39,17		41,36		43,68		43,68		
				Cakupan penerbitan akta perkawinan	persen	82,85	84,09	85,35		86,63		87,93		89,25		90,59		90,59		
				Cakupan penerbitan akta perceraian	persen	31,76	33,35	35,02		36,77		38,60		40,53		42,56		42,56		
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan.	persen	85,00	87,98	91,05	754,28	95,61	793,12	100,00	833,49	100,00	876,17	100,00	919,91	100,00	4.176,97	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan profil kependudukan Kabupaten Fakfak	ada/tidak ada	ada	ada	ada	45,00	ada	47,32	ada	49,73	ada	52,27	ada	54,88	ada	249,20	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.766,33	100,00	6.063,29	100,00	6.371,92	100,00	6.698,16	100,00	7.032,60	100,00	31.932,29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	2.575,42	100,00	2.708,05	100,00	2.845,89	100,00	2.991,60	100,00	3.140,97	100,00	14.261,94	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase terlaksananya kegiatan peningkatan kerjasama desa	persen	-	-	-	-		150.000		875.000		580.000		400.000		2.405.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	persen	100,00	100,00	100,00	1.850,00	100,00	1.945,27	100,00	2.044,29	100,00	2.148,95	100,00	2.256,25	100,00	10.244,76	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
				Persentase BUMDes berkembang dan Maju	persen	8,35	8,77	9,21		9,67		10,15		10,66		11,19		11,19		
				Persentase Desa meningkat Stratanya	persen	0,35	2,20	4,10		7,40		10,70		14,40		15,12		15,12		
				Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase PKK aktif	persen	100,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.156,65	100,00	1.215,52	100,00	1.277,76	100,00	1.341,55	100,00	6.091,48	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
				Presentase posyandu aktif (status purnama dan mandiri)	persen	18,71	19,84	21,03		22,50		24,07		25,76		27,56		27,56		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.096,18	100,00	6.410,14	100,00	6.736,41	100,00	7.081,32	100,00	7.434,89	100,00	33.758,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	24,50	24,50	25,97	107,23	27,53	112,75	29,18	118,49	30,93	124,56	32,79	130,78	32,79	593,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (M Contraceptive Prevalennce Rate / mCPR)	persen	-	52,82	55,99	2.033,57	59,34	2.138,30	62,91	2.247,14	66,68	2.362,20	70,68	2.480,14	70,68	11.261,36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Capaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan	persen	-	86,62	91,82	1.768,73	97,33	1.859,82	100,00	1.954,48	100,00	2.054,55	100,00	2.157,14	100,00	9.794,72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.151,17	100,00	8.570,95	100,00	9.007,21	100,00	9.468,38	100,00	9.941,14	100,00	45.138,85	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen	65,00	68,25	71,66	3.305,69	75,25	3.475,93	79,01	3.652,86	82,96	3.839,88	87,11	4.031,61	87,11	18.305,97	DINAS PERHUBUNGAN
				Cakupan penyediaan lampu jalan dan penerangan jalan kabupaten Fakfak	persen	20,00	20,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00				
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pembangunan fasilitas terbangun, pemeliharaan, dan pengawasan pada pelabuhan	persen	-	-	100,00	2.839,80	100,00	2.986,05	100,00	3.138,04	100,00	3.298,71	100,00	3.463,42	100,00	15.726,03	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah kunjungan kapal	unit	-	543	570		599		629		660		693		693		
				Jumlah arus barang	juta ton	-	1,61	1,69		1,78		1,86		1,96		2,05		2,05		
2	15	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	persen	100,00	100,00	100,00	9.500,00	100,00	9.989,25	100,00	10.497,70	100,00	11.035,19	100,00	11.586,17	100,00	52.608,31	DINAS PERHUBUNGAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.806,77	100,00	7.157,32	100,00	7.521,63	100,00	7.906,74	100,00	8.301,52	100,00	37.693,98	DINAS KOMUNIKASI DAN



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	-	40,00	42,00	5.363,08	44,10	5.639,28	46,31	5.926,32	48,62	6.229,75	51,05	6.540,80	51,05	29.699,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	persen	-	60,00	63,00	636,92	66,15	669,72	69,46	703,81	72,93	739,84	76,58	776,78	76,58	3.527,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Presentasi Jumlah Jaringan Internet dan Intranat terintegrasi	persen	-	30,00	31,50		33,08		34,73		36,47		38,29		38,29		
				Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.636,23	100,00	4.874,99	100,00	5.123,13	100,00	5.385,43	100,00	5.654,33	100,00	25.674,11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase permohonan izin pembukaan Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam , utk USP,KSP	persen	-	10,00	10,95	499,05	11,99	524,75	13,13	551,46	14,38	579,70	15,74	608,64	15,74	2.763,60	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase koperasi aktif	persen	16,67	19,21	20,17	620,26	21,18	652,21	22,24	685,40	23,35	720,50	24,52	756,47	24,52	3.434,84	DINAS KOPERASI,



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan yang berlaku	persen	5,33	6,62	7,25		7,94		8,69		9,52		10,42		10,42		USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	persen	-	-	70,00	160.360	75,00	200.360	80,00	200.360	85,00	230.360	90,00	250.000			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	persen	-	65,00	68,25	282,36	71,66	296,91	75,25	312,02	79,01	327,99	82,96	344,37	82,96	1.563,66	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	persen	-	65,00	67,28	2.000,00	69,63	2.103,00	72,07	2.210,04	74,59	2.323,20	77,20	2.439,19	77,20	11.075,43	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	persen	17,43	18,30	19,22	837,90	20,18	881,06	21,19	925,90	22,25	973,31	23,36	1.021,91	23,36	4.640,08	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang meningkat skala usaha menjadi Usaha Kecil	persen	65,00	65,00	66,63	425,49	68,29	447,41	70,00	470,18	71,75	494,25	73,54	518,93	73,54	2.356,27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.522,59	100,00	5.807,01	100,00	6.102,58	100,00	6.415,04	100,00	6.735,34	100,00	30.582,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perumusan kebijakan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	ada/tidak ada	ada	ada	ada	300,00	ada	315,45	ada	331,51	ada	348,48	ada	365,88	ada	1.661,32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	persen	60,00	63,00	64,58	114,63	66,19	120,53	67,84	126,67	69,54	133,15	71,28	139,80	71,28	634,79	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan penanaman modal	indeks	60,00	64,50	69,34	96,28	74,54	101,24	80,13	106,39	86,14	111,84	92,60	117,42	92,60	533,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase perusahaan yg melakukan LKPM	persen	80,00	86,00	92,45	149,90	100,00	157,62	100,00	165,64	100,00	174,12	100,00	182,82	100,00	830,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan profil investasi Kabupaten Fakfak	ada/tidak ada	-	ada	ada	18,59	ada	19,54	ada	20,54	ada	21,59	ada	22,67	ada	102,92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang dikelola	persen	70,00	75,25	80,89		86,96		93,48		100,00		100,00		100,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	90,19	90,19	91,54	2.331,18	92,92	2.451,23	94,31	2.576,00	95,72	2.707,89	97,16	2.843,10	97,16	12.909,40	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase peningkatan pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader	persen	12,00	12,62	12,81		13,01		13,20		13,40		13,60		13,60		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	persen	45,45	45,45	48,86	5.488,93	52,52	5.771,61	56,46	6.065,39	60,70	6.375,93	65,25	6.694,28	65,25	30.396,15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase atlet beerprestasi yang dibina	persen	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Jumlah event kompetisi dan pembudayaan olahraga	kali	-	1	2		2		3		3		3		13		
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	persen	100,00	100,00	100,00	750,00	100,00	788,63	100,00	828,77	100,00	871,20	100,00	914,70	100,00	4.153,29	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Persentase Bumi Perkemahan yang layak	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Statistik Sektoral Pelaksanaan Pembangunan yang Uptodate	persen	-	-	20,00	800.000	20,00	2.550.000	20,00	2.100.000	20,00	2.200.000	20,00	2.300.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola	Persen	-	-	20,00	300.000	20,00	1.900.000	20,00	2.150.000	20,00	2.400.000	20,00	2.650.000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	persen	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.051,50	100,00	1.105,02	100,00	1.161,60	100,00	1.219,60	100,00	5-537,71	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah kampung/kelurahan budaya	kampung/ kelurahan	0	1	2		2	5	5	5	5,00						
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prsentase Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Fakfak	persen	-	-	20,00	220.000	400,00	400.000	60,00	400.000	80,00	400.000	100,00	400.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	-	1,00	1,00	200,00	1,00	210,30	1,00	221,00	1,00	232,32	1,00	243,92	1,00	1.107,54	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	-	100,00	100,00	300,00	100,00	315,45	100,00	331,51	100,00	348,48	100,00	365,88	100,00	1.661,31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Tingkat pengelolaan permuseuman di Kabupaten Fakfak	persen	-	-		1.160.000	20,00	400.000	20,00	400.000		150.000		100.000			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYA AN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.666,47	100,00	3.855,30	100,00	4.051,53	100,00	4.258,97	100,00	4.471,62	100,00	20.303,89	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	persen	-	-	5,00	440,00	5,00	462,66	5,00	486,21	5,00	511,10	5,00	536,62	5,00	2.436,59	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	919,54	100,00	966,90	100,00	1.016,11	100,00	1.068,14	100,00	1.121,47	100,00	5.092,16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	95,00	100,00	100,00	439,99	100,00	462,65	100,00	486,20	100,00	511,09	100,00	536,61	100,00	2.436,54	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase terlaksananya kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	-	-	65,00	877.058	80,00	964.764	80,00	1.061.241	85,00	1.167.365	85,00	1.284.101			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.378,62	100,00	8.810,12	100,00	9.258,55	100,00	9.732,59	100,00	10.218,54	100,00	46.398,41	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026					
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.		
			DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	835,02	876,77	898,69	11.854,4 8	921,16	12.464,99	944,19	13.099,46	967,79	13.770,15	991,99	14.457,69	991,99	65.646,76	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	
				Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	persen	30,00	31,50	33,39		35,73			37,87		40,14		42,55		42,55		
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	18,62	19,56	20,05	961,80	20,55	1.011,33	21,06	1.062,81	21,59	1.117,22	22,13	1.173,00	22,13	5.326,16	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	
				Cakupan bina kelompok nelayan budi daya	persen	20,00	21,00	22,26		23,82			25,49		27,27		29,18		29,18		
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	kg	205,50	215,78	236,28	704,00	259,91	740,26	291,10	777,93	334,76	817,76	384,97	858,60	384,97	3.898,55	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.121,97	100,00	5.385,76	100,00	5.659,89	100,00	5.949,68	100,00	6.246,74	100,00	28.364,04	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	orang	6520,00	6683,00	6850,08	1.198,32	7021,33	1.260,04	7196,86	1.324,17	7376,78	1.391,97	7561,20	1.461,47	7561,20	6.635,98	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan/diikuti per tahun	event	1	1	1	2.949,47	1	3.101,36	1	3.259,22	1	3.426,09	1	3.597,16	5	16.333,30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi memperoleh HAKI	persen	10,00	10,50	11,03	1.250,00	11,58	1.314,38	12,16	1.381,28	12,76	1.452,00	13,40	1.524,50	13,40	6.922,15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan / fasilitasi sertifikasi kompetensi	persen	-	5,00	5,25	423,38	5,51	445,19	5,79	467,85	6,08	491,80	6,38	516,36	6,38	2.344,59	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.979,41	100,00	5.235,85	100,00	5.502,36	100,00	5.784,08	100,00	6.072,88	100,00	27.574,58	DINAS PERKEBUNAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas hasil perkebunan per tahun	ton/ha	840,06	840,06	861,06	1.215,31	882,58	1.277,90	904,65	1.342,95	927,27	1.411,70	950,45	1.482,19	950,45	6.730,05	DINAS PERKEBUNAN
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perkebunan	persen	-	-	65,00	4.018,18	68,25	4.225,12	71,66	4.440,18	75,25	4.667,52	79,01	4.900,57	79,01	22.251,57	DINAS PERKEBUNAN
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	65,00	68,25	71,66	126,50	75,25	133,01	79,01	139,78	82,96	146,94	87,11	154,28	87,11	700,51	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase tenaga penyuluh profesional tersertifikasi	persen	-	-	45,00	174,14	47,25	183,11	49,61	192,43	52,09	202,28	54,70	212,38	54,70	964,33	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	18.280,4 2	100,00	19.221,87	100,00	20.200,26	100,00	21.234,51	100,00	22.294,75	100,00	101.231,8 1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha		13,64	14,32	2.656,97	15,04	2.793,81	15,79	2.936,01	16,58	3.086,33	17,41	3.240,44	17,41	14.713,56	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Peningkatan produksi pangan hewani	persen	-	-	5,00		5,25		5,51		5,79		6,08		6,08		



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.			
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan peternakan	persen	-	-	65,00	2.960,63	68,25	3.113,10	71,66	3.271,56	75,25	3.439,06	79,01	3.610,77	79,01	16.395,12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Kabupaten/Kota	persen	80,00	80,00	84,00	461,07	88,20	484,81	92,61	509,49	97,24	535,58	102,10	562,32	102,10	2.553,27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis.	persen	30,00	35,00	36,75		38,59		40,52		42,54		44,67		44,67		
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	30,00	35,00	36,75	1.693,49	38,59	1.780,70	40,52	1.871,34	42,54	1.967,16	44,67	2.065,38	44,67	9.378,07	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Cakupan bina kelompok petani	persen	34,70	35,50	37,28		39,14		41,10		43,15		45,31		45,31		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	5.566,89	100,00	5.853,59	100,00	6.151,53	100,00	6.466,49	100,00	6.789,36	100,00	30.827,87	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan pendaftaran dan perusahaan	persen	-	-	300.000												DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan sarana distribusi perdagangan khususnya Pasar Rakyat dan PKL	persen	-	-	75,00	4.294,55	78,75	4.515,72	82,69	4.745,57	86,82	4.988,54	91,16	5.237,62	91,16	23.781,98	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	-	-	80,00	67,20	84,00	70,66	88,20	74,26	92,61	78,06	97,24	81,96	97,24	372,13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	persen	-	-		640.000		462.000		695.100		509.355		534.822			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3	30	6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi perlindungan konsumen	persen	-	-		1.258.657		1.334.899		1.582.121		1.783.035		2.106.984			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya	persen	-	-	60,00	58,05	63,00	61,04	66,15	64,14	69,46	67,43	72,93	70,80	72,93	321,45	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			URUSAN PEMERINTAHAN																	

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan pertumbuhan industri	persen	-	-	5,00	2.611,19	5,13	2.745,67	5,25	2.885,43	5,38	3.033,16	5,52	3.184,60	5,52	14.460,05	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN LJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Ijin Usaha Industri	persen	-	-		64.035		70.599		74.129		77.835		81.727			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistim Informasi Industri	persen	-	-		570.752		231.750		643.379		255.548		718.326			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
2	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	persen	-	-		3.000.0 00		4.000.00 0		5.000.000		5.500.000		6.000.00 0			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	persen	-	-		450.000		495.000		544.500		598.950		658.845			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	persen	15,60	17,47	18,87	1.455,57	20,38	1.530,53	22,01	1.608,44	23,77	1.690,79	25,67	1.775,21	25,67	8.060,53	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
			SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	56.664,6 5	100,00	59.582,88	100,00	62.615,65	100,00	65.821,57	100,00	69.108,04	100,00	313.792,8 0	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposai yang diusulkan masyarakat	Persen	80,00	100,00	100,00	27.045,0 8	100,00	28.437,90	100,00	29.885,39	100,00	31.415,52	100,00	32.984,10	100,00	149.768,0 0	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam LPPD	Persen	90,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase kerjasama yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peringkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Persen	55,00	60,39	65,52	2.364,61	71,09	2.486,39	77,14	2.612,95	83,69	2.746,73	90,81	2.883,87	90,81	13.094,55	SEKRETARIAT DAERAH
				Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persen	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

				Presentase Kegiatan strategis rumpun bidang ekonomi yang dikoordinasikan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Ketersediaan dokumen pengendalian dan	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		

VII-24

Kerangka Pendanaan



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				evaluasi yang berkualitas																
			SEKRETARIAT DPRD																	
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	35.532,05	100,00	37.361,95	100,00	39.263,67	100,00	41.273,97	100,00	43.334,78	100,00	196.766,42	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Umum Keuangan	indeks	35,00	39,48	42,84	16.874,22	46,48	17.743,24	50,43	18.646,37	54,71	19.601,07	59,36	20.579,75	59,36	93.444,64	SEKRETARIAT DPRD
				Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Persidangan	indeks	30,00	33,24	37,73		41,31		45,24		52,25		60,35				
				Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	indeks	35,00	39,20	42,53		46,15		50,07		54,33		58,94				
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada				
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada				
				Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada				

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				Dokumen Anggaran Setwan DPRD																
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN																	
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.921,46	100,00	9.380,91	100,00	9.858,40	100,00	10.363,15	100,00	10.880,58	100,00	49.404,51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	persen	85,00	90,00	100,00	5.968,79	100,00	6.276,18	100,00	6.595,64	100,00	6.933,33	100,00	7.279,51	100,00	33.053,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
				Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	ada/tidak ada	ada	ada	ada		ada		ada		ada						
				Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	75,00	80,00	95,00		95,00		100,00		100,00						
				Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	80,00	84,00	87,78		91,73		95,86		99,21						
				Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	75,00	78,75	82,29		86,00		89,87		93,91						
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62	5.576,50	93,49	5.863,69	96,77	6.162,15	100,00	6.477,65	100,00	6.801,08	100,00	30.881,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
				Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62		93,49		96,77		100,00						
				Persentase indikator Program RPJMD bidanginfrastruktur yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62		93,49		96,77		100,00						
				Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
			KEUANGAN																	



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	15.506,5 8	100,00	16.305,17	100,00	17.135,10	100,00	18.012,42	100,00	18.911,78	100,00	85.871,04	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tid ak Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	210.702, 07	tepat waktu	221.553,2 3	tepat waktu	232.830,2 9	tepat waktu	244.751,2 0	tepat waktu	256.971,6 0	tepat waktu	##### ###	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	-	-	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
				Persentase SILPA terhadap APBD	persen	9,10	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
				Persentase belanja pendidikan	persen	20,00	20,00	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00	20,00		
				Persentase belanja kesehatan	persen	10,00	10,00	10,00			10,00		10,00		10,00		10,00	10,00		
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	persen	85,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	persen	-	-	65,00	815,36	67,93	857,36	70,98	900,99	74,18	947,13	77,51	994,42	77,51	4.515,25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	persen	-	-	60,00			62,70		65,52		68,47		71,55	71,55		
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan PAD	persen	-	5,00	5,00	1.923,75	5,00	2.022,82	5,00	2.125,78	5,00	2.234,62	5,00	2.346,19	5,00	10.653,16	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	persen	70,00	73,50	77,54			81,81		86,31		91,05		96,06	96,06		
			KEPEGAWAIAN																	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	9.127,47	100,00	9.597,54	100,00	10.086,05	100,00	10.602,46	100,00	11.131,84	100,00	50.545,35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terselesaikannya Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan ASN	persen	85,00	86,70	88,87	10.558,50	91,09	11.102,26	93,37	11.667,37	95,70	12.264,74	98,09	12.877,12	98,09	58.469,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase PNS berkembang karier	persen	-	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
				Persentase Keterisian Jabatan	persen	-	-	90,00		92,25		94,56		96,92		99,34		99,34		
				Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	-	-	80,00		82,00		84,05		86,15		88,31		88,31		
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	2	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	-	-	70,00	1.406,95	73,50	1.479,41	77,18	1.554,71	81,03	1.634,31	85,09	1.715,91	85,09	7.791,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	-	-	75,00		78,75		82,69		86,82		91,16		91,16		
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	-	-	65,00		68,25		71,66		75,25		79,01		79,01		
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
			INSPEKTORAT DAERAH																	
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	8.866,53	100,00	9.323,16	100,00	9.797,71	100,00	10.299,35	100,00	10.813,60	100,00	49.100,35	INSPEKTORAT
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada OBRIK	Persen	-	100,00	100,00	4.709,72	100,00	4.952,27	100,00	5.204,34	100,00	5.470,81	100,00	5.743,96	100,00	26.081,11	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	-	-	78,00		79,95		81,95		84,00		86,10		86,10		
				Cakupan review terhadap produk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	100,00	100,00	219,59	100,00	230,89	100,00	242,65	100,00	255,07	100,00	267,81	100,00	1.216,00	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN																	





KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	1.862,67	100,00	1.958,59	100,00	2.058,29	100,00	2.163,67	100,00	2.271,70	100,00	10.314,92	DISTRIK ARGUNI
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Arguni	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK ARGUNI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	25,27	100,00	26,57	100,00	27,92	100,00	29,35	100,00	30,81	100,00	139,92	DISTRIK ARGUNI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK ARGUNI
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	7.587,59	100,00	7.978,36	100,00	8.384,45	100,00	8.813,74	100,00	9.253,81	100,00	42.017,95	DISTRIK PARIWARI
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Pariwari	persen	100,00	100,00	100,00	769,99	100,00	809,64	100,00	850,85	100,00	894,42	100,00	939,08	100,00	4.263,98	DISTRIK PARIWARI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	76,27	100,00	80,19	100,00	84,27	100,00	88,59	100,00	93,01	100,00	422,33	DISTRIK PARIWARI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	persen	100,00	100,00	100,00	574,30	100,00	603,88	100,00	634,61	100,00	667,11	100,00	700,42	100,00	3.180,32	DISTRIK PARIWARI



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan																
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	6.811,70	100,00	7.162,50	100,00	7.527,08	100,00	7.912,46	100,00	8.307,53	100,00	37.721,27	DISTRIK FAKFAK
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak	persen	100,00	100,00	100,00	314,55	100,00	330,75	100,00	347,58	100,00	365,38	100,00	383,62	100,00	1.741,89	DISTRIK FAKFAK
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	250,00	100,00	262,88	100,00	276,26	100,00	290,40	100,00	304,90	100,00	1.384,43	DISTRIK FAKFAK
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Fakfak	persen	100,00	100,00	100,00	149,98	100,00	157,70	100,00	165,73	100,00	174,21	100,00	182,91	100,00	830,53	DISTRIK FAKFAK
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.245,64	100,00	3.412,79	100,00	3.586,50	100,00	3.770,13	100,00	3.958,37	100,00	17.973,44	DISTRIK WARTUTIN
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Wartutin	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK WARTUTIN
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	23,64	100,00	24,85	100,00	26,12	100,00	27,45	100,00	28,83	100,00	130,88	DISTRIK WARTUTIN





KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK WARTUTIN
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.354,81	100,00	2.476,09	100,00	2.602,12	100,00	2.735,35	100,00	2.871,92	100,00	13.040,29	DISTRIK MBAHAMDANDA RA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Mbahamdandara	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK MBAHAMDANDA RA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	26,75	100,00	28,13	100,00	29,56	100,00	31,08	100,00	32,63	100,00	148,15	DISTRIK MBAHAMDANDA RA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK MBAHAMDANDA RA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.079,13	100,00	4.289,21	100,00	4.507,53	100,00	4.738,31	100,00	4.974,89	100,00	22.589,07	DISTRIK KARAS
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Karas	persen	100,00	100,00	100,00	40,00	100,00	42,06	100,00	44,20	100,00	46,46	100,00	48,78	100,00	221,51	DISTRIK KARAS



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah distrik Karas	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK KARAS
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	52,58	100,00	55,25	100,00	58,08	100,00	60,98	100,00	276,89	DISTRIK KARAS
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK KARAS
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3-574,52	100,00	3-758,61	100,00	3-949,92	100,00	4-152,16	100,00	4-359,47	100,00	19-794,68	DISTRIK FAKFAK BARAT
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Fakfak Barat	persen	100,00	100,00	100,00	34,35	100,00	36,11	100,00	37,95	100,00	39,90	100,00	41,89	100,00	190,19	DISTRIK FAKFAK BARAT
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Barat	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK FAKFAK BARAT
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	32,81	100,00	34,50	100,00	36,26	100,00	38,11	100,00	40,02	100,00	181,71	DISTRIK FAKFAK BARAT
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK FAKFAK BARAT
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.875,91	100,00	5.127,02	100,00	5-387,99	100,00	5.663,85	100,00	5-946,65	100,00	27.001,42	DISTRIK KOKAS
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				





KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kokas	persen	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	210,30	100,00	221,00	100,00	232,32	100,00	243,92	100,00	1.107,54	DISTRIK KOKAS
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	53,16	100,00	55,90	100,00	58,75	100,00	61,75	100,00	64,84	100,00	294,40	DISTRIK KOKAS
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	250,00	100,00	262,88	100,00	276,26	100,00	290,40	100,00	304,90	100,00	1.384,43	DISTRIK KOKAS
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.286,22	100,00	3.455,46	100,00	3.631,34	100,00	3.817,26	100,00	4.007,86	100,00	18.198,13	DISTRIK TOMAGE
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	99,92	100,00	105,07	100,00	110,41	100,00	116,07	100,00	121,86	100,00	553,33	DISTRIK TOMAGE
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	176,78	100,00	185,89	100,00	195,35	100,00	205,35	100,00	215,60	100,00	978,97	DISTRIK TOMAGE
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	30,00	100,00	31,55	100,00	33,15	100,00	34,85	100,00	36,59	100,00	166,13	DISTRIK TOMAGE
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	77,92	100,00	81,93	100,00	86,10	100,00	90,51	100,00	95,03	100,00	431,50	DISTRIK TOMAGE

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	23,20	100,00	24,39	100,00	25,64	100,00	26,95	100,00	28,29	100,00	128,48	DISTRIK TOMAGE
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.358,27	100,00	2.479,72	100,00	2.605,94	100,00	2.739,36	100,00	2.876,14	100,00	13.059,42	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Timur Tengah	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	58,88	100,00	61,91	100,00	65,06	100,00	68,39	100,00	71,81	100,00	326,04	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.381,52	100,00	2.504,17	100,00	2.631,63	100,00	2.766,37	100,00	2.904,50	100,00	13.188,19	DISTRIK FURWAGI
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Furwagi	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,72	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,64	DISTRIK FURWAGI





KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	14,98	100,00	15,75	100,00	16,55	100,00	17,39	100,00	18,26	100,00	82,93	DISTRIK FURWAGI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,76	DISTRIK FURWAGI
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.889,36	100,00	3.038,16	100,00	3.192,80	100,00	3.356,28	100,00	3.523,85	100,00	16.000,46	DISTRIK BOMBERAY
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Bomberaay	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK BOMBERAY
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	88,81	100,00	93,39	100,00	98,14	100,00	103,16	100,00	108,32	100,00	491,82	DISTRIK BOMBERAY
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	111,03	100,00	116,74	100,00	122,68	100,00	128,97	100,00	135,41	100,00	614,82	DISTRIK BOMBERAY
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.586,87	100,00	3.771,60	100,00	3.963,57	100,00	4.166,51	100,00	4.374,54	100,00	19.863,09	DISTRIK FAKFAK TIMUR
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Timur	persen	100,00	100,00	100,00	149,98	100,00	157,70	100,00	165,73	100,00	174,22	100,00	182,92	100,00	830,55	DISTRIK FAKFAK TIMUR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	23,15	100,00	24,34	100,00	25,58	100,00	26,89	100,00	28,24	100,00	128,21	DISTRIK FAKFAK TIMUR
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	99,62	100,00	104,76	100,00	110,09	100,00	115,72	100,00	121,50	100,00	551,69	DISTRIK FAKFAK TIMUR
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	3.364,17	100,00	3.537,42	100,00	3.717,48	100,00	3.907,81	100,00	4.102,93	100,00	18.629,81	DISTRIK KRAMONGMONG GA
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kramongmongga	persen	100,00	100,00	100,00	187,38	100,00	197,03	100,00	207,06	100,00	217,66	100,00	228,53	100,00	1.037,66	DISTRIK KRAMONGMONG GA
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	53,90	100,00	56,67	100,00	59,56	100,00	62,61	100,00	65,73	100,00	298,47	DISTRIK KRAMONGMONG GA
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK KRAMONGMONG GA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	2.402,62	100,00	2.526,36	100,00	2.654,95	100,00	2.790,88	100,00	2.930,23	100,00	13.305,05	DISTRIK KAYAUNI
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kayauni	persen			100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK KAYAUNI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen			100,00	20,00	100,00	21,03	100,00	22,10	100,00	23,23	100,00	24,39	100,00	110,75	DISTRIK KAYAUNI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen			100,00	100,00	100,00	105,15	100,00	110,50	100,00	116,16	100,00	121,96	100,00	553,77	DISTRIK KAYAUNI
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen			100,00	6.524,29	100,00	6.860,29	100,00	7.209,48	100,00	7.578,61	100,00	7.957,01	100,00	36.129,68	DISTRIK FAKFAK TENGAH
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah distrik Fakfak Tengah	persen			100,00	663,64	100,00	697,82	100,00	733,34	100,00	770,88	100,00	809,37	100,00	3.675,05	DISTRIK FAKFAK TENGAH
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen			100,00	51,98	100,00	54,65	100,00	57,43	100,00	60,37	100,00	63,39	100,00	287,82	DISTRIK FAKFAK TENGAH
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen			100,00	248,00	100,00	260,77	100,00	274,05	100,00	288,08	100,00	302,46	100,00	1.373,35	DISTRIK FAKFAK TENGAH
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen			100,00	3.764,21	100,00	3.958,07	100,00	4.159,53	100,00	4.372,50	100,00	4.590,82	100,00	20.845,14	DISTRIK TELUK PATIPI
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
								K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
				administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Teluk Patipi	persen	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	157,73	100,00	165,75	100,00	174,24	100,00	182,94	100,00	830,66	DISTRIK TELUK PATIPI
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	20,99	100,00	22,07	100,00	23,20	100,00	24,38	100,00	25,60	100,00	116,25	DISTRIK TELUK PATIPI
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	116,44	100,00	122,44	100,00	128,67	100,00	135,26	100,00	142,01	100,00	644,81	DISTRIK TELUK PATIPI
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	4.628,92	100,00	4.867,31	100,00	5.115,06	100,00	5.376,95	100,00	5.645,42	100,00	25.633,67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	281,12	100,00	295,60	100,00	310,65	100,00	326,55	100,00	342,86	100,00	1.556,79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	persen	81,79	-	-	2.923,03	-	3.073,57	90,00	3.230,01	-	3.395,39	-	3.564,92	90,00	16.186,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase ormas yang terbina	persen	100,00	100,00	100,00	135,64	100,00	142,63	100,00	149,89	100,00	157,56	100,00	165,43	100,00	751,15	BADAN KESATUAN



KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN										TARGET AKHIR RPJMD		PD Penanggung Jawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
						2020	2021	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
			ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasi kan	persen	100,00	100,00	100,00	277,52	100,00	291,82	100,00	306,67	100,00	322,37	100,00	338,47	100,00	1.536,85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	250,00	100,00	262,87	100,00	276,25	100,00	290,40	100,00	304,90	100,00	1.384,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi IKU daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi IKK pada akhir periode masa jabatan.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Fakfak. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Fakfak disajikan pada Tabel VIII.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada Tabel VIII.2.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari visi dan misi kepala daerah Kabupaten Fakfak. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,36	68,82	69,2	69,44	69,64	70,04	70,26	70,26
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63	14,9	15,1	15,34	15,55	15,7	15,925	15,93
Peningkatan kunjungan ke perpustakaan	persen	5	5	5	5	5	5	5	5,00
Angka Harapan Hidup	tahun	68,47	68,50	68,71	68,91	69,12	69,33	69,53	69,53
Prevalensi balita stunting	persen	18,02	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	12,00
Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	persen	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-2,95	1,65	2,12	3,53	4,25	5,35	6,415	6,42
Jumlah Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan	jiwa	17.720	17.188	16.673	16.420	15.860	15.384	14.978	14977,70
Jumlah Pengangguran/Tingkat Pengangguran	Jiwa	11,45	10,33	9,57	9,46	8,43	7,39	6,82	6,82
Laju pertumbuhan Investasi daerah	persen	2,16	2,14	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata pertahun	persen	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00
Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50
Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB	persen	5,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50
Cakupan UKM yang diberdayakan	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standar	persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	rendah	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Fakfak	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pertumbuhan PAD	persen	20,00	26,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	D	D	C	C	B	B	B	B
Skor Maturitas SPIP	skor	2	2	2	3	3	3	3	3,00
Cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	persen	70,00	72,00	72,00	73,00	73,00	74,00	74,50	74,50
Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PILKADA	persen	81,79	-	-	-	95,00	-	-	95,00
Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung	persen	50,00	60,00	75,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Kemahalan Konstruksi	indeks	135,74	135,74	128,90	125,00	120,00	115,00	110,55	110,55
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak Huni	persen	15,19	15,19	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi	persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Jumlah lembaga/organisasi adat dan budaya	lembaga	4	1	2	3	4	5	5	5,00
Cakupan masyarakat yang mendapatkan bantuan afirmasi perlindungan OAP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah program/kegiatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	program	5	6	7	8	9	9	10	10,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
Persentase pemanfaatan hutan lindung	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW	persen	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Persentase realisasi rencana pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
Indeks Resiko Bencana	persen	105,20	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	93,00

Tabel VIII.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,71	1,33	3,50	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,36	68,52	68,90	70,40	70,70	71,10	71,40	71,40

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,84	8,97	9,10	9,20	9,40	9,50	9,70	9,70
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63	14,90	15,10	15,34	15,55	15,70	15,93	15,93
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,47	0,69	68,60	68,70	68,80	68,90	69,90	69,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19	66,20	66,90	67,20	67,70	68,30	68,90	68,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,45	11,10	10,50	10,10	9,60	9,00	8,70	8,70
Rasio Gini	indeks	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34
Persentase penduduk miskin	Persen	22,27	22,10	21,30	20,50	19,50	18,20	17,30	17,30
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKLH	indeks	83,96	84,20	84,90	85,20	85,80	86,30	86,80	86,80
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,65	12,66	12,67	12,68	12,69	12,70	12,71	12,71
Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	3,31	3,32	3,33	3,34	3,35	3,36	3,37	3,37
Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	16,90	17,10	17,40	17,80	17,90	18,00	18,00	18,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Indeks Kemahalan Konstruksi	indeks	135,74	135,74	128,90	125,00	120,00	115,00	110,55	110,55
Pertumbuhan Nilai investasi (PMA / PMDN)	persen	2,16	2,14	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ASPEK PELAYANAN UMUM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
APS SD	persen	98,81	98,86	98,91	98,96	99,01	99,06	99,11	99,11
APS SMP	persen	98,11	98,16	98,21	98,26	98,31	98,36	98,40	98,40
APS SMA	persen	89,81	89,85	89,90	89,94	89,99	90,03	90,08	90,08
APK PAUD	persen	76,95	77,95	78,95	79,95	80,95	81,95	81,99	81,99
APS Kesenjangan	persen	28,03	30,03	32,30	34,30	36,03	38,03	38,05	38,05
Cakupan jumlah penerima beasiswa pelajar asli Fakfak	orang	-	-	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	25000,00
Persentase sekolah mengemban kurikulum muatan lokal	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	73,50	73,50
Rasio Guru Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah	persen	6,39	6,57	6,75	6,92	7,10	7,27	7,63	7,63
Rasio guru terhadap murid TK/RA Sederajat	per satuan guru	8,58	9,00	9,45	9,93	10,42	10,94	11,49	11,49
Rasio guru terhadap murid SD/MI Sederajat	per satuan guru	9,91	10,40	10,92	11,47	12,04	12,64	13,27	13,27
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Sederajat	per satuan guru	9,92	10,42	10,94	11,48	12,06	12,66	13,29	13,29

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Sederajat	per satuan guru	15,90	16,70	17,53	18,41	19,33	20,30	21,31	21,31
Persentase Guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	0,00	9,09	16,67	23,08	28,57	33,33	35,00	35,00
Persentase Guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	33,33	0,35	36,31	37,61	38,80	39,89	41,88	41,88
Persentase Guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	47,93	0,48	48,18	48,29	48,38	48,46	50,88	50,88
Persentase pengajuan Ijin pendirian Pendidikan Dasar yang dilayani	persen	60,00	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	76,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Persentase puskesmas yang terakreditasi	persen	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	persen	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
Persentase apotek, toko obat alkes, UMOT dan optik yang berijin	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian masing- masing peresepan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase rumah tangga ber PHBS	persen	50,00	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	63,81
Cakupan posyandu aktif di kampung kampung	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aakreditasi Rumah Sakit	tipe	C	C	C	B	B	B	B	B
Persentase Rumah Tangga Orang Asli Papua (OAP) yang terlayani Jaminan Kesehatan	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	50,00	51,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,90	60,90
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	persen	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	66,15	66,15
Persentase pelaksanaan normalisasi sungai	persen	-	-	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	72,93
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak	persen	7,20	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	26,25	26,25
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	persen	-	62,00	65,10	68,36	71,77	75,36	79,13	79,13
Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak	persen	75,60	77,11	78,65	80,23	81,83	83,47	85,14	85,14



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	15,20	16,00	16,80	17,64	18,52	19,45	20,42	20,42
Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	persen	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	80,41	80,41
Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota	persen	-	-	44,10	46,31	48,62	51,05	53,60	53,60
Tingkat Kemantapan Jalan Kab/ Kota	persen	79,11	80,69	82,31	83,95	85,63	87,34	89,09	89,09
Ketaatan terhadap RTRW	persen	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34	93,81	93,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Luas kawasan permukiman kumuh	ha	-	-	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	2,00
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	persen	15,19	15,95	16,75	17,58	18,46	19,39	20,36	20,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penegakan Perda	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi, Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	92,00	93,38	94,78	96,20	97,16	98,14	99,12	99,12
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial dan/atau rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan masyarakat OAP yang mendapatkan bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase DTKS Tervalidasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan jumlah penerima bantuan sosial dan perlindungan afirmasi OAP	persen	60,00	60,00	60,00	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	100,00	27,30	31,80	36,40	38,22	40,13	42,14	42,14
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	persen	9,10	9,83	10,61	11,46	12,38	13,37	14,44	14,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Persentase OPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	persen	60,00	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	82,96
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	45,33	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	63,81
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase keluarga dan anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina	persen	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	67,00	67,00
Persentase pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten yang diibentuk dan dibina	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
Indeks Keterjangkauan Pangan (IA)	indeks	65,45	68,72	72,16	75,77	79,55	83,53	87,71	87,71
Indeks Pemanfaatan Pangan (IP)	indeks	64,68	67,91	71,31	74,88	78,62	82,55	86,68	86,68
Tingkat Penanganan Desa Rawan Pangan	persen	6,71	7,52	8,42	9,43	10,56	11,83	13,25	13,25
Ketersediaan peta rawan pangan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	persen	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	80,41	80,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	persen	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	75,00	76,88	78,80	80,77	82,79	84,86	86,98	86,98
Persentase kenaikan luasan RTH		persen	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Persentase usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH	-persen	-	-	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	85,09
Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	-	-	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01
Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	100,00	31,00	32,55	34,18	35,89	37,68	39,56	39,56
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	30,08	3,10	3,26	3,42	3,59	3,77	3,96	3,96
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	persen	3,08							
Cakupan kepemilikan KTP			92,00	92,92	93,85	94,79	95,74	96,69	96,69
Cakupan kepemilikan KK	persen	91,26	92,00	92,92	93,85	94,79	95,74	96,69	96,69
Cakupan kepemilikan KIA	persen	91,26	92,00	92,92	93,85	94,79	95,74	96,69	96,69
Persentase penduduk memiliki akta kelahiran, perkawinan, perceraian	persen	91,26	32,84	34,49	36,21	38,02	39,92	41,92	41,92
Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.	persen	31,28	45,95	48,25	50,66	53,19	55,85	58,64	58,64
Persentase bayi memiliki akta kelahiran.		43,76	33,26	34,93	36,67	38,51	40,43	42,45	42,45
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	persen	31,68	33,26	35,13	37,09	39,17	41,36	43,68	43,68
Cakupan penerbitan akta perkawinan	persen	31,68	84,09	85,35	86,63	87,93	89,25	90,59	90,59
Cakupan penerbitan akta perceraian	persen	82,85	33,35	35,02	36,77	38,60	40,53	42,56	42,56
Persentase OPD dan lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan.	persen	31,76	87,98	91,05	95,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan profil kependudukan Kabupaten Fakfak	persen	85,00	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ada/tidak ada	ada							
Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase BUMDes berkembang dan Maju			8,77	9,21	9,67	10,15	10,66	11,19	11,19
Persentase Desa meningkat Stratanya	persen	8,35	2,20	4,10	7,40	10,70	14,40	15,12	15,12
	persen	0,35							



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase PKK aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase posyandu aktif (status purnama dan mandiri)	persen	18,71	19,84	21,03	22,50	24,07	25,76	27,56	27,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	24,50	24,50	25,97	27,53	29,18	30,93	32,79	32,79
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (M Contraceptive Prevalennce Rate / mCPR)	persen	-	52,82	55,99	59,34	62,91	66,68	70,68	70,68
Persentase Capaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan	persen	-	86,62	91,82	97,33	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Persentase sarana dan prasarana keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam kondisi baik	persen	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11
Cakupan penyediaan lampu jalan dan penerangan jalan kabupaten Fakfak	persen	20,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
Persentase pembangunan fasilitas terbangun, pemeliharaan, dan pengawasan pada pelabuhan	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kunjungan kapal	unit	-	543	570	599	629	660	693	693
Jumlah arus barang	juta ton	-	1,61	1,69	1,78	1,86	1,96	2,05	2,05
Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	-	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	51,05	51,05
Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	persen	-	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58	76,58
Presentasi Jumlah Jaringan Internet dan Intranat terintegrasi	persen	-	30,00	31,50	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase permohonan izin pembukaan Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas simpan pinjam , utk USP,KSP	persen	-	10,00	10,95	11,99	13,13	14,38	15,74	15,74
Persentase koperasi aktif	persen	16,67	19,21	20,17	21,18	22,24	23,35	24,52	24,52
Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan yang berlaku	persen	5,33	6,62	7,25	7,94	8,69	9,52	10,42	10,42
Persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	persen	-	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	82,96
Persentase peningkatan volume usaha koperasi	persen	-	65,00	67,28	69,63	72,07	74,59	77,20	77,20
Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	persen	17,43	18,30	19,22	20,18	21,19	22,25	23,36	23,36
Persentase Usaha mikro yang meningkat skala usaha menjadi Usaha Kecil	persen	65,00	65,00	66,63	68,29	70,00	71,75	73,54	73,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
Perumusan kebijakan Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase kegiatan promosi tingkat regional	persen	60,00	63,00	64,58	66,19	67,84	69,54	71,28	71,28
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan penanaman modal	indeks	60,00	64,50	69,34	74,54	80,13	86,14	92,60	92,60
Presentase perusahaan yg melakukan LKPM	persen	80,00	86,00	92,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan profil investasi Kabupaten Fakfak	ada/tidak ada	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang dikelola	persen	70,00	75,25	80,89	86,96	93,48	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	90,19	90,19	91,54	92,92	94,31	95,72	97,16	97,16
Persentase peningkatan pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader	persen	12,00	12,62	12,81	13,01	13,20	13,40	13,60	13,60
Persentase sarpras olahraga yang layak	persen	45,45	45,45	48,86	52,52	56,46	60,70	65,25	65,25
Persentase atlet beerprestasi yang dibina	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah event kompetisi dan pembudayaan olahraga	kali	-	1	2	2	3	3	3	13
Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Bumi Perkemahan yang layak	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
Persentase penyelenggaraan festival dan pertunjukan seni dan budaya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah kampung/kelurahan budaya	kampung/kelu- rahan	0	1	2	2	5	5	5	5,00



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	persen	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	835,02	876,77	898,69	921,16	944,19	967,79	991,99	991,99
Cakupan bina kelompok nelayan tangkap	persen	30,00	31,50	33,39	35,73	37,87	40,14	42,55	42,55
Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	18,62	19,56	20,05	20,55	21,06	21,59	22,13	22,13
Cakupan bina kelompok nelayan budi daya	persen	20,00	21,00	22,26	23,82	25,49	27,27	29,18	29,18
Produksi olahan hasil perikanan	kg	205,50	215,78	236,28	259,91	291,10	334,76	384,97	384,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
Jumlah kunjungan wisata	orang	6520,00	6683,00	6850,08	7021,33	7196,86	7376,78	7561,20	7561,20
Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan/diikuti per tahun	event	1	1	1	1	1	1	1	5
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi memperoleh HAKI	persen	10,00	10,50	11,03	11,58	12,16	12,76	13,40	13,40
Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan / fasilitasi sertifikasi kompetensi	persen	-	5,00	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38	6,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
Produktivitas hasil perkebunan per tahun	ton/ha	840,06	840,06	861,06	882,58	904,65	927,27	950,45	950,45
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perkebunan	persen	-	-	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01
Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11
Persentase tenaga penyuluh profesional tersertifikasi	persen	-	-	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	54,70
Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha		13,64	14,32	15,04	15,79	16,58	17,41	17,41
Peningkatan produksi pangan hewani	persen	-	--	5,00	5,25	5,51	5,79	6,08	6,08
Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan peternakan	persen	-	80,00	65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01
Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Kabupaten/Kota	persen	80,00		84,00	88,20	92,61	97,24	102,10	102,10



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis.	persen	30,00	35,00	36,75	38,59	40,52	42,54	44,67	44,67
Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	30,00	35,00	36,75	38,59	40,52	42,54	44,67	44,67
Cakupan bina kelompok petani	persen	34,70	35,50	37,28	39,14	41,10	43,15	45,31	45,31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
Peningkatan sarana distribusi perdagangan khususnya Pasar Rakyat dan PKL	persen	-	-	75,00	78,75	82,69	86,82	91,16	91,16
Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	-	-	80,00	84,00	88,20	92,61	97,24	97,24
Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarnya	persen	-	-	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	72,93
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
Persentase pertumbuhan industri	persen	-	-	5,00	5,13	5,25	5,38	5,52	5,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
Persentase penempatan transmigran	persen	15,60	17,47	18,87	20,38	22,01	23,77	25,67	25,67
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
SEKRETARIAT DAERAH									
Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	Persen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam LPPD	Persen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kerjasama yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Persen	55,00	60,39	65,52	71,09	77,14	83,69	90,81	90,81
Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Kegiatan strategis rumpun bidang ekonomi yang dikoordinasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi yang berkualitas	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
SEKRETARIAT DPRD									
Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Umum Keuangan	indeks	35,00	39,48	42,84	46,48	50,43	54,71	59,36	59,36
Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Persidangan	indeks	30,00	33,24	37,73	41,31	45,24	52,25	60,35	60,35
Indeks kepuasan anggota DPRD thd Pelayanan Bagian Fasiltias Penganggaran dan Pengawasan	indeks	35,00	39,20	42,53	46,15	50,07	54,33	58,94	58,94



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
PERENCANAAN									
Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	persen	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	75,00	80,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	80,00	84,00	87,78	91,73	95,86	99,21	102,69	102,69
Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	75,00	78,75	82,29	86,00	89,87	93,91	98,14	98,14
Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62	93,49	96,77	100,00	100,00	100,00
Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62	93,49	96,77	100,00	100,00	100,00
Persentase indikator Program RPJMD bidanginfrastruktur yang tercapai	persen	80,00	84,00	88,62	93,49	96,77	100,00	100,00	100,00
Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KEUANGAN									
Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase SILPA terhadap APBD	persen	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase belanja pendidikan	persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Persentase belanja kesehatan	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	persen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase aset daerah yang dapat diinventarisir dengan baik	persen	-	-	65,00	67,93	70,98	74,18	77,51	77,51
Tingkat efektifitas penatausahaan barang milik daerah	persen	-	-	60,00	62,70	65,52	68,47	71,55	71,55
Pertumbuhan PAD	persen	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Persentase realisasi pendapatan pajak daerah	persen	70,00	73,50	77,54	81,81	86,31	91,05	96,06	96,06
KEPEGAWAIAN									
Persentase Tereleasaikannya Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan ASN	persen	85,00	86,70	88,87	91,09	93,37	95,70	98,09	98,09
Persentase PNS berkembang karier	persen	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Persentase Keterisian Jabatan	persen	-	-	90,00	92,25	94,56	96,92	99,34	99,34
Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	-	-	80,00	82,00	84,05	86,15	88,31	88,31
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen		-	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	85,09
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen		--	75,00	78,75	82,69	86,82	91,16	91,16
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen			65,00	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INSPEKTORAT DAERAH									
Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada OBRK	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Persen			78,00	79,95	81,95	84,00	86,10	86,10
Cakupan review terhadap produk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN									
DISTRIK ARGUNI									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Arguni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK PARIWARI									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Pariwari	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FAKFAK									

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Fakfak	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK WARTUTIN									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Wartutin	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK MBAHAMDANDARA									
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Mbahamdandara	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK KARAS									
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Karas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah distrik Karas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FAKFAK BARAT									
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Fakfak Barat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Barat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK KOKAS									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kokas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK TOMAGE									
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Distrik Tomage	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Timur Tengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FURWAGI									
Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Distrik Furwagi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK BOMBERAY									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Bomberaay	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FAKFAK TIMUR									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Fakfak Timur	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK KRAMONGMONGGA									

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD		TARGET KINERJA IKD					TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	0 2 22	2023	2024	2025	2026	
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kramongmongga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK KAYAUNI									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Kayauni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK FAKFAK TENGAH									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah distrik Fakfak Tengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISTRIK TELUK PATIPI									
Persentase ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Distrik Teluk Patipi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	persen	81,79	-	-	-	90,00	-	-	90,00
Persentase ormas yang terbina	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasi kan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB IX

Penutup

Bab ini memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Fakfak dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah

RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Fakfak untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005- 2025 dan RTRW Kabupaten Fakfak Tahun 2010-2030, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, dan RPJM Nasional 2020-2024. Selain itu, RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam bab penutup ini disajikan kaidah-kaidah transisi dan pelaksanaan yang akan menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan RKPD disaat periode RPJMD berakhir, serta sebagai patokan dalam pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya dalam perencanaan jangka pendek.

9.1 KAIDAH TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah



kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya;

2. Sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Fakfak yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Fakfak dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung/Kelurahan, Distrik dan Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Fakfak menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);



6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD Kabupaten Fakfak merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja; serta
8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD KabupatenFakfak Tahun 2021-2026, Bupati Dan DPRD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 15TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021-2026